



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DI KECAMATAN PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan 3 (tiga) Desa pada Kawasan Perdesaan Agro Minapolitan kecamatan Padang Jaya sesuai dengan Dokumen Laporan Akhir Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 oleh Institut Pertanian Bogor, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018-2022

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018-202 (Berita Daerah kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga, Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sasaran RPKP Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara meliputi Desa Tambak Rejo, Desa Tanjung Harapan, Desa Marga Sakti, Desa Padang Jaya, Desa Sido Luhur dan Desa Tanah Hitam.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga, Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perubahan RPKP Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Bengkulu Utara
Pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640705 198803 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN DI KECAMATAN PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU
UTARA 2018-2020



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN.....	3
1.2.1. Maksud.....	3
1.2.2. Tujuan	3
1.2.3. Sasaran.....	4
1.3. RUANG LINGKUP	4
1.3.1. Lingkup Wilayah Perencanaan.....	4
1.3.2. Lingkup Tahapan dan Substansi Pekerjaan.....	4
1.4. KEDUDUKAN RPKP.....	7
BAB II KONSEP DAN METODE PENYUSUNAN PENDALAMAN RPKP	9
2.1. PENDEKATAN.....	10
2.2. TAHAPAN PEKERJAAN.....	17
2.3. METODOLOGI.....	18
2.3.1. Kerangka Berpikir.....	18
2.3.2. Jenis dan Sumber Data.....	21
2.3.3. Metode Analisis.....	22
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN	35
3.1. LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH ADMINISTRASI	36
3.2. FISIK DASAR.....	37
3.2.1. Iklim.....	37
3.2.2. Topografi	38
3.2.3. Jenis Tanah.....	39
3.2.4. Penutupan Lahan dan Status Kawasan	40
3.3. KEPENDUDUKAN	42
3.4. SOSIAL BUDAYA	44
3.5. PEREKONOMIAN WILAYAH.....	44
3.6. KONDISI INFRASTRUKTUR	46
3.6.1. Jalan dan Jembatan	46
3.6.2. Sarana Transportasi.....	46
3.6.3. Air Bersih.....	47
3.6.4. Sanitasi	47
3.6.5. Jaringan Energi Listrik.....	48
3.7. POTENSI WILAYAH	49

3.7.1.	Pertanian Tanaman Pangan	50
3.7.2.	Perkebunan.....	51
3.7.3.	Perikanan	53
BAB IV GABARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN.....		56
4.1.	PENETAPAN DAN DELINEASI KAWASAN	57
4.2.	KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF	58
4.2.1.	Topografi	60
4.2.2.	Jenis Tanah.....	60
4.2.3.	Penggunaan Lahan	61
4.2.4.	Kebencanaan	62
4.3.	KEPENDUDUKAN	64
4.3.1.	Jumlah Penduduk.....	64
4.3.2.	Laju Pertumbuhan Penduduk.....	65
4.3.3.	Komposisi Penduduk.....	65
4.3.4.	Migrasi Penduduk.....	66
4.3.5.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk	66
4.3.6.	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
4.3.7.	Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja	67
4.3.8.	Mata Pencaharian	68
4.3.9.	Tenaga Kerja dan Pengangguran	68
4.4.	PEREKONOMIAN.....	69
4.4.1.	Kesesuaian Sektor Basis Kabupaten terhadap Sektor/Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan.....	69
4.4.2.	Kesesuaian Hasil Analisis Produk/Komoditas Unggulan dengan Hasil Analisis Terdahulu dan Kesepakatan berdasarkan <i>Focused Group Discussion</i> (FGD)	78
4.4.3.	Kondisi Kemiskinan	79
4.5.	PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN	80
4.5.1.	Identifikasi Komoditas Unggulan	82
4.6.	PRODUK PENDUKUNG KAWASAN PERDESAAN	90
4.7.	MODAL SOSIAL DAN BUDAYA	90
4.8.	PRASARANA DAN SARANA.....	91
4.8.1.	Prasarana dan Sarana Transportasi	92
4.8.2.	Jaringan Telekomunikasi dan Internet.....	92
4.8.3.	Jaringan Energi	93
4.8.4.	Jaringan Air Bersih.....	93
4.8.5.	Jaringan Irigasi.....	96
4.8.6.	Persampahan.....	96
4.8.7.	Pengelolaan Limbah dan Sanitasi	99
4.8.8.	Sarana Pendidikan.....	100
4.8.9.	Sarana Kesehatan.....	100
4.8.10.	Sarana Peribadatan	101
4.8.11.	Sarana Ekonomi.....	101
4.8.12.	Sarana Pendukung Prukades	102
4.8.13.	Indeks Perkembangan Kawasan.....	103
4.9.	KELEMBAGAAN.....	108
4.9.1.	Kondisi Pemangku Kepentingan Terkait	108
4.9.2.	Keragaan Bumdesma.....	112

4.9.3.	Keragaan Kelembagaan Eksisting	115
4.9.4.	Rencana Aksi Organisasi	115
BAB V PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN.....		117
5.1.	TINJAUAN KEBIJAKAN.....	118
5.1.1.	Kebijakan Terkait Kawasan Perdesaan.....	118
5.1.2.	Kebijakan Terkait Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bengkulu Utara	123
5.2.	KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN.....	128
5.2.1.	Tema Pengembangan Kawasan	128
5.2.2.	Hulu Hilir Pengembangan Kawasan Perspektif Sistem Agribisnis.....	128
5.2.3.	Hulu-Hilir Perdesaan Agropolitan dalam Perspektif Pengembangan Kawasan	141
5.3.	PENGEMBANGAN JEJARING KAWASAN PERDESAAN	144
5.3.1.	Sentra Kawasan	144
5.3.2.	Keterkaitan dengan kawasan lain	145
BAB VI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM		149
6.1.	ISU STRATEGIS	150
6.1.1.	Isu Internal	150
6.1.2.	Isu External	151
6.2.	VISI DAN MISI	151
6.2.1.	Visi	151
6.2.2.	Misi.....	152
6.2.3.	Memperkenalkan Merk (<i>Branding</i>) Wilayah	152
6.3.	TUJUAN DAN SASARAN	153
6.3.1.	Tujuan	153
6.3.2.	Sasaran.....	153
6.4.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	153
6.5.	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	154
6.6.	RENCANA PUSAT-PUSAT KEGIATAN	164
6.7.	PRA DESAIN PROGRAM PRIORITAS.....	165
BAB VII NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.....		167
7.1.	PRODUK BARANG DAN JASA KAWASAN	168
7.2.	PENYERAPAN TENAGA KERJA	176
7.3.	PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN.....	177
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN		181
8.1.	KESIMPULAN.....	182
8.2.	SARAN	182
PENUTUP		183

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Rata-rata curah hujan Kabupaten Bengkulu tahun 2011-2015	38
Tabel 3.2.	Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menurut ketinggian	38
Tabel 3.3.	Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menurut ketinggian	39
Tabel 3.4.	Luas sebaran tutupan lahan Kabupaten Bengkulu Utara.....	40
Tabel 3.5.	Luas sebaran batas kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Utara.....	42
Tabel 3.6.	Struktur penduduk Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan kelompok umur tahun 2011-2016.....	43
Tabel 3.7.	PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kab. Bengkulu Utara (juta rupiah), 2013-2016	45
Tabel 3.8.	Perkembangan komoditas tanaman pangan tahun 2012-2015 di Kabupaten Bengkulu Utara	51
Tabel 3.9.	Luas tanaman perkebunan rakyat, produksi dan petani di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016	51
Tabel 3.10.	Jumlah luas lahan menurut jenis usaha budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2011-2016	53
Tabel 3.11.	Jumlah produksi menurut jenis usaha budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2012-2016	54
Tabel 3.12.	Produksi perikanan tangkap tahun 2012-2016.....	54
Tabel 4.1.	Luas desa dalam kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya.....	58
Tabel 4.2.	Luas sebaran asosiasi jenis tanah kawasan AgroMinapolitan	61
Tabel 4.3.	Jenis penggunaan lahan kawasan AgroMinapolitan	62
Tabel 4.4.	Kajian Risiko Bencana Provinsi Bengkulu 2016-2020	63
Tabel 4.5.	Jumlah penduduk kawasan perdesaan Kabupaten Bengkulu Utara.....	64
Tabel 4.6.	Jumlah penduduk tiap desa di Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya ..	65
Tabel 4.7.	Laju penduduk tiap desa di Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya	65
Tabel 4.8.	Jumlah penduduk tiap desa berdasarkan komposisi jenis kelamin.....	66
Tabel 4.9.	Jumlah dan kepadatan penduduk masing-masing desa di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya	66
Tabel 4.10.	Jumlah murid dan rasio guru menurut tingkatan sekolah di Kecamatan Padang Jaya tahun 2016	66
Tabel 4.11.	Jumlah peserta didik tingkat SD hingga sarjana di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya	67
Tabel 4.12.	Jumlah kelompok aktivitas penduduk di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya	67
Tabel 4.13.	Jenis dan jumlah mata pencaharian masyarakat kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya	68
Tabel 4.14.	Proporsi ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkulu Utara	69
Tabel 4.15.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Komoditas Pertanian Tanaman Pangan dan Palawija Kabupaten Bengkulu Utara	70
Tabel 4.16.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Komoditas Pertanian Tanaman Hortikultura dan Buah-buahan Kabupaten Bengkulu Utara	71

Tabel 4.17.	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara	73
Tabel 4.18.	Hasil Analisis LQ Komoditas Ternak Ruminansia di Kabupaten Bengkulu Utara	75
Tabel 4.19.	Hasil Analisis LQ Komoditas Ternak Unggas di Kabupaten Bengkulu Utara	75
Tabel 4.20.	Hasil Analisis LQ Komoditas Perikanan Budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara	77
Tabel 4.21.	Pilihan Komoditas Unggulan kawasan Agrominapolitan	78
Tabel 4.22.	Tingkat Kemiskinan Bengkulu Utara	79
Tabel 4.23.	Daftar Rumah Tangga dan Individu Berdasarkan Tingkat Kemakmuran ..	79
Tabel 4.24.	Luas, produksi dan produktivitas komoditas perikanan budidaya tiap desa di kawasan AgroMinapolitan	81
Tabel 4.25.	Luas, produksi dan produktivitas komoditas karet tiap desa di kawasan AgroMinapolitan	81
Tabel 4.26.	Luas, produksi dan produktivitas komoditas kelapa sawit tiap desa di kawasan AgroMinapolitan	82
Tabel 4.27.	Hasil Analisis LQ terhadap Komoditas Pertanian di Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya	83
Tabel 4.28.	Aspek Teknis produksi komoditas pertanian yang dapat dikembangkan di kawasan AgroMinapolitan	84
Tabel 4.29.	Analisis Ekonomi pengembangan komoditas perikanan kolam	85
Tabel 4.30.	Analisis Ekonomi pengembangan komoditas kelapa sawit	85
Tabel 4.31.	Analisis Ekonomi pengembangan komoditas karet	86
Tabel 4.32.	Analisis Komoditas Unggulan di Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya	88
Tabel 4.33.	Stok Modal Sosial kabupaten Bengkulu Utara	90
Tabel 4.34.	Sarana prasarana transportasi di kawasan AgroMinapolitan	92
Tabel 4.35.	Sarana telekomunikasi di kawasan AgroMinapolitan	92
Tabel 4.36.	Sarana prasarana energi yang terdapat di beberapa Desa Kawasan AgroMinapolitan	93
Tabel 4.37.	Sarana dan prasarana air bersih di kawasan AgroMinapolitan	93
Tabel 4.38.	Proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahun 2018-2022	95
Tabel 4.39.	Sarana prasarana infrastruktur pengairan di kawasan AgroMinapolitan ...	96
Tabel 4.40.	Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2018-2022	98
Tabel 4.41.	Sarana pendidikan di kawasan AgroMinapolitan Kab. Bengkulu Utara 2016	100
Tabel 4.42.	Sarana kesehatan di Kawasan AgroMinapolitan Bengkulu Utara tahun 2017	100
Tabel 4.43.	Sarana ibadah di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya Bengkulu Utara	101
Tabel 4.44.	Sarana prasarana penunjang ekonomi di kawasan AgroMinapolitan	101
Tabel 4.45.	Variabel yang digunakan dalam analisis skalogram	106
Tabel 4.46.	Jumlah desa berhirarki di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2014	107
Tabel 4.47.	Jumlah desa berhirarki di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2011	107
Tabel 4.48.	Pembagian Dusun dan Jumlah RT Desa Marga Sakti	108
Tabel 4.49.	Pembagian Dusun dan Jumlah RT Desa Tambak Rejo	111

Tabel 5.1.	Sentra Kawasan.....	144
Tabel 6.1.	Segmentasi pasar dalam pengelolaan merk kawasan	152
Tabel 6.2.	Program Prioritas	154
Tabel 6.3.	Program dan Kegiatan	156
Tabel 7.1.	Nilai produksi tanaman pangan-palawija di kawasan AgroMinapolitan...	169
Tabel 7.2.	Nilai produksi tanaman perkebunan di kawasan AgroMinapolitan	169
Tabel 7.3.	Nilai produksi tanaman hortikultura dan buah di kawasan AgroMinapolitan	170
Tabel 7.4.	Rantai nilai agribisnis komoditas perikanan <i>eksisting</i> di kawasan AgroMinapolitan	171
Tabel 7.5.	Rantai nilai agribisnis komoditas perikanan setelah ada peran Bumdes di kawasan AgroMinapolitan	171
Tabel 7.6.	Nilai produksi sektor perikanan di kawasan AgroMinapolitan	172
Tabel 7.7.	Nilai produksi peternakan di kawasan AgroMinapolitan.....	172
Tabel 7.8.	Rekapitulasi nilai produksi komoditas tiap sektor di Kawasan AgroMinapolitan	173
Tabel 7.9.	Asumsi tata kelola produksi perikanan nila kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya	174
Tabel 7.10.	Proyeksi laba rugi budidaya perikanan nila.....	174
Tabel 7.11.	Skenario pengembangan produksi budidaya ikan nila skala kawasan ...	176
Tabel 7.12.	Nilai penyerapan tenaga kerja di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara	177
Tabel 7.13.	Nilai peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.....	178
Tabel 7.14.	Standar nilai garis kemiskinan perkapita penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara	179

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).....	8
Gambar 2.1.	Diagram alur tahapan <i>review</i> dokumen RPKP.....	19
Gambar 2.2.	Diagram proses penyusunan RPKP 5 tahun ke depan.....	21
Gambar 2.3.	Sistem Agribisnis	25
Gambar 2.4.	Model Strategi Pengembangan Kawasan	29
Gambar 2.5.	Model perencanaan ekologis (Steiner, 2008).....	31
Gambar 2.6.	Matriks SWOT.....	34
Gambar 3.1.	Peta administrasi wilayah Kabupaten Bengkulu	37
Gambar 3.2.	Peta jenis tanah Kabupaten Bengkulu Utara	40
Gambar 3.3.	Peta tutupan lahan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017	41
Gambar 3.4.	Peta sebaran batas kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Utara	42
Gambar 3.5.	Diagram struktur penduduk Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan kelompok umur tahun 2011-2016	43
Gambar 3.6.	Grafik PDRB Kab. Bengkulu Utara atas dasar harga berlaku (juta rupiah), 2013-2016.....	45
Gambar 3.7.	Grafik laju pertumbuhan PDRB Kab. Bengkulu Utara atas dasar harga konstan, 2010, 2013-2016	45
Gambar 3.8.	Peran sektor pengadaan listrik dan gas berdasarkan PDRB harga berlaku Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2011-2015	48
Gambar 3.9.	Hasil Analisis LQ Antar Sektor di Kabupaten Bengkulu Utara	50
Gambar 4.1.	Peta deliniasi batas kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya	58
Gambar 4.2.	Peta letak kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya	59
Gambar 4.3.	Peta batas administrasi desa dalam kawasan AgroMinapolitan	60
Gambar 4.4.	Peta jenis tanah di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya.....	61
Gambar 4.5.	Peta penggunaan lahan wilayah AgroMinapolitan Bengkulu Utara.....	62
Gambar 4.6.	Peta bahaya banjir Kabupaten Bengkulu Utara	63
Gambar 4.7.	Proyeksi pertumbuhan penduduk agregat kawasan perdesaan di Kabupaten Bengkulu Utara	64
Gambar 4.8.	Kopi Trabas dari Desa Tanah Hitam menjadi salah satu usulan komoditas unggulan.....	82
Gambar 4.9.	Sarana transportasi jalan rusak di kawasan AgroMinapolitan.....	92
Gambar 4.10.	Irigasi Primer.....	96
Gambar 4.11.	Sarana prasarana	102
Gambar 4.12.	Sarana pendukung prukades di Desa Marga Sakti	102
Gambar 4.13.	Sarana pendukung prukades di Desa Tambak Rejo	103
Gambar 4.14.	Sarana pendukung prukades di Desa Tanjung Harapan	103
Gambar 4.15.	Ilustrasi susunan dan fungsi kawasan pada konsep wilayah nodal	104
Gambar 4.16.	Peta hierarki wilayah dan sebaran indeks pembangunan kecamatan	108
Gambar 4.17.	Struktur Organisasi Desa Marga Sakti	109
Gambar 4.18.	Struktur Organisasi Desa Tanjung Harapan	110

Gambar 5.1.	Jejaring Kelembagaan Kawasan Agrominapolitan Karet di Kabupaten Bengkulu Utara	132
Gambar 5.2.	Peta jejaring pemasaran produk karet Kawasan AgroMinapolitan di Bengkulu Utara	133
Gambar 5.3.	Jejaring Kelembagaan Kawasan Agrominapolitan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara	136
Gambar 5.4.	Peta jejaring pemasaran produk kelapa sawit kawasan AgroMinapolitan Kabupaten Bengkulu Utara	137
Gambar 5.5.	Jejaring Kelembagaan Kawasan Agrominapolitan Ikan Nila di Kabupaten Bengkulu Utara	140
Gambar 5.6.	Peta jejaring pemasaran produk ikan nila di Kawasan AgroMinapolitan Kabupaten Bengkulu Utara	141
Gambar 5.7.	Peta Penyebaran Infrastruktur Bisnis di Kawasan Agrominapolitan Karet di Kabupaten Bengkulu Utara.....	142
Gambar 5.8.	Peta Penyebaran Infrastruktur Bisnis di Kawasan Agrominapolitan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara	143
Gambar 5.9.	Peta Penyebaran Infrastruktur Bisnis di Kawasan Agrominapolitan Ikan Nila di Kabupaten Bengkulu Utara	144
Gambar 5.10.	Pusat Kawasan Agrominapolitan	145
Gambar 5.11.	Peta keterkaitan kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya dengan kawasan lainnya	146
Gambar 5.12.	Peta sebaran hamparan 3 desa yang diusulkan masuk ke dalam kawasan AgroMinapolitan Kabupaten Bengkulu Utara	147
Gambar 6.1.	Peta rencana program prioritas RPKP Padang Jaya Bengkulu Utara	162
Gambar 6.2.	Peta rencana program lainnya RPKP Padang Jaya Bengkulu Utara	163
Gambar 6.3.	Kondisi Jalan di Bengkulu Utara	164
Gambar 6.4.	Perkebunan karet (kiri) dan sawit (kanan).....	164
Gambar 6.5.	Logo bunga Bangkai pada gapura dan Pola Batik	165
Gambar 6.6.	Kondisi Pasar.....	165
Gambar 6.7.	Desain Pasar	166
Gambar 8.	Area <i>service</i> (kiri atas), area pasar (kanan atas), area parkir (kiri bawah), dan area plaza (kanan bawah)	166
Gambar 7.1.	Skema rencana pengelolaan produk perikanan di kawasan AgroMinapolitan	171
Gambar 7.2.	Rekapitulasi nilai produksi komoditas AgroMinapolitan	173
Gambar 7.3.	Grafik proyeksi laba rugi perikanan nila pada setiap skala ukuran kolam	175

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Bengkulu Utara



1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan cita negara kesejahteraan dan mendistribusikan kesejahteraan secara merata, maka Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Desa memandang perlu untuk membuat terobosan pembangunan dari lingkup kewilayahan terkecil, yaitu desa. Pandangan dan upaya sistemik ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak secara simultan terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Dengan perubahan pendekatan ini, maka pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut sebagai sebuah wilayah tersendiri. Namun demikian, desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu dengan desa-desa yang lain sebagai sebuah kawasan yang satu sama lainnya saling berinteraksi dan bersinergi. Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam perspektif kawasan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sendiri pada dasarnya meliputi: a) pengusulan kawasan perdesaan; b) penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; c) pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan e) pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. Dalam kaitan tersebut, lingkup penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang sudah diawali dengan proses pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan perlu dilengkapi dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). Adapun tujuan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan itu sendiri adalah mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dalam pembangunan kawasan perdesaan yang ditujukan untuk: (a) terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa yang sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; (b) terwujudnya sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (c) pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan (d) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Kawasan Perdesaan dibentuk pada satuan wilayah perencanaan yang terdiri dari desa-desa yang bertetangga dan memiliki kesamaan atau keterkaitan isu, masalah atau potensi pengembangan. RPKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan potensi dan/atau masalah kawasan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RPKP memiliki sifat dasar yaitu: prioritas, terintegrasi, dan spesifik. Prioritas artinya program dan kegiatan yang direncanakan diutamakan sesuai tema (ciri khas) kawasan yang ditetapkan. Terintegrasi artinya program

dan kegiatan yang direncanakan memadukan semua kepentingan antar desa. Spesifik artinya program dan kegiatan yang direncanakan bersifat khusus sesuai dengan tema (ciri khas) kawasan. Perencanaan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam RPKP ini memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan dengan substansi material yang setidaknya-tidaknya memuat: a. isu strategis kawasan perdesaan; b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan; c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan; d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan f. indikator capaian kegiatan tahunan.

Sebagaimana layaknya di perkotaan, kawasan perdesaan juga memerlukan perencanaan dan pengendalian pembangunan secara sistematis. Perencanaan perdesaan merupakan suatu keharusan, dengan mempertimbangkan pengembangan dan pengoptimalan keberadaan wilayah-wilayah yang memiliki sumberdaya yang potensial, yang terintegrasi dengan infrastruktur fisik yang sesuai dengan karakteristik perdesaan. Konsep perencanaan kawasan perdesaan, yang terdiri atas dua atau lebih desa, menjadi strategi dalam mengadakan perencanaan beberapa desa untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Pengembangan pusat pertumbuhan keterkaitan desa-kota sebagai sasaran RPJMN 2015-2019 “Peningkatan ketahanan ekonomi kawasan perdesaan dengan mendorong keterkaitan desa-kota dengan memperkuat 40 (empat puluh) pusat-pusat pertumbuhan baru yang tersebar di 60 Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)”. Kab. Bengkulu Utara merupakan salah satu lokasi KPPN dengan mendukung perkotaan Batik Nau dan Kota Otonom Terdekat Bengkulu.

Adapun tema dari kawasan perdesaan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah Kawasan Perdesaan AgroMinapolitan dengan produk unggulan pertanian perkebunan (karet dan sawit) dan perikanan budidaya (ikan nila). Desa-desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Desa Tanjung Harapan, Desa Marga Sakti, dan Desa Tambak Rejo. Ketiga desa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Padang Jaya.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1. Maksud

1. Memfasilitasi rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Bengkulu Utara berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan, sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan kawasan dan perkotaan sekitarnya.
2. Memfasilitasi perencanaan kawasan perdesaan secara terpadu baik infrastruktur fisik maupun non fisik dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan perdesaan sehingga secara umum memperkuat sistem keterkaitan kota-desa dan menjadi stimulan bagi desa-desa berkembang dan tertinggal di sekitarnya.

1.2.2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pendalaman dokumen RPKP di Kabupaten Bengkulu Utara. Dokumen RPKP memuat kebijakan pengembangan kawasan perdesaan strategis yang terpadu antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun) dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan perdesaan yang mandiri, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.2.3. Sasaran

Sasaran dari pekerjaan ini adalah:

1. Tersusunnya *review* rencana kebijakan, program dan kegiatan *eksisting* pengembangan kawasan perdesaan dan pembangunan fisik maupun non fisik;
2. Tersusunnya profil kawasan perdesaan yang sekurang-kurangnya memuat gambaran umum, potensi, serta permasalahan dalam pengembangan kawasan perdesaan;
3. Terumuskannya analisis dan strategi keterpaduan pengembangan kawasan perdesaan secara fungsi, lokasi, besaran kawasan, dan sumber pendanaan antar tingkat pemerintahan, antar sektor, dan kelembagaan;
4. Terumuskannya konsep pengembangan kawasan perdesaan yang memuat sistem agribisnis dari hulu hingga ke hilir, termasuk di dalamnya penentuan zona produksi, pengolahan, dan pemasaran serta strategi pengembangannya;
5. Tersusunnya rencana program/kegiatan pembangunan kawasan perdesaan untuk jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun);
6. Tersusunnya siteplan pusat pengembangan kawasan perdesaan; dan
7. Tersusunnya Pra-Desain program-program prioritas pengembangan kawasan perdesaan.

1.3. RUANG LINGKUP

1.3.1. Lingkup Wilayah Perencanaan

Ruang lingkup wilayah dalam pekerjaan meliputi kawasan perdesaan di Kabupaten Bengkulu Utara, yang terdiri dari Kecamatan Padang Jaya (Desa Tanjung Harapan, Desa Marga Sakti, Desa Tambak Rejo) sesuai Berita Acara Kesepakatan dengan para pihak terkait.

1.3.2. Lingkup Tahapan dan Substansi Pekerjaan

Ruang lingkup tahapan dan substansi pekerjaan ini meliputi:

A. Persiapan dan Organisasi Kerja

1. Kajian literatur, teori, dan *benchmark*/pengalaman praksis di Indonesia atau negara lain yang berhasil terkait pengembangan kawasan perdesaan;
2. *Review* terhadap kebijakan pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan rencana pembangunan dan rencana tata ruang baik nasional (RPJPN dan RTRWN), pulau/kepulauan (RTR Pulau/Kepulauan), provinsi (RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi), kabupaten/kota (RPJPD, RPJMD, RTRW Kabupaten/Kota), serta kebijakan sektoral oleh Kementerian/Lembaga terkait;
3. Identifikasi *stakeholder* pusat dan daerah terkait;
4. Pengumpulan data dan informasi lanjutan di kawasan perdesaan;
5. Penyusunan peta dasar;
6. Penajaman metodologi pelaksanaan pekerjaan;
7. Inventarisasi kebutuhan data, desain survei, dan penyiapan perangkat survei;
8. Penyusunan rencana kerja dan jadwal rinci mingguan pelaksanaan pekerjaan;
9. *Kick Off Meeting* di Jakarta; dan
10. Pembahasan Laporan Pendahuluan.

B. Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Sekunder di Tingkat Pusat, khususnya terkait dengan bidang pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan strategis sekurang-kurangnya di Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

- Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain;
2. Rapat Koordinasi dengan Bappeda Kabupaten untuk membahas deliniasi kawasan perdesaan yang akan disusun dokumen RPKP termasuk identifikasi desa-desa produksi, pengolahan, dan pemasaran;
 3. Musyawarah antar desa di aras kawasan perdesaan dengan mengundang aparat pemerintah tingkat desa dan kecamatan untuk membahas lebih lanjut potensi, permasalahan dan kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan;
 4. Pengumpulan Data Sekunder kawasan perdesaan melalui Bappeda serta dinas-dinas terkait untuk mendapatkan data *eksisting* dan rencana terkait pengembangan kawasan perdesaan;
 5. Pengumpulan kebutuhan Data Primer dilakukan melalui survei tahap pertama dengan melibatkan aparat desa dan dengan metode kuesioner serta kunjungan langsung ke lapangan. Masing-masing kepala desa dalam kawasan perdesaan diminta untuk mengisi kuesioner yang sekurang-kurangnya memuat potensi kawasan (jenis potensi, luasan, lokasi, nilai ekonomi), permasalahan (jenis permasalahan, lokasi) dan usulan program (jenis program, lokasi, besaran, perkiraan anggaran). Setelah itu dilakukan verifikasi komoditas potensial dan usulan program berdasarkan kuesioner tersebut langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data terinci yang dibutuhkan dalam menyusun RPKP dan matriks program pengembangan kawasan perdesaan; dan
 6. Survei Primer Tahap Kedua dilakukan setelah telaah dan analisis kawasan perdesaan serta *Focus Group Discussion* (FGD) di Jakarta dengan tujuan untuk memperdalam substansi RPKP dan mendetailkan Pra-desain kawasan dan program-program prioritas.

C. Penetapan lokasi Kawasan Perdesaan

1. Analisis dan komparasi kedudukan masing-masing wilayah pengembangan kawasan perdesaan;
2. Analisis potensi ekonomi pengembangan kawasan perdesaan; dan
3. Rapat Koordinasi tingkat Daerah dengan melibatkan minimal Bappeda dan dinas terkait, Kementerian Koordinator PMK, Bappenas, Kementerian DPDPTT, Kementerian ATR, Kementerian PUPR dan dalam rangka penentuan lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas.

D. Analisis Pengembangan Kawasan Perdesaan

1. Analisis posisi kawasan perdesaan dalam konstelasi regional dan global untuk mengetahui kedudukan deliniasi kawasan perdesaan terhadap lokasi yang lebih makro secara administrasi;
2. Analisis lingkungan fisik (*built environment*) struktur dan kecenderungan perkembangan kawasan perdesaan untuk mengetahui daya dukung lahan terhadap potensi kawasan perdesaan yang dapat dikembangkan;
3. Analisis potensi ekonomi, sosial budaya, jejaring prasarana dan kelembagaan pengembangan kawasan perdesaan untuk mengukur potensi kawasan perdesaan secara kuantitatif sebagai langkah penajaman potensi kawasan perdesaan yang harus dikembangkan;
4. Analisis isu strategis dan permasalahan pengembangan kawasan perdesaan untuk menajamkan informasi terkait daya dukung kawasan perdesaan secara fisik maupun non fisik;

5. Analisis sistem agribisnis dari hulu ke hilir, meliputi sub sistem produksi, sub sistem pengolahan, dan sub sistem pemasaran untuk menentukan rencana distribusi komoditas kawasan perdesaan;
6. Analisis proyeksi pertumbuhan penduduk dan ekonomi kawasan perdesaan untuk mengukur kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan yang didasarkan pada jumlah penduduk dalam rentang waktu perencanaan hingga jangka panjang;
7. Analisis kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan yang mendukung Pengembangan Ekonomi kawasan perdesaan untuk mengukur kebutuhan program berdasarkan kondisi *eksisting* yang terkait dengan potensi kawasan perdesaan dan potensi ekonomi;
8. Analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur yang mendukung untuk pengembangan kawasan perdesaan;
9. Analisis keterpaduan program dan sinkronisasi pembangunan;
10. Analisis sumber pembiayaan dan kelayakan ekonomi; dan
11. Analisis lain yang dibutuhkan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan ini.

E. Penyusunan Profil Kawasan Eksisting:

1. Nama, luas, dan delineasi kawasan perdesaan;
2. Posisi kawasan perdesaan dalam konstelasi regional sekurang-kurangnya.
3. Karakteristik perekonomian yang meliputi pertumbuhan ekonomi, komoditas unggulan, skala pemasaran, dan proyeksi pengembangan ke depan;
4. Karakteristik zonasi agribisnis kawasan perdesaan yang mencakup kawasan produksi, pengolahan, dan pemasaran;
5. Karakteristik kelembagaan yang mencakup sektor permodalan serta institusi-institusi yang melindungi petani, nelayan, dan pengusaha kecil; dan
6. Karakteristik sosial kependudukan termasuk *social capital* (fungsi-fungsi pranata sosial, tradisi budaya, persepsi, dan nilai-nilai lokal).

F. Penyusunan Rencana dan Program

1. Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan;
2. Penyusunan Program Pembangunan Kawasan jangka menengah (5 tahunan) dan tahunan (1 tahun) dilengkapi dengan pembagian kewenangan sektor pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Adapun rencana dan program pengembangan kawasan perdesaan meliputi:

- Pembangunan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Transportasi;
- Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Sentra Produksi, Sentra Industri Pengolahan, Hasil Pertanian dan Perikanan, serta Destinasi Wisata;
- Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sarana Bisnis atau Pusat Bisnis di Kawasan Ekonomi Perdesaan;
- Penerapan Teknologi dan Inovasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing;
- Pembangunan Suplai Energi Untuk Pemenuhan Domestik dan Industri;
- Pengembangan Pendidikan Kejuruan Untuk Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas Lokal;
- Pengembangan Kerjasama Antar Desa, Daerah, KPS, BUM Antar Desa;
- Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Daerah;
- Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Pertukaran Informasi;
- Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah; dan
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Kesehatan.

3. Penyusunan Strategi Keterpaduan Pengembangan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - Prioritisasi dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - Keterpaduan antar sektor;
 - Keterpaduan antara pusat dan daerah;
 - Skema pembiayaan; dan
 - Kelembagaan.

G. Penyusunan Siteplan Lokasi Prioritas Pusat Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pusat Pengembangan Kawasan Perdesaan merupakan lokasi desa yang direncanakan sebagai pusat pengolahan komoditas unggulan. Lokasi pusat pengembangan dipilih berdasarkan pertimbangan kondisi *eksisting* kawasan perdesaan baik dari segi kesiapan masyarakat maupun infrastruktur pendukung. Selain itu, perlu diperhatikan pula aksesibilitas terhadap kawasan produksi dan pemasaran. Sebelum dilakukan pemilihan terhadap pusat pengembangan kawasan perdesaan, terlebih dahulu dibuat matriks analisis kelayakan lokasi yang menghasilkan beberapa alternatif lokasi pusat pengembangan.

H. Penyusunan Pra-Desain Program Prioritas Pengembangan Kawasan Perdesaan

Program prioritas pengembangan kawasan perdesaan merupakan program yang jika diimplementasikan dapat secara signifikan mendukung terwujudnya kawasan perdesaan yang mandiri dan berdaya. Program prioritas yang dibuat pra-desainnya berupa program yang terkait bidang jalan/jembatan, prasarana ekonomi, maupun permukiman. Program tersebut juga dapat berupa infrastruktur yang mendukung pengembangan industri agribisnis atau pariwisata sesuai kebutuhan pengembangan pusat kawasan perdesaan, misalnya pembuatan tambatan kapal, talud penahan gelombang, revitalisasi pasar, bangunan industri pengolahan, pusat kuliner, show room produk hasil pengolahan (PI Prukades), dan lain-lain. Pra-Desain program prioritas disajikan melalui gambar-gambar teknik dan gambar skematik serta dilengkapi pula dengan visualisasi 3 dimensi.

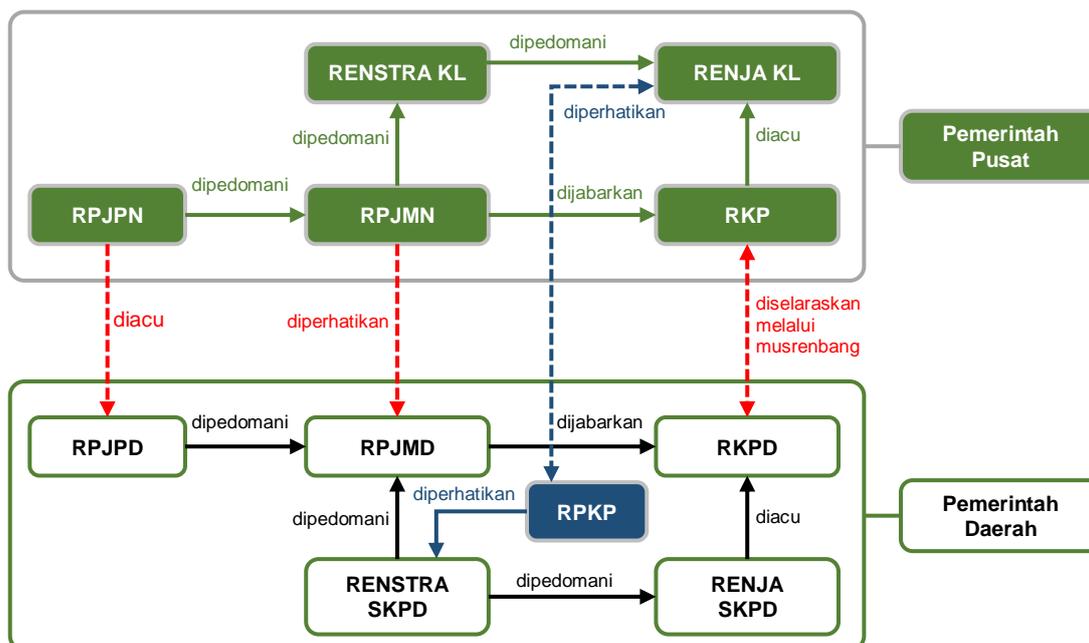
1.4. KEDUDUKAN RPKP

Menurut pasal 79 UU Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dipergunakan untuk menyusun dokumen:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
2. Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ketiga dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Perencanaan pembangunan desa tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun termaktub dalam dokumen RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang di dalamnya memuat program-program pembangunan. Selanjutnya, program disusun dengan mengkombinasikan antara pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan maksud untuk dapat memenuhi gap. Kegiatan awal dalam penyusunan program berupa pengumpulan data dan informasi; analisis kondisi kawasan perdesaaan; penelaahan dokumen perencanaan; perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan kebijakan; analisis isu strategis; serta perumusan program, kegiatan, pendanaan dan indikator capaian. Berikut ini kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) terhadap dokumen perencanaan lainnya yang tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)

Kedudukan RPKP terhadap sistem pusat-pusat eksternal tata ruang dapat digambarkan seperti Gambar 1.1 dimana RPKP akan dikembangkan dalam dimensi ekonomi, dimana pusat kegiatannya dapat setara dengan PKL(p) yang dipromosikan.

BAB II

KONSEP DAN METODE PENYUSUNAN PENDALAMAN RPKP

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Bengkulu Utara



2.1. PENDEKATAN

Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi salah satu fokus pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan strategi pengembangan wilayah dalam rangka pembangunan kawasan Kawasan Perdesaan yang termuat dalam RPJMN 2015-2019 adalah pengembangan kawasan perdesaan dan Peningkatan Keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan.

Kebijakan pengembangan kawasan perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 merupakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa. Tujuan pembangunan desa/ perdesaan adalah mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta membangun keterkaitan pembangunan ekonomi lokal antara perdesaan dan perkotaan. Sasaran utama pembangunan perdesaan difokuskan kepada pembangunan desa. Pembangunan desa ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di desa dan mengurangi jumlah desa tertinggal dan terisolasi, meningkatkan desa-desa berkembang dan desa mandiri serta pembangunan kawasan perdesaan.

Sedangkan pembangunan kawasan perdesaan ditujukan untuk memperluas dan mendiversifikasikan kegiatan ekonomi masyarakat desa, mendorong terjadinya industrialisasi perdesaan berbasis usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta mengembangkan kegiatan pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan oleh masyarakat desa berbasis ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015-2019 dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil.
 - a. Mempercepat pembangunan sistem, prasarana transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal;
 - b. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah; dan
 - c. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri.
2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi.
 - a. Meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, serta mengembangkan industri pengolahannya yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan agribisnis di sektor pertanian dan perikanan/kelautan serta pengembangan kawasan pariwisata.
 - c. Mengembangkan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha khususnya di sektor pertanian dan perikanan/kelautan serta sektor lain yang mendukung.
 - d. Menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan jasa.
3. Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan desa-kota
 - a. Mengembangkan sistem perdagangan antar daerah yang efisien;
 - b. Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah;

- c. Mengembangkan kerjasama antar daerah khususnya di luar Jawa-Bali dan kerjasama pemerintah-swasta;
- d. Mengembangkan forum dialog antar *stakeholder* yang mendorong perwujudan kerjasama;
- e. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal.

Arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan difokuskan pada perwujudan Sistem Perkotaan Nasional yang berperan sebagai Penghubung Kota-Desa (PKD), dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi. Dalam PKD ini terdapat suatu kegiatan yang dapat meningkatkan nilai dari komoditas barang dan jasa dari kawasan sekitar (*hinterland*) perkotaan maupun perdesaan. Kebijakan tersebut dijabarkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, dan antar Kota Kecil dan Desa sebagai Tulang Punggung (*Backbone*) Keterhubungan Desa-Kota.
 - a. Mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana di bidang transportasi, dan komunikasi untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan modal.
 - b. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah.
 - c. Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri.
2. Perwujudan keterkaitan kegiatan ekonomi hulu (*upstream linkages*) dan Kegiatan ekonomi Hilir (*downstream linkages*) Desa-Kota
 - a. Mengembangkan industri kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian/perikanan dan industri yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan menengah.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana termasuk informasi pasar dan pemasaran dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi perdesaan.
 - c. Mengembangkan lembaga keuangan daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan.
 - d. Menerapkan teknologi dan inovasi guna menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi kreatif sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing di industri pengolahan.
 - e. Strategi perwujudan keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu dan Hilir tersebut di atas dapat dilakukan melalui pengembangan agribisnis (agrowisata dan agroindustri), pariwisata, dan transmigrasi.
3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa
 - a. Menyediakan peraturan yang mendukung pergerakan barang dan jasa antara desa-kota dan antar wilayah.
 - b. Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha dengan mengefektifkan peran lembaga Perijinan Terpadu Satu Pintu di daerah guna meningkatkan iklim dunia usaha.
 - c. Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta, serta mengembangkan forum-forum yang mendorong perwujudan kerjasama.
 - d. Meningkatkan pendidikan formal dan informal untuk memperkuat kemampuan inovasi, kreatifitas lokal serta potensi keragaman sosial budaya untuk membangun daya saing kota-desa.

Beranjak dari permasalahan di atas, maka kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 secara spesifik berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam konteks Permen yang ada, Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan visi mewujudkan desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis juga mengatur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Intinya bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan ini merupakan upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Tujuan dari Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Prinsip-prinsip yang digunakan antara lain: Partisipatif, Holistik dan komprehensif, Berkesinambungan, Keterpaduan, Keadilan, Keseimbangan, Transparansi dan Akuntabilitas.

Pembanguna Kawasan Perdesaan dilakukan dengan tahapan proses; (i) Pengusulan kawasan perdesaan; (ii) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; (iii) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan (iv) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya memuat:

- a. isu strategis kawasan perdesaan;
- b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
- d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- e. indikator capaian kegiatan; dan
- f. kebutuhan pendanaan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan memunculkan sebuah lembaga baru yaitu Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya. Sebagaimana disebutkan dalam Permendesa PDTTTrans Nomor 5/2016.

A. Pengusulan Kawasan Perdesaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2016, Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa (Pasal 5 ayat 1) dan dapat dibantu oleh pihak ketiga (pasal 5 ayat 2), dan harus memiliki gagasan kawasan perdesaan sesuai pasal 3 ayat 1. Kawasan yang diusulkan disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dengan bentuk surat

kesepakatan kawasan perdesaan (Pasal 5 ayat 4) untuk kemudian diserahkan kepada bupati/walikota (ayat 5). Serta mendapatkan persetujuan tokoh masyarakat di kawasan yang diusulkan sebagai kawasan perdesaan.

B. Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan disusun oleh TKPKP Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Jangka waktu rencana pembangunan kawasan perdesaan berlaku selama 5 tahun yang terdiri atas kegiatan prioritas tahunan. Rencana pembangunan kawasan perdesaan setidaknya berisi tentang isu strategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan, strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, indikator capaian kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Mekanisme Penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan diawali dengan prakarasa Bupati/Walikota melalui TKPKP kabupaten/kota. TKPKP dalam melakukan proses penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan adalah beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan, keterkaitan masalah dan potensi pengembangan serta berada dalam satu kabupaten/kota. Selain itu, penetapan kawasan perdesaan harus memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan lainnya, permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat serta keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

C. Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan sebagai upaya untuk penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di kawasan perdesaan. Pembiayaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDesa, dan sumber lain yang tidak mengikat.

Dalam Pasal 12, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 dijelaskan bahwa (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Desa. (2) Penunjukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten/kota. (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan. (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah

yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (6) Bupati/Walikota dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (7) Bupati/Walikota dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

D. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 13, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 dijelaskan bahwa; 1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. 2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/Kota. 3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda Kabupaten/Kota tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pada Pasal 14, dijelaskan; 1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menjadi dasar Bappeda Kabupaten/Kota dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. 2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya. 3) Bappeda Kabupaten/Kota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Bupati/Walikota. 4) Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya. 5) Bupati/Walikota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

E. Kelembagaan TKPKP untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kelembagaan TKPKP dibahas dalam permendesa 5/2016 ini di bab 4 pasal 15 hingga pasal 20. Terdiri dari TKPKP Pusat, TKPKP Provinsi, dan TKPKP Kabupaten/Kota, dan melakukan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya (pasal 15). Apa dan siapa TKPKP Pusat, TKPKP Provinsi, TKPKP Kabupaten/Kota.

TKPKP Pusat dalam Pasal 16:

1. TKPKP pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari unsur kementerian/lembaga yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
2. TKPKP pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat nasional berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh TKPKP Provinsi.
3. TKPKP pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan TKPKP provinsi dan TKPKP kabupaten/kota.

TKPKP Provinsi dalam Pasal 17:

1. TKPKP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari unsur Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. TKPKP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat provinsi berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
3. Jumlah keanggotaan TKPKP provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

TKPKP Kabupaten/Kota dalam Pasal 18 dan 19:

Pasal 18

1. TKPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari unsur Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
2. TKPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk: a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan; b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati/Walikota; dan d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
3. Jumlah keanggotaan TKPKP kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pasal 19

1. TKPKP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
2. Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk: a. membantu TKPKP kabupaten/kota dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
3. Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

Dan ini yang istimewa dalam pasal 20 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja TKPKP diatur dalam Keputusan Menteri. Lebih istimewa lagi adalah bab V dalam hal Pendanaan Kawasan Pembangunan Perdesaan, coba dicermati.

F. Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Dalam Pasal 21 permendesa 5/2016 disebutkan bahwa:

1. Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
2. Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

Tugas Gubernur dan Menteri dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Menteri dan Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.

G. Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Menteri dan Gubernur

Pada Pasal 23 permendesa 5/2016 disebutkan bahwa:

1. Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan pembinaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan yaitu: a. standardisasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan; b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
2. Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan pembinaan dalam hal: a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Dengan diberlakukannya Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan ini maka menghapus ketentuan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Dalam konstruksi Undang-undang Desa, pengertian Kawasan Perdesaan lebih bersifat sektoral, seperti diatur pasal 83 UU No.6/2014, terkait dengan;

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Selanjutnya Permendes PDTT No. 5 Th. 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan memperjelas bahwa kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Pasal 9 ayat (2) mengatur supaya penetapan pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kegiatan Pertanian;
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya;
3. Tempat Permukiman Perdesaan;
4. Tempat Pelayanan Jasa Pemerintahan, Sosial Dan Ekonomi Perdesaan;
5. Nilai Strategis dan Prioritas Kawasan;
6. Kereseragaman Pembangunan Antar Kawasan dalam Wilayah Kabupaten/Kota;

7. Kearifan Lokal dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat; dan
8. Keterpaduan dan Keberlanjutan Pembangunan.

2.2. TAHAPAN PEKERJAAN

Berdasarkan amanat undang-undang, Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

1. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
2. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
3. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Salah satu produk pembangunan kawasan perdesaan adalah tersusunnya rancangan konsep dokumen RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Selatan yang telah disusun pada tahun 2016, namun saat ini belum sampai pada tahap operasional di lapangan. Analisa sementara adalah belum adanya keterpaduan antara konsep dengan kelembagaan pelaksana di lapangan. Sinkronisasi dilakukan untuk menjembatani hasil kajian dokumen RPKP dengan implementasi di lapang. Dalam kegiatan ini maka, dilakukanlah *review* dan pendalaman terhadap dokumen RPKP, yang meliputi:

- a. Persiapan,
- b. Penyusunan kerangka penelitian dan instrumen kajian,
- c. *Review* RPKP wilayah Kabupaten Bengkulu Utara,
- d. Penyusunan dan Presentasi Laporan Pendahuluan,
- e. Pendalaman rencana aksi melalui pengumpulan data dengan cara diskusi/FGD, wawancara dengan responden dan pengamatan lapangan di aras kawasan serta pengukuran batas-batas kawasan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat di aras kawasan,
- f. *Workshop* I di aras kabupaten: pembahasan hasil pendalaman RPKP dengan *stakeholder* kunci di aras provinsi dan kabupaten,
- g. Pengolahan dan analisis Data khususnya perhitungan manfaat ekonomi/dampak akibat pembangunan kawasan perdesaan seperti produksi/peningkatan wisatawan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan pelaku usaha, pengurangan kemiskinan dan dampak terhadap ekonomi wilayah lainnya,
- h. Penyusunan dan presentasi Laporan Antara,
- i. Penyusunan/pendalaman RPKP,

- j. *Workshop* II di aras pusat: pembahasan hasil pendalaman RPKP dengan melibatkan stekholder di internal Kemendesa, K/L lain, mitra negara/donor, KADIN, akademisi dan lain-lain,
- k. *Workshop* III: pembahasan hasil pendalaman RPKP dengan melibatkan *stakeholder* kunci provinsi dan kabupaten di aras kabupaten,
- l. Penyusunan dan presentasi *Draft* Laporan Akhir,
- m. Penyeempurnaan dan penyerahan Laporan Akhir.

Metode pengumpulan data untuk pendalaman RPKP dilakukan secara partisipatif dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD)/*World Cafe Method* (WCM) di aras kawasan perdesaan dengan melibatkan beberapa pengurus TKPKP (Ketua, Sekretaris dan Anggota), ketua kelompok tani/kelompok sadar wisata yang ada di kawasan perdesaan, para pelaku usaha dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran. Selain diskusi juga dilakukan peninjauan lapangan, khususnya untuk menentukan kebutuhan infrastruktur.

Focus Group Discussion (FGD)/*World Cafe Method* (WCM) untuk pembahasan hasil pendalaman RPKP di aras kabupaten, dengan partisipan adalah sebagai berikut: beberapa pengurus TKPKP (Ketua, Sekretaris dan Anggota) aras Kabupaten dan Provinsi, anggota DPRD bidang ekonomi, OPD (Dinas terkait) di aras kabupaten: Dinas PMD, Dinas/ Badan Penanaman Modal, Dinas PUPR, Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan (sesuai dengan komoditi unggulan), Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata (sesuai kebutuhan), Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, pelaku usaha, KADIN, asosiasi bisnis, perbankan, akademisi, LSM, tokoh agama dan tokoh adat/masyarakat.

Sedangkan workshop di aras pusat dilakukan dengan menggunakan metode FGD/WCM untuk membahas hasil pendalaman RPKP dalam bentuk rencana aksi yang tertuang dalam bentuk *program financial matrix* dengan mengundang *stakeholder* di internal Kemendesa, Kemenko PMK, BAPPENAS, KemenPUPR, BKPM, Kemendag, Kementan, Kemenkop dan UKM, KKP, Kemenperind, donor (CIDA, GIZ, JICA, UNDP), Akademisi, asosiasi bisnis antara lain KADIN, ARLI, GAPPINDO, PHRI, ASITA, dan lain sebagainya.

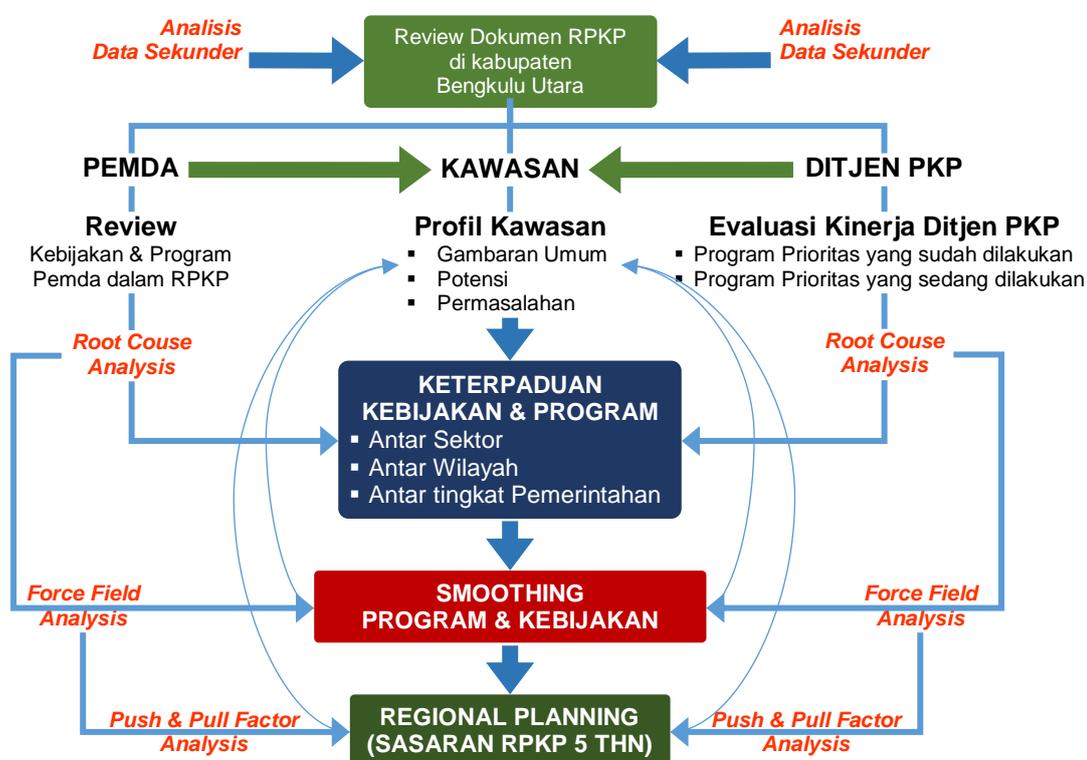
Analisis data untuk potensi dan peluang investasi dilakukan secara partisipatif dengan *stakeholder* di daerah baik di aras kawasan maupun aras kabupaten. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung manfaat/dampak ekonomi akibat pengembangan kawasan seperti produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari kawasan, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan dan kontribusi terhadap PDRB.

2.3. METODOLOGI

2.3.1. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan pekerjaan pendalaman RPKP ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu (1) *Review* dokumen RPKP dan (2) Penyusunan RPKP untuk 5 tahun ke depan. Tahapan *review* dokumen RPKP dilakukan dengan metode *desk study*, dimulai dengan pengumpulan data sekunder terkait ruang lingkup dokumen RPKP. Berikutnya adalah mengidentifikasi profil (nama, luas dan deliniase kawasan), potensi dan permasalahan kawasan yang menjadi lokus dalam dokumen RPKP. Selanjutnya telaah dan evaluasi dilakukan terhadap peran *stakeholder* (Pemda dan Ditjen PKP) yang menghasilkan kebijakan dan program-program pendukung kawasan, baik yang sudah maupun yang sedang dilakukan. Dengan melihat potensi dan permasalahan kawasan yang dikaitkan dengan keterpaduan kebijakan dan program maka dapat dilihat akar permasalahan program apakah ada keterkaitan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan. Melalui *force field analysis* maka akan

diperoleh penghalusan (*smoothing*) atau penyesuaian terhadap program dan kebijakan dalam RPKP, dan selanjutnya dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki rencana RPKP 5 tahun kedepan. Diagram alur tahapan *review* RPKP tersaji pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Diagram alur tahapan *review* dokumen RPKP

Setelah melakukan *review* terhadap dokumen RPKP, tahapan berikutnya adalah penyusunan RPKP untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Diawali dengan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) di pusat bersama Pemda dan beberapa pihak terkait seperti pengurus TKPKP (Ketua, Sekretaris dan Anggota), ketua kelompok tani/kelompok sadar wisata yang ada di kawasan perdesaan, para pelaku usaha dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran. Salah satu hasil dari FGD pusat tersebut adalah pemantapan kembali dan deliniasi kawasan, yang nantinya akan dituangkan dalam SK Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan.

Salah satu tujuan evaluasi dokumen RPKP ini adalah untuk memantapkan terhadap komoditas unggulan di RPKP yaitu dengan melakukan evaluasi kembali terhadap komoditas unggulan yang sudah ada. Evaluasi terhadap komoditas unggulan, selain dengan analisis LQ untuk mengetahui komoditas basis, juga dilakukan analisis terhadap beberapa kriteria parameter penentuan komoditas unggulan (Budiharsono, 2018), yaitu:

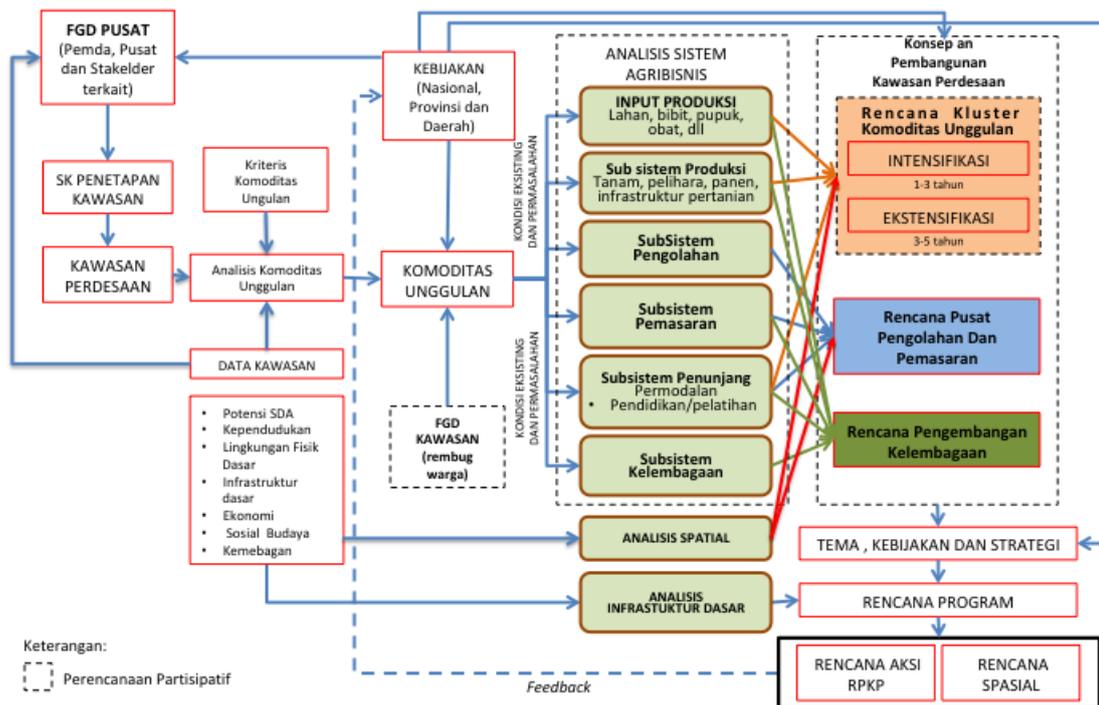
1. ketersediaan bahan baku;
2. ketersediaan sumberdaya manusia;
3. ketersediaan sarana dan prasarana;
4. potensi pasar domestik atau ekspor;
5. pasar jangka pendek atau jangka panjang;
6. keterlibatan UKM dan pengusaha besar;
7. lamanya masyarakat melakukan usaha;
8. kesesuaian dengan kebijakan/regulasi (nasional atau daerah); dan
9. kesesuaian terhadap aspek lingkungan.

Atas dasar kajian tersebut maka ditetapkan komoditas unggulan dan program prioritas kawasan. Tahap berikutnya adalah mengadakan FGD/*World Cafe Method* (WCM) pada tingkat kecamatan/desa bersama OPD Pemda dengan menggali informasi terkait perkembangan dan data produksi komoditas unggulan di kawasan. Selanjutnya validasi informasi dan pengumpulan data primer dilakukan saat kegiatan survei di lapang. Komoditas hasil analisis dan kesepakatan di atas, dianalisis potensi dan permasalahannya untuk setiap sub sistem agribisnis, yaitu (1) Sub-sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yaitu dengan melihat input produksi (lahan, pupuk, bibit obat-obatan dan lain-lain), (2) Sub-sistem usaha tani (*on-farm agribusiness*) yaitu dengan melihat kegiatan budidaya dari mulai pembibitan, penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan, (3) Sub-sistem pengolahan (*down-stream agribusiness*) yaitu melihat kondisi *eksisting* dan permasalahan pengolahan produk komoditas unggulan, (4) Sub-sistem pemasaran yaitu menganalisis sistem pemasaran komoditas unggulan, termasuk didalamnya adalah kegiatan distribusi, promosi, informasi pasar dan intelijen pasar, (5) Sub-sistem penunjang sistem agribisnis, yaitu jasa yang menyediakan jasa bagi sub-sistem agribisnis hulu, usaha tani dan hilir. Subsistem ini meliputi penelitian dan pengembangan, pembiayaan, asuransi, pelatihan, penyuluhan dan sistem informasi. Analisis yang terakhir adalah melakukan analisis terhadap kondisi dan permasalahan kelembagaan yang ada, menyangkut kelembagaan dalam pengembangan komoditas unggulan.

Hasil analisis sistem agribisnis terhadap komoditas unggulan di atas, menjadi dasar dalam penyusunan Konsep Pengembangan Kawasan Perdesaan. Konsep inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan. Secara umum rencana pengembangan kawasan perdesaan terdiri dari tiga, yaitu:

1. Rencana *Kluster* komoditas unggulan, Rencana *kluster* komoditas unggulan ini terdiri dari rencana Intensifikasi pengembangan komoditas unggulan untuk tahun 1-3, dan rencana ekstensifikasi pengembangan komoditas unggulan untuk tahun 4-5.
2. Rencana Pusat Pengolahan dan pemasaran, Rencana pusat pengolahan dan pemasaran ini menjadi sentra pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan di kawasan perdesaan. Sentra ini juga dapat menjadi pusat informasi dan sarana peningkatan keterampilan dan pelatihan dalam rangka pengembangan komoditas unggulan.
3. Rencana Pengembangan Kelembagaan, Kelembagaan mempunyai peran sangat penting untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan di kawasan perdesaan. Kelembagaan tersebut yang membuat aturan main serta memastikan rencana aksi yang sudah disepakati dalam dokumen RPKP ini dilaksanakan. Kelembagaan ini dapat berubah BUMDES Bersama.

Berdasarkan konsep Pembangunan kawasan perdesaan tersebut di atas ditentukan tema kawasan perdesaan, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perdesaan. Kebijakan dan strategi di atas, didetailkan kembali oleh rencana program pengembangan kawasan perdesaan. Rencana Program pengembangan kawasan perdesaan tersebut juga berdasarkan hasil analisis infrastruktur dasar yang menunjang pengembangan kawasan perdesaan. Dalam rangka untuk menterjemahkan program di atas. Disusun rencana aksi dan rencana ruangnya (*spatial*). Hasil kebijakan. Strategi, program dan rencana aksi dan rencana ruang menjadi bahan terhadap kebijakan pembangunan baik di pusat, provinsi maupun daerah. Selengkapanya alur pemikiran penyusunan rencana pengembangan kawasan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Diagram proses penyusunan RPKP 5 tahun ke depan

2.3.2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Data yang digunakan untuk Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bengkulu Utara, terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui *Focused Group Discussion* (FGD) serta survei data lapangan yang meliputi observasi lapangan, verifikasi data sekunder, dan wawancara dengan *stakeholder* terkait. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data yang dipublikasikan oleh dinas/lembaga pemerintah, seperti BPS, Bappeda, Dinas Pertanian dan Hortikultura, Dinas Perikanan, dan instansi terkait lainnya. Data yang dikumpulkan antara lain:

1. Kondisi fisik wilayah (topografi dan iklim);
2. Penggunaan lahan;
3. Kependudukan/demografi (jumlah, penyebaran, kepadatan penduduk, pendidikan dan lapangan pekerjaan);
4. Perekonomian wilayah;
5. Infrastruktur wilayah (prasarana jalan, sarana transportasi, listrik, sarana komunikasi);
6. Produksi, industri olahan dan pemasaran berbagai komoditas perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
7. Fasilitas pelayanan pertanian;
8. Ketersediaan tenaga kerja (SDM) pertanian;
9. Kelembagaan (kelompok tani, koperasi, dan lain-lain); dan
10. Data lainnya yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari berbagai dokumen terkait yang diterbitkan oleh instansi terkait, wawancara/diskusi, dan survei lapang sebagai berikut:

1. Peta Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian (perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan) Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Masterplan Pertanian Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Angka Tahun 2013-2017 (BPS Kabupaten Bengkulu Utara);
4. RTRW Kabupaten Bengkulu Utara;
5. RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Renstra dinas-dinas terkait di Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Laporan Tahunan dinas-dinas terkait di Kabupaten Bengkulu Utara;
8. Hasil wawancara (*indepth interview*) dan FGD dengan petani dan para pelaku agribisnis;
9. Observasi lapangan; dan
10. Sumber data lain yang relevan dengan kegiatan.

2.3.3. Metode Analisis

Berikut ini beberapa metode analisis terkait kerangka berpikir yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya:

1. Analisis Komparatif antar Komoditas (*Location Quotient (LQ)*)

Location Quotient (LQ) merupakan metode analisis yang umum digunakan di bidang ekonomi geografi. Namun demikian, LQ ini sering juga digunakan di bidang ilmu yang lain. Secara umum, metode analisis ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis (aktifitas). *Location Quotient (LQ)* merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. Secara lebih operasional, LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah ke-i terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati. Persamaan dari LQ adalah:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij} / X_i}{X_j / X_{..}}$$

dimana:

- X_{ij} : Luas area komoditas tertentu (pertanian/peternakan/perikanan) di kecamatan ke-i
- X_i : Luas area komoditas tertentu (pertanian/peternakan/perikanan) se-Kabupaten
- X_j : Total luas area pertanian/peternakan/perikanan di kecamatan ke-i se-Kabupaten
- $X_{..}$: Total luas area pertanian/peternakan/perikanan se-Kabupaten.

Untuk dapat menginterpretasikan hasil analisis LQ, terdapat suatu kesepakatan sebagai berikut:

- a. Jika nilai $LQ_i > 1$, maka hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi suatu aktivitas di sub wilayah ke-i secara relatif dibandingkan dengan total wilayah atau terjadi pemusatan aktivitas di sub wilayah ke-i.
- b. Jika nilai $LQ_i = 1$, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa aktivitas setara dengan pangsa total.
- c. Jika $LQ_i < 1$, maka sub wilayah ke-i tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang secara umum ditemukan di seluruh wilayah.

2. Analisis Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan (*Analisis Skalogram*)

Penentuan hirarki pusat-pusat pelayanan dilakukan dengan melihat ketersediaan infrastruktur atau sarana/prasarana yang dimiliki sampai pada level kelurahan/desa dengan menggunakan Analisis Skalogram. Data infrastruktur diperoleh dari data Podes (Potensi Desa) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis ini antara lain adalah jumlah penduduk, luas wilayah, panjang jalan, kelengkapan fasilitas pendidikan, kelengkapan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga pendidik, ketersediaan tenaga medis, kelengkapan fasilitas perekonomian (pasar, bank, koperasi), dan data lainnya.

Wilayah diasumsikan dalam tipologi wilayah nodal, dimana pusat atau *hinterland* suatu wilayah dapat ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang ada serta variabel penciri fisik-sosial-ekonomi terkait. Wilayah yang memiliki indeks perkembangan paling tinggi merupakan pusat dan akan mempunyai hierarki yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, jika satu wilayah mempunyai jumlah dan jenis fasilitas dengan kuantitas yang rendah atau nilai indeks perkembangan yang rendah merupakan wilayah *hinterland* dari wilayah lainnya.

Tujuan identifikasi pusat pelayanan dalam kajian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi pusat-pusat pelayanan kawasan pengembangan perdesaan serta daerah pelayanan pada tingkat yang berbeda; (2) pengintegrasian atau pengelompokan pelayanan pada tingkat yang berbeda; dan (3) penentuan dan keterkaitan guna mengembangkan aksesibilitas dan efisiensi.

3. Analisis Spasial (GIS) untuk Kesesuaian dan Ketersediaan Lahan

Kegiatan analisis kesesuaian dan ketersediaan diawali dengan identifikasi biofisik lahan. Hasil identifikasi selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis dan penilaian kesesuaian dan ketersediaan lahan. Kesesuaian lahan dan ketersediaan lahan disampaikan dalam bentuk informasi spasial dengan analisis SIG.

a. Identifikasi Biofisik Lahan

Secara garis besar survei bio-fisik lahan dibagi atas beberapa tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tahapan analisis data. Tahap persiapan mencakup kegiatan pengumpulan data awal dari berbagai instansi terkait, berupa data sekunder, peta-peta *eksisting* dan analisis-*eksisting* terdahulu yang pernah dilakukan di lokasi kegiatan. Data sekunder juga dapat digunakan sebagai pengganti data primer apabila ditemukan kesulitan atau keterbatasan didalam mendapatkan data lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan akses langsung data ke instansi-instansi terkait. Data-data yang dikumpulkan mencakup seluruh data yang mungkin ada, yang berguna untuk analisis bio-fisik.

Tahap pelaksanaan meliputi: (1) pembangunan basis data dan kompilasi peta-peta *eksisting* agar dapat terstruktur dengan baik. Selain basis data, peta-peta yang ada juga perlu direorganisasi dengan baik; dan (2) kompilasi dan penyajian hasil. Peta kesesuaian penggunaan lahan untuk pertanian (peta potensi pertanian) dan peta-peta bio-fisik lainnya dikompilasi dan dipadukan dengan peta Rupa Bumi serta disajikan pada skala 1:250.000. Peta-peta ini disiapkan secara digital dengan perangkat lunak Sistem Informasi Geografi (SIG).

b. Analisis Sistem Informasi Geografis (SIG)

Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografis (SIG) diartikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi

geografis atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumberdaya alam, lingkungan, sistem informasi bisnis dan pelayanan umum lainnya.

SIG dibutuhkan sebagai solusi dari beberapa alasan yang sangat mendasar, diantaranya karena adanya penenganan data geospasial yang kurang baik, cetakan peta dan statistik yang sangat cepat kadaluarsa, data dan informasi yang dihadirkan sering tidak akurat, serta tidak ada pelayanan penyediaan dan pertukaran data.

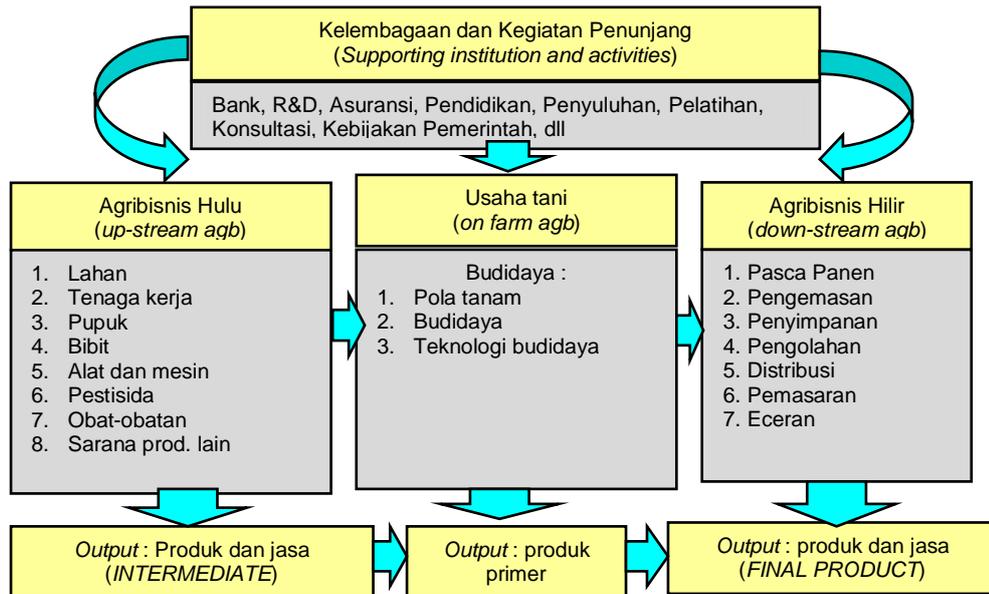
Cakupan aplikasi SIG dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori:

- Pengelolaan fasilitas, yaitu peta dalam skala besar dan akurat, dan analisis jaringan (*network analysis*) digunakan untuk pengelolaan utilitas kota.
- Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk tujuan ini digunakan peta skala menengah dan kecil, dan teknik tumpang tindih digabungkan citra satelit untuk analisis dampak lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam.
- Jaringan jalan, untuk fungsi jaringan jalan digunakan peta skala besar dan menengah dan analisis keruangan yang digunakan untuk mengetahui lokasi perumahan, jalan dan lain-lain.
- Sistem informasi lahan/tanah.

4. Analisis Pengembangan Sistem Agribisnis

Sistem agribisnis secara konseptual adalah semua aktivitas dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lainnya. Konsep agribisnis menurut Soekartawi (2002), adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan dan pemasaran yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian. Menurut Davis dan Goldberg (1957), agribisnis merupakan seluruh operasi yang terkait dengan manufaktur dan distribusi suplai pertanian, aktivitas produksi di pertanian, penyimpanan, proses dan distribusi komoditi pertanian serta segala sesuatu yang terbuat darinya.

Sedangkan menurut Saragih (2010), sistem agribisnis merupakan satu kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari lima sub-sistem yaitu: (1) Sub-sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yakni industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian seperti industri pembenihan, agrokimia, mesin dan alat pertanian, (2) Sub-sistem usaha tani (*on-farm agribusiness*) yakni kegiatan budidaya untuk menghasilkan komoditas pertanian primer, termasuk dalam hal ini tanaman pangan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, (3) Sub-sistem pengolahan (*down-stream agribusiness*) yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan, (4) Sub-sistem pemasaran yakni kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan didalam dan diluar negeri, termasuk didalamnya adalah kegiatan distribusi, promosi, informasi pasar dan intelijen pasar, (5) Sub-sistem jasa yang menyediakan jasa bagi sub-sistem agribisnis hulu, usaha tani dan hilir. Subsistem ini meliputi penelitian dan pengembangan, pembiayaan, asuransi, pelatihan, penyuluhan dan sistem informasi.



Gambar 2.3. Sistem Agribisnis
Sumber : Soekartawi, 2002

a. Subsistem Hulu (*up-stream agribusiness*)

Subsistem hulu (*up-stream agribusiness*) adalah industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian seperti industri perbenihan atau pembibitan, industri agrokimia (pupuk, pestisida, obat), industri alat dan mesin pertanian (Saragih 2010). Subsistem hulu berfungsi menghasilkan dan menyediakan sarana produksi yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Menurut Saragih (2010) penggunaan sarana produksi yang tepat seperti bibit unggul akan memiliki kemampuan produksi lebih tinggi dibandingkan tidak unggul.

Analisis subsistem hulu untuk pengembangan kawasan perdesaan dilakukan dengan mengevaluasi factor-faktor produksi yang terlibat dan ketersediaannya seperti lahan yang sesuai, bibit unggul, pupuk yang optimal, ketersediaan tenaga kerja petani, obat-obatan, mesin dan peralatan baik untuk pengolahan lahan seperti traktor, peralatan penyemprotan, dan peralatan panen yang dibutuhkan, serta sarana dan prasarana yang mendukung seperti jalan, pasar, listrik, irigasi dan sebagainya.

b. Subsistem Usaha tani (*on-farm agribusiness*)

Subsistem usaha tani (*on-farm agribusiness*) adalah kegiatan yang menggunakan modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Subsistem usaha tani sangat berkaitan dengan subsistem hulu. Subsistem usaha tani memerlukan bibit, obat dan alat-alat pertanian supaya usaha tani berhasil dengan baik. Pelaksanaan usaha tani bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi keluarga dan memenuhi kebutuhan pasar.

Analisis usaha tani pada hakekatnya adalah alat yang dipakai untuk pengukuran keberhasilan usaha tani dan bertujuan untuk melihat keragaan suatu kegiatan usaha tani. Terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk melihat keragaan kegiatan usaha tani yaitu analisis pendapatan usaha tani dan analisis imbalan penerimaan dan biaya (R/C rasio). Analisis usaha tani dilakukan dengan menganalisis proses penanaman sampai dengan pemanenan, teknologi dan

peralatan yang digunakan, kaitannya dengan norma yang berlaku dan komersialisasi usaha tani.

Analisis pendapatan usaha tani yaitu memberikan gambaran keadaan usaha tani dan hal yang perlu direncanakan untuk perbaikan dimasa mendatang. Bagi seorang petani, pendapatan dapat berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan usaha tani yang dikelolanya. Beberapa definisi yang berkaitan dengan ukuran pendapatan dan keuntungan usaha tani (Soekartawi, 2002):

- Penerimaan usaha tani: nilai uang yang diperoleh dari penjualan.
- Pengeluaran tunai usaha tani: jumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa bagi usaha tani.
- Pendapatan tunai usaha tani: selisih antara nilai penerimaan tunai usaha tani dan pengeluaran tunai usaha tani.
- Penerimaan kotor usaha tani: produk total dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun tidak dijual.
- Pengeluaran total usaha tani: nilai semua input habis terpakai atau dikeluarkan dalam produksi termasuk biaya-biaya yang diperhitungkan.
- Pendapatan bersih usaha tani: selisih antara penerimaan kotor usaha tani dengan pengeluaran total usaha tani.

Kegiatan usaha tani bertujuan untuk mencari produksi yang pada akhirnya dinilai dengan uang untuk diperhitungkan dari nilai produksi setelah dikurangi atau memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan. Pendapatan usaha tani yang didapatkan akan mendorong petani itu sendiri misalnya biaya produksi periode selanjutnya, tabungan dan pengeluaran lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara nilai penerimaan usaha tani dari hasil penjualan dengan biaya usahatani. Penerimaan usaha tani merupakan suatu nilai produk total dalam jangka waktu tertentu, baik dijual maupun dikonsumsi sendiri. Penerimaan usaha tani dinilai dari hasil perkalian antara nilai total produksi dengan harga pasar. Sedangkan pengeluaran usaha tani merupakan nilai penggunaan sejumlah input usaha tani yang dipakai saat mengelola usaha tani.

Biaya tersebut dapat digolongkan dalam biaya tunai usaha tani yang harus dikeluarkan dan biaya yang diperhitungkan. Biaya yang diperhitungkan yaitu nilai pemakaian input usaha tani. Biaya yang diperhitungkan digunakan untuk menghitung pendapatan kerja petani jika modal dan nilai tenaga kerja keluarga diperhitungkan. Analisis pendapatan usaha tani berguna bagi petani maupun pemilik input usaha tani. Analisis pendapatan usaha tani digunakan untuk mengetahui jumlah pendapatan yang diperoleh dalam usaha tani. Pendapatan usaha tani dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total.

Pendapatan usaha tani dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu nilai penerimaan (*revenue*) usaha tani dan pengeluaran (*cost*) usaha tani. Perhitungan pendapatan dibedakan menjadi pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total. Pendapatan atas biaya tunai diperoleh dari selisih antara total penerimaan usaha tani dan pengeluaran tunai, sedangkan pendapatan atas biaya total diperoleh dari selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran. Total penerimaan diperoleh dari penjumlahan antara penerimaan tunai dan penerimaan tidak tunai, sedangkan total pengeluaran diperoleh dari penjumlahan antara pengeluaran tunai dan pengeluaran tidak tunai (yang diperhitungkan).

Biaya tunai adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani, sedangkan biaya total adalah semua input milik keluarga yang diperhitungkan sebagai biaya. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang dibebankan kepada usaha tani untuk menggunakan tenaga kerja dalam keluarga, penyusutan alat-alat dan imbalan sewa lahan serta biaya imbalan benih. Biaya yang diperhitungkan digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan kerja petani jika modal, sewa lahan dan tenaga kerja dalam keluarga dan biaya benih milik sendiri diperhitungkan. Modal dipergunakan petani dihitung sebagai modal pinjaman meskipun modal tersebut milik petani sendiri. Tenaga kerja keluarga dinilai berdasarkan upah yang berlaku pada waktu anggota keluarga menyumbang kerja pada usaha tani tersebut. Lahan yang digunakan petani diperhitungkan sebagai lahan sewa yang besarnya berdasarkan rata-rata biaya sewa lahan di daerah tersebut. Secara umum pendapatan diperhitungkan sebagai penerimaan dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan. Pendapatan dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\pi \text{ tunai} &= TR - Bt \\ \pi \text{ total} &= TR - (Bt + BD)\end{aligned}$$

dimana:

- π = Pendapatan (rupiah)
- TR = Nilai produksi (hasil kali jumlah fisik produksi dengan harga)
- Bt = Biaya tunai (rupiah)
- BD = Biaya yang diperhitungkan (rupiah)

Analisis imbalan penerimaan dan biaya (R/C rasio) menunjukkan penerimaan yang diperoleh petani dari setiap rupiah pengeluaran yang dikeluarkan untuk usaha tani sebagai manfaat. Pernyataan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut (Hernanto 1996);

$$R/C \text{ rasio} = \frac{\text{Penerimaan (Rp)}}{\text{Biaya (Rp)}}$$

Kriteria keputusan yang digunakan untuk menilai hasil analisis R/C rasio tersebut adalah sebagai berikut:

- Jika nilai R/C rasio > 1 , maka usaha tani menghasilkan keuntungan dan efisien karena setiap biaya sebesar Rp 1,00 yang dikeluarkan untuk usaha tani akan menghasilkan penerimaan yang lebih besar.
- Jika nilai R/C rasio $= 1$, maka usaha tani berada pada titik impas yaitu tidak menghasilkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian karena jumlah biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani akan menghasilkan penerimaan yang sama besar.
- Jika nilai R/C rasio < 1 , maka usaha tani mengalami kerugian dan tidak efisien karena setiap biaya Rp 1,00 yang dikeluarkan untuk usaha tani akan menghasilkan penerimaan yang lebih kecil.

Analisis imbalan penerimaan atas biaya menunjukkan penerimaan yang berapa besarnya penerimaan yang diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan dalam produksi usaha tani. Menurut Soekartawi (2002), R/C adalah singkatan dari *Return Cost Ratio* atau dikenal sebagai perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya rasio. Rasio R/C menunjukkan berapa satuan mata uang penerimaan yang dihasilkan setiap satu satuan mata uang yang digunakan untuk biaya produksi dalam usaha tani. Rasio penerimaan atas biaya produksi dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan relatif kegiatan usaha tani, artinya dari angka rasio

penerimaan atas biaya tersebut dapat diketahui apakah usaha tani menguntungkan atau tidak. Dalam analisis ini akan diuji seberapa jauh setiap nilai rupiah yang dipakai dalam kegiatan usaha tani yang bersangkutan dapat memberikan sejumlah nilai penerimaan sebagai manfaatnya suatu usaha tani dikatakan efisien dan menguntungkan apabila nilai R/C lebih besar dari satu dan sebaliknya suatu usaha tani dikatakan belum menguntungkan atau tidak efisien apabila R/C kurang dari satu. Semakin tinggi rasio R/C berarti semakin besar penerimaan yang dihasilkan setiap satu satuan pengeluaran sehingga semakin efisien.

c. Subsistem Agroindustri Pengolahan (*down-stream agribusiness*)

Industri atau usaha pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan mengubah barang dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud mendekati produk tersebut kepada konsumen akhir untuk tujuan komersial. Dengan melihat potensi yang ada, perlu dijajaki pengolahan kearah mana yang paling menguntungkan dan layak untuk dikembangkan, dari berbagai alternative pengolahan yang ada dan memungkinkan dalam pohon industri. Pengolahan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk segar dalam rangka pemberdayaan petani dan lembaga yang terlibat demi meningkatkan kesejahteraan. Selain itu dengan hilirisasi, maka *primary product* dapat menjadi lebih tahan lama dan dapat meningkatkan elastisitas *demand*.

Menurut Soekartawi (2002), terdapat beberapa alasan yang mendasari pentingnya pengolahan dalam sistem agribisnis. Komponen pengolahan hasil pertanian menjadi penting karena pengolahan mampu menghasilkan nilai tambah, mampu meningkatkan kualitas hasil, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan keterampilan produsen, serta meningkatkan pendapatan produsen. Tujuan dari usaha pengolahan hasil adalah untuk menciptakan bentuk yang lebih mudah dikonsumsi, meningkatkan masa atau daya simpan produk, menciptakan bentuk yang lebih mudah diangkut dan untuk memelihara rasa dan nilai gizi suatu produk. Agroindustri diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi selain mampu memperoleh keuntungan yang berlanjut. Subsistem pengolahan menjadi penting karena mampu menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kualitas hasil, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan keterampilan produsen serta meningkatkan pendapatan produsen (Soekartawi 2002).

d. Subsistem Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain (Kotler 1992). Tujuan pemasaran bagi produsen adalah dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui pertukaran.

e. Subsistem Jasa Pendukung (Kelembagaan)

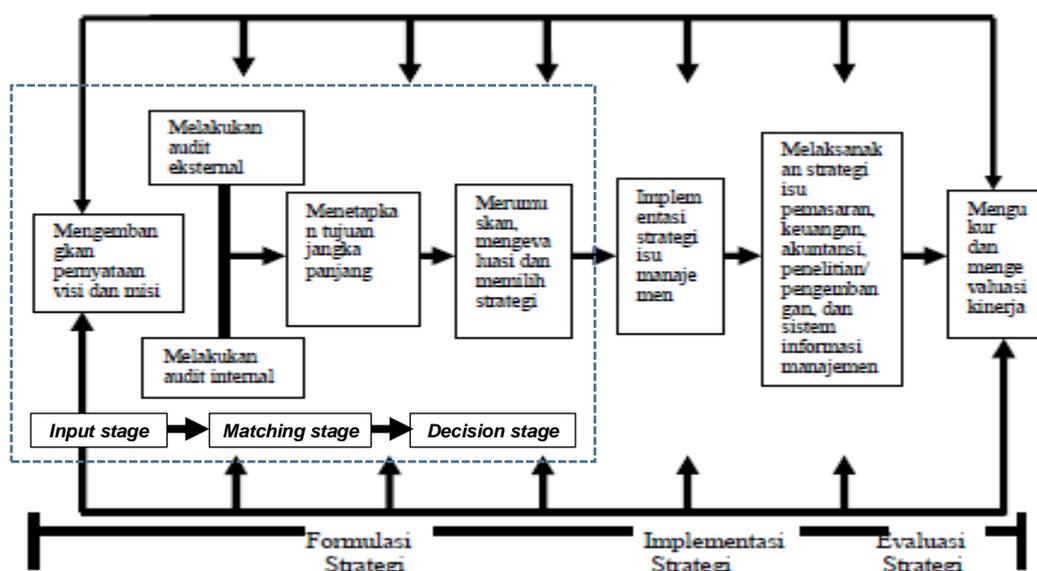
Subsistem jasa pendukung (kelembagaan) adalah semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem hulu, usaha tani dan hilir. Lembaga-lembaga yang terkait adalah penyuluh, konsultan, keuangan dan penelitian. Lembaga penyuluh dan konsultasi memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh petani dan pembinaan teknik budidaya, pemanenan dan manajemen usaha tani. Lembaga keuangan seperti perbankan, model ventura dan asuransi yang memberikan layanan keuangan berupa pinjaman dan penanggungan risiko usaha (khusus asuransi). Sedangkan

lembaga penelitian yang dilakukan oleh balai-balai penelitian atau perguruan tinggi memberikan layanan informasi teknologi produksi atau teknik manajemen hasil penelitian dan pengembangan.

Penentuan peranan jasa penunjang adalah dengan analisis deskriptif terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Metode yang dipakai dalam penentuan peran jasa penunjang adalah dengan wawancara. Pemaparan dilakukan pendeskripsian atas peran yang telah dilakukan selama ini. Beberapa pelaku yang berperan dalam kegiatan usaha tani adalah pemerintah, perbankan dan kelompok pengolah. Berdasarkan kegiatan tersebut akan ditanyakan kepada pelaku usaha apakah kegiatan yang telah dilakukan oleh jasa penunjang telah sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.

5. Analisis Kebijakan dan Strategi Agribisnis dalam Pengembangan Kawasan

Untuk menghasilkan langkah-langkah strategis agar program pengembangan kawasan berkelanjutan, perlu kiranya untuk melakukan formulasi yang diintegrasikan menjadi kerangka kerja pengambilan keputusan tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data (*input stage*), tahap pemaduan (*matching stage*), dan tahap pengambilan keputusan (*decision stage*) (David, 2009).



Gambar 2.4. Model Strategi Pengembangan Kawasan

Sumber: David, 2009

6. Analisis Sosial dan Kelembagaan

Kelembagaan merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan selama periode waktu yang relatif lama untuk mencapai tujuan bernilai kolektif (bersama) atau tujuan-tujuan yang bernilai sosial. Kelembagaan tidak hanya mengacu pada organisasi atau kelompok melainkan juga mengacu pada aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal penting untuk dilakukan mengingat besarnya peran kelembagaan lokal bagi pengembangan wilayah.

Menurut Uphoff (1992), kelembagaan di tingkat lokal memiliki peran penting terutama dalam memobilisasi dan mengatur penggunaan sumberdaya lokal berdasarkan aktivitas produktif jangka panjang. Melalui kelembagaan lokal ini, sumberdaya yang tersedia

dapat digunakan secara efisien dan berkelanjutan berdasarkan pengetahuan spesifik lokasi yang umum diketahui di wilayah tersebut sehingga pemantauan terhadap perubahan status sumberdaya menjadi lebih cepat dan murah ketika masyarakat lokal diikutsertakan. Masyarakat bukan lagi sebagai kelompok sasaran tetapi ikut berpartisipasi pada pembangunan. Peran kelembagaan sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Analisis kelembagaan menjelaskan hubungan pencapaian penghidupan yang berkelanjutan dengan aset (sumberdaya) dan akses yang dimiliki. Analisis kelembagaan mengidentifikasi hubungan relasi produksi dan sosial yang ada, baik dalam organisasi formal maupun informal terkait intervensi yang akan dilakukan. Konteks kelembagaan dapat mencakup dalam tingkatan organisasi petani (mikro), organisasi desa (meso), dan organisasi/institusi yang lebih luas dari desa (makro).

7. Delineasi Kawasan dan Penetapan Kawasan Pengembangan Perdesaan

Delineasi kawasan dilakukan untuk memperoleh atau membatasi areal-areal yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan perdesaan. Adapun delineasi dilakukan dengan melihat hasil akhir peta kelas kesesuaian/kemampuan lahan (aspek fisik) yang akan ditumpang susun dengan peta rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK), peta status kawasan, peta perijinan, dengan mempertimbangkan hasil analisis lainnya, yaitu hasil analisis komparatif dan analisis kompetitif komoditas-komoditas subsektor pertanian (potensi subsektor unggulan), serta analisis hirarki wilayah sehingga dapat diperoleh peta rekomendasi untuk pengembangan kawasan perdesaan.

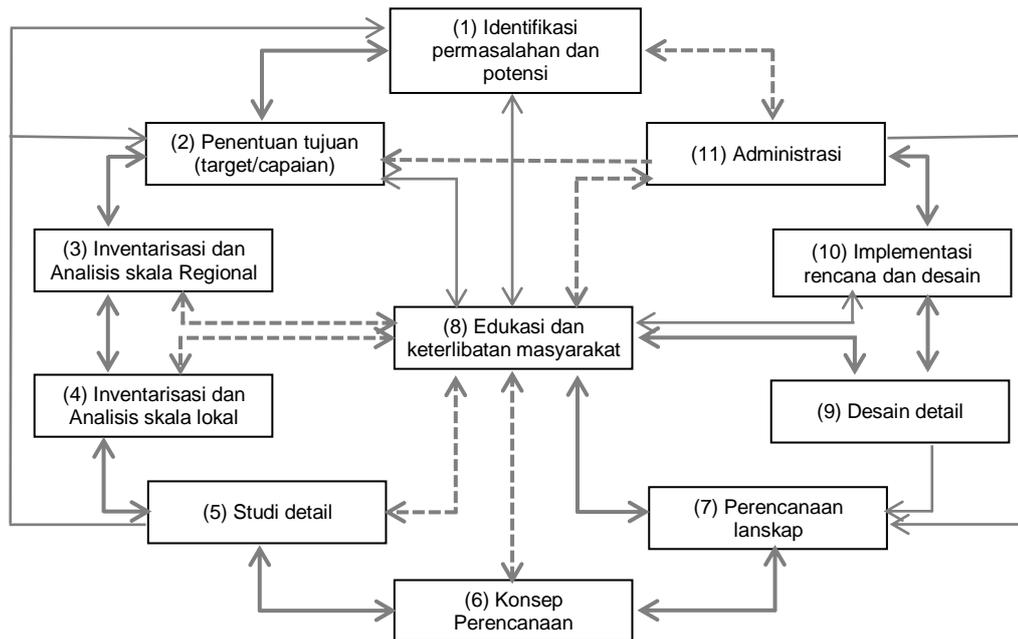
8. Penetapan *Site Plan* Lokasi Prioritas Pusat Pengembangan Kawasan Perdesaan

Tahapan selanjutnya adalah melakukan pembobotan untuk lokasi-lokasi yang potensial dikembangkan sebagai pusat pengembangan kawasan perdesaan berdasarkan berbagai aspek yang telah dijabarkan sebelumnya. Lokasi potensial dengan nilai bobot tertinggi akan ditetapkan sebagai lokasi prioritas pusat pengembangan kawasan perdesaan.

9. Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan penyelesaian masalah dan proses pengambilan keputusan atau merupakan proses pemikiran dari suatu ide ke arah bentuk nyata. Menurut Steiner, 2008 terdapat 11 tahap interaksi dalam model perencanaan ekologis yang tidak linear. Perencanaan ekologis tidak hanya menyangkut ekologi semata namun juga merangkul kajian sistem sosial budaya (*sociocultural*). Tahap tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tahap pertama adalah pengumpulan isu yang dilakukan bersama masyarakat. Tahap ke dua penentuan tujuan termasuk di dalamnya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian tahap 3 dan 4 inventarisasi dan analisis meliputi aspek biofisik dan sosial budaya, baik dalam level makro maupun mikro. Tahap ke-lima studi detil dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menghubungkan tujuan dan permasalahan. Tahap ke-enam, pengembangan konsep dan alternatif. Tahap ke-tujuh adalah perencanaan lanskap dari hasil konsep yang telah ditentukan tersebut kemudian dilakukan sounding kepada masyarakat dan melalui proses edukasi (tahap 8). Tahap ke-delapan inilah yang cukup penting karena perlu proses keterlibatan masyarakat. Tahap ke-sembilan adalah detail desain dalam skala pengguna atau skala tapak. Desain ini kemudian diimplementasikan

(tahap 10) dan tahap terakhir adalah proses administrasi salah satunya kegiatan pelaporan dari studi yang dilakukan.



Gambar 2.5. Model perencanaan ekologis (Steiner, 2008)

Secara lebih ringkas dari proses di atas, dalam kegiatan perencanaan dan desain kawasan mengacu pada metode yang terdiri dari beberapa tahapan meliputi persiapan, survei dan inventarisasi, analisis dan sintesis, konsep serta pengembangannya hingga produk akhir dapat berupa gambar konsep, masterplan, site plan ataupun visualisasi dari rancangan (desain). Adapun kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan terlepas dari proses perencanaan, secara lebih rinci meliputi:

a. Persiapan

Tahap persiapan adalah tahap awal dari proses kegiatan perencanaan. Pada model steiner tahap ini meliputi tahap 1 dan 2. Hal-hal yang dipersiapkan adalah:

- Informasi dasar tapak (desa) berupa data awal baik berupa kebijakan ketataruangan, peta kawasan, maupun informasi lainnya.
- Keinginan utama dari pemilik pekerjaan.

b. Pekerjaan Survei dan Inventarisasi

Pekerjaan survei dan inventarisasi meliputi tahap 3,4,5 pada model Steiner. Kegiatan survei dan inventarisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pengamatan langsung lokasi untuk melihat kondisi *eksisting* kawasan, yang bertujuan mendapatkan data primer menyangkut kondisi fisik, biofisik dan sosial budaya masyarakat desa. Kegiatan ini juga dilakukan kegiatan pengambilan gambar, pengukuran dan pengumpulan data elemen, sarana dan prasarana yang ada.
- Pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui laporan, literatur, makalah, jurnal, dan buku-buku penunjang. Data yang didapatkan berupa data tambahan dari data awal seperti fisik dan biofisik meliputi data spasial dan atribut antara lain: topografi, geologi, tanah, iklim, hidrologi, dan lainnya. Kondisi sosial desa, antara lain: aktivitas, pengguna dan data sejarah, serta peraturan dan

perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan tapak (desa).

c. Analisis dan Sintesis

Tahap analisis dan sintesis merupakan kelanjutan setelah inventarisasi, sama seperti tahap 3, 4, dan 5 pada model Steiner. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dilakukan analisa terhadap berbagai aspek dan faktor yang berperan terhadap fungsi ketataruangan desa tersebut sehingga dapat diketahui masalah, hambatan, potensi serta tingkat kerawanan atau kerapuhan dari lahan atau desa tersebut. Hasil dari kegiatan ini adalah menyajikan berbagai kemungkinan atau alternatif pengembangan desa. Aspek yang akan dianalisa dalam penyusunan rencana kawasan ini disesuaikan dengan fungsi setiap daerah/desa yang ada di masing-masing lokasi studi. Adapun aspek yang dipertimbangkan meliputi:

- Kondisi fisik maupun biofisik dari desa.
- Kondisi aktivitas (sosial-budaya) masyarakat yang ada di desa baik suku asli maupun pendatang.
- Struktur ruang dan fungsi ruang yang ada.
- Elemen alam yang ada seperti gunung, sungai, danau, air terjun, hutan, pantai dan lainnya.
- Peletakan fasilitas, elemen-elemen buatan yang ada seperti simbol, landmark, ragam hias, arsitektur.

d. Konsep dan Pengembangan

Proses penentuan konsep dan pengembangan dari rencana tapak dalam hal ini desa meliputi tahap 6, 7, 9, 10 dalam model Steiner. Lebih lanjut diperlukan *feedback* dari masyarakat dengan melalui rembuk warga, diskusi, atau yang umum dilakukan seperti FGD (*Focus Group Discussion*). Tahap ini merupakan proses edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam model Steiner (tahap 8).

Konsep merupakan hasil dari kajian terhadap analisis data, yang akan menjadi dasar pengembangan suatu rancangan. Konsep ini terdiri dari konsep dasar dan pengembangan. Pada Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, arahan konsep yang akan ditampilkan adalah masterplan/site plan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan pendekatan komprehensif. Untuk itu, rancangan ini akan ditampilkan baik dari penataan ruang seperti sirkulasi, sarana, prasarana, dan elemen pembentuknya serta dari pendekatan lainnya di berbagai aspek yang dikaji. Beberapa pertimbangan yang akan menjadi standar penataan ruang desa diantaranya:

- Pola fungsi dan struktur ruang desa.
- Pola Jalan - Sirkulasi - Transportasi.
- Jaringan Jalan & Drainase.
- Fasilitas, Utilitas.
- Ruang Terbuka Hijau.

10. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*)

Penentuan analisis SWOT didahului oleh penentuan isu strategis, dalam *Focus Group Discussion* (FGD) adalah bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta. FGD dinilai paling tepat dalam menggali permasalahan yang

bersifat spesifik, khas, dan lokal. FGD yang melibatkan masyarakat setempat dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai. Secara metodologi FGD merupakan teknik kualitatif dengan paradigma konstruksionis. Realitas sosial adalah hasil konstruksi, dimana mengutip kalimat Berger dalam bukunya *Invitation to Sociology* (1963 dalam Brigham, 1998), “*Social reality turns out to have many layers of meaning. The discovery of each new layer changes the perception of a whole.*” (Realitas sosial terbukti memiliki beragam lapis makna. Penemuan tiap lapis baru mengubah persepsi keseluruhan). Realitas sosial terdiri dari berlapis pemaknaan yang dikonstruksi oleh masyarakat, dan lapisan-lapisan itu membentuk kehidupan sehari-hari yang familier dan terkesan normal. Normalitas inilah yang ingin dibongkar penganut konstruktivisme. Mengutip N. Goodman, dunia sehari-hari dikonstruksi individu melalui beragam pengetahuan yang dimilikinya (Goodman, 1978 dalam Flick, 1998).

Dari berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan dalam kaitannya dengan penelitian, FGD berguna untuk:

- a. Memperoleh informasi yang banyak secara cepa (*triangulasi metode*);
- b. Mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai kepercayaan, sikap dan perilaku kelompok tertentu (*triangulasi sumber informasi*);
- c. Menghasilkan ide-ide untuk penelitian lebih mendalam dan
- d. *Cross-check* (triangulasi data) data dari sumber lain atau dengan metode lain.

Tahapan dalam FGD adalah sebagai berikut.

- a. Penggalan data dan informasi
- b. Pengelompokan
- c. Penamaan
- d. Prioritas (Konsensus)

Penambahan ide-ide inovatif yang muncul, dan sebagainya. Pada tahap penggalan informasi (*information sharing*) persepsi partisipan yang dalam FGD sering disebut sebagai narasumber sangat beragam karena pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, tahap ini adalah mencari realitas individu atau subjektif. Pada tahap pengelompokan (*clustering*) setiap partisipan sudah melakukan analisis mengenai (1) Keterkaitan antara isu, (2) Kesamaan antar isu, pada tahap ini realitas antar individu sudah mulai dilucuti lapis demi lapis maknanya. Pada saat penamaan (*naming/labelling*) analisis partisipan memasuki tahap konstruksi atau mereorganisasikan pengetahuan. Pada tahap terakhir adalah tahap pembuatan konsensus dengan menetapkan apa yang paling penting atau mendesak. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan prioritas.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan strategi kebijakan yang aplikatif adalah pendekatan matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Menurut David (2009), matriks SWOT adalah alat untuk mencocokkan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang membantu mengembangkan empat tipe strategi, yaitu: SO (*Strengths - Opportunities*), WO (*Weakness - Opportunities*), ST (*Strengths - Threats*), dan WT (*Weakness - Threats*). Strategi SO menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Strategi WT adalah taktik defensif yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Analisis SWOT digunakan untuk menghasilkan strategi yang secara bersamaan dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Pada matriks SWOT terdapat sembilan sel dengan empat sel faktor kunci, empat sel strategi dan satu sel yang dibiarkan kosong (kiri atas). Empat sel faktor kunci (S, W, O, dan T) diidentifikasi terlebih dahulu untuk mendapatkan empat sel strategi yaitu SO, WO, ST, dan WT. Matriks SWOT dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Faktor eksternal	Faktor internal	<i>Strenght (S)</i> Daftar kekuatan internal kawasan	<i>Weakness (W)</i> Daftar kelemahan internal kawasan
	<i>Opportunities (O)</i> Daftar peluang eksternal yang ada		Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
<i>Threats (T)</i> Daftar ancaman eksternal yang ada		Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 2.6. Matriks SWOT

Sumber: David (2009)

Langkah yang diperlukan dalam penyusunan matriks SWOT, antara lain:

1. Menuliskan peluang dan ancaman pada baris matriks SWOT.
2. Menuliskan kekuatan dan kelemahan pada kolom matriks SWOT.
3. Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, kemudian hasil strategi SO dituliskan ke dalam sel yang ditentukan.
4. Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, kemudian hasil strategi WO dituliskan ke dalam sel yang ditentukan.
5. Mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, kemudian hasil strategi ST dituliskan ke dalam sel yang ditentukan.
6. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, kemudian hasil strategi WT dituliskan ke dalam sel yang ditentukan.

11. Penyusunan Pra-Desain Program Prioritas Pengembangan Kawasan Perdesaan

Program prioritas pengembangan kawasan perdesaan merupakan program yang jika diimplementasikan dapat secara signifikan mendukung terwujudnya kawasan perdesaan yang mandiri dan berdaya. Program prioritas yang dibuat pra-desainnya berupa program yang terkait bidang jalan/jembatan, prasarana ekonomi, maupun permukiman.

Program tersebut juga dapat berupa infrastruktur yang mendukung pengembangan industri agribisnis sesuai kebutuhan pengembangan pusat kawasan perdesaan, misalnya revitalisasi pasar, bangunan industri pengolahan, pusat kuliner, *show room* produk hasil pengolahan (Prukades), dan lain-lain. Pra-Desain program prioritas disajikan melalui gambar-gambar teknik dan gambar skematik serta dilengkapi pula dengan visualisasi 3 dimensi.

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Bengkulu Utara

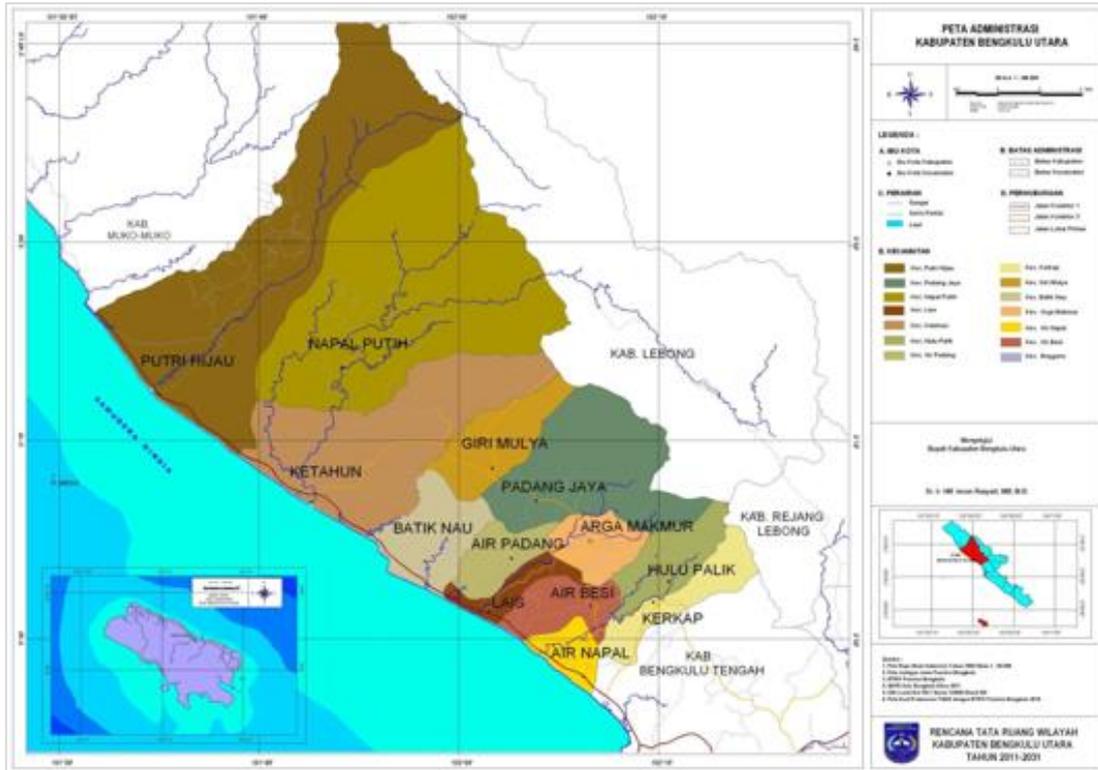


3.1. LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH ADMINISTRASI

Posisi astronomis Kabupaten Bengkulu Utara terletak posisi geografis Kabupaten Bengkulu Utara terletak antara $101^{\circ} 32'$ - $102^{\circ} 8'$ BT dan $2^{\circ}15'$ - 4° LS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu ditetapkan sebagai tiga ibukota pemerintahan yaitu sebagai ibukota provinsi, Ibukota Kotamadya Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan semakin kompleksnya permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan seiring dengan perkembangan pembangunan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976, Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara dipindahkan ke Kota Arga Makmur pada Tanggal 8 Oktober 1976.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko. Kemudian pada Tahun 2008, Kabupaten Bengkulu Utara kembali memekarkan wilayahnya yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu dan sejak saat itu pengelolaan wilayah serta Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi terpisah.

Selain wilayah daratan atau wilayah yang berada di Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki wilayah kepulauan yaitu Pulau Enggano dan Pulau Mega. Secara administratif, Pulau Enggano adalah merupakan wilayah kecamatan sendiri dengan nama Kecamatan Enggano, dengan luas wilayah 400 km, terletak di zona perairan Samudera Hindia pada posisi antara $102,05^{\circ}$ BT dan $5,17^{\circ}$ - $5,31^{\circ}$ LS. Selain Pulau Enggano dan Pulau Mega, terdapat pulau lainnya yang berada di sekitar Pulau Enggano dan terintegrasi dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari: Pulau Bangkei, Pulau Dua, Pulau Dua Kecil, Pulau Merbau, Pulau Satu, Pulau Tapakarifin, dan Pulau Tapakbalai. Sebagian besar penduduk pulau tersebut bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani kelapa. Secara ekologi, Pulau Enggano dan pulau-pulau lainnya tersebut sangat kaya dengan sumber daya alam, baik yang terdapat di daratan maupun di perairan lautnya. Di pulau tersebut terdapat dua kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam.



Gambar 3.1. Peta administrasi wilayah Kabupaten Bengkulu

3.2. FISIK DASAR

Analisis fisik dasar mencakup gambaran mengenai karakter fisik, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa. Sementara analisis keagrariaan mencakup identifikasi status kepemilikan tanah dan penguasaan lahan.

3.2.1. Iklim

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah yang mempunyai temperatur rata-rata tahunan antara 22°C - 24°C. Data jumlah curah hujan berdasarkan data BMKG Pos Arga Makmur, di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015 sampai dengan bulan Desember setiap bulannya berkisar 53-685 mm, dengan rata-rata setiap bulannya 325 mm. Pada tahun 2015 ini, curah hujan yang tinggi terjadi pada Bulan April, yaitu 685 mm dan curah hujan terendah pada Bulan September yaitu 53 mm. Ditinjau dari jumlah hari hujan, menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan bulan Desember 2013 berkisar antara 7-27 hari dengan rata-rata tiap bulannya sebanyak 17 hari. Hari hujan pada tahun 2013 sebanyak 214 kali, lebih banyak dibandingkan tahun 2012 yang sebanyak 199 kali.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmiddan Ferguson, daerah ini tergolong tipe iklim C dengan tinggi kelembaban 60-70%. Jumlah bulan basah 3,6 dan bulan kering 3,2 dengan rata-rata dimulai dari bulan Oktober dan berakhir pada bulan Juli. Keadaan demikian tentunya cukup mendukung bagi berkembangnya semua sektor kegiatan penduduk khususnya pertanian dan perkebunan. Sesuai dengan pola iklim global, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini tergolong kepada wilayah dengan Iklim Tropis Basah yang relatif tanpa musim kering (***Humid Tropical Climate with No Dry Season***), yang diberi simbol Af (sesuai dengan Kriteria Koppen serta selaras dengan klasifikasi menurut Schmid dan Ferguson

menurut Oldeman dan menurut Mohr). Rata-rata curah hujan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1. Rata-rata curah hujan Kabupaten Bengkulu tahun 2011-2015

No	Bulan	Tahun (mm)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	273	317	588	333	456	425
2	Februari	60	266	635	162	491	423
3	Maret	275	121	279	452	411	453
4	April	221	537	345	307	685	192
5	Mei	324	359	328	446	217	319
6	Juni	418	147	238	146	297	176
7	Juli	162	210	273	279	124	233
8	Agustus	157	237	160	351	200	372
9	September	341	86	499	158	53	352
10	Oktober	361	525	523	369	109	246
11	November	534	1.081	498	733	535	392
12	Desember	369	511	318	167	622	311
Total		3.495	4.397	4.684	3.903	4.200	4.125

Sumber : Kabupaten Bengkulu dalam Angka 2017

3.2.2. Topografi

Kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian dibawah 150 m dpl terdapat dibagian barat membujur searah pantai dari selatan ke utara, dibagian timur topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian 541 m dpl, sedangkan dibagian utara yang berbatasan dengan Provinsi Jambi mencapai ketinggian 2.300 m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menurut ketinggian

No	Ketinggian (m)	Luas (km ²)	%
1	0 - 100	2.187,44	50,58
2	100 - 300	901,83	20,65
3	300 - 700	597,62	13,82
4	700 - 1.200	489,99	11,33
5	> 1200	147,72	3,42
Jumlah		4.324,60	100

Sumber : Kabupaten Bengkulu Utara dalam Angka 2017

Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada umumnya merupakan tanah bergelombang yang ditandai dengan adanya bukit-bukit yang memiliki ketinggian yang bervariasi. Daerah datar dengan ketinggian 10-150 meter di atas permukaan laut (dpl) terdapat dibagian pantai barat yang terbentang dari selatan ke utara. Sedangkan dibagian timur merupakan daerah yang berbukit dengan ketinggian rata-rata 541 meter dpl. Kondisi topografi merupakan faktor utama yang paling besar pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Ketinggian yang dimaksud adalah ketinggian lahan yang dinyatakan dalam meter.

Kabupaten Bengkulu Utara didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0-100 meter diatas permukaan laut (dpl) yaitu sebanyak 50,58% atau dengan total luas 2.187,44 km

Selanjutnya, ketinggian yang dominan lainnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah ketinggian mencapai 100-300 meter seluas 901,83 km² atau sekitar 20,85%.

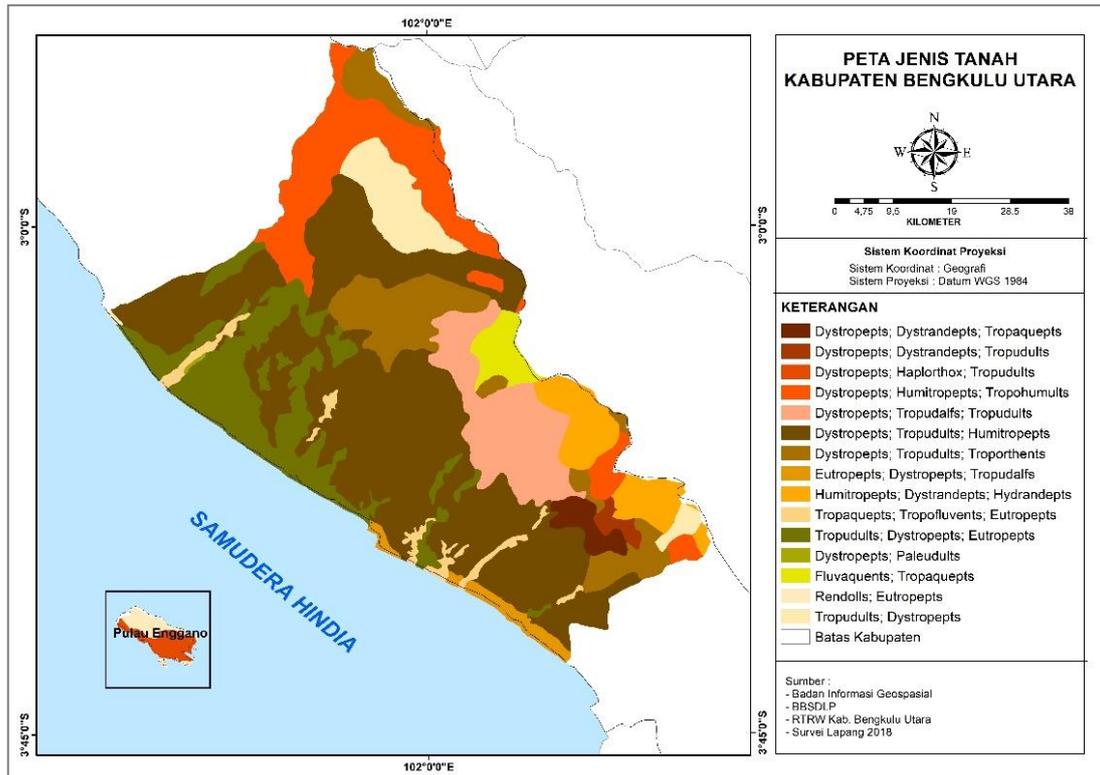
3.2.3. Jenis Tanah

Kondisi tanah di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari beberapa jenis tanah, dari luas wilayah 4.472,22 km². Jenis tanah dominan yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara adalah Dystropepts, Tropudults, Humitropepts dan Dystrandepsts. Peta jenis tanah yang tersedia untuk Kabupaten Bengkulu Utara adalah skala tinjau, sehingga penamaan jenis tanahnya bersifat asosiasi. Jenis tanah Dystropepts tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten, sedangkan jenis Tropudults tersebar di sebelah barat Kabupaten Bengkulu. Jenis tanah lainnya tersebar ke arah timur dan utara. Jenis tanah Dystropepts tergolong jenis tanah dengan tingkat perkembangan lanjut, memiliki sifat agak masam, tekstur tanah lempung dan agak lekat, tingkat kesuburan rendah hingga sedang. Tanah jenis Tropudults tergolong jenis tanah dengan tingkat perkembangan sangat lanjut, memiliki sifat masam, tekstur tanah berliat dan lekat, tingkat kesuburan rendah hingga sedang. Jenis tanah lainnya tingkat kesuburan tanahnya relatif rendah hingga tinggi. Adapun sebaran jenis tanah di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dapat di lihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menurut ketinggian

Asosiasi tanah	Luas (ha)	%
Dystropepts; Dystrandepsts; Tropaquepts	5.785,40	1,29
Dystropepts; Dystrandepsts; Tropudults	2.708,26	0,61
Dystropepts; Haplorthox; Tropudults	23.227,40	5,19
Dystropepts; Humitropepts; Tropohumults	48.299,56	10,80
Dystropepts; Tropudalfs; Tropudults	34.500,66	7,71
Dystropepts; Tropudults; Humitropepts	163.270,93	36,51
Dystropepts; Tropudults; Troporthents	39.389,76	8,81
Eutropepts; Dystropepts; Tropudalfs	5.790,18	1,29
Humitropepts; Dystrandepsts; Hydrandepsts	20.107,68	4,50
Tropaquepts; Tropofluvents; Eutropepts	7.912,63	1,77
Tropudults; Dystropepts; Eutropepts	52.105,05	11,65
Rendolls; Eutropepts	16.316,87	3,65
Tropudults; Dystropepts	19.740,24	4,41
Dystropepts; Paleudults	276,11	0,06
Fluvaquents; Tropaquepts	7.794,20	1,74
Jumlah	447.224,93	100

Sumber : BBSDLP



Gambar 3.2. Peta jenis tanah Kabupaten Bengkulu Utara

Tanah untuk pertumbuhan tanaman pertanian memiliki minimal empat faktor yang dapat mempengaruhi dalam kegiatan pertanian terutama untuk pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam, faktor-faktor tersebut adalah jenis tanah, tekstur tanah, pH tanah, dan warna tanah.

3.2.4. Penutupan Lahan dan Status Kawasan

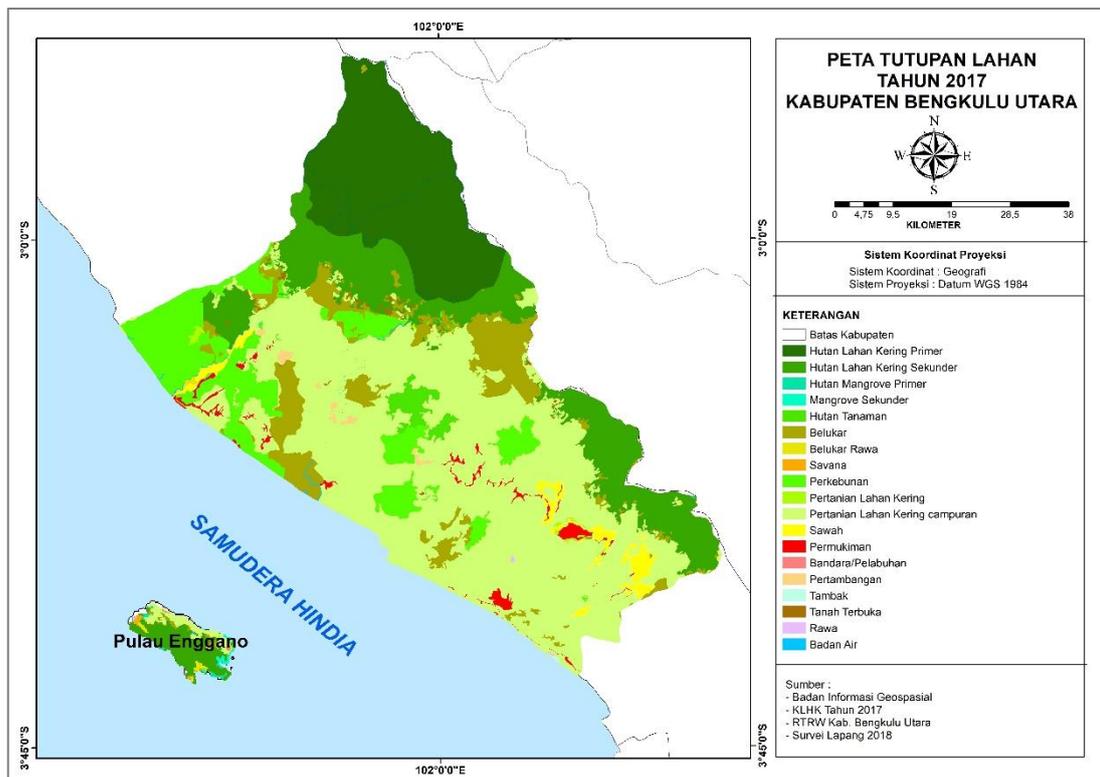
Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan, telah terjadi penggunaan lahan yang melalui prosedur administrasi untuk kepentingan pembangunan lahan terbangun dan non terbangun. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkulu Utara masih didominasi oleh hutan, lahan budidaya pertanian, semak/belukar dan hanya sebagian kecil terdiri dari lahan-lahan yang terdegradasi. Kondisi hutan sebagian besar terdapat di kawasan pegunungan dengan kemiringan lahan di atas 25%, sedangkan pada daerah tengah sebagian terdiri dari hutan bekas terbangun. Tutupan lahan hutan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara meliputi: hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan tanaman. Luas tutupan dominan adalah pertanian lahan kering campur semak yaitu sebesar 386.912,29 ha atau 39,90 % dari luas kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 3.4. Luas sebaran tutupan lahan Kabupaten Bengkulu Utara

Tutupan Lahan	Luas (ha)	%
Hutan lahan kering primer	67.685,24	13,74
Hutan lahan kering sekunder / bekas terbangun	89.431,72	18,15
Hutan mangrove primer	772,97	0,16
Hutan mangrove sekunder / bekas terbangun	1.068,31	0,22
Hutan tanaman	4.810,28	0,98

Tutupan Lahan	Luas (ha)	%
Semak belukar	83.476,70	16,94
Semak belukar rawa	1.346,27	0,27
Savanna / Padang rumput	467,92	0,09
Pertanian lahan kering	1.308,36	0,27
Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	183.839,85	37,31
Lahan terbuka	956,42	0,19
Perkebunan / Kebun	43.996,07	8,93
Sawah	6.809,64	1,38
Permukiman / Lahan terbangun	5.406,87	1,10
Pertambangan	1.168,94	0,24
Bandara / Pelabuhan	40,19	0,01
Rawa	105,14	0,02
Tambak	56,89	0,01
Jumlah	492.747,78	100

Sumber: KLHK, 2017



Gambar 3.3. Peta tutupan lahan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017

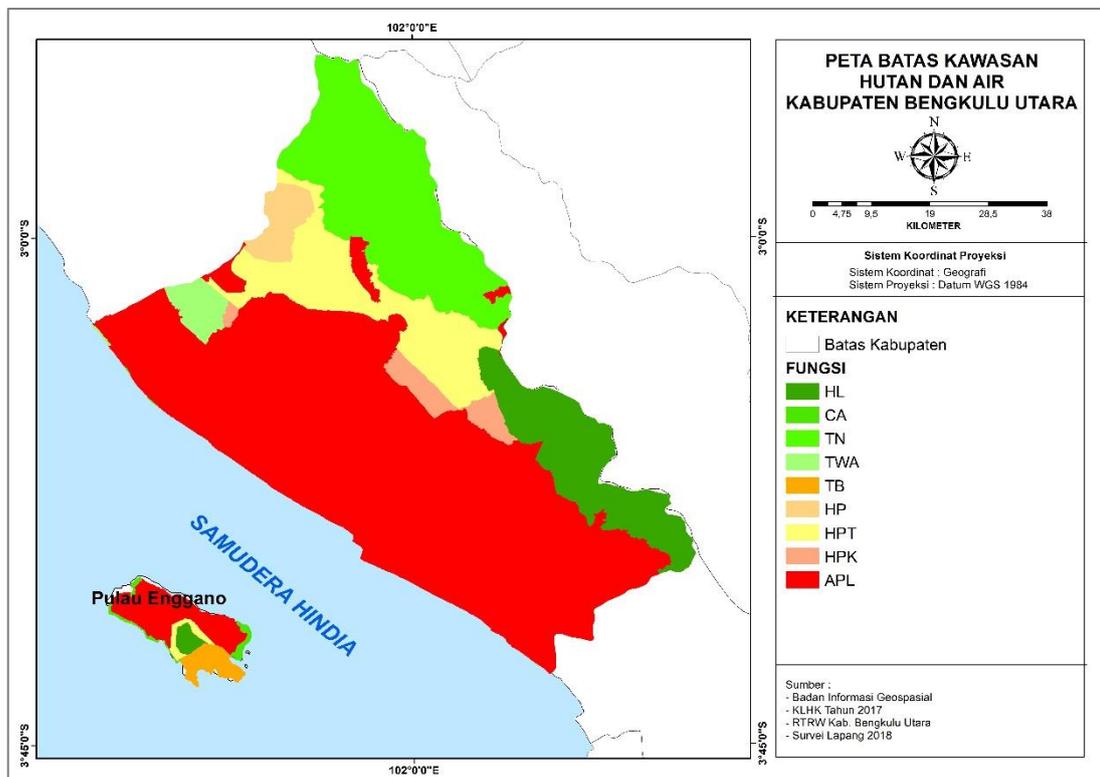
Berdasarkan peta kawasan hutan dan konservasi perairan (SK. Menhut Nomor: 869/Menhut-II/2014), fungsi kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas: Fungsi hutan lindung (HL), Cagar Alam (CA), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), Tahura, Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Taman Bermain (TB) dan Areal Penggunaan Lain (APL). Luas dominan terdapat pada kawasan APL yaitu sebesar 53,77 % dari total luas Kabupaten Bengkulu Utara. Luas kawasan yang bertutupan vegetasi hutan dominan terdapat pada kawasan taman nasional,

yaitu sebesar 22,44 %. Luas serta sebaran kawasan hutan Kabupaten Bengkulu Utara tersaji pada Tabel 3.5 dan Gambar 3.4.

Tabel 3.5. Luas sebaran batas kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Utara

Fungsi kawasan	Luas (ha)	%
APL	258.447,79	57,70
CA	2.559,29	0,57
HL	40.490,77	9,04
HP	8.431,91	1,88
HPK	8.877,25	1,98
HPT	44.977,89	10,04
TB	7.727,61	1,73
TN	69.825,62	15,59
TWA	6.550,30	1,46
Jumlah	447.888,43	100,00

Sumber: KLHK, 2017



Gambar 3.4. Peta sebaran batas kawasih hutan di Kabupaten Bengkulu Utara

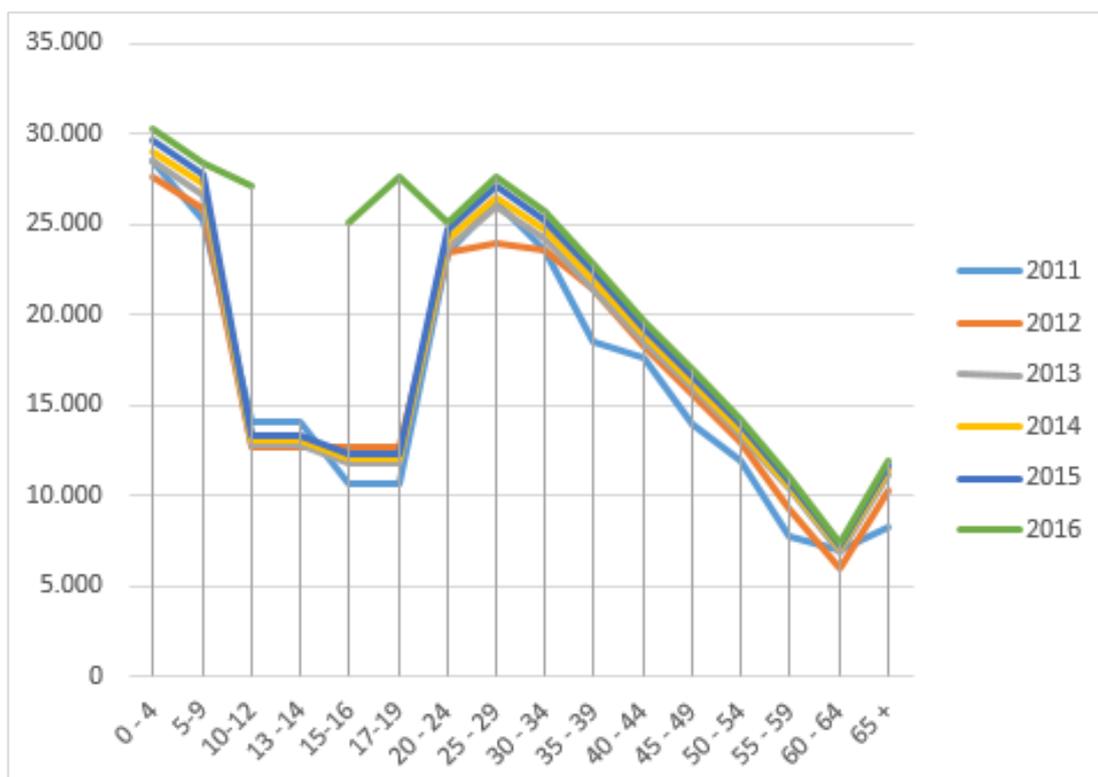
3.3. KEPENDUDUKAN

Dalam periode 2011 sampai dengan 2016 kondisi penduduk Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan adanya tingginya angka ketergantungan yaitu sebesar 53,47% pada Tahun 2010 menjadi 49,91% pada Tahun 2014. Sedangkan dari struktur umur didominasi usia kurang dari 10 tahun dan antara 20 tahun sampai dengan 45 Tahun sebagai mana ditunjukkan pada Tabel 3.6 dan Gambar 3.5 berikut.

Tabel 3.6. Struktur penduduk Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan kelompok umur tahun 2011-2016

Kelompok umur	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 4	28.521	27.668	28.473	29.073	29.662	30.243
5 - 9	25.269	25.856	26.664	27.227	27.783	28331
10-12	14.075	12.740	12.756	13.027	13.292	27.110
13 -14	14.075	12.740	12.756	13.027	13.292	
15-16	10.669	12.653	11.814	12.060	12.303	25.084
17-19	10.669	12.653	11.814	12.060	12.303	27.603
20 - 24	23.398	23.443	23.696	24.181	24.655	25.124
25 - 29	26.219	23.923	25.996	26.540	27.075	27.603
30 - 34	23.607	23.604	24.166	24.682	25.189	25.689
35 - 39	18.543	21.464	21.475	21.935	22.387	22.833
40 - 44	17.662	18.223	18.512	18.905	19.291	19.672
45 - 49	13.972	15.556	15.946	16.284	16.617	16.944
50 - 54	11.903	12.894	13.340	13.625	13.905	14.179
55 - 59	7.738	9.290	10.358	10.579	10.797	11.012
60 - 64	6.991	5.995	6.904	7.055	7.203	7.349
65 +	8.309	10.220	11.189	11.440	11.686	11.926
Jumlah	261.620	268.921	275.858	281.699	287.439	293.099

Sumber : Kabupaten Bengkulu Utara dalam Angka 2017



Gambar 3.5. Diagram struktur penduduk Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan kelompok umur tahun 2011-2016

3.4. SOSIAL BUDAYA

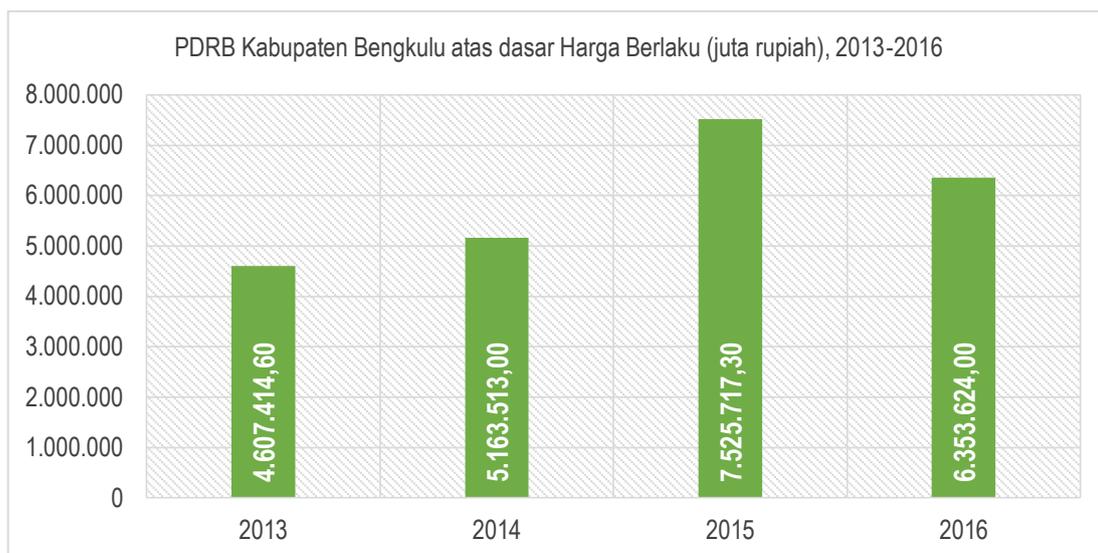
Kabupaten Bengkulu Utara salah satu kabupaten yang mempunyai daerah pemukiman transmigrasi yang paling besar di Bengkulu. Adapun lokasi transmigrasi tersebut yaitu, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Putri Hijau. Maka tidaklah heran kalau bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa yang paling didengar selain bahasa Rejang yang merupakan suku asli setempat. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara sangat dipengaruhi oleh adanya kegiatan perdagangan dan jasa yang banyak menyerap tenaga kerja. Terutama di Kecamatan Arga Makmur, Lais, Ketahun dan Padang Jaya. Hal ini mengindikasikan semakin pesatnya pertumbuhan pusat-pusat kegiatan perkotaan, seperti perdagangan dan jasa, sehingga penduduk yang semula bermukim di pusat kegiatan akan bergeser ke wilayah yang agak jauh dari pusat kota, sebagai akibat adanya alih fungsi penggunaan lahan dari tempat tinggal menjadi perdagangan dan jasa.

Masih banyaknya penduduk miskin yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, merupakan salahsatu kendala dalam melaksanakan pembangunan, karena penduduk miskin ini perlu perhatian khusus. Ada lagi salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara yang letaknya cukup jauh, yaitu Kecamatan Enggano. Kecamatan Enggano terletak di Pulau Enggano yang jaraknya memakan waktu 12 jam perjalanan laut. Tidak setiap hari kapal yang berlabuh di Enggano, satu-satunya kapal ferry yang berlayar adalah kapal Raja Enggano, yang berlayar 1 kali dalam seminggu, itupun tergantung cuaca, sehingga kalau cuaca buruk maka dalam beberapa bulan penduduk Enggano akan mengalami kesulitan.

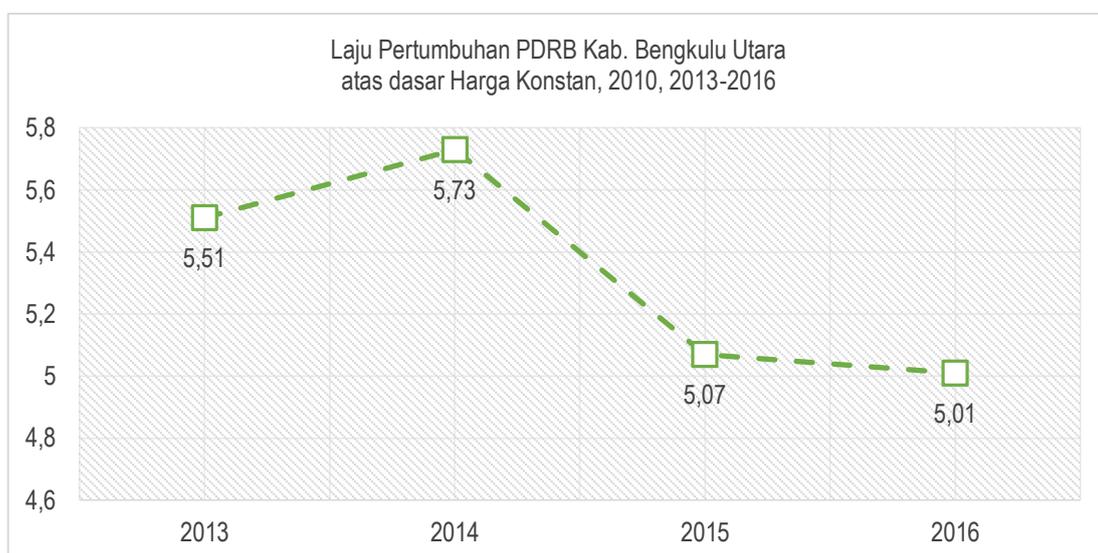
3.5. PEREKONOMIAN WILAYAH

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2016 PDRB Kabupaten Bengkulu Utara atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp 6.353.624,- juta, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 4.514.802,3,- juta. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016 atas dasar harga berlaku telah mengalami perkembangan sebesar 10,96 %, sedangkan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016 atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 %.

Peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara hingga tahun 2016 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai *leadingsector* dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Utara atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp 2.531.615,3,- juta dan peranannya dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 39,85 %. Kemudian diikuti sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp 647.836,5,- juta dengan peran sebesar 10,20 %.



Gambar 3.6. Grafik PDRB Kab. Bengkulu Utara atas dasar harga berlaku (juta rupiah), 2013-2016



Gambar 3.7. Grafik laju pertumbuhan PDRB Kab. Bengkulu Utara atas dasar harga konstan, 2010, 2013-2016

Tabel 3.7. PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kab. Bengkulu Utara (juta rupiah), 2013-2016

No	Lapangan usaha	2013	2014	2015*	2016**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.965.762,50	2.171.207,20	2.356.254,70	2.531.615,30
2	Pertambangan dan Penggalian	503.898,90	585.943,40	615.585,20	647.836,50
3	Industri Pengolahan	385.014,30	443.081,20	495.804,80	556.098,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.061,70	2.612,20	3.233,60	4.269,50
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	9.203,80	9.418,00	10.385,20	11.417,90
6	Konstruksi	181.523,50	203.016,30	235.560,70	272.891,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	364.363,20	413.985,30	472.109,20	556.971,10
8	Transportasi dan Pergudangan	96.168,70	106.324,30	121.835,20	137.200,80

No	Lapangan usaha	2013	2014	2015*	2016**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29.441,00	33.685,20	40.219,00	48.633,90
10	Informasi dan Komunikasi	92.204,10	102.241,30	110.368,00	120.111,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	168.890,60	186.439,60	215.649,10	252.689,10
12	Real Estate	128.742,80	144.214,40	160.421,50	180.049,20
13	Jasa Perusahaan	5.414,10	6.049,90	7.013,50	7.948,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	349.326,80	390.960,20	465.689,30	548.412,00
15	Jasa Pendidikan	259.827,50	289.952,80	326.715,00	371.561,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46.405,00	52.633,50	62.870,60	74.741,60
17	Jasa Lainnya	19.166,30	21.748,30	26.002,70	31.167,40
Jumlah		4.607.414,80	5.163.513,10	5.725.717,30	6.353.615,00

Keterangan : *Angka sementara

**Angka sangat sementara

3.6. KONDISI INFRASTRUKTUR

Infrastruktur fisik adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Kondisi infrastruktur adalah gambaran kondisi fisik wilayah terkait regulasi arus barang dan atau jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana fisik.

3.6.1. Jalan dan Jembatan

Indikator keberhasilan sebuah pemerintahan, salah satunya dapat dinilai dari baik tidaknya infrastruktur yang ada, karena keberadaan infrastruktur di suatu daerah, utamanya sarana transportasi, berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Jika kondisi infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan baik, maka para pengguna jalan dan jembatan tersebut akan merasa aman dan nyaman. Berdasarkan hasil kinerja capaian panjang jalan di Kabupaten Bengkulu tergolong baik, karena rasio antara kualitas jalan yang tergolong baik-sedang dibanding panjang seluruh jalan di Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 63,32 %.

Namun jika melihat kondisi infrastruktur jalan dan jembatan *eksisting* di Kabupaten Bengkulu Utara masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Berdasarkan data dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Utara, dari panjang ruas jalan 1.526 km (kewenangan Provinsi Bengkulu), 1.200 km berada dalam kondisi rusak parah. Ini yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperbaiki kondisi ini.

3.6.2. Sarana Transportasi

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan penting demi memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi penduduk antar

daerah dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau dan terisolir. Pada tahun 2016, panjang jalan kabupaten di Kabupaten Bengkulu Utara adalah sepanjang 595.770 km. Sebesar 29,87 persen atau 178,00 km merupakan jalan aspal, 6,49 persen atau 38,66 km merupakan jalan koral (kerikil), dan 5,34 persen atau 31,87 km merupakan jalan tanah dan jenis jalan yang tidak dirinci sebesar 58,28 persen atau 347,24 km. Dari panjang jalan tersebut 29,87 persen kondisi jalannya baik dan yang lainnya beraneka kondisi jalan.

Sarana transportasi yang berkembang di Kabupaten Bengkulu Utara adalah angkutan darat meliputi bus, minibus, bajaj, kendaraan roda 2. Selain itu juga sudah terdapat pengangkutan laut dan pengangkutan udara.

3.6.3. Air Bersih

Pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan oleh PDAM Tirta Ratu Samban sampai dengan Tahun 2008, meliputi wilayah Kecamatan (Arga Makmur, Lais, Air Napal, Pondok Kelapa, Kerkap, Air Besi, Padang Jaya, Putri Hijau, Ketahun, Karang Tinggi, Talang Empat dan Taba Penanjung, sedangkan sejak Tahun 2009 wilayah pelayanannya meliputi kecamatan Arga Makmur, Lais, Air Napal, Kerkap, Air Besi, Putri Hijau dan Ketahun. Sumber-sumber air baku PDAM di Kabupaten Bengkulu Utara meliputi air permukaan (sungai) dan mata air. Selain dari PDAM Tirta Ratu Samban pelayanan air bersih untuk masyarakat Bengkulu Utara juga dilayani melalui pengelolaan air bersih secara swadaya yang programnya melalui program CWSHP.

Sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini disuplai dari sumber-sumber air permukaan (90%) dengan kapasitas produksi total 125 liter/detik. Jumlah produksi air lebih kurang 3.565.400 m³/tahun, sedang yang didistribusikan lebih kurang 3.228.400 m³/tahun, serta tingkat kehilangan air sebesar 23%. Sistem penyediaan air bersih yang dikelola oleh PDAM 14 unit, saat ini melayani 16% masyarakat. Jumlah pelanggan total di Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebanyak 9.188 unit SR dimana 90% adalah pelanggan rumah tangga, sedang selebihnya berturut-turut adalah kelompok sosial (2%), instansi pemerintah (2%), niaga (2%), industri (2%), dan selebihnya adalah kelompok umum (2%).

3.6.4. Sanitasi

Pengumpulan dan pengangkutan dilakukan menggunakan pola individual, pengumpulan dari rumah ke rumah langsung di buang ke TPA dengan "pick up" atau "dump truck" pola lain adalah pola individual tidak langsung. Pengumpulan dengan gerobak "pick up", dipindah ke truck pengangkut ke TPA. Pola komunal langsung sampah diambil pada lokasi pengumpulan komunal seperti TPS, pengangkutan ke TPS dilakukan oleh petugas sampah kemudian dibuang ke TPA. Pola komunal tidak langsung, sampah dikumpulkan dari sumber sampah dengan gerobak dipindah ke TPS dan dari TPS dibawa ke TPA. Dalam pemindahan sampah terjadi kegiatan-kegiatan pemindahan dari TPS atau container ke depo, dan kegiatan pengurangan volume, seperti pengomposan dan pengambilan material yang masih berguna. Pengumpulan sampah langsung dilakukan pada pengumpulan sampah jalan, taman, tempat rekreasi dan wisata serta lapangan olah raga.

Di Kota Arga Makmur sarana kebersihan terdiri dari fasilitas pengangkutan (truk, gerobak dorong, gerobak motor, kontainer, TPS, depo dan transito). Jumlah kontainer sebanyak 6 buah, Gerobak sebanyak 12 buah, Bak Sampah (TPS) sebanyak 9 buah.

Sarana angkutan terdiri atas “*dump truck*” 5 unit dan armrol sebanyak 2 unit. Tempat Pembuangan Akhir berada di TPA Rama Agung.

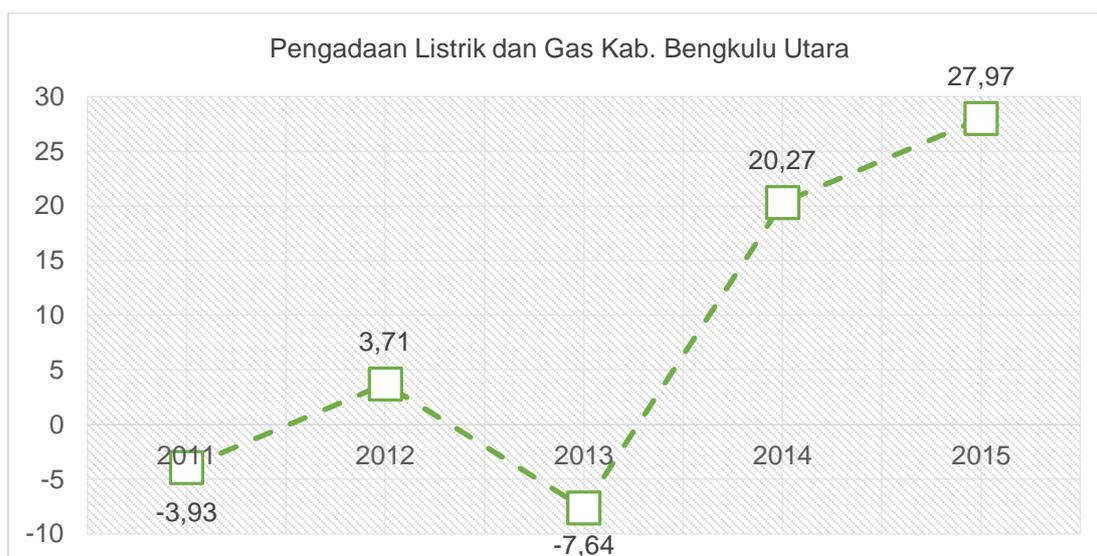
Membuang limbah air mandi, cuci dan dapur langsung ke saluran drainase masih sering dijumpai. Tanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas sanitasi setempat berada pada tingkat keluarga. Untuk menghemat biaya, masyarakat sering melibatkan diri dalam pembangunan fasilitas tersebut.

Di bawah ini beberapa kondisi *eksisting* pelayanan sanitasi di Kabupaten Bengkulu Utara:

- Pembuangan limbah domestik di Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar (80%) dibuang melalui septik tank (milik sendiri). Sedangkan sisanya 20 % dilakukan melalui lobang tanah, sungai, dan lain-lain.
- Untuk pelayanan penyedotan lumpur tinja, Kabupaten Bengkulu Utara belum memiliki truk penyedotan tinja.

3.6.5. Jaringan Energi Listrik

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,06 persen terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2015. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2015 adalah sebesar -3,09 persen jauh sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,81 persen.



Gambar 3.8. Peran sektor pengadaan listrik dan gas berdasarkan PDRB harga berlaku Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2011-2015

Pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan listrik di Kabupaten Bengkulu Utara terus diupayakan melalui peningkatan kinerja pembangkit listrik tenaga diesel yang telah ada, interkoneksi dengan PLTA Tes maupun PLTA Musi. Selain itu, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga sudah dipersiapkan untuk dibangun di Kecamatan Putri Hijau dengan nilai investasi sebesar Rp.138 Miliar.

Pelaksanaan pembangunan kelistrikan di Kabupaten Bengkulu Utara mulai Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu: program penambahan jaringan listrik masuk desa melalui pembangunan jaringan listrik pedesaan baik dari APBD Kabupaten maupun melalui UPT Listrik

Pedesaan PT. PLN, pembangunan PLTS baik tersebar maupun terpusat, termasuk pembangunan PLTMH. Sampai dengan tahun 2015 telah dilakukan pembangunan PLTS terpusat di 2 (dua) desa pada Kecamatan Enggano. Selain itu, persiapan pembangunan PLTU Seblat yang berlokasi di Kecamatan Putri Hijau dengan kapasitas pembangkit 6 MW akan segera dimulai.

Terlepas dari kedua faktor tersebut, bahwa pada umumnya setiap penduduk yang hidup di zaman yang semakin modern ini dipastikan membutuhkan pelayanan listrik dalam melakukan setiap aktivitasnya sehingga pihak PLN perlu meningkatkan pelayanannya pada masa-masa mendatang.

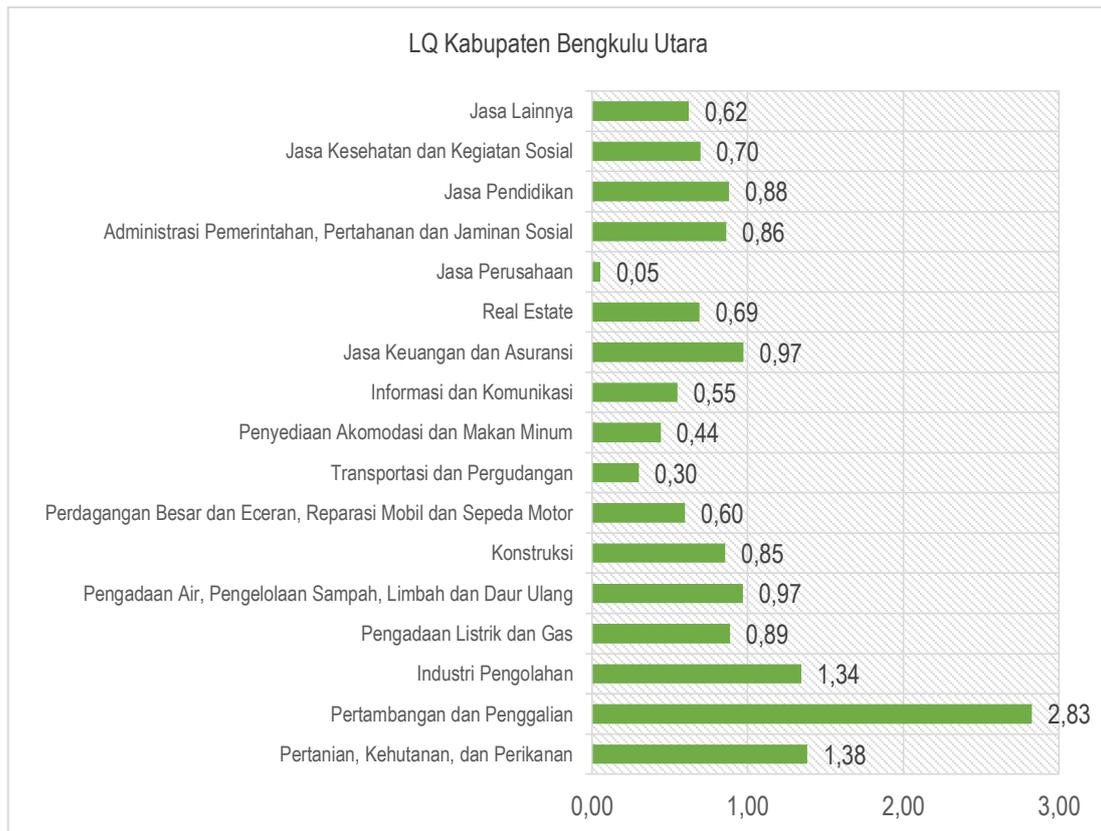
Dilihat secara keseluruhan, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkulu Utara telah terlayani listrik. Namun bila dilihat perkecamatan, masih ada kecamatan yang masih minim mendapat pelayanan listrik yaitu Kecamatan Enggano. Dari 6 Desa yang ada di Kecamatan Enggano, baru Desa Banjarsari yang mendapatkan pelayanan listrik melalui PLTS terpusat yang dibangun tahun 2014, dan pada tahun 2015 ini direncanakan pembangunan PLTS terpusat di desa Kahyapu. Walaupun demikian secara bertahap dan terukur, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan semaksimal mungkin melakukan percepatan pemenuhan pelayanan listrik di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara termasuk di Pulau Enggano.

Walaupun demikian, kendala dan permasalahan utama sektor ini adalah keterbatasan ketersediaan daya listrik yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara termasuk oleh pelaku usaha yang ada.

3.7. POTENSI WILAYAH

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar kedua dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), setelah sektor pertambangan dan penggalian. Namun, sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor yang berbasis sumberdaya yang sifatnya *nonrenewable resources* (tidak dapat diperbarukan), sehingga tidak dapat diandalkan keberlanjutannya untuk masa yang akan datang. Berbeda halnya dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sangat potensial untuk terus dikembangkan di masa yang akan datang. Cakupan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi subsektor tanaman pangan dan palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Gambar 3.9 menunjukkan hasil analisis keunggulan komparatif (analisis *Location Quotient*) antar sektor dengan menggunakan data PDRB Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai LQ tertinggi kedua, yaitu sebesar 1,38. Nilai LQ sektor ini lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan dibandingkan sektor lainnya.



Gambar 3.9. Hasil Analisis LQ Antar Sektor di Kabupaten Bengkulu Utara

3.7.1. Pertanian Tanaman Pangan

Komoditas yang tetap menjadi andalan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah tanaman pangan, utamanya padi ladang dan padi sawah. Dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki angka produksi padi tertinggi dengan luas tanam padi yang tinggi juga. Tanaman bahan makanan memiliki kontribusi besar dalam pertanian dan memiliki peran yang sangat strategis dalam kaitannya dengan ketahanan pangan daerah. Meskipun demikian, kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Secara riil, hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya tingkat konversi lahan dari lahan tanaman pangan menjadi lahan non tanaman pangan, khususnya tanaman perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan milik perusahaan besar swasta. Sementara kecenderungan petani melakukan konversi lahan tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha tani tanaman pangan. Terjadinya konversi pada lahan sawah beririgasi teknis, terutama disebabkan tidak tercukupinya air irigasi secara memadai dan berkelanjutan, serta tingginya gangguan hama penyakit tanaman. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah hal mendesak dalam rangkaantisipasi konversi lahan tersebut serta dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara di masa yang akan datang.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan antara lain, dengan pemberian bantuan benih/bibit, perbaikan infrastruktur pertanian, Penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi), peningkatan kemampuan SDM petani dan aparaturn pertanian, penyediaan permodalan serta perbaikan sistem pemasaran hasil pertanian khususnya tanaman pangan.

Sistem pemasaran hasil pertanian khususnya tanaman pangan. Tanaman Bahan Makanan meliputi padi, palawija, merupakan kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Produksi padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 sebesar 127.335,76 ton Gabah Kering Panen (GKP) dari Hasil panen areal seluas 25.234 ha. Sedangkan produksi palawija mencapai 12.448,37 ton dari hasil areal seluas 3.806 ha. Padi merupakan tanaman pokok bagi petani.

Tanaman palawija yang diusahakan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Tanaman palawija yang banyak diusahakan petani adalah tanaman jagung. Dengan luas panen 1.628 ha, produksi tanaman jagung pada Tahun 2016 sebesar 8.211,20 ton. Untuk produksi palawija berfluktuasi. Hal ini disebabkan petani menanam tanaman palawija sangat dipengaruhi oleh harga dan kondisi cuaca, sehingga petani akan memilih tanaman yang cocok dan menguntungkan secara ekonomis pada kondisi tersebut. Pada umumnya tanaman ini ditanam dilahan bukan sawah (lahan kering). Perkembangan Produksi padi dan palawija disajikan pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8. Perkembangan komoditas tanaman pangan tahun 2012-2015 di Kabupaten Bengkulu Utara

No	Jenis komoditas	Produksi (ton/tahun)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi sawah	90.731,07	103.561,04	103.561,04	75.486,87	124.383,66
2	Padi ladang	6.816,70	3.908,50	4.535,10	1.865,57	2.952,10
3	Jagung	13.451,90	5.732,30	6.776,94	8.291,21	8.211,20
4	Ubi kayu	4.095,90	2.464,60	2.823,00	3.672,60	2.271,70
5	Ubi Jalar	4.036,90	2.915,10	4.007,90	2.758,90	1.987,20
6	Kacang tanah	3.231,50	1.694,00	1.938,12	2.780,06	1.081,70
7	Kacang hijau	209,83	272,70	248,12	190,02	145,39
8	Kedelai	197,00	210,70	96,90	1.275,37	1.022,88

Sumber : Dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, 2017

3.7.2. Perkebunan

Bidang Perkebunan juga memiliki kontribusi yang besar dalam struktur perekonomian di Kabupaten Bengkulu Utara dengan komoditi yang dominan adalah sawit dan karet. Perkebunan yang dikelola terbagi dalam perkebunan perusahaan swasta dan perkebunan rakyat. Dari 4.324,6 km² luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 19,29% adalah lahan tanaman perkebunan. Meskipun luasnya relatif kecil, namun telah memberikan kontribusi yang besar dalam rangka menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun luas tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara dirinci pada Tabel 3.9 sebagai berikut.

Tabel 3.9. Luas tanaman perkebunan rakyat, produksi dan petani di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016

No	Komoditas	Luas areal (ha) / Kondisi (2015)				Produksi (kg) s/d Triwulan (2015)		Wujud produksi	Jumlah petani (KK) pemilik
		TBM	TM	TTM/TR	Jumlah	Jumlah	Rata-rata (kg/ha/bln)		
1	Kelapa sawit	10.659,97	24.710,75	1.535,75	36.906,47	324.844.940,00	1095	TBS	22.756
2	Karet	7.311,20	22.182,65	3.369,55	32.863,40	41.663.302,00	157	Karet kering	24.649
3	Kopi robusta	685,00	3.896,75	1.112,75	5.694,50	3.840.325,00	82	Biji kering	5.136
4	Kopi Arabika	73,95	272,40	385,05	731,40	282.212,00	86	Biji kering	593

No	Komoditas	Luas areal (ha) / Kondisi (2015)				Produksi (kg) s/d Triwulan (2015)		Wujud produksi	Jumlah petani (KK) pemilik
		TBM	TM	TTM/TR	Jumlah	Jumlah	Rata-rata (kg/ha/bln)		
5	Kakao	406,25	3.477,25	75,00	3.958,50	3.875.705,00	93	Biji kering	6.209
6	Kelapa dalam	569,00	1.721,65	158,35	2.449,00	2.350.166,00	114	Kopra	16.815
7	Lada	29,25	17,00	7,75	54,00	20.016,00	98	Lada kering	214
8	Cengkeh	39,13	46,00	2,38	87,51	23.000,00	48	Bunga kering	262
9	Aren	0,50	0,50		1,00	4.800,00	800	Gula merah	1
10	Kayu manis	7,37	1,13	6,00	14,50	2.160,00	160	Kulit kering	87
11	Pinang	96,63	151,97	14,90	263,50	72.247,00	40	Biji kering	3.222
12	Kapuk	16,90	13,55	6,65	37,10	6.456,00	40	Serat biji	352
13	Kemiri	7,63	5,00	4,00	16,63	16.032,00	267	Inti kemiri	193
14	Vanili		1,00		1,00	468,00	39	Polong kering	8
15	Pala	117,75			117,75			Biji pala basah	513
16	Jarak pagar							Biji kering	
Jumlah		20.020,53	56.497,60	6.678,13	83.196,26	377.001.829,00	3.119,00		81.010,00

Sumber : Dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, 2017

Dalam pengembangan usaha perkebunan rakyat, peran unit-unit pembibitan kecil (UPK) sangat penting dalam penyediaan bibit unggul tanaman perkebunan. Pada Tahun 2015 Unit Pembibitan Kecil (UPK) tidak berlaku lagi sesuai dengan permentaan No. 50 Tahun 2015 namanya diganti produsen benih tanaman karet yaitu Jaya Mandiri Lokasi Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya.

Investasi swasta di bidang perkebunan di merupakan yang dominan dalam menggerakkan perekonomian, baik untuk budidaya maupun pengolahan. Sampai dengan Tahun 2016 terdapat sebanyak 26 Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang terdiri dari 20 Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan komoditi kelapa sawit, 4 Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan komoditi karet dan 3 Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang khusus membuka pabrik CPO, dengan luas Izin yang sudah dikeluarkan mencapai 74.897,49 ha.

Sedangkan investasi dalam pengolahan produk perkebunan, sebelum Tahun 2006 hanya terdapat satu pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi CPO (*crude palm oil*) dengan kapasitas 45 ton per jam tandan buah segar (TBS). Namun hingga Tahun 2014 terdapat 6 pabrik CPO dengan kapasitas keseluruhan 270 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam, dan 1 pabrik lagi dengan kapasitas 45 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam sedang dalam proses pembangunan. Apabila 7 pabrik CPO tersebut seluruhnya telah beroperasi, maka di Kabupaten Bengkulu Utara akan memiliki kapasitas keseluruhan maksimal sebesar 315 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam.

Meskipun demikian, keseluruhan kapasitas pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut masih belum mampu secara optimal menampung produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari PBS dan kebun rakyat. Hal ini ditambah dengan masuknya TBS dari kabupaten lain di sekitar Kabupaten Bengkulu Utara. Keterbatasan kapasitas tersebut telah

mengakibatkan lemahnya posisi tawar petani kebun sawit dalam hal harga produksi sehingga menyebabkan rendahnya tingkat harga TBS di tingkat petani.

Permasalahan dalam rangka pengembangan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah harga yang masih relatif rendah bila dibandingkan dengan harga kelapa sawit di beberapa provinsi lain di Sumatera. Selain itu, produktivitas perkebunan rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara juga masih relatif rendah dibandingkan daerah lain, yang antara lain disebabkan oleh banyak faktor seperti, masih sulitnya memperoleh sarana produksi, terutama pupuk dan bibit bermutu, serta masih rendahnya kualitas infrastruktur transportasi di sentra-sentra perkebunan rakyat, yang mengakibatkan tingginya biaya transportasi yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya pendapatan petani kebun kelapa sawit.

3.7.3. Perikanan

Dengan panjang pantai 239,1 km dan sumber daya air yang tersedia, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi yang besar dalam pengembangan subsektor perikanan, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan PDRB harga berlaku, bahwa peran subsektor perikanan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 perannya sebesar 8,16% namun pada tahun 2014 turun menjadi 7,95%. Kondisi ini diakibatkan dampak pelambatan ekonomi global, disamping perubahan regulasi nasional terutama perikanan tangkap. Selain itu disebabkan dalam pembangunan subsektor perikanan masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Sementara kegiatan pembangunan yang sifatnya peningkatan kapasitas individual maupun kelompok khususnya nelayan dan petani ikan melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusia serta penyediaan permodalan masih relatif kecil. Pembangunan tersebut diharapkan berdampak positif untuk beberapa tahun ke depan.

Dalam hal perikanan budi daya, sentra produksinya yaitu di sekitar wilayah Kecamatan Kerkap, Kecamatan Arga Makmur dan Kecamatan Padang Jaya masih berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Jumlah Luas Lahan Menurut Jenis Usaha Budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010-2015 sebagaimana pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10. Jumlah luas lahan menurut jenis usaha budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2011-2016

No	Jenis usaha budidaya	Potensi lahan (ha)	Luas lahan yang sudah dimanfaatkan (ha)					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
A Benih								
1	Balai benih ikan (BBI)	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
2	Unit Pembenuhan rakyat	500	35,5	37,76	40,21	42,37	47,17	513,1
Sub jumlah		513,1	48,6	50,86	53,31	55,47	60,27	526,2
B Pembesaran								
1	Tambak	400	10		10	10	11,21	54,62
2	Kolam	5.437,24	1.123,40	1.125,50	1.200,00	1.217,80	1.293,73	1.482,42
3	Keramba	356	1,4					
4	Sawah	890	570,6	574,5	574,5	487,1		
5	Jaring apung	207,8						
Sub jumlah		7.291,04	1.705,40	1.700,00	1.784,50	1.714,90	1.304,94	1.537,04
Jumlah		7.804,14	1.754,00	1.750,86	1.837,81	1.770,37	1.365,21	2.063,24

Sumber : Dinas perikanan dan kelautan Bengkulu Utara 2017

Selanjutnya jumlah produksi menurut jenis usaha budi daya di Kabupaten Bengkulu Utara mulai Tahun 2012-2016 menunjukkan fluktuatif dikarenakan banyak faktor antara lain

adalah ketersediaan bahan pakan ikan yang masih sangat sulit di dapat dengan oleh pelaku usaha budi daya ikan. Data jumlah produksi menurut jenis usaha budi daya di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut.

Tabel 3.11. Jumlah produksi menurut jenis usaha budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2012-2016

No	Jenis usaha budidaya	Potensi produksi	Jumlah produksi				
			2012	2013	2014	2015	2016
A Benih (ekor)							
1	Balai benih ikan (BBI)	20.000.000	9.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	1.920.000
2	Unit Pembenhian rakyat	60.000.000	34.338.000	40.835.000	32.367.000	35.173.000	11.520.000
Sub jumlah		80.000.000	43.838.000	54.835.000	46.867.000	50.173.000	13.440.000
B Pembesaran (ton)							
1	Tambak	1000	22,45	31,8	22,44	23,47	40,17
2	Kolam	10.000	8.722,4	8.907	10.189,1	11.718,01	11.784,46
3	Keramba	100					
4	Sawah	1.000	181,8	181,8	239,5		
5	Jaring apung						
Sub jumlah		12.100	8.926,65	9.120,6	10.451,04	11.741,48	11.824,63

Sumber : Dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, 2017

Tabel 3.12. Produksi perikanan tangkap tahun 2012-2016

No	Kecamatan	Tahun (ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Putri Hijau	330,25	555,21	597,13	603,31	608,17
2	Ketahun	339,07	313,55	262,23	127,79	129,22
3	Batik Nau	541,37	752,14	874,31	887,13	89,64
4	Lais	25,11	26,03	27,15	27,25	28,75
5	Air Besi	25,33	26,68	28,22	28,31	30,39
6	Air Napal	2.239,63	2.277,63	2.378,50	2.489,53	2.508,55
7	Enggano	1.627,40	1.699,40	1.727,27	1.733,21	1.765,37

Sumber : Dinas perikanan dan kelautan Bengkulu Utara 2017

Dari data diketahui bahwa dalam hal perikanan budidaya, pada tahun 2014 terjadi penurunan luaslahan perikanan budidaya, yang menyebabkan menurunnya produktifitas perikanan budidaya. Hambatan lain berupa keterbatasan ketersediaan sarana produksi dan permodalan juga merupakan salah satu penyebab utama, begitu juga dengan keterbatasan dalam ketersediaan bibit yang berkualitas serta pakan dan obat-obatan. Belum optimalnya peran dari Balai Benih Ikan (BBI) yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara salah satu penyebab terbatasnya ketersediaan bibit ikan. Hal ini ditunjukkan dengan potensi produksi bibit dari BBI sebanyak 20.000.000 bibit hanya mampu memproduksi 40% dari kapasitas tersebut. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya biaya operasional yang tersedia pada masing-masing BBI, antara lain untuk pengadaan pakan, obat-obatan, biaya tenaga kerja dan biaya operasional rutin lainnya. Sementara itu harga pakan yang tinggi menyebabkan ketidakmampuan petani ikan untuk mengoptimalkan lahan yang dimiliki.

Sedangkan untuk perikanan tangkap, besarnya potensi laut yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkulu Utara tidak sebanding dengan produksi yang terealisasi. Keterbatasan sarana dengan teknologi yang masih sederhana yang dimiliki oleh para nelayan

menyebabkan terbatasnya jangkauan pencarian ikan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pembangunan subsektor perikanan masih terfokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini terkait dengan sumber pendanaan untuk pembangunan subsektor perikanan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi khusus dan dana penyesuaian infrastruktur daerah yang masing-masing sesuai dengan ketentuan yang dialokasikan untuk kegiatan fisik.

Produktivitas nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara pada umumnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan, masih rendahnya teknologi penangkapan ikan hingga pasca produksi perikanan, rendahnya kualitas SDM nelayan sehingga menyebabkan timbulnya hambatan-hambatan dalam mengadopsi teknologi penangkapan ikan, serta aspek jangkauan pemasaran serta Berbagai infrastruktur dibidang perikanan laut. Selain itu lemahnya permodalan nelayan juga berdampak pada rendahnya produktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV

GABARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Bengkulu Utara



Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu daerah otonom dalam lingkup wilayah Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah daratan sebesar 4.424,6 km² dan luas wilayah laut sebesar 2.088 km². Secara administrasi, Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 19 kecamatan dan 224 desa definitif. Akan tetapi, dari sejumlah desa tersebut, hanya beberapa desa yang akan dipilih untuk dijadikan kawasan perdesaan.

Penetapan kawasan perdesaan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dari berbagai pihak yang berkepentingan. Fokus Group Discussion (FGD) adalah sarana yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kawasan dan untuk menghasilkan kesepakatan. Berdasarkan FGD yang dilakukan maka kawasan perdesaan yang terpilih di Kabupaten Bengkulu Utara adalah Kawasan Perdesaan AgroMinapolitan Padang Jaya.

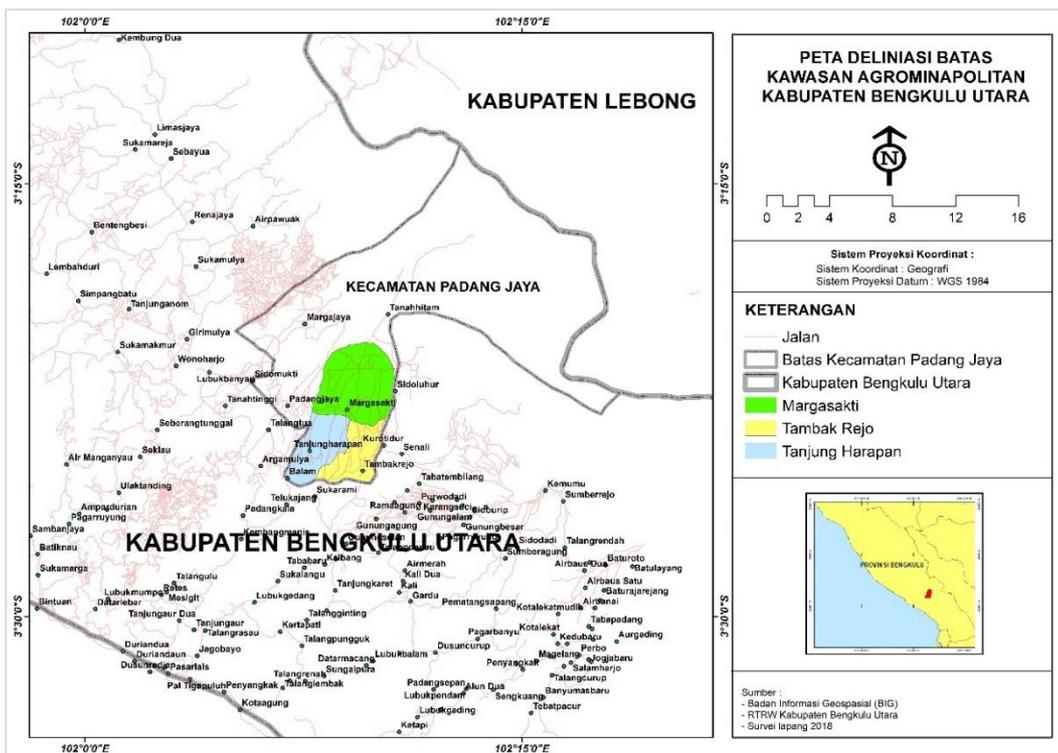
Kawasan perdesaan tersebut terdiri dari Desa Marga Sakti, Desa Tanjung Harapan, dan Desa Tambak Rejo yang berada di Kecamatan Padang Jaya. Pengembangan kawasan ini akan diarahkan menjadi kawasan agropolitan berbasis komoditas utama di kawasan ini yaitu dari hasil perkebunan dan perikanan. Sedangkan sektor pertanian dan peternakan akan menjadi sektor sekunder dan penunjang. Ketiga desa tersebut termasuk ke dalam satu kesatuan Kawasan Perdesaan AgroMinapolitan Padang Jaya yang juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam pengembangan kawasan.

4.1. PENETAPAN DAN DELINEASI KAWASAN

Berdasarkan landasan yuridis Permendesa Nomor 5 tahun 2016 yang diprakarsai oleh Bupati/Walikota, maka ditetapkan kawasan perdesaan di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari tiga desa yaitu Desa Marga Sakti, Tambak Rejo dan Tanjung Harapan. Deliniasi batas desa yang ada dalam dan atau diluar kawasan belumlah mendapatkan legitimasi dari lembaga yang berwenang (Depdagri) yang digambarkan sebagai batas wilayah oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi batas-batas desa yang ada di dalam dan atau di luar kawasan, maka dilakukanlah forum FGD dengan *stakeholder* antar desa dalam kawasan dan pihak kecamatan.

Deliniasi batas kawasan dan batas antar desa dalam kawasan dilakukan melalui masukan dari berbagai pihak dan dilakukan secara partisipatif. Setelah beberapa titik ikat

disepakati barulah dilakukan *groundcheck* di lapang. Proses selanjutnya adalah menarik batas-batasnya dengan pemetaan partisipatif.



Gambar 4.1. Peta deliniasi batas kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

4.2. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF

Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dengan jarak 75 km dari kota Bengkulu. Secara geografis wilayah ini terletak pada 3,342⁰ - 3,425⁰ LS dan 102,114⁰ - 102,175⁰ BT dengan ketinggian wilayah kawasan antara 98 - 295 m di atas permukaan laut (dpl). Posisi secara geografis kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya tersaji pada Gambar 4.2. Adapun batas kawasan AgroMinapolitan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Tanah Hitam dan Desa Marga Jaya
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sidoluhur, Kurotidur, Senali dan Tabat Tembilang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Sukarami dan Desa Karanganyar
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Padang Jaya, Desa Talangtua dan Desa Agra Mulya

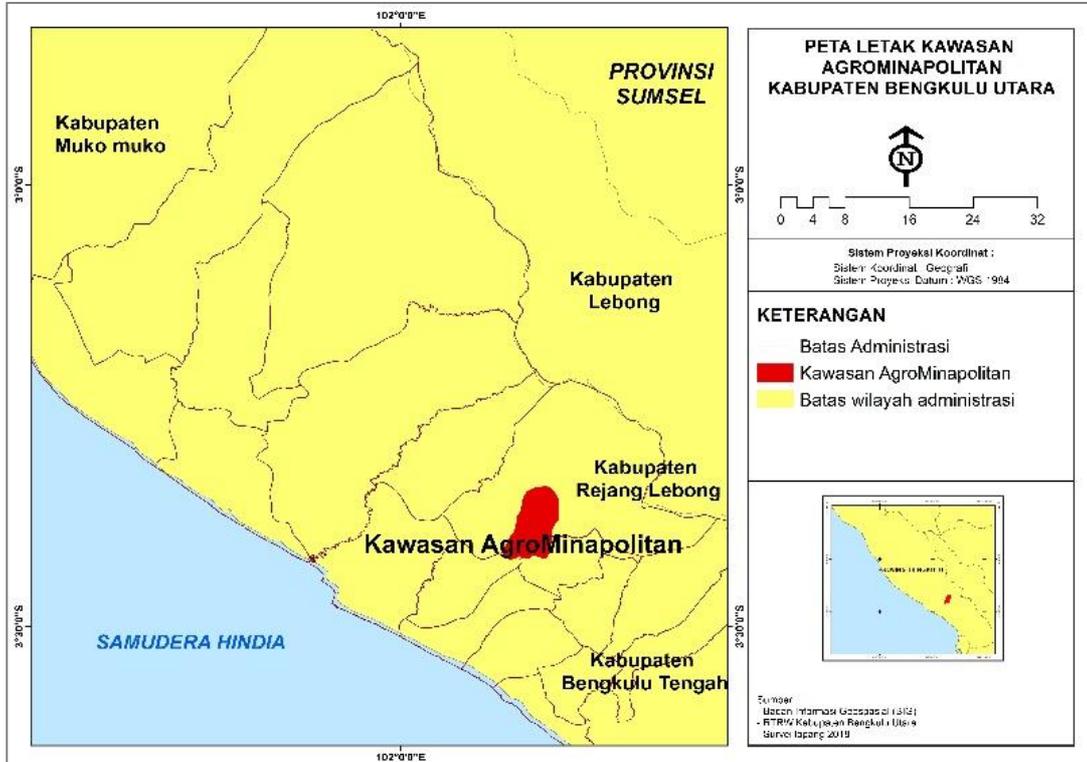
Luas areal kawasan AgroMinapolitan yang terdiri dari 3 desa, yang terluas adalah Desa Marga Sakti yaitu sebesar 33,75 km², dilanjutkan Desa Tanjung Harapan dan Desa Tambak Rejo. Deliniasi batas desa dalam kawasan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan saat FGD antar desa dan verifikasi batas terluar serta antar desa dalam kawasan. Data luas dan sebaran batas desa dalam kawasan selengkapnya tersaji pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.3.

Tabel 4.1. Luas desa dalam kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

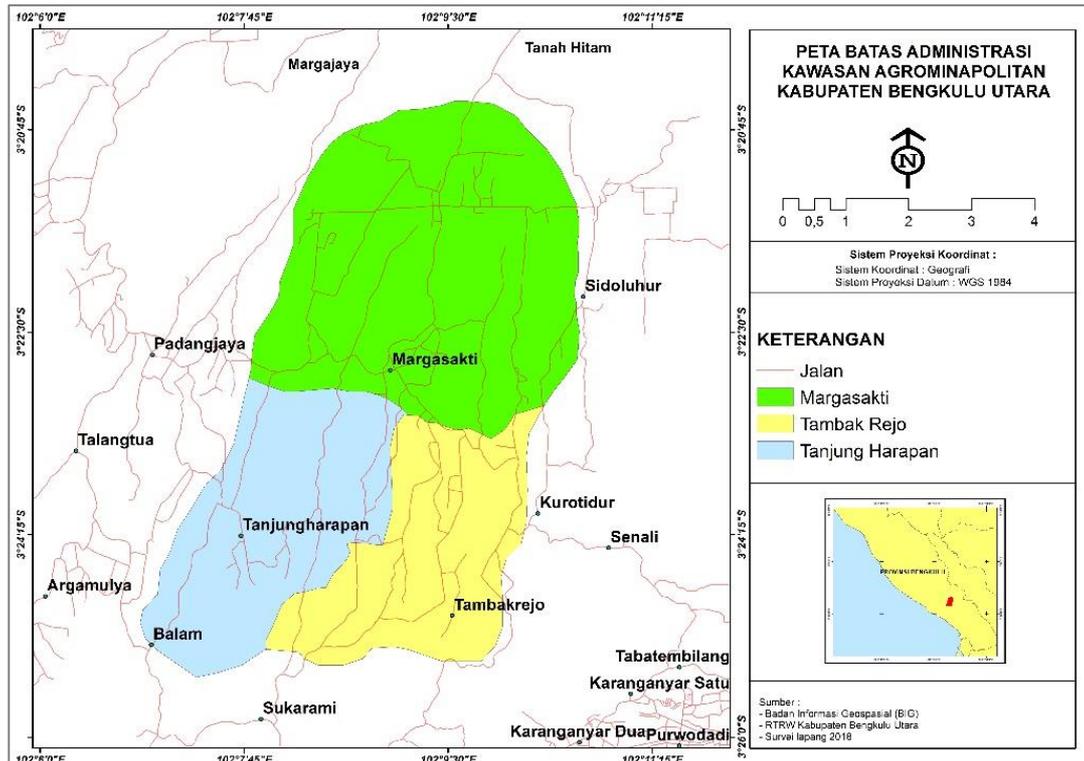
No	Desa	Luas (km ²)
----	------	-------------------------

1	Marga Sakti	33,75
2	Tanjung Harapan	11,95
3	Tambak Rejo	11,18

Sumber : Kecamatan dalam Angka, 2017



Gambar 4.2. Peta letak kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya



Gambar 4.3. Peta batas administrasi desa dalam kawasan AgroMinapolitan

Wilayah kawasan AgroMinapolitan termasuk beriklim tropika basah dengan rata-rata curah hujan sebesar 390 mm/bulan, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26-30⁰C (Sumber BMKG).

4.2.1. Topografi

Kondisi topografi wilayah kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian dibawah 100 - 300 m. Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya pada umumnya merupakan tanah bergelombang yang ditandai dengan adanya bukit-bukit yang memiliki ketinggian yang bervariasi. Daerah datar dengan ketinggian < 100 - 300 m dpl meter di atas permukaan laut terdapat di bagian timur yang terbentang dari selatan ke utara. Kondisi topografi merupakan faktor utama yang paling besar pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Ketinggian yang dimaksud adalah ketinggian lahan yang dinyatakan dalam meter.

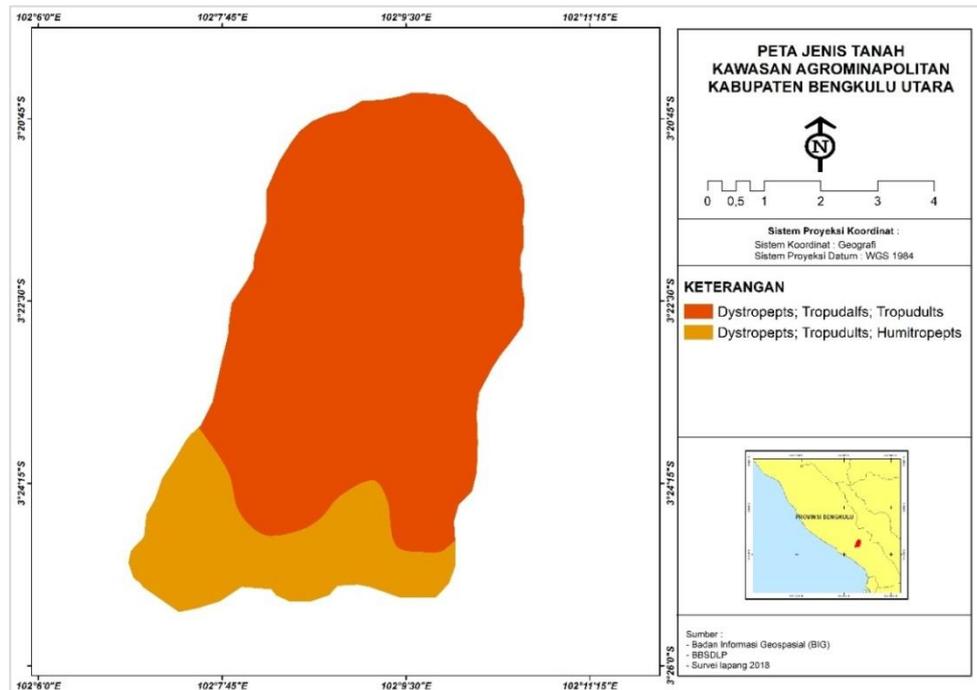
4.2.2. Jenis Tanah

Jenis tanah yang berkembang di wilayah kawasan AgroMinapolitan berasal dari bahan induk volkan dan sedimen. Tanah yang berasal dari bahan induk volkan mendominasi dan menyebar diseluruh wilayah kawasan, tanah yang terbentuk cenderung bertekstur lempung hingga berliat. Data tanah wilayah kawasan AgroMinapolitan yang tersedia, berada pada level skala tinjau, oleh karena itu, satuan peta tanah yang disajikan dalam bentuk asosisasi tanah (kumpulan jenis tanah). Berdasarkan sebarannya di lapangan, jenis tanah pada masing-masing asosiasi tanah terdiri dari jenis tanah yang sebarannya dominan (D), sedang (M) dan sedikit (F). Jenis tanah pada masing-masing asosiasi tanah dapat dipilah ke dalam jenis tanah terpisah pada tingkat pemetaan yang lebih detil. Luas serta sebaran tanah wilayah kawasan AgroMinaplitan tersaji pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.4.

Tabel 4.2. Luas sebaran asosiasi jenis tanah kawasan AgroMinapolitan

Asosiasi jenis tanah	% Lereng	Luas (ha)	%
Dystropepts; Tropudalfs; Tropudults	3-8	4.348,89	76,44
Dystropepts; Tropudults; Humitropepts	15-25	1.340,27	23,56
Jumlah		5.688,76	100

Sumber : BBSDLP



Gambar 4.4. Peta jenis tanah di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

Sebagian besar tanah di kawasan AgroMinapolitan didominasi oleh tanah dengan perkembangan sedang (*virile stage*) yaitu tanah Dystropepts, Tropudalfs dan Tropudults. Jenis-jenis tanah ini banyak ditemukan pada wilayah dataran hingga berbukit. Tanah-tanah tersebut umumnya mempunyai tingkat kesuburan tanah rendah hingga sedang, secara potensial dapat dikembangkan untuk lahan pertanian, khususnya pada relief datar hingga berombak. Pada wilayah agak berbukit (kemiringan 15-25%), penggunaan tanah ini untuk kegiatan pertanian dapat direkomendasikan, namun dianjurkan menggunakan teknologi konservasi tanah dan air, sedangkan tanah dengan kemiringan > 30 % sebaiknya digunakan sebagai wilayah konservasi.

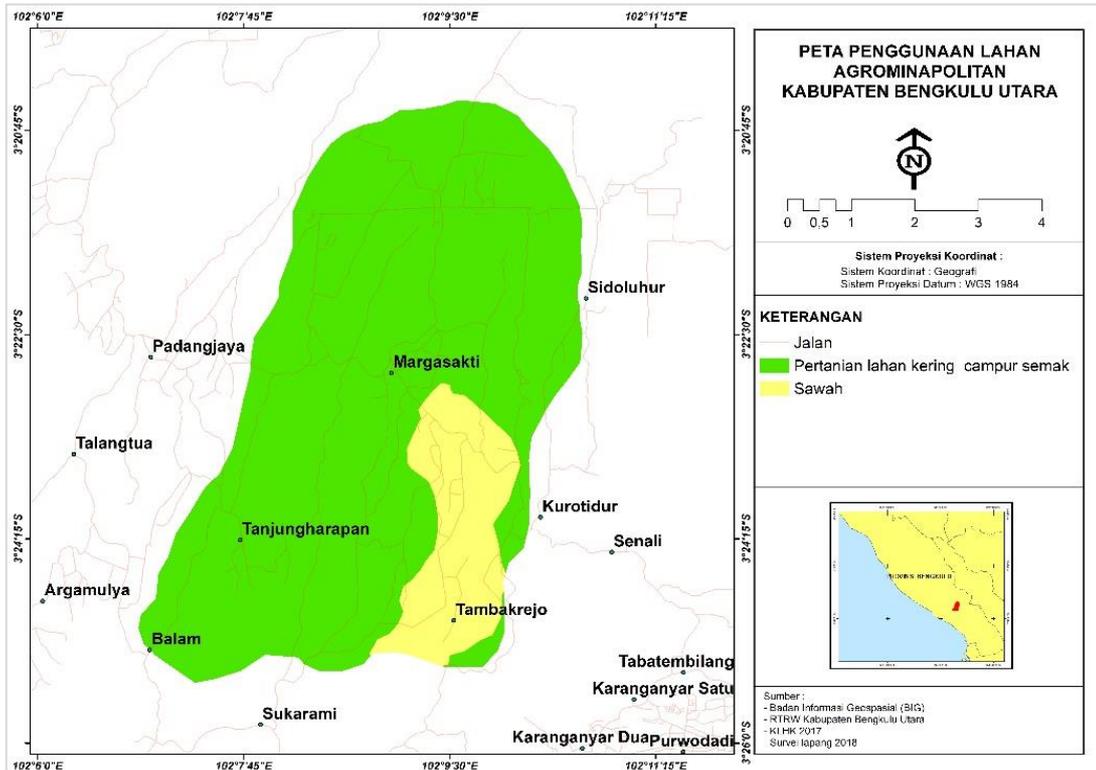
4.2.3. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2017, penggunaan lahan wilayah AgroMinapolitan Padang Jaya di Kabupaten Bengkulu Utara didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak/kebun campur yaitu 3.655,63 ha atau 86,79 % dari luas kawasan perdesaan. Sedangkan sisanya berdasarkan peta tergambar sebagai sawah yaitu sebesar 556,46 ha atau 13,21 %, namun hasil verifikasi di lapang menunjukkan tidak semuanya merupakan penggunaan sawah, tetapi sudah berubah fungsi menjadi kolam budidaya ikan. Luas sebaran penggunaan lahan wilayah AgroMinapolitan Padang Jaya tersaji pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.5.

Tabel 4.3. Jenis penggunaan lahan kawasan AgroMinapolitan

Penggunaan lahan	Luas (ha)	%
Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	3.655,63	86,79
Sawah	556,46	13,21
Jumlah	4.212,09	100

Sumber : KLHK, 2017



Gambar 4.5. Peta penggunaan lahan wilayah AgroMinapolitan Bengkulu Utara

4.2.4. Kebencanaan

Tahap awal dalam mengidentifikasi wilayah rawan bencana adalah dengan melihat resiko bencana terhadap wilayah tersebut. Dalam menghitung resiko bencana sebuah daerah kita harus mengetahui Bahaya (*hazard*), Kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*) suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya.

Bahaya adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana apabila telah menimbulkan korban dan kerugian.

Kerentanan adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak-tanggap terhadap dampak bahaya. Jenis-jenis kerentanan:

- Kerentanan Fisik: Bangunan, Infrastruktur, Konstruksi yang lemah.
- Kerentanan Sosial: Kemiskinan, Lingkungan, Konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita, lansia.

- c. Kerentanan Mental: ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya diri, dan lainnya.

Kapasitas adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia (fisik, manusia, keuangan dan lainnya). Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. Menghitung Resiko bencana di suatu wilayah berdasarkan pada penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas di wilayah tersebut.

Tabel 4.4. Kajian Risiko Bencana Provinsi Bengkulu 2016-2020

Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kerentanan			Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
		Potensi Penduduk Terpapar	Potensi Kerugian	Potensi Kerusakan Lingkungan			
Banjir	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
Banjir Bandang	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
Cuaca Ekstrim	Sedang	Sedang	Tinggi	-	Sedang	Rendah	Tinggi
Gempa Bumi	Tinggi	Rendah	Tinggi	-	Sedang	Rendah	Tinggi
Kebakaran Lahan & Hutan	Rendah	-	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
Kekeringan	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
Tanah Longsor	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber: BPBD Provinsi Bengkulu, 2016



Gambar 4.6. Peta bahaya banjir Kabupaten Bengkulu Utara

4.3. KEPENDUDUKAN

4.3.1. Jumlah Penduduk

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tiga komponen pokok yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (*migration*). Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian, dan migrasi masuk (*in migration*) lebih besar dari pada migrasi keluar (*out migration*).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017, pada tahun 2016 penduduk Kecamatan Padang Jaya mencapai 30.639 jiwa, terdiri dari 15.664 jiwa laki-laki dan 14.975 jiwa perempuan. Sesuai data BPS Tahun 2017, Kecamatan Padang Jaya memiliki sebanyak 12 desa. Pada rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) Kecamatan Padang Jaya direncanakan sebanyak tiga desa kawasan yaitu Desa Marga Sakti, Desa Tanjung Harapan dan Desa Tambak Rejo. Berdasarkan data penduduk tahun 2016 jumlah penduduk terbesar ada pada Desa Marga Sakti yaitu sebesar 5.856 orang dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 174 orang per km². Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada Desa Tambak Rejo yaitu sebesar 2.334 orang, dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 209 orang per km². Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Jumlah penduduk kawasan perdesaan Kabupaten Bengkulu Utara

Kec. Padang Jaya	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Desa Tanjung Harapan	3.587	3.656	1.965	1.968	1.987	2.030	2.071	2.115	2.158	2.202
Desa Marga Sakti	7.488	6.551	6.485	6.742	6.805	5.650	5.764	5.886	6.006	6.128
Desa Tambak Rejo	0	0	1.943	1.999	2.018	2.063	2.104	2.149	2.192	2.236
Agregat Kawasan	11.075	10.207	10.393	10.709	10.810	9.743	9.939	10.150	10.356	10.566,18

Sumber: Kecamatan dalam Angka, 2107

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik daerah, kawasan perdesaan di kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara mengalami pertumbuhan penduduk yang fluktuatif dari tahun 2007 hingga tahun 2015. Tahun 2007 hingga tahun 2011 jumlah penduduk relatif naik setiap tahunnya, kemudian turun pada tahun 2012 dan kembali naik hingga tahun 2015. Sementara berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk dengan metode geometri pada tahun 2025 jumlah penduduk di kawasan tersebut mencapai 10176 jiwa. Proyeksi penduduk pada tahun 2025 dapat tersaji pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7. Proyeksi pertumbuhan penduduk agregat kawasan perdesaan di Kabupaten Bengkulu Utara

4.3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan pengertian dari BPS (Badan Pusat Statistik), laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan 3 metode, yaitu aritmatik, geometric, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Berikut rumus penghitungan laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode geometrik:

$$r = \{(Pt / Po)-1\} \times 100$$

Keterangan:

r = laju pertumbuhan penduduk

Pt = Jumlah penduduk tahun terakhir

P0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar (1/t)

t = selisih tahun terakhir dengan tahun dasar

Oleh karena itu, sebelum menghitung laju pertumbuhan penduduk, maka perlu diketahui terlebih dahulu jumlah penduduk Desa Marga Sakti, Desa Tanjung Harapan, dan Desa Tambak Rejo pada beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2013-2015. Jumlah penduduk dari kedua desa dalam lima tahun terakhir, bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6. Jumlah penduduk tiap desa di Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

Desa	Tahun		
	2013	2014	2015
Marga Sakti	5.764	5.886	6.006
Tanjung Harapan	2.071	2.115	2.158
Tegal Rejo	2.104	2.149	2.192

Sumber : Kecamatan Padang Jaya dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dari ketiga Desa cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun pertambahan jumlah penduduk tidak secara signifikan. Berikut ini laju pertumbuhan penduduk yang ada di Desa Marga Sakti, Desa Tanjung Harapan, dan Desa Tambak Rejo.

Tabel 4.7. Laju penduduk tiap desa di Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

Desa	Laju pertumbuhan penduduk	
	2013-2014	2014-2015
Marga Sakti	0,021	0,020
Tanjung Harapan	0,021	0,020
Tegal Rejo	0,021	0,020

4.3.3. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan.

Database kependudukan pada setiap desa dalam kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya tidak seragam dan baku, sehingga perlu dilengkapi dan disusun sesuai dengan format yang baku dan memenuhi standar. Berikut ini disajikan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing desa di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya.

Tabel 4.8. Jumlah penduduk tiap desa berdasarkan komposisi jenis kelamin

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Marga Sakti	5.051	3.121	8.172
Tanjung Harapan	1.154	1.128	2.282
Tegal Rejo	1.115	1.219	2.334

Sumber : RPJMDes, 2018

4.3.4. Migrasi Penduduk

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Masih minimnya informasi dan data terkait migrasi penduduk yang masuk maupun ke luar kawasan, maka data tentang migrasi penduduk di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya belum dapat ditampilkan.

4.3.5. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau kawasan, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km² atau hektar pada suatu wilayah.

Berdasarkan hasil telaah dan survei lapang, sebaran permukiman menunjukkan terpat terkonsentrasinya jumlah penduduk. Penduduk cenderung untuk terkonsentrasi (membangun permukiman) pada pusat-pusat kegiatan ekonomi desa dalam kawasan, sementara yang menyebar biasanya mendekati lokasi lahan usahanya. Jumlah penduduk paling besar terdapat di Desa Marga Sakti yaitu sejumlah 8.172 orang, sedangkan pada Desa Tanjung Harapan dan Tambak Rejo jumlahnya cukup berimbang. Jika dibandingkan jumlah penduduk dengan luas desa masing-masing, maka desa yang memiliki kepadatan tertinggi terdapat di Desa Marga Sakti, selanjutnya Desa Tegal Rejo dan paling rendah kepadatannya berada di Desa Tanjung Harapan.

Tabel 4.9. Jumlah dan kepadatan penduduk masing-masing desa di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

Desa	Jumlah penduduk	Luas desa (ha)	Kepadatan penduduk (populasi/ha)
Marga Sakti	8.172	1.710	4,78
Tanjung Harapan	2.282	1.725	1,32
Tegal Rejo	2.334	1.185	1,97

Sumber : RPJMDes, 2018

4.3.6. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berupa sumber daya manusia dan sarana fisik sangatlah penting untuk ditingkatkan. Pembangunan kawasan perdesaan dapat bertumbuh dengan baik apabila ditopang dengan sumber daya yang baik, khususnya yang memiliki ketrampilan. Namun apabila dilihat dari peserta didik di Kecamatan Padang Jaya, sebagian besar tingkat SD sederajat, yaitu sebanyak 3.851 orang, dilanjutkan tingkat SMP sebanyak 1.559 orang dan tingkat SMA sebanyak 894 orang.

Tabel 4.10. Jumlah murid dan rasio guru menurut tingkatan sekolah di Kecamatan Padang Jaya tahun 2016

No	Tingkat	Jumlah		Rasio Murid/Guru
		Murid	Guru	

No	Tingkat	Jumlah		Rasio Murid/Guru
		Murid	Guru	
1	SD	3.741	248	15,08
2	MI	110	12	99,17
3	SMP	1.559	74	21,07
4	SMA	540	42	12,86
5	SMK	344	34	10,12

Sumber : Kecamatan Padang Jaya dalam Angka 2017

Selain peserta didik (SDM) yang dapat menentukan kemajuan suatu daerah, pendidik juga memiliki peranan besar dalam menentukan mutu dari pendidikan itu sendiri. Berdasarkan data rasio murid/guru Kecamatan Padang Jaya, nilai rasio murid/guru tertinggi terdapat pada tingkatan sekolah MI yaitu sebesar 99,17, sedangkan tingkat rasio murid/guru terendah ada pada tingkatan SMK yaitu sebesar 10,12. Semakin tinggi nilai rasio murid/guru disuatu daerah maka menunjukkan tingkatan pendidikan tersebut kekurangan pendidiknya, hal ini yang terjadi pada tingkatan pendidikan MI di Kecamatan Padang Jaya. Khusus untuk jumlah peserta didik di Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya, yang terbanyak ada di Desa Marga Sakti untuk seluruh strata dari SD hingga sarjana, sedangkan yang paling sedikit ada di Desa Tambak Rejo. Data selengkapnya tersaji pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Jumlah peserta didik tingkat SD hingga sarjana di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

Desa	SD	SMP	SMA	D1/D2/D3	Sarjana
Marga Sakti	1.056	827	1.005	76	83
Tambak Rejo	922	323	206	3	23
Tanjung Harapan	328	710	956	53	68

Sumber : RPJMDes, 2018

4.3.7. Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk kurang dari 15 tahun meski telah bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja sebagai bagian dari aspek demografi memiliki kecenderungan meningkat atau menurun sesuai perubahan yang dialami oleh penduduk. Hal ini dikarenakan faktor alamiah, yakni kelahiran, kematian, dan pergeseran jumlah penduduk.

Keberadaan data terkait kelompok aktivitas dan angkatan kerja pada kelompok umur di Kawasan AgroMinapolitan belum tersedia. Sebagai gambaran umum dapat dikelompokkan berdasarkan data yang tersedia menjadi kelompok aktivitas bekerja (usia 15 - 60 tahun), kelompok sekolah dan tidak bekerja dan tidak sekolah (kelompok menganggur), secara rinci jumlah serta persentasenya disajikan dibawah ini.

Tabel 4.12. Jumlah kelompok aktivitas penduduk di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

Kelompok aktivitas	Jumlah (Jiwa)	%
Bekerja	5.734	44,84
Sekolah	6.639	51,92
Menganggur	415	3,25
Jumlah	12.788	100

Sumber : Kecamatan Padang Jaya dalam Angka 2017

4.3.8. Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Pertanian dalam arti luas meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

Berdasarkan data RPJMDes masing-masing desa yang berada di dalam kawasan AgroMinapolitan, jenis mata pencaharian penduduknya sangat beragam. Desa Marga Sakti memiliki keragaman matapencaharian penduduk dibandingkan 2 desa lainnya. Jenis mata pencaharian dominan masyarakat di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya adalah petani dengan persentase 43,87 %, dilanjutkan peternak sebesar 21,22 % dan terbesar ke-3 adalah buruh serta jasa dan perdagangan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13. Jenis dan jumlah mata pencaharian masyarakat kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

Mata Pencaharian	Desa (orang)			Jumlah	%
	Marga Sakti	Tambak Rejo	Tanjung Harapan		
Petani	1.285	892	418	2.595	43,87
Peternak	591		664	1.255	21,22
Petani ikan	126			126	2,13
Jasa dan pedagangan	465	17	13	495	8,37
PNS	127	14	23	164	2,77
UMK	55	4	8	67	1,13
Montir dan supir	99	14	18	131	2,21
Buruh		500		500	8,45
Guru	74	9	98	181	3,06
Kontraktor		2		2	0,03
Dokter	1			1	0,02
Bidan	11			11	0,19
Tukang	184	22		206	3,48
Pensiunan	23			23	0,39
Lain-lain			158	158	2,67

Sumber : RPJMDes 2018

4.3.9. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Penduduk dapat digolongkan ke dalam dua macam kelompok, yaitu (1) penduduk yang, dalam kaitannya dengan aspek ekonomi, aktif secara ekonomis dan (2) penduduk yang tidak aktif secara ekonomis. Penduduk yang aktif secara ekonomis adalah mereka yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mereka yang mencari pekerjaan. Kelompok ini biasa disebut sebagai "Angkatan Kerja". Sedangkan penduduk yang tidak aktif secara ekonomis adalah mereka yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja dan disebut "Bukan Angkatan Kerja". Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih. Mereka terdiri dari penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal sebagai "Tingkat Partisipatif Angkatan Kerja" (TPAK). Pada tahun 2015, dari jumlah penduduk Bengkulu Utara 293.099 orang, terdapat 88.827 orang atau 47,04 % merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK) dan dari jumlah tersebut, sebanyak 52,96 % merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Proporsi pekerja terhadap Angkatan Kerja

pada tahun 2015 sebesar 69,56 %, angka ini menunjukkan besarnya kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan atau yang dikenal dengan istilah “Tingkat Kesempatan Kerja” (TTK). Dengan begitu, maka tingkat pengangguran di Bengkulu Utara pada tahun 2015 mencapai 4,05 % atau setara dengan jumlah 18.870 orang. Pada Tabel 4.14 disajikan data ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 4.14. Proporsi ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkulu Utara

No	Klasifikasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja			
	a. Bekerja	88.827	49.060	137.887
	b. Pengangguran	2.680	3.140	5.820
2	Bukan Angkatan Kerja			
	a. Sekolah	8.865	13.163	22.028
	b. Mengurus RT	830	32.040	32.870
	b. Lainnya	4.640	2.758	7.398
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	86,46	52,12	69,56
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,93	6,02	4,05

Sumber: BPS (2017)

4.4. PEREKONOMIAN

4.4.1. Kesesuaian Sektor Basis Kabupaten terhadap Sektor/Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan

Komoditas unggulan adalah komoditi potensial yang dipandang dapat dipersaingan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi (Ely, 2014). Komoditas unggulan merupakan hasil usaha masyarakat yang memiliki peluang pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat. Beberapa kriteria dari komoditas unggulan adalah:

1. Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan/ciri spesifik, kualitas bagus, harga murah).
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dan dapat dikembangkan.
3. Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat.
4. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia.
5. Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.

Berdasarkan hasil analisis keunggulan komparatif (analisis *Location Quotient/LQ*) antar sektor di tingkat Kabupaten Bengkulu Utara (Gambar 3.9), dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai LQ 1,38 yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bengkulu Utara dibandingkan dengan sektor lainnya. Bahasan selanjutnya adalah bahasan lebih detil terkait analisis komoditas unggulan berdasarkan komoditas masing-masing subsektor yang tercakup dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dikarenakan keterbatasan data, tingkat administratif yang dianalisis adalah tingkat kecamatan.

1. Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Palawija

Tingkat keunggulan komparatif antar komoditas subsektor pertanian tanaman pangan dan palawija di Kabupaten Bengkulu Utara diperoleh berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) dengan menggunakan data luas panen berbagai komoditas tanaman pangan dan palawija tahun 2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Bengkulu Utara. Dikarenakan keterbatasan data saat ini, lingkup wilayah administratif yang dianalisis adalah tingkat kecamatan bukan desa/kelurahan. Hasil analisis LQ subsektor pertanian tanaman pangan dan palawija Kabupaten Bengkulu Utara disajikan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Komoditas Pertanian Tanaman Pangan dan Palawija Kabupaten Bengkulu Utara

Kecamatan	Nilai LQ Komoditas Tanaman Pangan dan Palawija							
	Padi sawah	Padi ladang	Jagung	Kedelai	Kacang tanah	Kacang hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Enggano	0,72	5,82	0,66	0,51	1,35	0,80	0,88	0,74
Kerkap	0,83	0,15	3,50	0,31	0,71	1,30	1,03	1,17
Air Napal	1,12	0,08	0,55	0,43	1,82	1,28	0,70	0,94
Air Besi	0,60	5,29	0,69	1,97	1,15	2,14	3,25	0,82
Hulu Palik	1,14	0,15	0,92	0,26	0,47	0,35	0,43	0,99
Tanjung Agung Palik	1,18	0,20	0,48	0,23	0,91	0,78	0,29	0,69
Arga Makmur	1,15	0,04	0,71	0,93	0,39	0,26	0,64	0,43
Arma Jaya	1,11	0,30	0,65	0,65	0,79	0,33	0,74	1,41
Lais	1,14	0,21	0,48	0,80	1,12	1,55	0,43	0,16
Batik Nau	1,20	0,19	0,21	0,69	0,72	0,72	0,38	0,17
Giri Mulya	0,33	3,16	1,66	1,31	3,29	4,49	6,57	6,62
Air Padang	0,91	0,80	0,93	1,29	3,30	3,23	0,67	1,43
Padang Jaya	0,76	0,48	1,66	3,88	1,18	0,22	2,66	2,51
Ketahun	0,68	3,81	0,73	3,30	1,30	1,59	2,22	0,71
Napal Putih	0,00	12,19	1,11	3,70	2,11	0,36	2,39	1,60
Ulok Kupai	0,57	5,86	0,60	1,97	2,10	3,51	1,48	1,34
Pinang Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Putri Hijau	1,15	0,11	0,51	0,33	0,99	1,53	0,77	0,69
Marga Sakti Sebelat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Utara (2017), diolah

Suatu komoditas dikatakan memusat atau memiliki keunggulan komparatif di lokasi (kecamatan) tertentu jika komoditas di lokasi tersebut memiliki nilai LQ lebih dari satu ($LQ > 1$). Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 4.15, dapat dilihat bahwa komoditas-komoditas pertanian tanaman pangan dan palawija yang memiliki nilai $LQ > 1$ adalah: (1) padi sawah di Kecamatan Air Napal, Hulu Palik, Tanjung Agung Palik, Arga Makmur, Arma Jaya, Lais, Batik Nau, dan Putri Hijau; (2) padi ladang di Kecamatan Enggano, Air Besi, Giri Mulya, Ketahun, Napal Putih, dan Ulok Kupai; (3) jagung di Kecamatan Kerkap, Giri Mulya, Padang Jaya, dan Napal Putih; (4) kedelai di Kecamatan Air Besi, Giri Mulya, Air Padang, Padang Jaya, Ketahun, Napal Putih, dan Ulok Kupai; (5) kacang tanah di Kecamatan Enggano, Air Napal, Air Besi, Lais, Giri Mulya, Air Padang, Padang Jaya, Ketahun, Napal Putih, dan Ulok Kupai; (6) kacang hijau di Kecamatan Kerkap, Air Napal, Air Besi, Lais, Giri Mulya, Air Padang, Ketahun, Ulok Kupai, dan Putri Hijau; (7) ubi kayu di Kecamatan Kerkap, Air Besi, Giri Mulya, Padang Jaya, Ketahun, Napal Putih, dan Ulok Kupai; dan (8) ubi jalar di Kecamatan Kerkap, Arma Jaya, Giri Mulya, Air Padang, Padang Jaya, Napal Putih, dan Ulok Kupai.

Komoditas-komoditas tanaman pangan dan palawija di lokasi-lokasi selain yang dijabarkan sebelumnya memiliki nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$), yang artinya bahwa komoditas-komoditas tanaman pangan dan palawija tersebut tidak memusat atau tidak unggul atau memiliki pangsa relatif kecil dibandingkan dengan komoditas pertanian tanaman

pangan dan palawija di lokasi-lokasi yang telah dijabarkan sebelumnya (yang memiliki nilai $LQ > 1$).

Komoditas-komoditas pertanian tanaman pangan dan palawija yang memiliki nilai LQ tertinggi di suatu lokasi dapat disimpulkan merupakan komoditas yang memiliki tingkat komparatif tertinggi atau komoditas paling unggul di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis LQ pada Tabel 4.15, dapat dilihat bahwa komoditas padi sawah ($LQ=1,20$) paling unggul di Kecamatan Batik Nau, padi ladang ($LQ=12,19$) di Kecamatan Napal Putih, jagung ($LQ=3,50$) di Kecamatan Kerkap, kedelai ($LQ=3,88$) di Kecamatan Padang Jaya, kacang tanah ($LQ=3,30$) di Kecamatan Air Padang, kacang hijau ($LQ=4,49$) di Kecamatan Giri Mulya, ubi kayu ($LQ=6,57$) di Kecamatan Giri Mulya, dan ubi jalar ($LQ=6,62$) di Kecamatan Giri Mulya.

Jika dikaji berdasarkan lokasi, komoditas pertanian tanaman pangan dan palawija yang paling unggul di Kecamatan Enggano adalah padi ladang; di Kecamatan Kerkap adalah jagung; di Kecamatan Air Napal dan Air Padang adalah kacang tanah; di Kecamatan Air Besi, Ketahun, Napal Putih, dan Ulok Kapai adalah padi ladang; di Kecamatan Hulu Palik, Tanjung Agung Palik, Arga Makmur, dan Batik Nau adalah padi sawah; di Kecamatan Arma Jaya dan Giri Mulya adalah ubi jalar; di Kecamatan Lais dan Putri Hijau adalah kacang hijau; dan di Kecamatan Padang Jaya adalah kedelai. Sedangkan Kecamatan Pinang Raya dan Marga Sakti Sebelat tidak memiliki komoditas unggulan tanaman pangan dan palawija sama sekali.

2. Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Hortikultura dan Buah-Buahan

Tingkat keunggulan komparatif antar komoditas subsektor pertanian tanaman hortikultura di Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan data. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Kabupaten Bengkulu Utara dalam Angka Tahun 2017), tidak ada data luas panen atau luas lahan tanaman hortikultura (kecuali komoditas cabai) di Kabupaten Bengkulu Utara untuk tingkat kecamatan, yang tersedia adalah data luas lahan tanaman hortikultura se-kabupaten. Oleh karena itu, komoditas tanaman hortikultura yang dianalisis hanya komoditas cabai.

Sedangkan, beberapa komoditas tanaman buah-buahan dapat dianalisis tingkat keunggulan komparatifnya karena data cukup tersedia. Keunggulan komparatif antar komoditas subsektor pertanian tanaman buah-buahan di Kabupaten Bengkulu Utara diperoleh berdasarkan hasil analisis LQ dengan menggunakan data produksi berbagai komoditas buah-buahan tahun 2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu Utara dengan lingkup wilayah administratif adalah tingkat kecamatan. Data produksi digunakan karena data luas lahan atau luas panen tanaman buah-buahan tidak tersedia. Idealnya, data yang digunakan adalah data luas lahan atau luas panen. Hasil analisis LQ subsektor pertanian tanaman hortikultura dan buah-buahan di Kabupaten Bengkulu Utara disajikan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Komoditas Pertanian Tanaman Hortikultura dan Buah-buahan Kabupaten Bengkulu Utara

Kecamatan	Nilai LQ Komoditas Tanaman Hortikultura						
	Cabai	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Nanas
Enggano	0,08	0,57	0,00	0,03	2,22	0,05	0,07
Kerkap	0,39	0,16	2,07	0,20	0,24	0,37	0,13
Air Napal	4,42	0,88	1,58	0,97	0,06	0,58	0,62
Air Besi	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kecamatan	Nilai LQ Komoditas Tanaman Hortikultura						
	Cabai	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Nanas
Hulu Palik	0,38	1,49	1,63	0,00	0,48	1,97	0,30
Tanjung Agung Palik	0,82	0,23	2,09	0,68	0,13	0,34	0,25
Arga Makmur	2,38	1,89	0,52	4,53	0,49	10,66	14,14
Arma Jaya	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lais	0,50	2,27	2,10	0,00	0,01	0,00	0,00
Batik Nau	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giri Mulya	1,40	2,23	0,62	1,59	1,11	1,29	3,74
Air Padang	7,70	0,00	1,15	0,72	0,14	1,03	0,00
Padang Jaya	7,71	0,00	0,00	0,00	1,08	2,29	24,68
Ketahun	12,97	0,00	0,66	0,48	0,00	0,00	0,00
Napal Putih	5,02	5,21	0,98	0,71	0,11	0,76	0,82
Ulok Kupai	12,16	3,51	0,08	0,52	0,08	5,31	3,22
Pinang Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Putri Hijau	2,93	1,60	0,13	18,67	0,06	3,79	2,99
Marga Sakti Sebelat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Utara (2017), diolah

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 4.16, dapat dilihat bahwa komoditas-komoditas hortikultura dan buah-buahan yang memiliki nilai $LQ > 1$ adalah: (1) cabai di Kecamatan Air Napal, Air Besi, Arga Makmur, Batik Nau, Giri Mulya, Air Padang, Padang Jaya, Ketahun, Napal Putih, Ulok Kupai, dan Putri Hijau; (2) mangga di Kecamatan Hulu Palik, Arga Makmur, Lais, Giri Mulya, Napal Putih, Ulok Kumpai, dan Putri Hijau; (3) durian di Kecamatan Kerkap, Air napal, Hulu Palik, Tanjung Agung Palik, Lais, dan Air Padang; (4) jeruk di Kecamatan Arga Makmur, Giri Mulya, dan Putri Hijau; (5) pisang di Kecamatan Enggano, Giri Mulya, dan Padang Jaya; (6) pepaya di Kecamatan Hulu Palik, Arga Makmur, Giri Mulya, Air Padang, Padang Jaya, Ulok Kumpai, dan Putri Hijau; (7) nanas di Kecamatan Arga Makmur, Giri Mulya, Padang Jaya, Ulok Kumpai, dan Putri Hijau.

Komoditas-komoditas hortikultura dan buah-buahan di lokasi-lokasi selain yang dijabarkan di atas memiliki nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$), yang artinya bahwa komoditas-komoditas hortikultura dan buah-buahan tersebut tidak memusat atau unggul di lokasi-lokasi lain atau memiliki pangsa relatif kecil dibandingkan dengan komoditas hortikultura dan buah-buahan ($LQ > 1$) di lokasi-lokasi yang telah dijabarkan di atas.

Komoditas-komoditas pertanian hortikultura dan buah-buahan yang memiliki nilai LQ tertinggi di suatu lokasi dapat disimpulkan merupakan komoditas yang memiliki tingkat komparatif tertinggi atau komoditas paling unggul di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis LQ pada Tabel 4.16, dapat dilihat bahwa komoditas cabai ($LQ = 18,25$) paling unggul di Kecamatan Air Besi, Arma Jaya, dan Batik Nau; mangga ($LQ = 5,21$) di Kecamatan Napal Putih; durian ($LQ = 2,10$) di Kecamatan Lais; jeruk ($LQ = 18,67$) di Kecamatan Putri Hijau; pisang ($LQ = 2,22$) di Kecamatan Enggano; pepaya ($LQ = 10,66$) di Kecamatan Arga Makmur; dan nanas ($LQ = 24,68$) di Kecamatan Padang Jaya.

Jika dikaji berdasarkan lokasi, komoditas pertanian hortikultura dan buah-buahan yang paling unggul di Kecamatan Enggano adalah pisang; di Kecamatan Kerkap, Tanjung Agung Palik, Lais adalah durian; di Kecamatan Air Napal, Air Besi, Arma Jaya, Batik Nau, Air Padang, Ketahun, Ulok Kupai adalah cabai; di Kecamatan Hulu Palik adalah pepaya; di Kecamatan Arga Makmur, Giri Mulya, Padang Jaya adalah nanas; di Kecamatan Napal

Putih adalah mangga; dan di Kecamatan Putri Hijau adalah Jeruk. Sedangkan Kecamatan Pinang Raya dan Marga Sakti Sebelat tidak memiliki komoditas unggulan hortikultura dan buah-buahan sama sekali. Namun demikian, untuk kedua kecamatan ini perlu ditelusuri kembali apakah kedua kecamatan tersebut tidak memiliki komoditas unggulan hortikultura dan buah-buahan dikarenakan komoditas-komoditas tersebut belum/tidak dikembangkan atau karena tidak ada data yang tersedia.

3. Komoditas Unggulan Tanaman Perkebunan

Tingkat keunggulan komparatif antar komoditas subsektor tanaman perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara diperoleh berdasarkan hasil analisis LQ dengan menggunakan data luas lahan berbagai komoditas tanaman perkebunan tahun 2017 yang diperoleh dari BPS Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil analisis LQ subsektor tanaman perkebunan disajikan pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara

Kecamatan	Nilai LQ Komoditas Tanaman Perkebunan												
	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi Robusta	Lada	Kakao	Kopi Arabika	Cengkeh	Kayu Manis	Pinang	Kapuk	Kemiri	Pala
Enggano	0,05	9,60	0,00	1,49	13,30	10,10	0,00	36,64	0,00	8,31	1,77	0,00	30,50
Kerkap	0,44	0,10	0,27	0,82	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Air Napal	0,62	2,68	1,43	0,35	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00
Air Besi	1,79	0,51	0,44	1,02	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hulu Palik	0,62	0,26	0,32	4,72	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanjung Agung Palik	1,14	0,73	0,53	1,09	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arga Makmur	0,85	0,46	1,36	0,58	0,59	0,11	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arma Jaya	1,65	0,50	0,29	2,84	1,19	0,21	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lais	1,52	2,41	0,46	1,56	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	5,60	0,00
Batik Nau	1,38	0,35	0,98	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	1,83	4,47	0,00	0,00
Giri Mulya	0,99	0,81	1,01	1,95	0,00	0,04	0,00	0,00	0,86	0,29	0,00	0,00	0,00
Air Padang	0,33	0,26	1,83	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padang Jaya	1,04	1,00	0,85	1,89	11,09	0,64	0,00	0,30	2,74	3,28	0,00	0,00	4,77
Ketahun	0,87	1,06	1,02	1,40	0,00	0,11	7,93	0,00	2,88	0,44	0,30	5,06	0,00
Napal Putih	0,66	0,08	0,91	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulok Kupai	0,99	0,22	1,35	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinang Raya	1,17	1,64	0,94	0,60	1,51	0,05	2,68	0,17	5,38	0,89	1,17	4,09	0,00
Putri Hijau	1,08	0,85	1,23	0,00	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00
Marga Sakti Sebelat	0,86	0,77	1,42	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Utara (2017), diolah

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 4.17, dapat dilihat bahwa komoditas-komoditas pertanian tanaman perkebunan yang memiliki nilai $LQ > 1$ adalah: (1) karet di Kecamatan Air Besi, Tanjung Agung Palik, Arma Jaya, Lais, Batik Nau, Padang Jaya, Pinang Raya, dan Putri Hijau; (2) kelapa di Kecamatan Enggano, Air Napal, Lais, Padang Jaya, Ketahun, dan Pinang Raya; (3) kelapa sawit di Kecamatan Air Napal, Arga Makmur, Giri Mulya, Air Padang, Ketahun, Ulok Kupai, Putri Hijau, dan Marga Sakti Sebelat;

(4) kopi robusta di Kecamatan Enggano, Air Besi, Hulu Palik, Tanjung Agung Palik, Arma Jaya, Lais, Giri Mulya, Padang Jaya, Ketahun, dan Napal Putih; (5) lada di Kecamatan Enggano, Arma Jaya, Padang Jaya, dan Pinang Raya; (6) kakao di Kecamatan Kerkep, Hulu Palik, dan Tanjung Agung Palik; (7) kopi arabika di Kecamatan Ketahun dan Pinang Raya; (8) cengkeh di Kecamatan Enggano; (9) kayu manis di Kecamatan Padang Jaya, Ketahun, dan Pinang Raya; (10) pinang di Kecamatan Enggano, Air Napal, Lais, Batik Nau, dan Padang Jaya; (11) kapuk di Kecamatan Enggano, Batik Nau, dan Pinang Raya; (12) kemiri di Kecamatan Lais, Ketahun, dan Pinang Raya; dan (13) pala di Kecamatan Enggano dan Padang Jaya.

Komoditas-komoditas pertanian tanaman perkebunan di lokasi-lokasi selain yang dijabarkan sebelumnya memiliki nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$), yang artinya bahwa komoditas-komoditas tersebut tidak memusat atau unggul di lokasi-lokasi lain atau memiliki pangsa relatif kecil dibandingkan dengan komoditas pertanian tanaman perkebunan lainnya ($LQ > 1$) di lokasi-lokasi yang telah dijabarkan sebelumnya.

Komoditas-komoditas pertanian tanaman perkebunan yang memiliki nilai LQ tertinggi di suatu lokasi dapat disimpulkan merupakan komoditas yang memiliki tingkat komparatif tertinggi atau komoditas paling unggul di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis LQ pada Tabel 4.17, dapat dilihat bahwa komoditas karet ($LQ=1,79$) paling unggul di Kecamatan Air Besi, kelapa ($LQ=9,60$) di Kecamatan Enggano, kelapa sawit ($LQ=1,83$) di Kecamatan Air Padang, kopi robusta ($LQ=4,83$) di Kecamatan Napal Putih, lada ($LQ=13,30$) di Kecamatan Enggano, kakao ($LQ=13,65$) di Kecamatan Kerkep, dan kopi arabika ($LQ=7,93$) di Kecamatan Ketahun, cengkeh ($LQ=36,64$) di Kecamatan Enggano, kayu manis ($LQ=5,38$) di Kecamatan Pinang Raya, pinang ($LQ=8,31$) di Kecamatan Enggano, kapuk ($LQ=4,47$) di Kecamatan Batik Nau, kemiri ($LQ=5,60$) di Kecamatan Lais, dan pala ($LQ=30,50$) di Kecamatan Enggano.

Jika dikaji berdasarkan lokasi, komoditas pertanian tanaman perkebunan yang paling unggul di: Kecamatan Enggano adalah cengkeh; di Kecamatan Kerkep, Hulu Palik, dan Tanjung Agung Palik adalah kakao; di Kecamatan Air Napal adalah kelapa; di Kecamatan Air Besi adalah karet; di Kecamatan Arga Makmur, Air Padang, Ulok Kupai, Putri Hijau, dan Marga Sakti Sebelat adalah kelapa sawit; di Kecamatan Arma Jaya, Giri Mulya, dan Napal Putih adalah kopi robusta; di Kecamatan Lais dan Pinang Raya adalah kemiri; di Kecamatan Batik Nau adalah kapuk; di Kecamatan Padang Jaya adalah lada; dan di Kecamatan Ketahun adalah kopi arabika.

4. Komoditas Peternakan Ruminansia dan Unggas

Hasil analisis keunggulan komparatif subsektor peternakan ruminansia dan unggas di Kabupaten Bengkulu Utara disajikan pada Tabel 4.18 dan Tabel 4.19. Berdasarkan Tabel 4.18, pemusatan komoditas-komoditas ternak ruminansia yang memiliki nilai $LQ > 1$ adalah: (1) sapi potong di Kecamatan Kerkep, Hulu Palik, Tanjung Agung Palik, Arga Makmur, Arma Jaya, Giri Mulya, Ketahun, dan Putri Hijau; (2) kerbau di Kecamatan Enggano, Air Napal, Tanjung Agung Palik, Lais, Batik Nau, Air Padang, dan Putri Hijau; (3) kambing di Kecamatan Enggano, Air Besi, Lais, Batik Nau, Air Padang, Padang Jaya, Napal Putih, dan Ulok Kapai; (4) domba di Kecamatan Air Besi, Lais, Batik Nau, Giri Mulya, Air Padang, dan Ulok Kupai; dan (5) babi di Kecamatan Arga Makmur dan Arma Jaya. Terkait komoditas sapi perah tidak dapat dianalisis tingkat keunggulan komparatifnya karena data tidak tersedia atau komoditas ini belum dibudidayakan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 4.18. Hasil Analisis LQ Komoditas Ternak Ruminansia di Kabupaten Bengkulu Utara

Kecamatan	Nilai LQ Komoditas Ternak Ruminansia					
	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
Enggano	0,00	0,72	1,91	1,40	0,00	0,00
Kerkap	0,00	1,22	0,05	0,89	0,00	0,00
Air Napal	0,00	0,76	5,48	0,69	0,62	0,00
Air Besi	0,00	0,14	0,05	2,47	5,51	0,00
Hulu Palik	0,00	1,19	0,00	0,94	0,00	0,00
Tanjung Agung Palik	0,00	1,06	1,31	0,94	0,00	0,00
Arga Makmur	0,00	1,23	0,99	0,44	0,00	5,62
Arma Jaya	0,00	1,09	0,23	0,73	0,00	6,84
Lais	0,00	0,90	1,99	1,05	1,00	0,00
Batik Nau	0,00	0,61	3,48	1,04	6,91	0,00
Giri Mulya	0,00	1,32	0,07	0,67	1,12	0,00
Air Padang	0,00	0,34	1,73	1,80	6,40	0,00
Padang Jaya	0,00	0,79	0,00	1,60	0,00	0,00
Ketahun	0,00	1,24	0,48	0,70	0,97	0,78
Napal Putih	0,00	0,41	0,00	2,24	0,00	0,00
Ulok Kupai	0,00	0,85	0,00	1,42	2,23	0,00
Pinang Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Putri Hijau	0,00	1,07	1,40	0,86	0,23	0,64
Marga Sakti Sebelat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Utara (2017), diolah

Komoditas-komoditas peternakan, baik ternak ruminansia maupun unggas yang memiliki nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$) di lokasi-lokasi tertentu, berarti bahwa komoditas-komoditas ternak tersebut tidak memusat atau tidak unggul di lokasi-lokasi tersebut atau memiliki pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan komoditas ternak lainnya di lokasi-lokasi dengan komoditas yang memiliki nilai $LQ > 1$.

Komoditas-komoditas ternak ruminansia yang memiliki nilai LQ tertinggi di suatu lokasi dapat disimpulkan merupakan komoditas yang memiliki tingkat komparatif tertinggi atau komoditas paling unggul di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis LQ pada Tabel 4.18, dapat dilihat bahwa komoditas sapi potong ($LQ=1,32$) paling unggul di Kecamatan Giri Mulya, kerbau ($LQ=5,48$) di Kecamatan Air Napal, kambing ($LQ=2,47$) di Kecamatan Air Besi, domba ($LQ=6,91$) di Kecamatan Batik Nau, dan babi ($LQ=6,84$) di Kecamatan Arma Jaya.

Jika dilihat berdasarkan lokasi per kecamatan, komoditas ternak ruminansia yang paling unggul di Kecamatan Enggano, Air Napal, Tanjung Agung Palik, Lais, dan Putri Hijau adalah kerbau; di Kecamatan Kerkap, Hulu Palik, Giri Mulya, dan Ketahun adalah sapi potong; di Kecamatan Air Besi, Batik Nau, Air Padang, dan Ulok Kupai adalah domba; di Kecamatan Arga Makmur adalah babi; dan di Kecamatan Padang Jaya dan Napal Putih adalah kambing. Sedangkan di Kecamatan Pinang Raya dan Marga Sakti Sebelat tidak memiliki komoditas ternak ruminansia unggulan.

Tabel 4.19. Hasil Analisis LQ Komoditas Ternak Unggas di Kabupaten Bengkulu Utara

Kecamatan	Nilai LQ Komoditas Ternak Unggas			
	Ayam kampung	Ayam petelur	Ayam pedaging	Itik

Kecamatan	Nilai LQ Komoditas Ternak Unggas			
	Ayam kampung	Ayam petelur	Ayam pedaging	Itik
Enggano	1,58	0,00	0,00	6,05
Kerkap	0,65	0,00	1,63	0,20
Air Napal	0,13	0,82	2,29	1,77
Air Besi	1,62	0,00	0,00	4,34
Hulu Palik	1,54	0,86	0,05	4,59
Tanjung Agung Palik	0,15	0,81	2,34	0,00
Arga Makmur	0,18	1,64	2,20	0,41
Arma Jaya	1,07	0,39	0,92	1,43
Lais	1,47	0,00	0,00	10,21
Batik Nau	1,72	0,00	0,00	0,63
Giri Mulya	0,94	0,00	1,18	0,62
Air Padang	1,73	0,00	0,00	0,42
Padang Jaya	1,10	6,14	0,45	1,34
Ketahun	1,00	0,00	0,89	5,33
Napal Putih	1,62	0,00	0,00	4,39
Ulok Kupai	1,73	0,00	0,00	0,48
Pinang Raya	0,00	0,00	0,00	0,00
Putri Hijau	1,72	0,00	0,01	0,62
Marga Sakti Sebelat	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Utara (2017), diolah

Berdasarkan hasil analisis LQ yang disajikan pada Tabel 4.19, dapat dilihat bahwa pemusatan komoditas-komoditas ternak unggas yang memiliki nilai LQ>1 adalah: (1) ayam kampung di Kecamatan Enggano, Air Besi, Hulu Palik, Arma Jaya, Lais, Batik Nau, Air Padang, Padang Jaya, Ketahun, Napal Putih, Ulok Kupai, dan Putri Hijau; (2) ayam petelur di Kecamatan Arga Makmur dan Padang Jaya; (3) ayam pedaging di Kecamatan Kerkap, Air Napal, Tanjung Agung Palik, Arga Makmur, dan Giri Mulya; dan (4) itik di Kecamatan Enggano, Air Napal, Air Besi, Hulu Palik, Arma Jaya, Lais, Padang Jaya, Ketahun, dan Napal Putih.

Komoditas-komoditas ternak unggas yang memiliki nilai LQ tertinggi di suatu lokasi dapat disimpulkan merupakan komoditas yang memiliki tingkat komparatif tertinggi atau komoditas paling unggul di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis LQ pada Tabel 4.19, dapat dilihat bahwa komoditas ayam kampung (LQ=1,73) paling unggul di Kecamatan Air Padang, ayam petelur (LQ=6,14) di Kecamatan Padang Jaya, ayam pedaging (LQ=2,34) di Kecamatan Tanjung Agung Palik, dan itik (LQ=10,21) di Kecamatan Lais.

Jika dilihat berdasarkan lokasi per kecamatan, komoditas ternak unggas yang paling unggul di Kecamatan Enggano, Air Besi, Hulu Palik, Arma Jaya, Lais, Ketahun, dan Napal Putih, adalah itik; di Kecamatan Kerkap, Air Napal, Tanjung Agung Palik, Arga Makmur, dan Giri Mulya adalah ayam pedaging; di Kecamatan Batik Nau, Air Padang, Ulok Kupai, dan Putri Hijau adalah ayam kampung; dan di Kecamatan Padang Jaya adalah ayam petelur. Sedangkan di Kecamatan Pinang Raya dan Marga Sakti Sebelat tidak memiliki komoditas ternak unggas unggulan.

5. Komoditas Perikanan

Data terkait subsektor perikanan yang diperoleh dari BPS (Kabupaten Bengkulu Utara dalam Angka Tahun 2017) adalah data produksi perikanan budidaya (dalam ton) dan data luas wilayah potensi rumah tangga perikanan budidaya (dalam hektar) tingkat kecamatan. Namun, sebaran data produksi perikanan budidaya kurang baik untuk digunakan dalam analisis LQ, sehingga data yang digunakan adalah data luas wilayah potensi rumah tangga perikanan budidaya.

Hasil analisis LQ subsektor perikanan di Kabupaten Bengkulu Utara disajikan pada Tabel 4.20. Berdasarkan tabel tersebut, pemusatan komoditas-komoditas perikanan yang memiliki nilai $LQ > 1$ adalah perikanan: (1) tambak di Kecamatan Air Napal, Air Besi, Lais, Batik Nau, Ketahun, dan Putri Hijau; (2) kolam *fresh* di Kecamatan Hulu Palik, Tanjung Agung Palik, Arma Jaya, Giri Mulya, Padang Jaya, Napal Putih, Ulok Kupai, dan Putri Hijau; (3) keramba di Kecamatan Air Napal, Hulu Palik, Arga Makmur, Giri Mulya, dan Napal Putih; (4) jaring apung di Kecamatan Air Napal, Hulu Palik, Arga Makmur, Giri Mulya, dan Napal Putih; dan (5) sawah di Kecamatan Air Besi, Hulu Palik, Tanjung Agung Palik, Arga Makmur, Arma Jaya, dan Lais.

Tabel 4.20. Hasil Analisis LQ Komoditas Perikanan Budidaya di Kabupaten Bengkulu Utara

Kecamatan	Nilai LQ Komoditas Perikanan Budidaya				
	Tambak	Kolam Fresh	Keramba	Jaring Apung	Sawah
Enggano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kerkap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Air Napal	3,35	0,30	1,70	1,39	0,97
Air Besi	2,24	0,46	0,75	0,89	2,82
Hulu Palik	0,00	1,07	3,33	3,11	1,05
Tanjung Agung Palik	0,00	1,26	0,00	0,00	1,96
Arga Makmur	0,00	0,70	2,53	1,96	5,02
Arma Jaya	0,00	1,06	0,00	0,00	3,66
Lais	3,22	0,41	0,55	0,68	1,00
Batik Nau	3,02	0,51	0,58	0,81	0,60
Giri Mulya	0,00	1,11	3,05	2,89	0,92
Air Padang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padang Jaya	0,00	1,33	0,75	0,80	0,77
Ketahun	1,53	0,95	0,50	0,50	0,51
Napal Putih	0,00	1,31	1,37	1,61	0,37
Ulok Kupai	0,00	1,39	0,00	0,00	0,82
Pinang Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Putri Hijau	1,49	1,01	0,00	0,00	0,52
Marga Sakti Sebelat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Utara (2017), diolah

Komoditas-komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai LQ tertinggi di suatu lokasi dapat disimpulkan merupakan komoditas yang memiliki tingkat komparatif tertinggi atau komoditas paling unggul di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis LQ pada Tabel 4.20, dapat dilihat bahwa komoditas perikanan tambak ($LQ=3,35$) paling unggul di Kecamatan Air Napal, perikanan kolam *fresh* ($LQ=1,39$) paling unggul di Kecamatan Ulok Kupai, perikanan keramba ($LQ=3,33$) paling unggul di Kecamatan Hulu Palik, perikanan jaring apung ($LQ=3,11$) paling unggul di Kecamatan Hulu Palik, dan perikanan sawah ($LQ=5,02$) paling unggul di Kecamatan Arga Makmur.

Jika dilihat berdasarkan lokasi per kecamatan, komoditas perikanan yang paling unggul di Kecamatan Air Napal, Lais, Batik Nau, Ketahun, dan Putri Hijau adalah perikanan tambak; di Kecamatan Air Besi, Tanjung Agung Palik, Arga Makmur, dan Arma Jaya adalah perikanan sawah; di Kecamatan Hulu Palik dan Giri Mulya adalah perikanan keramba; di Kecamatan Padang Jaya dan Ulok Kupai adalah perikanan kolam *fresh*; dan di Kecamatan Napal Putih adalah perikanan jaring apung. Sedangkan Kecamatan Enggano, Kerkap, Air Padang, Pinang Raya, dan Marga Sakti Sebelat tidak memiliki komoditas unggulan perikanan budidaya.

4.4.2. Kesesuaian Hasil Analisis Produk/Komoditas Unggulan dengan Hasil Analisis Terdahulu dan Kesepakatan berdasarkan *Focused Group Discussion* (FGD)

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 4.21, dapat dilihat bahwa produk-produk atau komoditas-komoditas unggulan di Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan berdasarkan kajian terdahulu yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2016 adalah perikanan, karet, dan kelapa sawit dengan lokus deliniasi di Kecamatan Padang Jaya (di 3 desa: Desa Tanjung Harapan, Marga Sakti, dan Tambak Rejo). Komoditas yang ditetapkan tersebut tetap sama dengan komoditas unggulan yang ditetapkan dan tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Penyusunan RPKP Tahun 2018, hanya saja untuk perikanan budidaya komoditas utamanya adalah ikan nila. Lokus delienasi yang ditetapkan juga sama, yaitu di Kecamatan Padang Jaya (di 3 desa: Desa Tanjung Harapan, Marga Sakti, dan Tambak Rejo).

Jika dibandingkan dengan hasil analisis LQ yang telah dilakukan dengan menggunakan data terbaru, komoditas unggulan yang telah ditetapkan berdasarkan lokasi deliniasi tingkat kecamatan tersebut sesuai. Di mana, Kecamatan Padang Jaya memang memiliki komoditas unggulan tanaman perkebunan karet (LQ=1,04) dan juga cukup unggul dalam pengembangan komoditas kelapa sawit (LQ=0,85). Sedangkan untuk perikanan budidaya, Kecamatan Padang Jaya memang unggul dalam pengembangan perikanan budidaya kolam *fresh*, dengan komoditas unggulannya adalah ikan nila. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Kabupaten Bengkulu Utara dalam Angka Tahun 2017), produksi ikan nila tertinggi di tahun 2016 adalah di Kecamatan Padang Jaya (sebesar 3.183,8 ton). Kesesuaian lokasi deliniasi untuk lingkup desa berdasarkan hasil FGD, yaitu di Desa Tanjung Harapan, Desa Marga Sakti, dan Desa Tambak Rejo telah terkonfirmasi sesuai. Tema pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Bengkulu Utara yang telah disepakati bersama berdasarkan FGD adalah Agrominapolitan.

Tabel 4.21. Pilihan Komoditas Unggulan kawasan Agrominapolitan

Provinsi	Kabupaten	RPKP Sebelumnya	Berita Acara Kesepakatan (Hasil FGD di Jakarta, 22 Mei 2018)	Berita Acara Kesepakatan (Hasil FGD di Daerah)
Bengkulu	Bengkulu Utara	Lokus Delineasi: Kec. Padang Jaya 1. Desa Tanjung Harapan 2. Desa Marga Sakti 3. Desa Tambak Rejo Produk Unggulan:	Lokus Delineasi: Kec. Padang Jaya 1. Desa Tanjung Harapan 2. Desa Marga Sakti 3. Desa Tambak Rejo Produk Unggulan:	Lokus Delineasi → Usulan penambahan Kec. Padang Jaya 1. Desa Tanjung Harapan 2. Desa Marga Sakti 3. Desa Tambak Rejo Produk Unggulan:

Provinsi	Kabupaten	RPKP Sebelumnya	Berita Acara Kesepakatan (Hasil FGD di Jakarta, 22 Mei 2018)	Berita Acara Kesepakatan (Hasil FGD di Daerah)
		Perikanan, Karet dan Sawit Tema Pengembangan: Agrominapolitan	Perikanan budidaya (ikan nila), Karet dan Sawit Tema Pengembangan: Agrominapolitan	Perikanan budidaya (ikan nila), Karet dan Sawit Tema Pengembangan: Agrominapolitan Usulan Penambahan Lokasi dan Produk/ Komoditas: Kec. Padang Jaya 1. Desa Padang Jaya Komoditas: Sapi 2. Desa Sidoluhur Komoditas: Ikan nila 3. Desa Tanah Hitam Komoditas: Kopi

Sumber : Hasil FGD di Kawasan, 2018

4.4.3. Kondisi Kemiskinan

Dalam periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Utara cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2011 persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 14,40%, dan mengalami penurunan di Tahun 2017 menjadi 13,11%.

Jika dibandingkan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Utara masih dibawah angka kemiskinan Provinsi Bengkulu sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.22. Tingkat Kemiskinan Bengkulu Utara

Tahun	Persentase Angka Kemiskinan (%)	
	Kab Bengkulu Utara	Provinsi Bengkulu
2011	14,40%	17,36%
2012	14,40%	17,51%
2013	14,50%	17,75%
2014	13,95%	17,09%
2015	14,33%	17,88%
2016	13,67%	17,32%
2017	13,11%	15,59%

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017

Analisis data kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu TNP2K tahun 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.23. Daftar Rumah Tangga dan Individu Berdasarkan Tingkat Kemakmuran

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				Total	Jumlah Individu				Total
	Desil I	Desil II	Desil III	Desil IV		Desil I	Desil II	Desil III	Desil IV	
Air Besi	55	235	309	323	922	264	937	1.115	1.031	3.347

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				Total	Jumlah Individu				Total
	Desil I	Desil II	Desil III	Desil IV		Desil I	Desil II	Desil III	Desil IV	
Air Napal	54	162	216	270	702	319	790	965	1.080	3.154
Air Padang	73	268	274	320	935	352	961	837	815	2.965
Arga Makmur	190	590	610	685	2.075	1.022	2.606	2.406	2.449	8.483
Arma jaya	104	321	344	337	1.106	561	1.381	1.284	1.054	4.280
Batik Nau	105	335	400	469	1.309	551	1.344	1.336	1.182	4.413
Enggano	19	48	103	119	289	128	229	418	424	1.199
Giri Mulya	18	154	263	323	758	95	698	1.018	1.110	2.921
Hulu Palik	131	374	384	355	1.244	717	1.710	1.512	1.246	5.185
Kerkap	156	404	466	467	1.493	860	1.839	1.765	1.477	5.941
Ketahun	101	359	459	492	1.411	564	1.540	1.677	1.487	5.268
Lais	74	259	348	368	1.049	376	1.106	1.347	1.213	4.042
Marga Sakti Sebelat	77	268	279	359	983	473	1.245	1.086	1.097	3.901
Napal Putih	77	333	420	504	1.334	432	1.423	1.495	1.486	4.836
Padang Jaya	150	560	811	976	2.497	854	2.569	3.078	3.022	9.523
Pinang Raya	49	217	332	382	980	262	1.007	1.299	1.245	3.813
P. Hijau	25	134	250	353	762	145	637	963	1.108	2.853
TAP	104	296	327	271	998	556	1.264	1.231	895	3.946
Ulok Kupai	65	324	448	498	1.335	367	1.424	1.660	1.574	5.025
Total	1.627	5.641	7.043	7.871	22.182	8.898	24.710	26.492	24.995	85.095

Sumber: Basis Data Terpadu TNP2K 2015

Berdasarkan basis data terpadu TNP2K Tahun 2015 jumlah rumah tangga/Individu dengan pendapatan terendah 40% di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 22.185 keluarga yang terdapat di 19 Kecamatan, terdiri dari Desil I 1.627, Desil II 5.641, Desil III 7.043, Desil IV 7.871 dan untuk jumlah individu berjumlah 85.095 orang yang terdiri dari Desil I 8.898, Desil II 24.710, Desil III 26.492, Desil IV 24.995.

Berdasarkan data RPJMDes masing-masing desa yang ada di dalam kawasan AgroMinapolitan tahun 2017, teridentifikasi penduduk miskin di Desa Marga Sakti berjumlah 434 jiwa, Desa Tambak Rejo berjumlah 199 dan di desa Tanjung Harapan berjumlah 253 jiwa.

4.5. PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN

Menguraikan tentang jenis-jenis produk unggulan kawasan, jumlah tenaga kerja diserap, produksi produk unggulan dalam lima tahun terakhir dalam satuan berat/volume dan uang, serta pasar tujuan barang yang diproduksi kawasan tersebut apakah untuk pasar domestik atau ekspor. Produk unggulan kawasan yang dipilih oleh masyarakat adalah perikanan budidaya, karet dan kelapa sawit.

1. Perikanan budidaya

Luas serta sebaran perikanan budidaya ada pada setiap desa dalam kawasan. Luas perusahaan budidaya ikan dominan terdapat di Desa Tambak Rejo, yaitu sebesar 455 ha. Sementara luas total kolam yang diusahakan masyarakat untuk perikanan budidaya yaitu sebesar 776 ha. Untuk produksi ikan nila tertinggi terdapat di Desa Tambak Rejo yaitu sebesar 2.011 ton, dengan total produksi ikan kawasan sebesar 3.457 ton.

Produksi produktivitas panen ikan per-hektar rata-rata untuk 3 desa adalah sebesar 4,45 ton/ha.

Tabel 4.24. Luas, produksi dan produktivitas komoditas perikanan budidaya tiap desa di kawasan AgroMinapolitan

Desa	Komoditas perikanan		Produktivitas (ton/ha)
	Luas yang diusahakan (ha)	Produksi (ton)	
Marga Sakti	197	871	4,42
Tambak Rejo	455	2.011	4,42
Tanjung Harapan	124	575	4,64
Jumlah	776	3.457	4,45

Sumber : RPJMDes, 2018

Untuk produk perikanan darat pemasaran terjauh ke Provinsi Sumatera Utara. Komoditas lainnya yang berfungsi sebagai produk pendukung komoditas unggulan yaitu Karet dan Sawit diambil oleh perusahaan sekitar Provinsi Bengkulu.

2. Karet

Komoditas karet adalah salah satu komoditas yang telah lama diusahakan oleh masyarakat dalam kawasan AgroMinapolitan. Luas serta sebaran tanaman karet ada pada setiap desa dalam kawasan. Luas pengusahaan lahan dominan untuk komoditas karet yang diusahakan masyarakat terdapat di Desa Marga Sakti, yaitu sebesar 405 ha. Sementara luas total yang diusahakan masyarakat untuk komoditas karet yaitu sebesar 1.026 ha. Untuk produksi getah karet dalam bentuk lateks, produksi tertinggi ada di Desa Marga Sakti yaitu sebesar 304 ton. Produksi lateks kawasan sebesar 771 ton, dengan produktivitas per-hektar rata-rata sama untuk 3 desa yang berada dalam kawasan yaitu 0,75 ton/ha. Perkembangan komoditas karet di kawasan AgroMinapolitan kurang begitu baik mengingat harga yang cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir, sehingga banyak petani karet yang melakukan alih fungsi komoditas yang diusahakan menjadi tanaman kelapa sawit.

Tabel 4.25. Luas, produksi dan produktivitas komoditas karet tiap desa di kawasan AgroMinapolitan

Desa	Komoditas karet		Produktivitas (ton/ha)
	Luas yang diusahakan (ha)	Produksi (ton)	
Marga Sakti	405	304	0,75
Tambak Rejo	295	222	0,75
Tanjung Harapan	326	245	0,75
Jumlah	1.026	771	0,75

Sumber : RPJMDes, 2018

3. Kelapa sawit

Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas yang berkembang cukup masif di kawasan kawasan AgroMinapolitan. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara ikut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah petani sawit di kawasan AgroMinapolitan. Adanya pabrik pengolah kelapa sawit yang berdiri tidak jauh dari kawasan ini serta adanya peluang untuk menampung hasil penennya, menggerakkan sebagian masyarakat untuk membudidayakan tanaman kelapa sawit. Selain itu menurunnya harga jual getah karet ikut mendorong masyarakat pengusaha karet untuk beralih membudidayakan tanaman kelapa sawit. Luas serta sebaran

tanaman kelapa sawit ada pada setiap desa dalam kawasan. Luas pengusahaan lahan dominan untuk komoditas kelapa sawit yang diusahakan masyarakat terdapat di Desa Marga Sakti, yaitu sebesar 521 ha. Sementara luas total yang diusahakan masyarakat untuk komoditas karet yaitu sebesar 1.395 ha. Produksi kelapa sawit tertinggi ada di Desa Marga Sakti yaitu sebesar 2.080 ton. Produksi kelapa sawit kawasan sebesar 4.701 ton, dengan produktivitas per-hektar rata-rata dari 3 desa tertinggi terdapat di Desa Marga Sakti dan Tambak Rejo yaitu 3,99 ton/ha. Produktivitas panen rata-rata tanaman kelapa sawit di kawasan AgroMinapolitan adalah sebesar 3,37 ton/ha. Perkembangan komoditas kelapa sawit di kawasan AgroMinapolitan saat ini kurang begitu baik karena tidak semua hasil panen kelapa sawit dari masyarakat dapat ditampung oleh pabrik pengolah kelapa sawit.

Tabel 4.26. Luas, produksi dan produktivitas komoditas kelapa sawit tiap desa di kawasan AgroMinapolitan

Desa	Komoditas kelapa sawit		Produktivitas (ton/ha)
	Luas yang diusahakan (ha)	Produksi (ton)	
Marga Sakti	521	2.080	3,99
Tambak Rejo	383	1.530	3,99
Tanjung Harapan	491	1.091	2,22
Jumlah	1.395	4.701	3,37

Sumber : RPJMDes, 2018

Beberapa produksi yang diusulkan seperti Kopi Trabas potensial menjadi kopi premium yang pasaran manca negara. Desa Tanah Hitam yang merupakan Desa pemekaran dari Desa Margasakti adalah Desa Pinggir Hutan yang merupakan kawasan penyangga hutan Bukit Barisan.

Sedangkan komoditas lainnya yang menjadi usulan adalah komoditas sapi yang sebarannya hampir di semua kawasan Kecamatan Padang Jaya. Desa Padang Jaya menjadi bagian usulan tempat/desa tambahan karena merupakan pusat industri olahan skala UMKM. Sedangkan untuk desa Sidoluhur menjadi tambahan desa karena menjadi sentra pembibitan dan pengairan.

Ketiga desa tersebut bisa juga diposisikan sebagai desa penunjang kawasan. Mengingat fungsi desa-desa tersebut sebagai penerima hasil (desa Padang Jaya dan desa Tanah Hitam) sedangkan desa Sidoluhur adalah desa penyedia input produksi, terutama bibit ikan dan sumber air (Bendungan Lais).



Gambar 4.8. Kopi Trabas dari Desa Tanah Hitam menjadi salah satu usulan komoditas unggulan

Sumber: <https://www.instagram.com/p/BiviQrOIlw2/?h=id&tagged=kopitrabas>

4.5.1. Identifikasi Komoditas Unggulan

Identifikasi komoditas unggulan mempunyai peran cukup penting bagi perencanaan pengembangan kawasan perdesaan. Dengan mengembangkan komoditas unggulan pada setiap aspek sistem agribisnis diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah kawasan perdesaan tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

4.5.1.1. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan

Analisis penentuan komoditas unggulan tidak hanya dilihat pada satu atau dua aspek parameter saja, tetapi dianalisis dari berbagai aspek, baik dari aspek kebijakan, teknis, maupun aspek ekonomi dan sosial. Analisis Aspek kebijakan akan dilihat arahan pengembangan komoditas unggulan baik berasal dari kebijakan pemerintah pusat (kementerian terkait atau dari amanat RPJMN), kebijakan pemerintah daerah, serta keterkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD atau RTRW). Pada aspek teknis beberapa parameter yang dapat dilihat antara lain dari sisi ketersediaan bahan baku, luasan atau jumlah eksiting, kesesuaian lahan, produksi, produktivitas, jumlah tenaga kerja serta sesuai dengan aspek lingkungan hidup. Sedangkan dari sisi ekonomi juga akan dilihat peluang dan potensi pemasaran, besarnya investasi pengembangan, dan analisis *cost benefit ratio*.

1. Penentuan Komoditas Unggulan dengan analisis aspek Kebijakan

Penentuan Komoditas Unggulan dari aspek Kebijakan akan dilihat berdasarkan hasil analisis kebijakan baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah provinsi atau kabupaten. Berdasarkan analisis profil kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, potensi pengembangan kawasan adalah komoditas berbasis pertanian (tanaman perkebunan) dan perikanan budidaya. Berdasarkan Peraturan menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/CT.140/8/2012 yang kemudian didetailkan pada peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, pengembangan pertanian di Kabupaten Bengkulu Utara diarahkan untuk pengembangan komoditas perkebunan (Karet dan kelapa sawit) dan perikanan budidaya.

2. Penentuan Komoditas Unggulan dengan analisis LQ.

Berdasarkan analisis profil pertanian pada bab sebelumnya yang dianalisis berdasarkan data sekunder dan data primer hasil pengamatan di lapangan ada beberapa komoditas pertanian yang berpotensi dikembangkan di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya, yaitu antara lain tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu), perkebunan (kelapa, kopi, dan lain lain), dan peternakan (sapi potong, kambing, dan lain lain). Salah satu metode analisis yang dapat dilakukan dalam rangka untuk menentukan komoditas tersebut di atas, adalah dengan menggunakan analisis LQ. Tujuan analisis LQ adalah untuk melihat komoditas yang menjadi basis dalam pengembangan wilayah. Tabel berikut ini adalah hasil analisis LQ terhadap Komoditas Pertanian di Kawasan Perdesaan. Berdasarkan hasil analisis LQ di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya terdapat 12 komoditas pertanian yang menjadi komoditas basis pada kawasan tersebut, yaitu tanaman pangan (jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar), hortikultura (cabai, pisang dan pepaya) perkebunan (kelapa sawit), peternakan (kambing) dan perikanan (kolam *fresh*). Secara lengkap hasil analisis LQ terhadap komoditas pertanian di Kawasan AgroMinapolitan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.27. Hasil Analisis LQ terhadap Komoditas Pertanian di Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

No	Komoditas	Nilai LQ	Status
A	TANAMAN PANGAN		
1	Padi sawah	0,76	NON BASIS
2	Padi ladang	0,48	NON BASIS
3	Jagung	1,66	BASIS
4	Kedelai	3,88	BASIS
5	Kacang tanah	1,18	BASIS

No	Komoditas	Nilai LQ	Status
6	Kacang hijau	0,22	NON BASIS
7	Ubi kayu	2,66	BASIS
8	Ubi jalar	2,51	BASIS
B	HORTIKULTURA		
1	Cabai	1,08	BASIS
2	Pisang	2,29	BASIS
3	Pepaya	24,68	BASIS
C	PERKEBUNAN		
1	Karet	0,33	NON BASIS
2	Kelapa	0,26	NON BASIS
3	Kelapa sawit	1,83	BASIS
4	Kopi Robusta	0,72	NON BASIS
D	TERNAK		
1	Sapi potong	0,79	BASIS
2	Kambing	1,6	BASIS
E	PERIKANAN		
1	Kolam fresh	1,13	BASIS
2	Keramba	0,75	NON BASIS
3	Jaring apung	0,8	NON BASIS

Sumber Hasil Analisis 2018

3. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan dari aspek teknis produksi

Analisis penentuan komoditas unggulan Unggulan dari aspek teknis produksi dapat dilihat dari aspek batas luasan minimal kawasan pengembangan komoditas unggulan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Berdasarkan peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa, luas minimal secara ekonomi dalam rangka pengembangan kawasan untuk tanaman pangan adalah minimal 5.000 ha dan untuk kedelai 2.000 ha, untuk hortikultura diatas 25 ha dan perikanan kolam diatas 500 ha.

Tabel 4.28. Aspek Teknis produksi komoditas pertanian yang dapat dikembangkan di kawasan AgroMinapolitan

No.	Komoditas	Luas eksisiting (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Karet	1.026	771	0,75
2	Kelapa sawit	1.395	4.701	3,37
3	Perikanan kolam	776	3.457	4,45

Sumber : Analisis data lapang 2018

Berdasarkan aspek teknis produksi komoditas pertanian seperti pada Tabel di atas, maka komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di kawasan AgroMinapolitan adalah perikanan kolam dan kelapa sawit.

4. Penentuan Komoditas Unggulan dari aspek ekonomi dan potensi pasar

Aspek lainnya yang menjadi kriteria penentuan komoditas unggulan di suatu kawasan perdesaan adalah aspek ekonomi dan pemasaran. Berdasarkan hasil analisis ekonomi yaitu dengan melihat pendapatan pendapatan petani. Berdasarkan hasil analisis ekonomi yaitu dengan melakukan analisis pendapatan terhadap komoditas potensi di kawasan AgroMinapolitan, terdapat 3 komoditas yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu perikanan kolam, kelapa sawit dan karet artinya bahwa ketiga komoditas tersebut layak dikembangkan untuk skala ekonomi yang lebih luas karena mempunyai nilai R/C di atas 1. Dibawah ini adalah hasil analisis ekonomi untuk ketiga komoditas perikanan kolam, kelapa sawit dan karet.

Tabel 4.29. Analisis Ekonomi pengembangan komoditas perikanan kolam

No.	Variabel	Jumlah
PENGELUARAN		
1	Total biaya tetap/ha	Rp. 24.025.000
2	Total Biaya Variabel/ha	Rp. 12.500.000
	Total Biaya/ha	Rp. 36.525.000
PENERIMAAN		
1.	Produksi Per Hektar (kg)	4.500 kg/ha
2.	Harga jual per-kg	Rp. 18.000
	Total Penerimaan	Rp 81.000.000
	TOTAL PENDAPATAN	Rp. 44.475.000
	R/C	2,21

Sumber : Analisis data lapang 2018

Analisis usaha tani digunakan sebagai parameter kelayakan penggunaan lahan secara ekonomi. Indikator yang digunakan adalah rasio penerimaan dengan total biaya (R/C ratio). Suatu usaha tani komoditas pertanian dikatakan layak apabila nilai R/C-nya lebih besar dari satu, dimana semakin tinggi nilai R/C ratio maka usaha tani tersebut semakin menguntungkan (Gray *et al*, 1992).

Berdasarkan hasil analisis pendapatan petani untuk komoditas perikanan budidaya (kolam) seperti yang tertera pada tabel di atas, nilai R/C untuk komoditas perikanan budidaya adalah 2,21. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa komoditas perikanan layak untuk dikembangkan di kawasan AgroMinapolitan. Nilai R/C 2,21 juga dapat diartikan bahwa kalau melakukan investasi untuk kegiatan pengembangan komoditas perikanan budidaya dengan modal Rp. 1.000.000,- maka akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 2.210.000,-.

Tabel 4.30. Analisis Ekonomi pengembangan komoditas kelapa sawit

No.	Variabel	Jumlah
PENGELUARAN		
1	Total biaya tetap/ha	Rp. 1.000.000
2	Total Biaya Variabel/ha	Rp. 2.750.000
	Total Biaya/ha	Rp. 3.750.000
PENERIMAAN		
1	Produksi Per Hektar (kg)	8250
2	Harga Jual kelapa sawit (Rp/kg)	Rp. 1.000
	Total Penerimaan	Rp 8.250.000
	Total pendapatan	Rp. 4.500.000

Sumber : Analisis data lapang 2018

Berdasarkan hasil analisis pendapatan petani Komoditas kelapa sawit seperti yang tertera pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai R/C untuk kelapa sawit adalah 1,2. Hal itu mempunyai arti bahwa komoditas kelapa sawit layak untuk dikembangkan pada kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya, karena mempunyai nilai lebih dari 1. Sedangkan nilai R/C 1,2 juga dapat diartikan bahwa apabila melakukan investasi untuk kegiatan kelapa sawit dengan modal Rp. 1.000.000,- akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 1,200.000.

Tabel 4.31. Analisis Ekonomi pengembangan komoditas karet

No.	Variabel	Jumlah
PENGELUARAN		
1	Total biaya tetap/ha	Rp. 1.000.000
2	Total Biaya Variabel/ha	Rp. 2.000.000
	Total Biaya/ha	Rp. 3.000.000
PENERIMAAN		
1	Produksi Per Hektar (kg)	777 kg
2	Harga karet (Rp/kg)	Rp. 6.000
	Total Penerimaan	Rp 4.662.000
	Pendapatan	Rp. 1.662.000
	R/C	0,55

Sumber : Analisis data lapang 2018

Berdasarkan hasil analisis pendapatan petani karet seperti yang tertera pada tabel di atas, nilai R/C untuk Komoditas karet adalah 0,55. Hal itu mempunyai arti bahwa komoditas karet belum layak untuk dikembangkan pada kawasan AgroMinapolitan, karena mempunyai nilai kurang dari 1. Sedangkan nilai R/C 0,55 juga dapat diartikan bahwa apabila melakukan investasi untuk kegiatan karet dengan modal Rp. 1.000.000,- akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 550.000,-.

Berdasarkan hasil analisis komoditas unggulan pendekatan potensi pasar, hanya komoditas perikanan budidaya dan kelapa sawit yang memiliki prospek baik untuk dikembangkan di kawasan AgroMinapolitan, baik secara lokal, regional maupun nasional. Untuk komoditas lainnya belum memenuhi kriteria untuk dikembangkan karena dari aspek luas yang diusahakan masih cukup rendah.

4.5.1.2. Penentuan Komoditas Unggulan dengan analisis pada kondisi infrastruktur penunjang

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam penentuan komoditas unggulan suatu kawasan adalah aspek infrastruktur penunjang, baik infrastruktur penunjang dalam hal produksi, pengolahan maupun infrastruktur pemasaran. Ketersediaan SDM adalah parameter yang sangat penting diperhatikan dalam rangka pengembangan suatu komoditas. Salah satu permasalahan di kawasan AgroMinapolitan adalah petani di kawasan tersebut rata-rata sudah tua dengan umur di atas 55 tahun, sedangkan generasi mudanya rata-rata bekerja di luar pertanian atau ke luar daerah. Aspek penunjang lainnya yang sangat penting adalah ketersediaan infrastruktur produksi dan infrastruktur penunjang usaha tani. Kawasan pengembangan AgroMinapolitan sudah mempunyai infrastruktur produksi dan infrastruktur

penunjang usaha tani yang cukup memadai. Berdasarkan hasil analisis penentuan komoditas unggulan dengan melihat aspek kebijakan, komoditas basis (LQ), aspek teknis produksi (usaha tani), aspek ekonomi dan pasar dan aspek infrastruktur penunjang, maka komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di kawasan AgroMinapolitan adalah perikanan budidaya dan kelapa sawit.

Hasil komoditas unggulan yang diperoleh berdasarkan analisis ke empat aspek diatas, yaitu perikanan budidaya, kelapa sawit dan karet, kemudian dibawa ke dalam forum FGD warga di kawasan AgroMinapolitan. Salah satu tujuan FGD adalah untuk menyakinkan kembali bahwa komoditas unggulan yang sudah dihasilkan benar-benar sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Berdasarkan tiga komoditas tersebut hanya ada satu komoditas yang dinyatakan paling prioritas untuk diunggulkan, yaitu perikanan budidaya.

Tabel 4.32. Analisis Komoditas Unggulan di Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

No	Parameter Komoditas Unggulan	Karet		Kelapa sawit		Perikanan budidaya	
		Status	Skor	Status	Skor	Status	Skor
1.	Berdasarkan kebijakan nasional	Sesuai	3	Sesuai	3	Sesuai	3
2	Berdasarkan Bupati	Sesuai	3	Sesuai	3	Sesuai	3
3	Berdasarkan analisis LQ	Non Basis	1	Sesuai	3	Sesuai	3
4	Ketersediaan bahan baku						
	Luas lahan <i>eksisting</i> (ha)	1.026 ha (<5.000 ha)	1	1.395 ha (<5.000 ha)	1	776 ha (>500 Na)	3
	Potensi pengembangan	0	1	0	1	Ada	3
	Produktivitas (ton/ha)	0,77	1	8,25	3	4,5	3
5	Ketersediaan SDM						
	Jumlah petani	Tersedia	3	Tersedia	3	Tersedia	3
6	Ketersediaan prasarana dan saran						
	Jalan produksi	Tersedia	3	Tersedia	3	Tersedia	3
	Akses terhadap pembiayaan	Tersedia	3	Tersedia	3	Tersedia	3
	Akses terhadap teknologi dan infotmasi	Tersedia	3	Tersedia	3	Tersedia	3
	Ketersediaan saprodi	Tersedia	3	Tersedia	3	Tersedia	3
	Prasarana pertanian	Tersedia	3	Tersedia	3	Tersedia	3
7	Pasar jangka pendek dan jangka panjang	Panjang	3	Panjang	3	Panjang	3
8	Pasar domestik dan pasar ekspor						
	Pasar lokal	Lokal	3	Lokal	3	Lokal	3
	Pasar regional	Regional	3	Regional	3	Regional	3
	Pasar nasional	Nasional	3	Nasional	3	Nasional	3
	Pasar ekspor	Tidak ekspor	1	Tidak ekspor	1	Tidak ekspor	1
9	Pelibatan masyarakat/tenaga kerja	Banyak	3	Banyak	3	Sedikit	3
10	Kesesuaian dengan regulasi						
	RTRW	Sesuai	3	Sesuai	3	Sesuai	3

No	Parameter Komoditas Unggulan	Karet		Kelapa sawit		Perikanan budidaya	
		Status	Skor	Status	Skor	Status	Skor
	Kebijakan komoditas unggulan	Sesuai	3	Sesuai	3	Sesuai	3
11	Aspek lingkungan	Ramah lingkungan	3	Ada resiko	2	Ramah	3
12	Lamanya masyarakat dalam melakukan	1/setahun	3	1/setahun	3	2-3/setahun	3
13	Investasi pengembangan						
	Besar	0	0	0	0	0	0
	Sedang	Sedang	3	Sedang	3	Sedang	3
	Kecil	0	0	0	0	0	0
14	Cost Benefit Ratio	<1	1	>1	3	>1	3
15	Kesesuaian lahan	Sesuai	3	Sesuai	3	Sesuai	3
Total Skor			63		68		73

Sumber : Hasil Analisis

4.6. PRODUK PENDUKUNG KAWASAN PERDESAAN

Produk pendukung kawasan perdesaan kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya adalah peternakan dan pariwisata.

1. Peternakan

Peternakan yang dikembangkan oleh masyarakat di kawasan perdesaan MinaAgropolitan Padang Jaya sejauh ini sebagian besar fokus pada komoditas sapi. Masyarakat juga menginginkan untuk diberi dukungan dalam mengembangkan peternakan tersebut melalui pemberian indukan sapi. Sejauh ini usaha peternakan sapi yang dilakukan oleh masyarakat hanya untuk sapi pedaging dan hanya dipasarkan dalam lingkup kabupaten. Kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas pengembangan peternakan sapi sehingga dapat menjadi alternatif kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

2. Wisata

Pariswisata merupakan salah satu produk pendukung kawasan, atraksi wisata yang tersedia antara lain Reog Ponorogo, Keroncong, dan Tarling. Sedangkan untuk lokasi wisata terdapat lokasi wisata Curug Sembilan di desa Tanah Hitam, yang dulu bagian dari desa Marga Sakti, objek wisata ini ada dalam kawasan hutan lindung. Jenis wisata lain yang berbasis komoditas unggulan adalah wisata mancing dan kuliner ikan. Sedangkan jenis wisata terkait dengan budaya adalah wisata budaya adat Rejang.

4.7. MODAL SOSIAL DAN BUDAYA

Menjelaskan tentang kondisi sosial dan budaya masyarakat antara lain menyangkut *trust*, *netwoth* dan *norms* dalam kaitannya dengan melek bisnis dan keuangan, dan budaya apa saja yang ada di dalam kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan, serta pelibatan pegiat sosial budaya dalam pengembangan kawasan.

Dari data BPS (2010) stok modal sosial Kabupaten Bengkulu Utara rata-rata di atas rata-rata stok modal sosial di Indonesia kecuali dari sisi tingkat kepercayaan terhadap aparaturnya dan kelompok, serta jejaring.

Tabel 4.33. Stok Modal Sosial kabupaten Bengkulu Utara

Peringkat	Kode	Nama	Stok Modal Sosial	Komponen (%)						Total
				Percaya		Toleransi beragama dan suku bangsa	Kelompok	Persahabatan	Jejaring	
				Aparatur dan Kelompok	Tetangga					
217	1703	Bengkulu Utara	61,2	30,0	19,4	18,1	12,0	10,1	10,4	100,0
		Provinsi Bengkulu	62,28	30,16	17,88	18,12	12,71	10,07	11,09	100,00
		Indonesia	60,60	31,16	18,96	17,17	11,96	9,56	11,20	100,00

Sumber: Stok Modal Sosial dan Persentase Kontribusi Faktor Pembentuknya di Indonesia (BPS 2010)

Kondisi sosial pada tahun 2018 dari data RPJM Desa adalah sebagai berikut.

1. Desa Margasakti

Penduduk Desa Marga Sakti berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Bengkulu Selatan, Madura, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Marga Sakti dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Keaneka ragaman budaya yang dibawa dari masing-masing asal daerah, menjadikan Desa Marga Sakti menjadi desa yang kaya akan kesenian daerah. Berbagai paguyuban kesenian mewarnai kehidupan masyarakat. Namun dengan berkembangnya kesenian-kesenian moderen, hasanah budaya masyarakat aslinya sudah kurang nampak lagi, apalagi selama ini tidak ada wadah yang mampu menghidupkan seni budaya masyarakat sehingga kreasi-kreasi seni yang selama ini ada tenggelam bersama zaman.

2. Desa Tanjung Harapan

Penduduk Desa Tanjung Harapan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, mayoritas penduduknya dominan berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Oleh karena itu tradisi dan kebudayaan juga bermacam-macam, tradisi gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan kearifan masih terjaga hingga sekarang.

Budaya masyarakat masih sama dengan desa transmigran lainnya, terdiri dari berbagai campuran kelompok budaya, seperti kesenian Tarling dari Jawa Barat, Reog Ponorogo, dan Musik Keroncong yang diketuai transmigran dari Jawa Tengah.

3. Desa Tambak Rejo

Tambak Rejo berasal dari bahasa Jawa, kata “Tambak” mempunyai arti empang atau kolam merupakan penegasan bahwa sebagian besar penduduknya mempunyai usaha budidaya perikanan, sedangkan “Rejo” mempunyai arti Jaya. Dengan penamaan Tambak Rejo diharapkan desa ini memiliki kemajuan dan kejayaan dalam usaha budidaya perikanan.

Desa Tambak Rejo merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Desa Tambak Rejo adalah desa pemekaran dari Desa Tanjung Harapan atau yang lebih dikenal dengan Unit 2, Kecamatan Lais lebih tepatnya kecamatan perwakilan Padang Jaya. yang pada saat itu dibagi menjadi dua wilayah yaitu Unit 2A dan Unit 2B yang merupakan wilayah lokasi transmigrasi Kuro Tidur tahun 1978 dari Propinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Seiring dengan perkembangan waktu, pada tanggal 20 Oktober 2009, wilayah Unit 2B diresmikan menjadi desa defenitif Desa Tambak Rejo oleh Bupati Bengkulu Utara Bapak Imron Rosyadi.

4.8. PRASARANA DAN SARANA

Prasarana merupakan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan suatu kawasan/wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan sarana merupakan fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian sarana dan prasarana dasar merupakan hal yang harus terpenuhi bagi seluruh warga kota atau desa agar dapat mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan didalam suatu kawasan perdesaan antara lain Sarana pendidikan, Sarana kesehatan, Sarana ekonomi, Sarana sosial budaya/ibadah, Sarana dan prasarana transportasi, Sarana dan prasarana energy, Sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi, Sarana dan prasarana air bersih serta Sarana dan prasarana irigasi.

4.8.1. Prasarana dan Sarana Transportasi

Sarana transportasi berupa angkutan umum tidak terdapat di Desa Marga Sakti, Tambak Rejo dan Tanjung Harapan sehingga untuk mencapai ketiga desa tersebut harus menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi jalan yang ada untuk menuju ketiga desa tersebut seluruhnya berbahan dasar aspal, namun terdapat beberapa jalan dengan kondisi rusak. Jalanan yang rusak tersebut dapat menghambat proses distribusi hasil pertanian, perikanan, perkebunan maupun peternakan yang terdapat di ketiga desa tersebut. Berikut beberapa foto kondisi jalan yang dalam kondisi baik dan kondisi rusak di kawasan perdesaan AgroMinapolitan Kab. Bengkulu Utara.

Tabel 4.34. Sarana prasarana transportasi di kawasan AgroMinapolitan

Sarana dan Prasarana	Desa		
	Marga Sakti	Tambak Rejo	Tanjung Harapan
Jalan	15 km	13,5 km	10 km
Jembatan	3 Unit	6 Unit	4 Unit
Angkudes	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Ojek	Ada	Ada	Ada

Sumber : RPJMDes, 2018



Gambar 4.9. Sarana transportasi jalan rusak di kawasan AgroMinapolitan

4.8.2. Jaringan Telekomunikasi dan Internet

Kondisi jaringan telekomunikasi di Desa Marga Sakti, Tambak Rejo dan Tanjung Harapan hanya dapat diakses oleh satu provider telepon seluler. Masyarakat juga telah banyak yang mampu menggunakan telepon genggam sebagai alat komunikasi untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Dengan demikian proses komunikasi antara ketiga desa tersebut dapat berjalan dengan mudah.

Tabel 4.35. Sarana telekomunikasi di kawasan AgroMinapolitan

Sarana dan Prasarana	Desa		
	Marga Sakti	Tambak Rejo	Tanjung Harapan
Kantor Pos	-	-	-
Wartel	-	-	-
Tower Telkom	3	2	1
Lainnya	-	-	-

Sumber : RPJMDes, 2018

4.8.3. Jaringan Energi

Desa Marga Sakti, Tambak Rejo dan Tanjung Harapan seluruhnya telah teraliri listrik. Keberadaan energi listrik di ketiga desa tersebut dipasok oleh PLN. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat desa, sering terjadi pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN. Hal ini cukup menghambat kegiatan ekonomi masyarakat yang membutuhkan alat dengan sumber energi listrik, sehingga masyarakat terpaksa harus menggunakan genset agar kegiatan yang mereka lakukan dapat terus berjalan.

Tabel 4.36. Sarana prasarana energi yang terdapat di beberapa Desa Kawasan AgroMinapolitan

Sarana dan Prasarana	Desa		
	Marga Sakti	Tambak Rejo	Tanjung Harapan
1. SPBU	-	-	-
2. Listrik/ PLTS	Ada	Ada	Ada
3. Lainnya	-	-	-

Sumber : RPJMDes, 2018

4.8.4. Jaringan Air Bersih

Air bersih yang digunakan oleh penduduk di Desa Marga Sakti, Tambak Rejo dan Tanjung Harapan bersumber dari sumur yang digali masing-masing oleh masyarakat. Jaringan PDAM baru ada pada Desa Marga Sakti. Sementara desa lainnya masih menggunakan air sumur sebagai kebutuhan konsumsi dan mencuci dengan kualitas air yang rata-rata masih keruh.

Tabel 4.37. Sarana dan prasarana air bersih di kawasan AgroMinapolitan

Sarana dan Prasarana	Desa		
	Marga Sakti	Tambak Rejo	Tanjung Harapan
1. Sumur	12	9	7
2. PDAM	1	-	-
3. Lainnya	-	-	-

Sumber : RPJMDes, 2018

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

SPAM di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. Berdasarkan PP No.16 Tahun 2005 tentang pengembangan SPAM, SPAM jaringan perpipaan terdiri atas SPAM jaringan perpipaan PDAM, SPAM jaringan perpipaan swadaya masyarakat dan desa, termasuk kran warga atau hidran umum. Sementara itu, SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri atas sumur gali, sumur pompa, penampungan air hujan, (PAH), dan tangki air minum.

Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kecamatan Padang Jaya baik SPAM jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan tidak ada datanya. Sehingga diperlukan survei langsung untuk melihat kondisi setempat.

Faktor utama belum meratanya pelayanan PDAM yang dapat dinikmati oleh masyarakat adalah keterbatasan kapasitas pengelolaan pada Instalasi Pengolah Air Minum (IPA) yang dimiliki. Pembangunan IPA baru membutuhkan investasi yang cukup besar, disamping keterbatasan sumber air yang dijadikan sebagai sumber air baku. Jangkauan jaringan yang masih terbatas juga merupakan penyebab belum meratanya penyediaan air bersih terutama bagi daerah-daerah yang berjarak cukup jauh dari IPA. Berikut ini proyeksi kebutuhan air bersih di Bengkulu Utara dari 2018-2022.

Prasarana penyediaan air minum di Kabupaten Bengkulu Utara dapat berupa Saluran Rumah (SR) dan Hidran Umum (HU). Jumlah kebutuhan Sambungan Rumah (SR) dan Hidran Umum (HU) Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2022 mencapai 257.814 unit sambungan rumah dan 342 unit hidran umum. Kapasitas unit Sambungan Rumah (SR) yaitu sebesar 60 l/o/h sedangkan untuk Hidran Umum (HU) yaitu sebesar 30 l/o/h.

Tabel 4.38. Proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahun 2018-2022

No	Desa	Tahun	Perkiraan Penduduk (Jiwa)	Penduduk terlayani (%)	Kebutuhan Sambungan Rumah			Kebutuhan Hidran Umum			Keb Air Domestik (SR+HU) (ltr/dtk)	Keb Air Non Domestik (30% domestik) (ltr/dtk)	Kebocoran Air (20%) (ltr/dtk)	Total Kebutuhan Air (ltr/dtk)	Kapasitas Air (ltr/dtk)		GAP (ltr/dtk)
					Rasio (90%)	Jumlah (4 jiwa/KK)	Air SR (60 ltr/org/hr)	Rasio (10%)	Jumlah (100 jiwa/HU)	Air HU (30 ltr/org/hr)					Maks	Puncak	
A KEC. PADANG JAYA																	
1	Desa Tanjung Harapan	2018	2.263	100	2.036	509	50.906	226	2	67,88	0,590	0,18	0,12	0,88	0,97	1,33	-64,63
		2019	2.293		2.064	516	51.601	229	2	68,80	0,598	0,18	0,12	0,90	0,99	1,35	-64,62
		2020	2.325		2.092	523	52.305	232	2	69,74	0,606	0,18	0,12	0,91	1,00	1,36	-64,61
		2021	2.356		2.121	530	53.019	236	2	70,69	0,614	0,18	0,12	0,92	1,01	1,38	-64,60
		2022	2.389		2.150	537	53.742	239	2	71,66	0,623	0,19	0,12	0,93	1,03	1,40	-64,58
2	Marga Sakti	2018	6.296	100	5.667	1.417	141.663	630	6	188,88	1,642	0,49	0,33	2,46	2,71	3,69	-96,62
		2019	6.382		5.744	1.436	143.594	638	6	191,46	1,664	0,50	0,33	2,50	2,75	3,74	-96,58
		2020	6.469		5.822	1.456	145.550	647	6	194,07	1,687	0,51	0,34	2,53	2,78	3,80	-96,55
		2021	6.557		5.901	1.475	147.534	656	7	196,71	1,710	0,51	0,34	2,56	2,82	3,85	-96,51
		2022	6.646		5.982	1.495	149.544	665	7	199,39	1,733	0,52	0,35	2,60	2,86	3,90	-96,48
3	Tambang Rejo	2018	2.297	100	2.067	517	51.678	230	2	68,90	0,599	0,18	0,12	0,90	0,99	1,35	-77,32
		2019	2.328		2.095	524	52.377	233	2	69,84	0,607	0,18	0,12	0,91	1,00	1,37	-77,31
		2020	2.359		2.123	531	53.084	236	2	70,78	0,615	0,18	0,12	0,92	1,02	1,38	-77,30
		2021	2.391		2.152	538	53.801	239	2	71,74	0,624	0,19	0,12	0,94	1,03	1,40	-77,29
		2022	2.424		2.181	545	54.528	242	2	72,71	0,632	0,19	0,13	0,95	1,04	1,42	-77,27
Jumlah		2018	10.856														-238,57
		2019	11.003														
		2020	11.153														
		2021	11.305														
		2022	11.459														

Sumber: Hasil Analisa, 2018

4.8.5. Jaringan Irigasi



Gambar 4.10. Irigasi Primer

Irigasi merupakan upaya manusia untuk mengairi lahan pertanian. Sistem irigasi yang digunakan oleh Desa Marga Sakti, Tambak Rejo dan Tanjung Harapan tidak hanya untuk mengairi lahan pertanian, namun juga untuk mengairi kolam-kolam budidaya perikanan air tawar. Sistem irigasi yang digunakan adalah irigasi teknis. Sumber irigasi primer yang digunakan bersumber dari Bendungan Air Lais Kuro Tidur. dengan kapasitas 6.063 ha. Bendungan tersebut berada di antara Desa Kuro Tidur. Irigasi primer tersebut dalam kondisi baik dan kondisi air yang bening. Kemudian

salah satu irigasi sekunder yang digunakan berada di Desa Padang Jaya yang disebut Suplesi Air Buat, dengan sumber air dari Sungai Air Buat dan kapasitas 100-200 m³. Namun kondisi air dari irigasi sekunder tersebut keruh akibat limbah pelet dari usaha budidaya perikanan air tawar. Selain itu, masyarakat di Desa kawasan juga sudah membangun beberapa embung penampung air yang berfungsi sebagai sumber baku pengairan kolam-kolam ikan.

Tabel 4.39. Sarana prasarana infrastruktur pengairan di kawasan AgroMinapolitan

Sarana dan Prasarana	Desa		
	Marga Sakti	Tambak Rejo	Tanjung Harapan
1. Irigasi Teknis	2,5 km	1 km	2 km
2. DAM	-	-	-
3. Embung	2	1	1

Sumber : RPJMDes, 2018

4.8.6. Persampahan

Penanganan terhadap sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kawasan, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat terhadap kawasan sendiri. Masalah persampahan di kawasan AgroMinapolitan sebenarnya sudah lama menjadi persoalan bagi pemerintahan di tiap desa, terutama dalam perilaku masyarakat yang terbiasa membuang sampah sembarangan. Apabila perilaku masyarakat tidak diperbaiki dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kebersihan lingkungan, maka di khawatirkan akan menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Praktik pembuangan sampah yang masih ditemui di lapangan biasanya dengan membuat lubang sampah, membakar, membuang ke sungai dan membuang pinggir jalan atau lahan kosong. Hanya di beberapa tempat saja yang sudah ada TPS (Tempat Pembuangan Sampah), itupun terkendala dalam hal kendaraan angkut yang terbatas.

Prediksi kebutuhan infrastruktur pelayanan sampah di Kabupaten Bengkulu Utara dihitung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018-2022. Dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2018-2022 tersebut maka diperoleh kebutuhan prasarana persampahan yang ideal mengacu pada target pelayanan 100 persen.

Untuk lebih jelasnya tentang kebutuhan prasarana persampahan di Kabupaten Bengkulu Utara ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.40. Kebutuhan Prasarana Persampahan di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2018-2022

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Timbulan Sampah (m ³ /hari)	Potensi Komposting	Potensi Recycle	Kebutuhan Prasarana Persampahan				
							TPS	Luas (ha)	Gerobak (1 m ³)	Kontainer (1 m ³)	Truk Sampah (6 m ³)
TAHUN 2018											
A	KEC. PADANG JAYA	10,856	2,714	11.72	N/A	N/A	14	N/A	14	14	4
1	Tanjung Harapan	2,263	566	1.63	N/A	N/A	3	N/A	3	3	1
2	Marga Sakti	6,296	1,574	6.80	N/A	N/A	8	N/A	8	8	2
3	Tambak Rejo	2,297	574	1.65	N/A	N/A	3	N/A	3	3	1
TAHUN 2019											
A	KEC. PADANG JAYA	11,003	2,751	11.88	N/A	N/A	14	N/A	14	14	4
1	Tanjung Harapan	2,293	573	2.20	N/A	N/A	3	N/A	3	3	1
2	Marga Sakti	6,382	1,595	6.89	N/A	N/A	8	N/A	8	8	2
3	Tambak Rejo	2,328	582	1.68	N/A	N/A	3	N/A	3	3	1
TAHUN 2020											
A	KEC. PADANG JAYA	11,153	2,788	12.05	N/A	N/A	14	N/A	14	14	4
1	Tanjung Harapan	2,325	581	1.67	N/A	N/A	3	N/A	3	3	1
2	Marga Sakti	6,469	1,617	6.99	N/A	N/A	8	N/A	8	8	2
3	Tambak Rejo	2,359	590	2.26	N/A	N/A	3	N/A	3	3	1
TAHUN 2021											
A	KEC. PADANG JAYA	11,305	2,826	12.21	N/A	N/A	14	N/A	14	14	4
1	Tanjung Harapan	2,356	589	1.70	N/A	N/A	3	N/A	3	3	1
2	Marga Sakti	6,557	1,639	7.08	N/A	N/A	8	N/A	8	8	2
3	Tambak Rejo	2,391	598	1.72	N/A	N/A	3	N/A	3	3	1
TAHUN 2022											
A	KEC. PADANG JAYA	11,459	2,865	12.38	N/A	N/A	14	N/A	14	14	4
1	Tanjung Harapan	2,389	597	2.29	N/A	N/A	3	N/A	3	3	1
2	Marga Sakti	6,646	1,662	7.18	N/A	N/A	8	N/A	8	8	2
3	Tambak Rejo	2,424	606	1.74	N/A	N/A	3	N/A	3	3	1

Sumber: Hasil Analisa, 2018

Perlu dibangun SPA ataupun TPST yang menerapkan kompaksi sampah serta prinsip 3R sebagai tempat pengelolaan sampah setempat, sebelum sampah hasil pengolahan dibawa ke TPA. Keberadaan fasilitas ini selain berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah (dengan mengatur optimasi ritasi truk sampah), juga dapat membantu menurunkan kuantitas sampah yang dibawa ke TPA.

Dalam perencanaan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Utara ini mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman, dan Pekerjaan Umum dengan kriteria prasarana pelayanan persampahan, sebagai berikut:

- Gerobak sampah 1 m³ untuk melayani 200 kk
- Kontainer 1 m³ untuk melayani 200 kk
- Truk sampah 6 m³ melayani 700 kk
- Ritasi pengangkutan 2 - 6 ritasi/hari
- Hingga tahun 2022 jumlah timbulan sampah di Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 114 m³/hari. Untuk itu dibutuhkan prasarana persampahan antara lain 14 TPS, Gerobak 14 unit, Kontainer 14 unit, dan Truk Sampah 4 unit.

Dalam RTRW Kabupaten Bengkulu Utara, sudah direncanakan untuk dibuat sistem pengelolaan sampah terpadu, dimana akan dibangun TPS ditiap kecamatan dan sebagai pusat pengelolaan sampah TPA akan ditempatkan di Kecamatan Agra Makmur.

4.8.7. Pengelolaan Limbah dan Sanitasi

Di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya pada umumnya masyarakat masih menjadikan sungai dan drainase sebagai sarana untuk menyalurkan air limbah rumah tangga dan juga masih banyak masyarakat yang permukimannya jauh dari sungai, langsung menyalurkan air limbah tersebut kepekarangan belakang rumah tanpa melalui bak penampungan seperti limbah dari mencuci dan mandi, sehingga dikhawatirkan apabila tidak cepat di atasi akan mencemari air tanah dan sungai. Sedangkan untuk air limbah domestik, masyarakat masih menjadikan sungai dan kebun sebagai sarana untuk membuang air besar (BABS).

Adapun permasalahan air limbah di kawasan AgroMinapolitan adalah:

- Pembuangan air limbah domestik sebagian besar (80%) di buang melalui septitank milik sendiri (sebagian besar cubluk) dan sisanya (20%) di buang di lobang tanah, sungai atau saluran irigasi.
- Belum ada layanan penyedotan lumpur tinja
- Belum ada sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Belum ada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Belum ada regulasi terkait pengelolaan air limbah
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sarana dan prasarana umum seperti MCK dan saluran drainase.
- Belum adanya partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan air limbah. Masih rendahnya dana untuk peruntukan pengelolaan air limbah

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka berdasarkan arahan rencana RTRW Kabupaten Bengkulu Utara, akan dikembangkan sistem pengelolaan air limbah Sistem pengelolaan air limbah direncanakan untuk dikembangkan melalui:

- a. penyehatan lingkungan permukiman dengan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk kawasan perkotaan;

- b. peningkatan prasarana sanitasi permukiman di pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk kawasan perkotaan; dan
- c. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di kawasan industri dan kawasan lainnya yang berpotensi mengeluarkan bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

4.8.8. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan hal mendasar dalam pembangunan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas SDM yang dihasilkan. Sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat dalam kawasan AgroMinapolitan Kabupaten Bengkulu Utara disajikan tabel berikut.

Tabel 4.41. Sarana pendidikan di kawasan AgroMinapolitan Kab. Bengkulu Utara 2016

Sarana dan Prasarana	Desa		
	Marga Sakti	Tambak Rejo	Tanjung Harapan
Paud/ TK/TPA	23	10	7
SD/ Min	4	1	1
SMP/MTs	1	1	-
SMA/SMK	-	-	-

Sumber: RPJMDes Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keberadaan sarana pendidikan untuk jenjang TK hingga SMP telah terdapat di Desa Marga Sakti, Tambak Rejo dan Tanjung Harapan. Sementara keberadaan SMP tidak terdapat pada Desa Tanjung Harapan, karena pada tahun 2014 desa tersebut merupakan pemekaran dari Desa Tambak Rejo dan SMP yang terdapat pada desa tersebut termasuk dalam lingkup wilayah Desa Tambak Rejo. Desa Tanjung Harapan yang saat ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 2.000 jiwa sebenarnya telah memenuhi standar kebutuhan 1 SMP berdasarkan Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Kemudian untuk sarana pendidikan jenjang SMA dan SMK yang melayani skala kecamatan, terdapat di desa lain. SMA terletak di Desa Padang Jaya dan jenjang SMK terletak di Desa Sido Mukti.

4.8.9. Sarana Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal yang mendasar dalam pembangunan dan peningkatan kualitas SDM. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di suatu desa bisa berpengaruh terhadap kualitas SDM. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Marga Sakti, Tambak Rejo dan Tanjung Harapan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.42. Sarana kesehatan di Kawasan AgroMinapolitan Bengkulu Utara tahun 2017

No	Sarana Kesehatan	Desa Marga Sakti	Desa Tanjung Harapan	Desa Tambak Rejo
1	Polindes	-	1	-
2	Poskesdes	-	-	-
3	Pustu	1	-	-
4	Paramedis	-	1	1
5	Posyandu	1	2	1
6	MCK umum	3	-	-
7	Bidan	-	1	-
8	PAM Desa	1	-	-

Sumber: Profil Desa Tahun 2017

Keberadaan sarana kesehatan di kawasan baik secara kuantitas dan jenisnya berbeda-beda antar desa satu dengan lainnya. Sarana kesehatan seperti puskesmas pembantu, posyandu, MCK umum dan PAM desa tersedia di Desa Marga Sakti, sementara di Desa Tambak Rejo terdapat sarana polindes, paramedis, posyandu dan bidan dan di Desa Tanjung Harapan baru terdapat posyandu dan paramedis.

4.8.10. Sarana Peribadatan

Sarana ibadah yang terdapat di kawasan perdesaan AgroMinapolitan Padang Jaya Bengkulu Utara terdiri dari masjid dan gereja. Sebagian besar penduduk di kawasan perdesaan AgroMinapolitan beragama Islam, oleh karena itu sarana ibadah masjid terdapat di ketiga desa. Kemudian untuk penduduk beragama selain Islam yaitu Nasrani dan Budha juga telah disediakan sarana untuk beribadah.

Tabel 4.43. Sarana ibadah di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya Bengkulu Utara

No	Sarana Ibadah	Desa Marga Sakti	Desa Tambak Rejo	Desa Tanjung Harapan
1	Masjid	16 unit	8 unit	6 unit
2	Gereja	4 unit	2 unit	1 unit

Sumber : RPJMDes, 2018

4.8.11. Sarana Ekonomi

Sarana prasarana ekonomi yang terdapat pada suatu desa merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di desa. Dengan adanya sarana prasarana penunjang tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat karena kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih mudah. Sarana dan prasarana ekonomi yang terdapat di kawasan perdesaan AgroMinapolitan Padang Jaya yaitu 2 pasar yang terletak di Desa Marga Sakti. Pasar di Desa hanya buka di hari Senin dan Kamis. Pasar ini digunakan sebagai sarana pemasaran barang atau jasa oleh masyarakat di kawasan AgroMinawisata. Namun kondisi pasar tersebut masih perlu ditingkatkan lagi baik dari tata letak kios/lapak maupun pelayanannya dalam transaksi jual beli. Keberadaan sarana prasarana penunjang aktivitas ekonomi kawasan dapat dilihat pada table berikut.

Jenis sarana prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat kawasan AgroMinapolitan terlengkap ada di Desa Marga Sakti yang meliputi pasar, bank, UKM, koperasi dan BUMDes, sedangkan pada 2 desa lainnya baru berkembang UKM.

Tabel 4.44. Sarana prasarana penunjang ekonomi di kawasan AgroMinapolitan

Sarana dan Prasarana	Desa		
	Marga Sakti	Tambak Rejo	Tanjung Harapan
Pasar	2	-	-
Bank	3	-	-
UKM	28	38	15
Koperasi	3	-	-
BUMDes	1	-	-

Sumber : RPJMDes, 2018



Gambar 4.11. Sarana prasarana

4.8.12. Sarana Pendukung Prukades

Prukades adalah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan dimana beberapa desa membentuk cluster ekonomi yang fokus pada Produk Tertentu. Pembangunan kluster ekonomi adalah pembangunan berbasis *landscape* / bentang alam, dimana desa yang memiliki karakteristik alam yang sama memiliki kesamaan produk unggulan sama. Sehingga secara bersama dapat memfokuskan kegiatan pada komoditi / produk unggulan tertentu sesuai potensi wilayah. Kluster ekonomi ini akan melahirkan sentra-sentra produk unggulan.

Sarana penunjang Prukades pada kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya Bengkulu Utara tersebar di 3 desa. Sarana penunjang prukades terbanyak terdapat di Desa Marga Sakti yang terdiri dari pasar dengan bangunan permanen, Unit Pembenihan Rakyat (ikan), kolam deras, bak penampung hasil panen ikan, saluran tersier, jalan produksi, peternakan sapi penghasil biogas, rencana rumah pajang dan rumah pengolahan. Sarana penunjang prukades di Desa Tambak Rejo terdiri dari jalan produksi dan saluran tersier, sedangkan di Desa Tanjung Harapan sarana penunjangnya terdiri dari bendung suplesi, saluran tersier, bak penampungan ikan dan rencana peningkatan jalan produksi, rencana pabrik pakai ikan dan unit pembenihan rakyat. Letak dan gambaran sarana pendukung prukades di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya tersaji pada Gambar dibawah ini.



Gambar 4.12. Sarana pendukung prukades di Desa Marga Sakti



Gambar 4.13. Sarana pendukung prukades di Desa Tambak Rejo



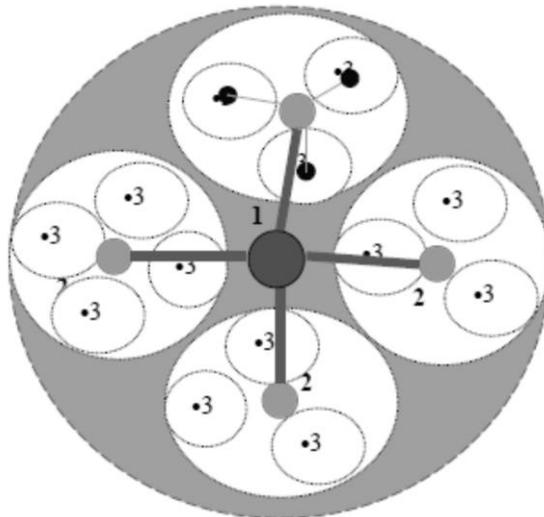
Gambar 4.14. Sarana pendukung prukades di Desa Tanjung Harapan

4.8.13. Indeks Perkembangan Kawasan

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Masing-masing desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan di tiap-tiap kabupaten ini membentuk susunan dan fungsi kawasan yang berbeda-beda. Salah satu bentuk susunan dan fungsi kawasan adalah apa yang dinamakan sebagai konsep wilayah nodal. Pada konsep wilayah nodal ini, wilayah diibaratkan sebagai suatu sel hidup, dimana ada sub wilayah yang berfungsi sebagai inti (pusat), dan ada sub wilayah yang berfungsi sebagai plasma (*hinterland/periphery*). Konsep wilayah nodal ini adalah konsep yang membagi atau mengkategorisasikan wilayah ke dalam berbagai orde/ordo/hirarki menurut

fungsi dan tingkat perkembangan wilayahnya. Sub wilayah yang menjadi inti (pusat) memiliki fungsi sebagai: (1) tempat pemukiman; (2) pusat pelayanan terhadap daerah *hinterland*; (3) pasar komoditas pertanian/industri; (4) pusat industri manufaktur (*manufactory*). Sementara itu, sub wilayah yang menjadi plasma (*hinterland/periphery*) berfungsi sebagai: (1) pemasok (produsen) bahan mentah dan atau bahan baku; (2) pemasok tenaga kerja; (3) daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur; dan (4) penjaga keseimbangan ekologis. Hirarki wilayah dalam konsep sistem wilayah nodal, dapat diilustrasikan pada Gambar 1, dimana pada gambar tersebut, orde (hirarki) wilayah yang lebih tinggi menjadi pusat dan orde (hirarki) yang lebih rendah berfungsi sebagai daerah *hinterland* (*periphery*).



Gambar 4.15. Ilustrasi susunan dan fungsi kawasan pada konsep wilayah nodal

Suatu wilayah yang luas dapat mempunyai beberapa inti dengan hirarki (orde) tertentu. Sub wilayah inti dengan hirarki yang lebih tinggi merupakan pusat bagi beberapa sub wilayah inti dengan hirarki yang lebih rendah. Secara teoritis, hirarki wilayah sebenarnya ditentukan oleh tingkat kapasitas pelayanan wilayah secara totalitas yang tidak terbatas ditunjukkan oleh kapasitas infrastruktur fisiknya saja tetapi juga kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia serta kapasitas-kapasitas perekonomiannya (Rustiadi *et al.* 2011).

Menurut Tarigan (2009), hirarki wilayah menggambarkan jenjang suatu wilayah akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di kota tersebut. Atas dasar perbedaan itu, volume dan keragaman pelayanan yang dapat diberikan setiap jenis fasilitas juga berbeda. Perbedaan fungsi ini umumnya terkait langsung dengan perbedaan besarnya suatu wilayah (jumlah penduduk). Perbedaan fungsi ini juga sekaligus menggambarkan perbedaan luas pengaruh. Hirarki perkotaan sangat penting dalam perencanaan wilayah karena menyangkut fungsi yang ingin diarahkan untuk masing-masing wilayah. Sedangkan Perkembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosioekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, mencegah perubahan yang tidak diinginkan pada suatu wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam suatu wilayah, kota yang memiliki orde tertinggi diberi peringkat ke-I. Penentuan orde (tingkat) sangat terkait dengan luas wilayah analisis. Untuk kepentingan perencanaan wilayah, setiap kota di suatu wilayah harus ditetapkan ordenya. Orde atau hirarki wilayah tersebut akan mempermudah pengelolaan suatu wilayah. Wilayah dengan orde/ hirarki yang sama diberlakukan kebijakan yang sama karena karakteristiknya sama (Tarigan 2009). Analisis Skalogram merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Semakin tinggi perkembangan suatu wilayah berarti wilayah tersebut semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah tersebut seperti fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, dan pemerintahan. Analisis skalogram dapat ditentukan dalam skala kabupaten/kota ataupun kecamatan yang dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Kecamatan yang memiliki kelengkapan fasilitas tertinggi dapat ditentukan sebagai pusat pertumbuhan (Nainggolan 2005). Menurut Riyadi *et al.* (2003), analisis skalogram mengelompokkan klasifikasi kota berdasarkan pada tiga komponen fasilitas dasar yang dimilikinya yaitu: (1) *Differentiation* yaitu fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Fasilitas ini menunjukkan jumlah dan jenis fasilitas. (2) *Solidarity* adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas ini menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota. (3) *Centrality* adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi politik/pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota/ komunitas.

Dalam menganalisis tingkat perkembangan wilayah, pengolahan data dilakukan dengan metode skalogram berbobot atau skalogram termodifikasi. Teknik skalogram ini tidak hanya mempertimbangkan jumlah dan jenis fasilitas tapi juga kapasitas layanan (pembagian jumlah fasilitas dengan jumlah penduduk) dan invers jarak menuju fasilitas pelayanan. Teknik skalogram digunakan dalam menentukan hierarki perkembangan suatu wilayah. Jenis data yang digunakan jumlah dan jenis fasilitas serta jaraknya terhadap fasilitas yang diperoleh dari data PODES. Pengolahan data fasilitas menggunakan metode Skalogram berbobot dengan asumsi bahwa bobot setiap fasilitas tidaklah sama. Bobot yang digunakan adalah rasio antara jumlah total fasilitas dengan jumlah unit wilayah yang memiliki fasilitas tersebut.

Tingkat perkembangan suatu wilayah dapat dianalisis dengan mengidentifikasi jumlah dan jenis fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial dan pertanian. Analisis tingkat perkembangan wilayah dilakukan dengan teknik skalogram untuk menentukan hirarki pusat-pusat wilayah penopang yang mendukung wilayah sebagai pusat pelayanan aktivitas. Hirarki ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas. Unit wilayah yang memiliki fasilitas dengan kuantitas yang lebih banyak dan jenis yang lebih kompleks memiliki tingkat hirarki yang lebih tinggi (Panuju dan Rustiadi 2011). Jenis data yang digunakan dalam analisis ini antara lain jumlah penduduk, jumlah dan jenis fasilitas umum (fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial).

Tahapan analisis skalogram (Panuju dan Rustiadi, 2011) diawali dengan penentuan invers jarak menggunakan rumus:

$$B_{ij} = 1/X_{ij} \dots\dots\dots [1]$$

B_{ij} = indeks invers data
 X_{ij} = nilai data wilayah ke-i, variabel ke-j

Setelah didapatkan invers terhadap jarak kemudian dihitung kapasitas pelayanan dari fasilitas tersebut dengan rumus:

$$A_{ij} = 1000 * F_{ij} P_i \dots\dots\dots [2]$$

A_{ij} = indeks fasilitas ke-j pada wilayah ke-i
 F_{ij} = jumlah fasilitas ke-j di wilayah ke-i
 P_i = Jumlah penduduk di wilayah ke-i

Tahapan selanjutnya adalah penentuan bobot masing-masing variabel dengan rumus:

$$I_{ij} = X_{ij} \times j \dots\dots\dots [3]$$

$i = 1, 2, \dots, n$;

$j =$ jumlah wilayah $1, 2, \dots, n$

Tahapan akhir dari analisis ini adalah menyusun nilai IPD, di mana nilai IPD merupakan nilai baku. Pembakuan dilakukan karena adanya perbedaan satuan dari masing-masing variabel yang digunakan. Rumus menghitung nilai IPD adalah:

$$K_{ij} = (I_{ij} - \min I_j) / S_j \dots\dots\dots [4]$$

K_{ij} = nilai baku indeks hirarki

I_{ij} = nilai bobot wilayah ke- i dan fasilitas ke- j Min

(I_j) = nilai minimum indeks pada fasilitas ke- j

S_j = nilai standar deviasi

Nilai IPD kemudian disusun berdasarkan urutan hirarki dari nilai tertinggi sampai terendah. Hirarki wilayah pada masing-masing unit analisis kemudian dapat juga dibandingkan jika data yang kita miliki *time series*. Asumsi penetapan hirarki mengikuti sebaran normal sebagai berikut:

1. Wilayah Hirarki I (tingkat perkembangan tinggi) yaitu wilayah yang nilai jumlah indeks bakunya paling tidak sama dengan nilai rata-ran ditambah dengan standar deviasi atau ($IPD > (Stdev + Average)$).
2. Wilayah Hirarki II: Wilayah dengan nilai indeks hirarki paling tidak sama dengan nilai rata-ran indeksnya ($IPD \geq Average$).
3. Wilayah Hirarki III: Wilayah dengan nilai indeks hirarki kurang dari nilai rata-ran indeks di seluruh wilayah atau ($IPD < Average$).

Perkembangan suatu wilayah dapat dicirikan oleh tingkat hirarki wilayahnya terhadap wilayah lain. Hirarki wilayah yang semakin tinggi menunjukkan wilayah tersebut relative berkembang, dan sebaliknya tingkat hirarki wilayah yang lebih rendah menunjukkan wilayah tersebut kurang berkembang. Tingkatan hirarki suatu wilayah ditentukan berdasarkan nilai indeks pembangunan desanya (IPD). Nilai IPD yang tinggi pada suatu wilayah berbanding lurus dengan hirarki wilayah yang tinggi, dan sebaliknya. Berikut ini adalah variable-variabel yang digunakan pada analisis skalogram dalam penentuan tingkat hirarki wilayah (Tabel 4.3).

Tabel 4.45. Variabel yang digunakan dalam analisis skalogram

Jenis	Nama Variabel
Fasilitas Pendidikan	TK
	SD/MI
	SMP/MTs
	SMA/MA
	SMK
	Akademi/Perguruan Tinggi
Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit
	Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin
	Poliklinik/Balai Pengobatan
	Puskesmas
	Puskesmas Pembantu

Jenis	Nama Variabel
	Tempat Praktek Dokter
	Tempat Praktek Bidan
	Poskesdes
	Polindes
	Posyandu
	Apotek
Fasilitas Ekonomi	Pasar tanpa bangunan
	Mini market
	Restoran/rumah makan
	Warung/kedai makanan minuman
	Toko/warung kelontong
	Hotel
	Penginapan
	Jumlah Koperasi
	Jumlah Bank Umum
	Jumlah Bank Perkreditan Rakyat
Fasilitas Sosial, Kelembagaan	Organisasi Kemasyarakatan
	Organisasi Sosial
	Organisasi Profesi
	Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi
	Lembaga Swadaya Masyarakat

Kabupaten Bengkulu Utara, terdiri dari 12 Kecamatan/kota dan 224 desa. Berdasarkan hasil analisis skalogram, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki sebaran nilai Indeks Kelengkapan Infrastruktur Desa dari rentang 0.68 sampai 196. Nilai IKID tertinggi sebesar 196 terdapat di desa Purwodadi. Melihat sebaran hirarki secara spasial, kabupaten Bengkulu utara memiliki desa berhirarki I sejumlah 19 desa dan tersebani setiap kecamatan. Sedangkan jumlah desa berhirarki II dan III berturut-turut sebesar 63 desa dan 142 desa. Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur menjadi desa dengan nilai IKID tertinggi, letaknya yang berada di pusat ibukota kabupaten membuat Desa Purwodadi menjadi desa dengan kelengkapan infrastruktur tertinggi.

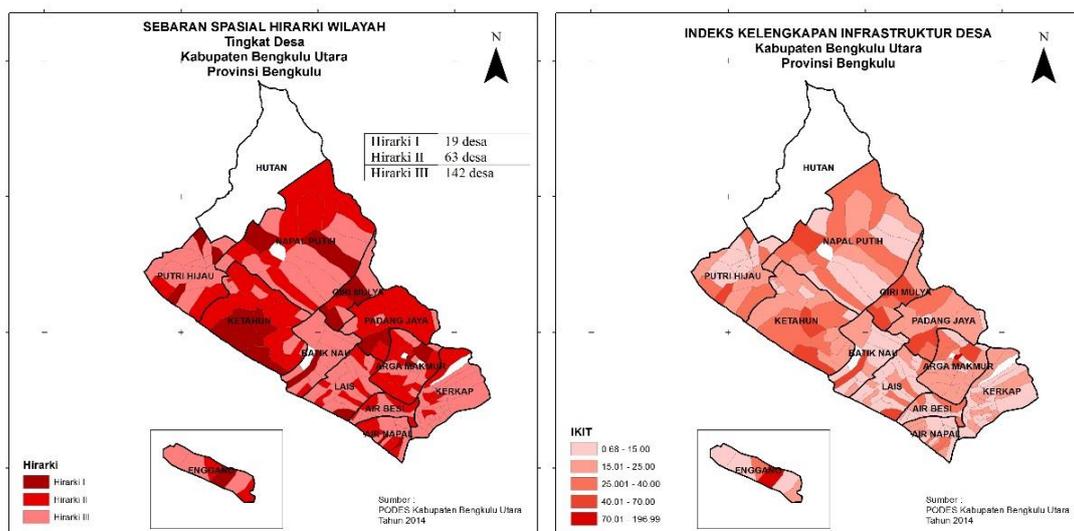
Indeks Kelengkapan Infrastruktur Desa menunjukkan tingkat hirarki suatu desa, Berdasarkan hasil analisis skalogram dari data podes 2011 dan 2014 didapatkan perubahan nilai IKID. Perubahan dan perbandingan nilai IKID tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.46. Jumlah desa berhirarki di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2014

Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah (2014)	Kriteria (2014)
Hiraki 1	19 desa	IKID > 35
Hirarki 2	63 desa	18.6<IKID<35
Hirarki 3	142 desa	IKID<18.6

Tabel 4.47. Jumlah desa berhirarki di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2011

Kabupaten Bengkulu Utara	Jumlah (2011)	Kriteria (2011)
Hirarki 1	23 desa	IKID>32,38
Hirarki 2	63 desa	19,82<IKID<32,38
Hirarki 3	139 desa	IKID<19,82



Gambar 4.16. Peta hierarki wilayah dan sebaran indeks pembangunan kecamatan

4.9. KELEMBAGAAN

4.9.1. Kondisi Pemangku Kepentingan Terkait

Diuraikan kondisi kelembagaan di aras kawasan, sebagai lembaga yang memayungi kawasan, dan lembaga di aras Kabupaten /Kota dalam pengembangan ekonomi lokal atau daerah.

1. Desa Marga Sakti

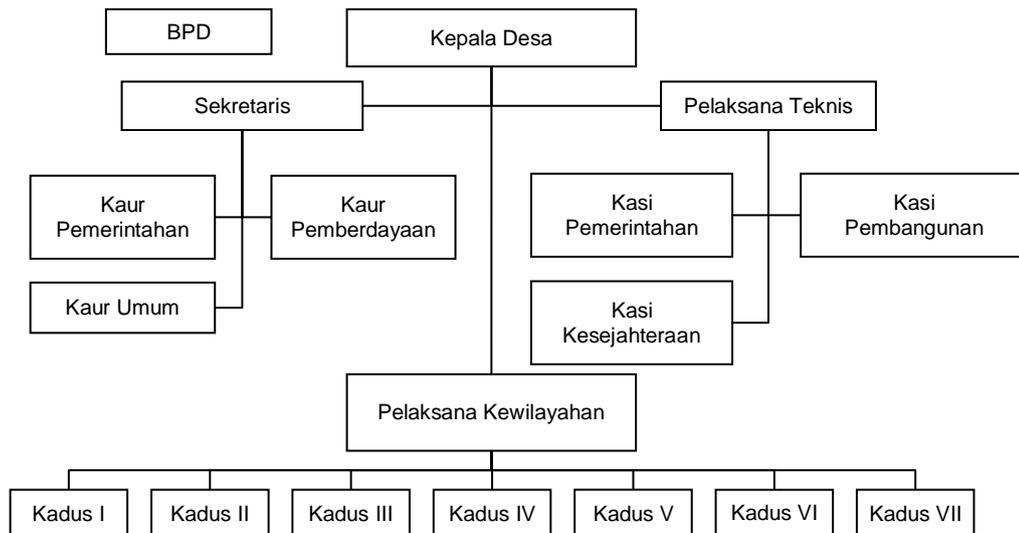
Pembagian wilayah Desa Marga Sakti dibagi menjadi tujuh wilayah dusun yang diketuai oleh seorang Kepala Dusun (Kadun) dan masing-masing dusun terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) yang diketuai oleh seorang Ketua RT dan tidak ada pembagian wilayah secara khusus, dan pusat desa berada di dusun II. Secara rinci pembagian dusun dan jumlah RT tiap dusun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.48. Pembagian Dusun dan Jumlah RT Desa Marga Sakti

Dusun	Jumlah RT
Dusun I	12
Dusun II	9
Dusun III	6
Dusun IV	4
Dusun V	5
Dusun VI	7
Dusun VII	6

Sumber : RPJMDes, 2018

Struktur Organisasi Desa Marga Sakti menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, dimana Kepala Desa dibantu oleh seorang sekretaris desa, 3 orang kepala seksi (kasi), 3 orang kepala urusan (kaur), dan 7 orang kepala dusun.



Gambar 4.17. Struktur Organisasi Desa Marga Sakti

Sumber: Profil Desa Marga Sakti, 2017

a. Perangkat Desa

Kepala Desa	: Sumaryono
Sekretaris Desa	: Endro Pradopo
Kasi Pemerintahan	: Nuradi Marwanto
Kasi Pelayanan	: Rahmawati
Kasi Kesejahteraan	: M. Jauhari Fajri
Kaur Keuangan	: Daryani
Kaur Perencanaan	: Fan Choliz, F.A
Kaur Tata USaha Umum	: Sri Nopiyanti

b. Kepala Dusun

Dusun I	: Dedi Suwito
Terdiri Dari	: 12 Rt
Dusun li	: Supomo
Terdiri Dari	: 8 Rt
Dusun lii	: Wahyu Dianis ,A.W
Terdiri Dari	: 6 Rt
Dusun Iv	: Darmanto
Terdiri Dari	: 4 Rt
Dusun V	: Widarno
Terdiri Dari	: 6 Rt
Dusun Vi	: Slamet
Terdiri Dari	: 7 Rt
Dusun Vii	: Adi Suseno
Terdiri Dari	: 6 Rt

c. Badan Permusyawaratan Desa

Ketua	: Purwanto
Wakil Ketua I	: Tugimin, S.Pd
Sekretaris	: Wahyu Hutomo Putro, S.E.
Anggota	:
	- Zainuri

- Suhanis
- Suparmi
- Suciati Wahyuningsih
- Agus Suhendi
- Muhsin Muhtarom
- Zulkarnain
- Evi Susanti

d. Tim Penggerak Pkk

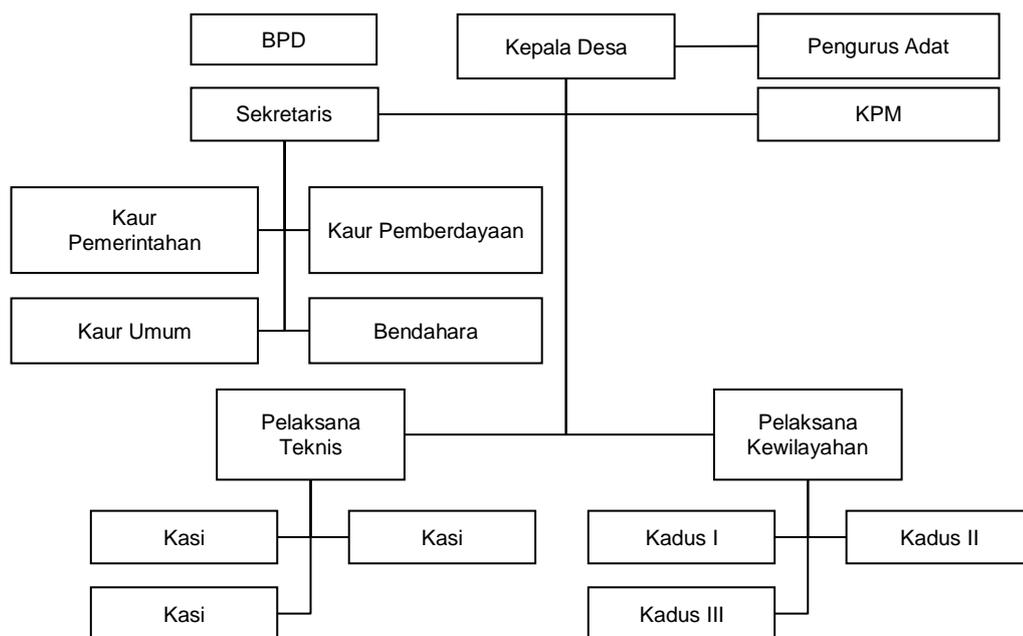
- Ketua : Sukarni
- Wakil Ketua : Sukawati
- Sekretaris I : Wasilah
- Sekretaris li : Asmawati
- Kelompok Kerja : 4 Kelompok

e. Karang Taruna Desa

- Ketua : Yateni
- Wakil Ketua : Arie Wibowo
- Sekretaris : M. Jauhari Fajri
- Anggota : 75 Orang

2. Desa Tanjung Harapan

Pembagian wilayah Desa Tanjung Harapan dibagi menjadi tiga wilayah dusun yang diketuai oleh seorang Kepala Dusun (Kadun) dan masing-masing dusun terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) yang diketuai oleh seorang Ketua RT dan tidak ada pembagian wilayah secara khusus. Struktur Organisasi Desa Tanjung Harapan menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, dimana Kepala Desa dibantu oleh seorang sekretaris desa, 3 orang kepala seksi (kasi), 4 orang kepala urusan (kaur), dan 3 orang kepala dusun.



Gambar 4.18. Struktur Organisasi Desa Tanjung Harapan
 Sumber: Profil Desa Tanjung Harapan, 2017

3. Desa Tambak Rejo

Pembagian wilayah Desa Tambak Rejo dibagi menjadi tiga wilayah dusun yang diketuai oleh seorang Kepala Dusun (Kadun) dan masing-masing dusun terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) yang diketuai oleh seorang Ketua RT dan tidak ada pembagian wilayah secara khusus, dan pusat desa berada di dusun I. Secara rinci pembagian dusun dan jumlah RT tiap dusun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.49. Pembagian Dusun dan Jumlah RT Desa Tambak Rejo

Dusun	Jumlah RT
Dusun I	12
Dusun II	9
Dusun III	6
Dusun IV	4
Dusun V	5
Dusun VI	7
Dusun VII	6

Sumber: Profil Desa Tambak Rejo, 2018

Struktur Organisasi Desa Tambak Rejo menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, dimana Kepala Desa dibantu oleh seorang sekretaris desa, 3 orang kepala seksi (kasi), 3 orang kepala urusan (kaur), dan 3 orang kepala dusun.

a. PERANGKAT DESA

Kepala Desa	= Ali Sadikin
Sekretaris Desa	= Tanto Kuswanto
Kaur Keuangan	= Mita Ade Safitri
Kaur Adminitrasi	= TumakNinatul Qoiriyah
Kaur Umum	= Ismi Zuni Arum
Kasi Pemerintahan	= Rahmat Andika, SKM
Kasi Kesejahteraan	= Nurjana
Kasi Pelayanan	= Susanti, S.Kom
Kepala Dusun I	= Alma'ruf
Kepala Dusun II	= Odang Sujana
Kepala Dusun III	= Halim

b. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua	= Matsoleh
Wakil Ketua	= Didin Mahfudin
Sekretaris Desa	= Luluk Ulfati Ningsih, S.Pd.AUD
Kabid Pemerintahan & Pembinaan Masyarakat	= Yan Mustofa, S.Pd. I
Anggota	= Siti Fatimah
Kabid Pembangunan & Pemberdayaan	= Samiran
Anggota	= Siti Aisyah

c. BAPPEDES

Jumlah Pengurus	= 11 Orang
-----------------	------------

d. LEMBAGA KEMASYARAKTAN

Ketua RT	= 14 Orang
Kader KPM / KTD	= 7 Orang

Kader PKK	= 15 Orang
Kader Posyandu	= 13 Orang
Pengurus Adat	= 7 Orang
Pengurus Karang Taruna	= 9 Orang
Jumlah Kelompok Tani	= 13 Kelompok
Jumlah Kelompok Peikanan (Pokdakan)	= 25 Kelompok

4.9.2. Keragaan Bumdesma

Secara administrasi Kecamatan Padang Jaya berbatasan dengan: Bukit Barisan di sebelah Utara, Desa Suka Rame disebelah selatan, Kecamatan Giri Mulya di sebelah Barat dan Desa Kurotidur Kecamatan Argamakmur di sebelah Timur. Kecamatan Padang Jaya terdiri dari 12 (dua belas) Desa dengan luas wilayah 418.97 km². Pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penduduk kecamatan Padang Jaya memiliki mata pencaharian beraneka ragam. Mulai dari perikanan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, pertanian, peternakan ayam telur, peternakan ayam potong, penggemukan ternak sapi dan kambing, perdagangan dan jasa.

Desa Tajung Harapan, Desa Tambak Rejo dan Desa Margasakti merupakan Kawasan Agrominapolitan yang mata pencaharian penduduknya adalah budidaya ikan nila dan perkebunan sawit dan karet. Dengan besarnya potensi sumber daya alam air yang melimpah menjadikan daerah kawasan ini rata-rata memiliki kolam ikan. Namun permasalahan yang kerap terjadi adalah harga jual komoditi perikanan dan perkebunan sering fluktuatif sehingga perbandingan antara tenaga dan biaya operasional yang dikeluarkan sangat tidak berimbang. Hal ini terjadi disebabkan karena over produksi, faktor alam, dan faktor-faktor lainnya. Akibat dari permasalahan tersebut banyak para petani perikanan dan perkebunan yang tidak sejahtera dan mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Badan Usaha Milik Desa Bersama Tanjung Rejo Sakti adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang dibentuk salah satunya dengan tujuan menambah pendapatan setiap masyarakat kawasan perdesaan lewat kegiatan Program Inkubator Produk Unggulan Desa (PI PRUKADES). Karena hampir semua masyarakat kawasan perdesaan adalah para pekerja yang pada siang harinya berprofesi sebagai pekerja pada budidaya ikan air tawar, perkebunan, pertanian, dan industri rumah tangga. Besar harapan BUMDESMA untuk memajukan perekonomian masyarakat kawasan Agrominapolitan, menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung sumber daya manusia untuk bersaing dan berinovasi sesuai dengan pekerjaan masing-masing sehingga terwujud masyarakat kawasan Agrominapolitan yang makmur dan sejahtera.

VISI DAN MISI

Visi

Dengan adanya Rumah Pajang di Desa Marga Sakti yang merupakan bagian dari amanat Kawasan Perdesaan di Kecamatan Padang Jaya di harapkan kedepannya mampu untuk menaikkan pendapatan masyarakat dan mewujudkan masyarakat kawasan Agrominapolitan yang makmur dan sejahtera.

Misi

Untuk mencapai Visi di atas maka yang di lakukan adalah:

- Tersedianya sarana dan prasarana dasar untuk pemasaran produk
- Permodalan untuk unit usaha

- c. Pelatihan keterampilan dasar, produksi dan pemasaran
- d. Melakukan kerja sama dengan NGO (pihak ketiga)
- e. Pembinaan secara berjenjang dari dinas terkait
- f. Melakukan pertemuan Forum Usaha bersama di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi

TUJUAN

Secara singkat dapat kami paparkan tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama Tanjung Rejo Sakti Desa Tanjung Harapan, Tambak Rejo, dan Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan hasil Produk Unggulan Desa atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, dengan tersedianya fasilitas serta alat-alat yang memadai.
2. Meningkatkan kemampuan/ketrampilan masyarakat untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia dan mengembangkan kewirausahaan kelompok-kelompok usaha masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia;
3. Sebagai unit usaha BUM Desa Bersama yang menjual produk unggulan kawasan perdesaan dan kebutuhan lainnya yang dapat menggerakkan perekonomian melalui transaksi jual-beli di kawasan perdesaan;
4. Sebagai unit usaha rintisan yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan rintisan unit usaha lainnya di bawah BUM Desa Bersama, yang akan mendukung usaha masyarakat sebagai penggerak ekonomi di kawasan perdesaan;
5. Sebagai sarana penjualan, promosi, pembelajaran dan informasi baik internal maupun pihak luar
6. Merubah pola pikir setiap masyarakat, dari yang hanya sebagai pekerjaan sambilan menjadi profesi yang menjanjikan dan menghasilkan
7. Sebagai media informasi dan bertukar pikiran dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama agar masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri
8. Menyediakan jejaring pasar produk unggulan lokal antar desa atau antar kawasan;
9. Memupuk rasa kerja sama dan solidaritas sesama.

RENCANA USAHA

Adapun rencana kedepan yang akan kami lakukan dengan adanya Rumah Pajang adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi produk unggulan yang ada Kawasan Perdesaan
2. Identifikasi komunitas/pelaku usaha yang ada Kawasan Perdesaan
3. Melibatkan komunitas/pelaku usaha yang ada Kawasan Perdesaan untuk bekerjasama dengan BUMDESMA
4. Pembinaan dan pelatihan SDM komunitas/pelaku usaha yang ada Kawasan Perdesaan
5. Bantuan permodalan dan peralatan dengan komunitas/pelaku usaha yang ada Kawasan Perdesaan
6. Menginformasikan dan mempromosikan produk unggulan tersebut melalui Rumah Pajang, Media Sosial, Pasar Online (BukaLapak.com, TokoPedia.com dll) dan ikut serta di dalam kegiatan pameran produk industri baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
7. Mencari alternatif/Solusi bersama untuk memajukan komunitas/pelaku usaha yang ada Kawasan Perdesaan
8. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka perluasan pasar
9. Pengembangan usaha kebutuhan pokok dan lain-lain

Untuk rencana kedepan yang akan kami lakukan dengan adanya embung kawasan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan embung kawasan sebagai tampungan air untuk menunjang budidaya perikanan
2. Pengembangan destinasi wisata
3. Pengembangan budidaya ikan patin

PROFIL USAHA

- A. Unit usaha yang akan di dikembangkan meliputi:
 1. Unit usaha perikanan
 2. Unit usaha perkebunan dan hortikultura
 3. Unit usaha ekonomi kreatif
- B. Pengembangan usaha Rumah Pajang
- C. Pengembangan usaha embung kawasan

STRUKTUR ORGANISASI

- A. Penasehat:
 1. Kepala Desa Marga Sakti : SUMARYONO
 2. Kepala Desa Tanjung Harapan : AHMAD GOZAINUS
 3. Kepala Desa Tambak Rejo : ALI SADIKIN
- B. Pengurus:
 1. Direktur : ARIE WIBOWO, ST
 2. Asisten Administrasi : RAMLAN
 3. Asisten Keuangan : ROSYIDA DWI K L, S.Pd

PRODUK UNGGULAN

- A. Jenis Produk
 1. Abon Ikan
 2. *Baby Fish Crispy*
 3. Stik Duri Ikan
 4. Kerajinan Rumah Tangga
 5. Kopi Trabas
- B. Sumber Produk yang akan di jual.

Sumber produk yang akan di jual terdapat di lingkungan Kawasan Perdesaan dan desa penyangga kawasan yang terdapat di Kecamatan Padang Jaya.

Gambaran pesaing usaha di wilayah setempat

Untuk sementara waktu ini belum ada pesaing lokal maupun pesaing di luar lokal Kecamatan Padang Jaya. Keunggulan dan peluang usaha yang diharapkan. Adapun keunggulan produk yang ada di kawasan perdesaan yang tidak di miliki oleh pesaing usaha baik di dalam kecamatan maupun di luar kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Kopi Trabas.
- b. *Baby Fish Crispy*
- c. Stik Duri Ikan

TARGET PASAR

Adapun segmen pasar yang ada di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Luar Propinsi. Target Sasara seluruh kelompok masyarakat baik yang kelompok masyarakat bawah, menengah dan atas.

PROMOSI DAN PEMASARAN

Strategi promosi dan pemasaran yang akan di jalankan adalah dengan menggunakan media social (market shopping), brosur, spanduk, iklan di Koran. (Toko Jajanan/oleh-oleh, Rumah Makan, Media Sosial dll)

LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan atas kesepakatan bersama yang tertuang di Peraturan Desa masing-masing sebagai berikut:

a. Desa Marga Sakti	: Rp.35.000.000.-
b. Desa Tanjung Harapan	: Rp.35.000.000.-
c. Desa Tambak Rejo	: Rp.35.000.000.-
Total	: Rp.105.000.000.-

4.9.3. Keragaan Kelembagaan Eksisting

Berdasarkan hasil musyawarah Badan Kerjasama Antar Desa, kelembagaan kawasan AgroMinapolitan adalah sebagai berikut.

Pembina: Camat Kecamatan Padang Jaya

Ketua Umum: Ali Sadikin

Ketua 1 Bidang Pengembangan Sumberdaya: Sumaryono

Ketua 2 Bidang Produk Unggulan Kawasan Perdesaaan: Ahmad Gozainus

Ketua 3 Bidang Kemitraan dan Kerjasama: Saiful Anwar

Sekretaris: Mat Sholeh

Bendahara: Tugimin

Sebagai pengelola kawasan BKAD akan melakukan koordinasi kepada Bumdes dan Bumdesma serta badan/lembaga/organisasi serta pelaku usaha di kawasan Agro Minapolitan. Dengan program kerja per bidang seperti dibawah ini:

4.9.4. Rencana Aksi Organisasi

A. Bidang Kemitraan dan Kerjasama

1. Menjalin kemitraan usaha pengembangan kawasan Agrominapolitan dengan pihak swasta dan pemerintah
2. Membuat rencana dan kesepakatan dengan para pihak terkait promosi dan pemasaran produk unggulan kawasan Agrominapolitan. memasarkan produk unggulan Agrominapolitan.
3. Melakukan kerjasama dengan desa-desa sekitar kawasan terkait rantai pasokan

B. Bidang Pengembangan Sumberdaya

1. Peningkatan kapasitas pengurus dan pelaku usaha
2. Penggalian potensi kawasan (SDA, SDM, Sumberdaya social/ budaya/ kultur)
3. Membuat aturan dan kelengkapan organisasi
4. Melakukan recruitmen staff organisasi

5. Mengembangkan potensi kawasan (unit-unit usaha baru)
6. Fasilitasi/pendampingan kelompok-kelompok usaha di kawasan
7. Membuat rencana kerja organisasi dan mekanisme evaluasi
8. Pengembangan teknologi tepat guna.

C. Bidang Produk Unggulan Kawasan

1. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan kawasan Agro Minapolitan.
2. Pengembangan produk olahan dan turunan komoditas unggulan kawasan
3. Pengembangan industri kreatif dan inovasi produk unggulan kawasan
4. Pensertifikasian komoditas dan produk unggulan kawasan
5. Pengembangan *branding* produk unggulan kawasan

BAB V

PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Bengkulu Utara



5.1. TINJAUAN KEBIJAKAN

Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan sebagai salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dengan kebijakan perencanaan pembangunan lainnya. Dalam Sub bab ini akan dikaji terhadap kebijakan peraturan perundangan terkait dengan amanat pembangunan kawasan perdesaan secara nasional dan kebijakan terkait pengembangan Kawasan perdesaan di Bengkulu Utara.

5.1.1. Kebijakan Terkait Kawasan Perdesaan

Beberapa kebijakan nasional dalam hal ini adalah peraturan perundangan terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

5.1.1.1. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang No.26 tahun 2007, Kawasan Perdesaan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dalam UU No.26/2007 Pasal 48, penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk (1) pemberdayaan masyarakat perdesaan; (2) pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; (3) konservasi sumberdaya alam; (4) pelestarian warisan budaya lokal; (5) pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan (6) penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.

Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan sebagai pengembangan kawasan perdesaan yang dijelaskan pengertiannya berupa kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Pada Pasal 5 ayat 4 juga disebutkan bahwa Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

Pada UU 26/2007 juga disebutkan bahwa salah satu materi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik itu RTRW Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten adalah Rencana Struktur Ruang wilayah yang meliputi **sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah.**

Ketentuan tentang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan kerjasama penataan ruang kawasan perdesaan diatur rinci pada UU 26/2007:

A. Ketentuan mengenai perencanaan tata ruang kawasan perdesaan dalam UU 26/2007 adalah sebagai berikut:

1. Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.
2. Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama

lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.

3. Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.
4. Rencana tata ruang berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.
5. Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten.
6. Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:
 - a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan;
 - b. Rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan;
 - c. Rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - d. Arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan
 - e. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

B. Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dalam UU 26/2007 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
2. Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.

C. Ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dalam UU 26/2007 adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten.
3. Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.

D. Ketentuan mengenai kerja sama penataan ruang kawasan perdesaan dalam UU 26/2007 adalah sebagai berikut:

1. Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional.
5. Keterpaduan mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.

5.1.1.2. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada Pasal 83 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembahasan rencana pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

5.1.1.3. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Dalam rangka untuk mewujudkan sasaran di atas, berikut ini adalah beberapa arah kebijakan dan strateginya:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: (a) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman; (b) meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan; (c) meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan; (d) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan (e) meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi: (a) fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah

- tangga desa; (b) fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan (c) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi melalui strategi: (a) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; (b) memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat; (c) mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan; (d) meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; (e) menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan (f) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.
 4. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi: (a) konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga; (b) memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa; (c) memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap; (d) mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
 5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparat pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui strategi: (a) meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital; (b) Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan; (c) meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa; (d) mengembangkan kerjasama antar desa; (e) melaksanakan penataan desa; dan (f) mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.
 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi: (a) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; (b) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; (c) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan; (d) menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan; (e) menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam; (f) menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham; (f)

merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi: (a) mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata; (b) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; (c) mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan (d) membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi; (e) membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan; (f) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

5.1.1.4. Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Perturan menteri Desa No. 5 tahun 2016 akan fokus membahas mengenai penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan yang diatur didalamnya sesuai dengan konteks kegiatan ini. Ketentuan mengenai Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan menurut Peraturan tersebut adalah sebagai:

1. Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
2. Kawasan perdesaan memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP kabupaten/kota.
3. Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
4. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
6. Program pembangunan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
7. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya memuat:
 - a. Isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. Tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. Program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. Indikator capaian kegiatan; dan
 - f. Kebutuhan pendanaan.
8. Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:
 - a. Bupati/Walikota memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten/kota; dan
 - b. TKPKP kabupaten/kota dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.
9. Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
10. Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:

- a. Kegiatan pertanian;
- b. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- c. Tempat permukiman perdesaan;
- d. Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- e. Nilai strategis dan prioritas kawasan;
- f. Keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota;
- g. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- h. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

5.1.2. Kebijakan Terkait Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bengkulu Utara

Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan sebagai salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dengan kebijakan perencanaan pembangunan lainnya. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan harus sejalan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di atasnya. Beberapa dokumen kebijakan yang menjadi harus menjadi acuan dalam perencanaan perdesaan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

5.1.2.1. Tinjauan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD)

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bengkulu Utara 2006-2026, terdapat arahan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan, yaitu pengembangan kawasan agropolitan. Hal ini karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, tentang perencanaan tata ruang Pasal 48, ayat (4) menyebutkan bahwa Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.

Arahan pembangunan perdesaan di Bengkulu Utara dalam hal ini Kawasan Agropolitan yaitu arahan peningkatan produksi, kualitas dan daya saing produk pertanian dan produk agroindustri lainnya serta arahan Peningkatan kemampuan promosi dan pemasaran produk pertanian dan produk agroindustri lainnya. Artinya Kabupaten Bengkulu Utara telah merencanakan untuk membentuk agropolitan dengan harapan akan terwujud produk agroindustri yang memiliki kualitas dan daya saing. Selain itu pembentukan agropolitan diharapkan juga akan dapat dipromosikan dan dipasarkan. Berikut adalah kutipan arahan pengembangan agroindustri Kabupaten Bengkulu Utara.

1. **Pengembangan Pertanian dan Agroindustri**, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi.
 - b. Terjaganya tingkat produksi beras di sentra-sentra produksi untuk mencukupi kebutuhan lokal dan kemandirian pangan.
 - c. Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk mencukupi kebutuhan lokal dan kemandirian pangan.
 - d. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan serta meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani.
 - e. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.
 - f. Meningkatnya areal perkebunan karet, kakao dan kelapa sawit.
 - g. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan karet, kakao dan kelapa sawit.
 - h. Meningkatnya pendapatan petani karet, kako dan kelapa sawit.
 - i. Meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertanian dan perikanan.
 - j. Meningkatnya kemampuan petani dalam mengelola sumberdaya alam secara lestari dan bertanggung jawab.

- k. Optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan non kayu serta jasa lingkungan.
- l. Pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka peningkatan nilai tambah melalui pembangunan pabrik CPO, pabrik *Crumb Rubber* dan pabrik pengolahan kayu karet.

Sedangkan Arah Kebijakan Pengembangan Pertanian dan Agroindustri adalah:

- a. Peningkatan kemampuan petani dan petambak serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya.
 - Pengembangan penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, petambak dan pembudidaya ikan.
 - Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan petambak terhadap sarana produktif dan meningkatkan pengusaha yang dapat meningkatkan posisi tawar petani.
 - Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian.
- b. Pengamanan ketahanan pangan.
 - mempertahankan tingkat produksi beras untuk mensuplai kebutuhan domestik, agar kemandirian pangan daerah dapat diamankan.
 - Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan daerah, dengan arahan meningkatnya kebijakan populasi hewan agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin.
 - Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras.
- c. Peningkatan produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.
 - Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya melalui:
 - Penataan dan perbaikan lingkungan perikanan budidaya.
 - Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
 - Peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan dan teknologi pasca panen.
 - Percepatan peningkatan produk perikanan.
 - Peningkatan kemampuan SDM, penyuluh perikanan yang ada.
 - Perkuatan sistem kelembagaan, koordinasi dan pengembangan peraturan sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada.
 - Pengembangan industri pengolahan ikan dan hasil ternak.
 - Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis.
 - Penyusunan strategi peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan, misalnya dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan, melindungi petani dan petambak dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Peningkatan produktivitas, produksi dan pendapatan petani kebun.
 - Meningkatkan produksi dan pengelolaan input produksi.
 - Pengembangan industri berbasis perkebunan, akses pasar dan harga komoditas perkebunan.
 - Pengembangan sumberdaya, kelembagaan petani dan riset teknologi.

- e. Pembangunan perkebunan mengedepankan kepentingan masyarakat khususnya petani perkebunan, yang diarahkan pada:
 - Peningkatan produksi dan pengelolaan input produksi.
 - Kebijakan pengembangan industri berbasis perkebunan, akses pasar dan harga komoditas perkebunan.
 - Pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan petani dan riset teknologi.
 - Kebijakan pembiayaan perkebunan.
2. **Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Serta Agrobisnis**, dengan Sasaran
- a. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan tinggi.
 - b. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal.
 - c. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan dan nilai tambah yang tinggi.
 - d. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

Arah Kebijakan

1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan gender:
 - a. Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan.
 - b. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan.
 - c. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi.
 - d. Intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan:
 - a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi
 - b. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif
 - c. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrilisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM
 - d. Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan daerah, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di daerah

4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak
5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk:
 - a. Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek persaingan usaha yang tidak sehat
 - b. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepada koperasi
 - c. Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi

5.1.2.2. Tinjauan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara 2011-2016, terdapat kebijakan mengenai minapolitan. Garis pantai Kabupaten Bengkulu Utara keseluruhannya sepanjang lebih kurang 239,1 km terdiri dari bagian daratan yang berada di Pulau Sumatera sepanjang 115,9 km dan wilayah yang berada di Pulau Enggano dengan panjang pantai lebih kurang 123,2 km, sehingga sesuai dengan kewenangannya maka Kabupaten Bengkulu Utara memiliki wilayah laut seluas 2.088 km², serta sumber daya air tawar yang sangat besar berupa sungai, rawa, danau maupun mata air merupakan potensi yang sangat besar di bidang kelautan dan perikanan. Penetapan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu kawasan pengembangan minapolitan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32IMEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan diharapkan lebih mendorong tumbuh kembangnya agribisnis kelautan dan perikanan. Subsektor ini memiliki kontribusi rata-rata 5,8% dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bengkulu Utara.

Kemudian jika dilihat dari arahan RPJPD Kabupaten Bengkulu Utara 2006-2026, maka terdapat target untuk RPJMD tahun 2016-2021 dan tahun 2021-2026. Target RPJMD Ke-3 (2016-2021) adalah RPJMD Bengkulu Utara lebih memprioritaskan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan fokus tekanan kepada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan kepada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara terus mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat. Kualitas sumber daya manusia terus adanya perbaikan yang ditandai dengan terus meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja termasuk pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan didukung dengan manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif. Ketersediaan infrastruktur, terutama infrastruktur perdesaan, pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan terutama untuk dapat mendukung tumbuhnya perekonomian rakyat terutama dari sektor pertanian dan perkebunan

Sedangkan pada RPJMD Ke-4 (2021-2026), RPJMD Bengkulu Utara diarahkan kepada terwujudnya masyarakat Bengkulu Utara yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dan pencapaian ini adalah melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang di Kabupaten Bengkulu Utara. Pada tahun keempat ini maka diharapkan kesejahteraan masyarakat terus ditingkatkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia terus pula diupayakan, struktur perekonomian masyarakat dan daerah makin maju.

5.1.2.3. Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Bengkulu Utara adalah:

- a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
- b. pengembangan wilayah pusat-pusat permukiman untuk mendukung
- c. pengembangan ekonomi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah; c. peningkatan fungsi PKWp Kota Argamakmur menjadi PKW;
- d. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
- e. peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan;
- f. peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- g. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Bagian Ketiga

Sedangkan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah:

Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara-selatan meliputi:

- a. mengembangkan interaksi kawasan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. meningkatkan akses kawasan budi daya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kabupaten; dan
- c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat barang dan sarana pelabuhan perikanan di PKL, PPK, dan PPL.

Pasal 8

Strategi untuk mengembangkan wilayah pusat-pusat permukiman yang mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
- b. meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
- c. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi dan sarana pendukungnya;
- d. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan terutama di Kota Argamakmur sebagai PKWp; dan

- e. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan, dan pariwisata.

Dalam RTRW Kab. Bengkulu Utara 2015-2035, Kecamatan Padang Jaya merupakan kawasan strategis kabupaten **sebagai kawasan minapolitan budidaya**. Kawasan strategis kabupaten ini merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Kawasan ini memiliki keuntungan sebagai PPK dan sudah terdapat indikasi programnya indikasi program PPK Desa Padang Jaya yaitu:

- a. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan produksi dan jalan usaha pertanian;
- b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- c. peningkatan balai benih ikan tawar;
- d. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan; dan
- e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan fasilitas umum.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan hortikultura dikembangkan seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Padang Jaya, dan Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Giri Mulya, dan Kecamatan Batik Nau. Sedangkan rencana pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dikembangkan seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Batik Nau, dan Kecamatan Air Besi.

5.2. KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN

5.2.1. Tema Pengembangan Kawasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan baik data sekunder dan primer, maka tema pengembangan kawasan untuk Kabupaten Bengkulu Utara adalah agrominapolitan. Penetapan tema tersebut, didasarkan dari potensi kewilayahan kabupaten dalam sektor pertanian dan perikanan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi secara regional maupun nasional. Adapun komoditas pertanian yang dijadikan komoditas unggulan adalah sawit dan karet, sedangkan untuk komoditas perikanan adalah budidaya ikan nila. Komoditas-komoditas tersebut sudah dikembangkan oleh masyarakat, sehingga terjamin kelangsungan usahanya secara terus menerus. Dari komoditas tersebut, selanjutnya dilakukan value added produk turunan, baik dalam bentuk pengolahan yang masih dalam bentuk primer, atau produk olahan sementara, atau produk olahan akhir. Peningkatan nilai tambah tersebut, bisa dilakukan oleh industri kecil atau menengah atau besar agar dapat meningkatkan produk agar menjadi punya daya saing dan mempunyai pangsa pasar baik lokal, regional maupun nasional, yang selanjutnya menjadi ciri khas daerah kawasan di Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri.

5.2.2. Hulu Hilir Pengembangan Kawasan Perspektif Sistem Agribisnis

Untuk menunjang tema AgroMinapolitan tersebut, perlu dilakukan skema pembangunan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam pengembangan kawasan tersebut. Konsep pengembangan hulu hilir pengembangan kawasan AgroMinapolitan melalui pendekatan sistem agribisnis.

5.2.2.1. Karet

Karet merupakan salah satu komoditas unggulan di Kab Bengkulu Utara. Pada tahun tahun 2015 luas areal tanaman karet sebesar 33.210,80 ha, menempati urutan kedua, setelah tanaman kelapa sawit (BPS, 2017). Hal ini, menunjukkan bahwa karet adalah

komoditas unggulan dan penting buat Kabupaten Bengkulu Utara. Hulu-hilir kawasan agropolitan karet dalam kajian ini didefinisikan sebagai sistem agribisnis budidaya karet secara menyeluruh mulai dari hulu sampai dengan hilir. Dalam sistem agribisnis, hulu-hilir agribisnis karet sistem agribisnis dikelompokkan dalam empat subsistem, yaitu: 1) Subsistem hulu atau dapat juga disebut *up-stream* agribisnis; 2) subsistem usaha tani atau dapat juga disebut sebagai *on-farm* agribisnis; 3) Subsistem agroindustri atau dapat juga disebut sebagai *down-stream* agribisnis; dan 4) Supporting Sistem yang berfungsi sebagai penunjang *up-stream* dan *down-stream* agribisnis. Rincian unsur hulu-hilir kawasan AgroMinapolitan karet dalam kerangka agribisnis adalah sebagai berikut.

1. Subsistem Hulu

Tanaman karet di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat merata di 3 desa di kawasan tersebut. Mayoritas petani memiliki lahan sendiri bukan sebagai petani penggarap dengan kepemilikan rata-rata petani memiliki lahan sekitar 2 ha. Sebagian besar masyarakat melakukan pembelian bibit yang ada di masing-masing desa. Sedikit masyarakat yang melakukan pembibitan sendiri.

Bibit karet yang berkualitas menentukan tingkat produktivitasnya, sedangkan untuk memperoleh bibit yang berkualitas tidak mudah, semuanya harus diperhatikan secara seksama dimulai dari; asal bibit yang bagus untuk karet unggul adalah bibit yang berasal dari penyerbukan sendiri maupun silang yang dibantu serangga jenis (Nitidulidae, Phloeridae, Eurculionidae) setelah sebulan terjadinya pembuahan sekitar 30-60% akan gugur secara berangsur-angsur dan sisanya berkembang hingga masak, ini adalah bibit yang bagus. Seleksi bibit, setelah mendapatkan bibit, tidak langsung dapat disemai tetapi terlebih dahulu diseleksi untuk memisahkan antara bibit yang bagus dengan bibit yang kualitasnya jelek.

Di kawasan tersebut, belum terbentuk kelompok tani karet maupun gabungan kelompok tani karet, sehingga posisi tawar petani karet rendah baik dalam memperoleh menentukan harga jual karetnya. Posisi tawar yang rendah juga termasuk dalam memperoleh sarana dan prasana input produksi, bibit, pupuk, pestisida dan lainnya. Dari aspek tenaga kerja yang terlibat dalam usaha tani didominasi tenaga kerja dalam keluarga sendiri, tetapi untuk pembukaan lahan menggunakan tenaga dari luar (tenaga kerja upahan).

2. Subsistem Usaha tani

Permasalahan umum yang terjadi dalam budidaya karet adalah rendahnya produktivitas, termasuk di wilayah Bengkulu Utara. Petani umumnya mempunyai keterbatasan dalam penguasaan teknologi usaha tani. Untuk itu, perlu adanya perbaikan teknologi dan manajemen perusahaan tanaman karet.

3. Subsistem Agroindustri

Selain petani harus memahami teknik usaha tani yang baik, petani harus memahami waktu yang tepat karet untuk dimulai disadap. Penyadapan adalah mata rantai pertama dalam proses produksi. Karet penyadapan dilaksanakan dikebun produksi dengan menyayat atau mengiris (dewasa ini juga dengan cara menusuk) batang dengan cara tertentu dengan maksud untuk memperoleh lateks atau getah. Untuk memperoleh karet yang bermutu tinggi, pengumpulan lateks hasil penyadapan dikebun harus bersih, proses pengolahan ini dimulai dari mengumpulkan lateks dikebun penerimaan lateks. Pengangkutan lateks, pengumpulan gumpalan karet mutu rendah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lateks serta bahan-bahan kimia dan air sebagai bahan pengolahan.

Kondisi saat ini, di Bengkulu Utara perlunya tambahan pabrik karet. Sampai saat ini jumlah pabrik yang tersedia berjumlah 2 dan lokasinya berada di luar kawasan dan luar kecamatan. Perlu adanya teknologi dan alat untuk pengolahan karet sampai jadi lembaran karet dan perlu adanya teknologi untuk mengolah limbah karet yang tidak diterima oleh pabrik (grade c), karena selama ini karet grade c dibuang begitu saja dan dikhawatirkan akan mencemari lingkungan.

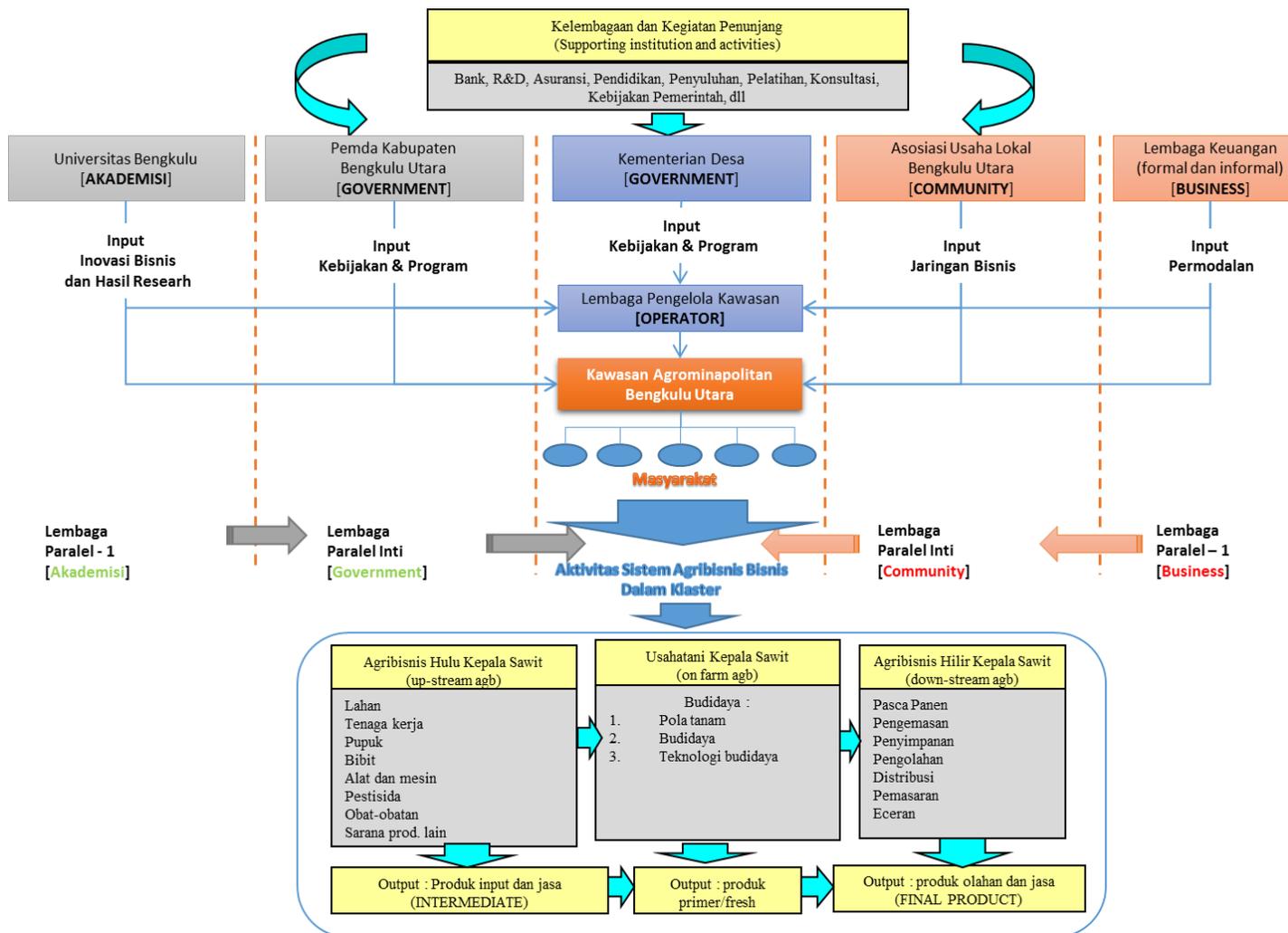
4. Subsistem Supporting

Setelah semua rangkaian dari proses telah dilaksanakan, kemudian sampai pada proses/tahap pemasaran. Kondisi harga karet adalah relatif rendah, karena ada beberapa faktor, yaitu posisi tawar petani yang rendah dan penanganan pasca panen yang kurang baik. Untuk itu, peran penelitian dan Pengembangan (R & D) dari lembaga terkait perlu dilakukan untuk *transfer knowledge* petani dalam proses penanganan pasca panen dalam meningkatkan nilai tambah karet.

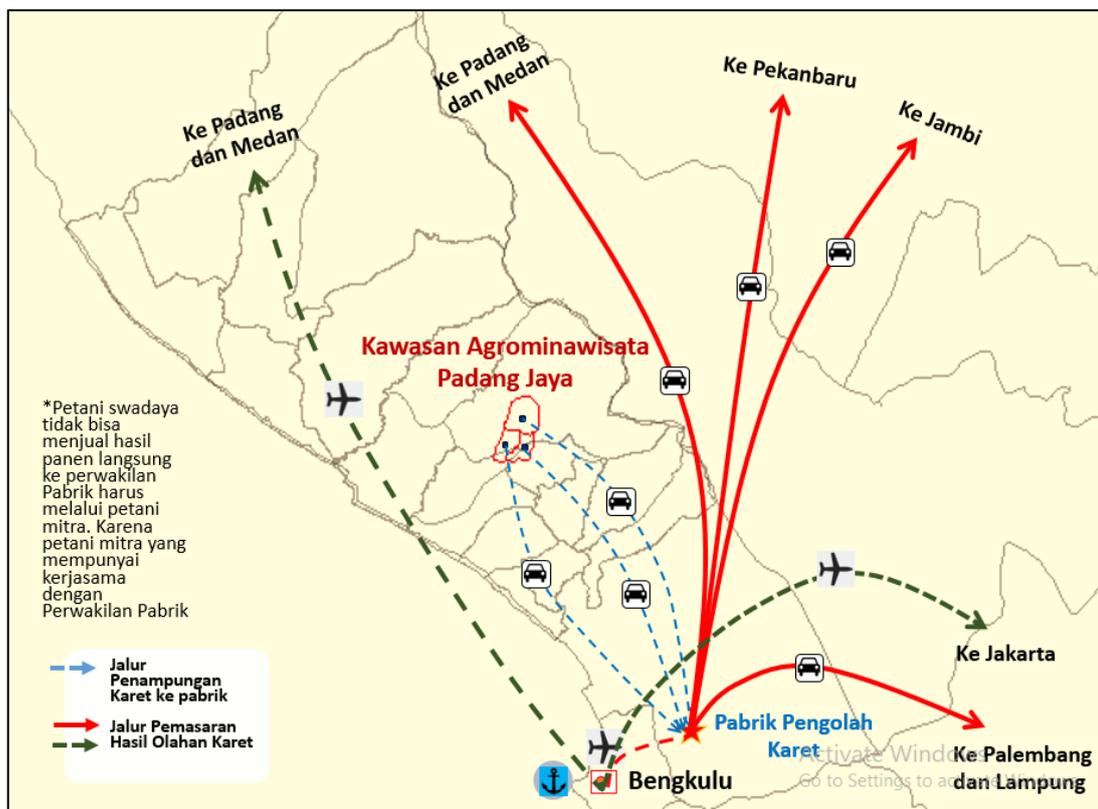
Sementara itu, dalam perspektif pengembangan kawasan, selain sistem agribisnis tersebut juga perlu dikembangkan jejaring kelembagaannya untuk memetakan peran dan fungsi masing-masing aktor di dalam kawasan pengembangan. Pihak-pihak terkait dalam pengembangan kawasan ini adalah: 1) Pengelola kawasan; 2) Masyarakat sebagai pelaku usaha di dalam klaster; 3) Pemerintah pusat yang keterlibatannya di bawah koordinasi Kementerian Desa; 4) Pemerintah daerah; 5) Institusi pendidikan tinggi; dan 6) Institusi keuangan. Peran dan fungsi masing-masing aktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Masyarakat
 - a. Sebagai pelaku utama dalam pengembangan usaha
 - b. Sebagai pelaku utama dalam penciptaan iklim bisnis yang kondusif
 - c. Sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian dan kenyamanan lingkungan di kawasan
2. Pengelola kawasan
 - a. Sebagai aktor utama dalam menggerakkan aktivitas bisnis di seluruh kawasan
 - b. Pengelola kawasan terlibat langsung dalam kegiatan bisnis
 - c. Pengelola kawasan menjadi media/perantara antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat di dalam kawasan
3. Pemerintah Pusat
 - a. Pembuat kebijakan dan regulasi dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan
 - b. Mengalokasikan program fisik dan non fisik, baik yang bersumber dari anggaran internal maupun dari kementerian/lembaga lain dalam rangka percepatan pembangunan kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan
4. Pemerintah Daerah
 - a. Pembuat kebijakan dan regulasi daerah dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan
 - b. Mengalokasikan program fisik dan non fisik, baik yang bersumber dari anggaran internal maupun dari eksternal dalam rangka percepatan pembangunan kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan
 - c. Mengkoordinasikan peran institusi di daerahnya dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengendalian program-program kegiatan di kawasan yang bersangkutan
5. Asosiasi Usaha Lokal
 - a. Sebagai penguat jejaring bisnis, khususnya di bidang pemasaran
 - b. Sebagai pemberi input *best practice*
6. Lembaga Keuangan
 - a. Sebagai penyedia permodalan usaha

- b. Ada beberapa kasus, lembaga keuangan selain memberikan modal juga melakukan pendampingan usaha supaya usahanya berhasil, sehingga modal yang dipinjamkan dapat dikembalikan tepat waktu
7. Institusi Pendidikan Tinggi Lokal
- a. Sebagai penyedia inovasi bisnis berbasis riset terapan sesuai dengan tema bisnis di kawasan
 - b. Sebagai pendamping dan pembina usaha dalam rangka mengamalkan tri dharma pendidikan tinggi di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 5.1. Jejaring Kelembagaan Kawasan Agrominapolitan Karet di Kabupaten Bengkulu Utara



Gambar 5.2. Peta jejaring pemasaran produk karet Kawasan AgroMinapolitan di Bengkulu Utara

5.2.2.2. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan komoditi yang paling mendominasi luas areal perkebunan Bengkulu Utara, data tahun 2015 menunjukkan bahwa luas kebun kelapa sawit mencapai 36.662,75 ha (BPS, Bengkulu Utara, 2017). Rincian unsur hulu-hilir kawasan AgroMinapolitan kelapa sawit dalam kerangka agribisnis adalah sebagai berikut.

1. Subsistem Hulu

Tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat di 3 desa, dan yang paling besar berada di Desa Margasakti, karena 70 % masyarakatnya petani sawit. Mayoritas petani memiliki lahan sendiri bukan sebagai petani penggarap dengan kepemilikan rata-rata petani memiliki lahan sekitar 1 ha. Sebagian besar masyarakat melakukan pembelian bibit pohon sawit berasal dari PPKS (Pusat Pengembangan Kelapa Sawit) yang lokasinya berada di luar kawasan perdesaan. Dan kendalanya dalam memperoleh bibit, adalah adalah birokrasi pengajuan ke PPKS yang relatif berbelit (harus melampirkan surat pengantar dari dinas perkebunan), buat petani itu jadi permasalahan yang perlu solusi dari pihak terkait. Hal ini menjadi penting, karena bibit yang berkualitas akan mempengaruhi produktivitasnya. Di kawasan tersebut, belum terbentuk kelompok tani Kelapa Sawit maupun gabungan kelompok tani Kelapa Sawit, sehingga posisi tawar petani rendah baik dalam memperoleh menentukan harga jual produknya. Posisi tawar yang rendah juga termasuk dalam memperoleh sarana dan prasana input produksi, bibit, pupuk, pestisida dan lainnya.

2. Subsistem Usaha tani

Usaha kelapa sawit banyak diusahakan perusahaan dengan tenaga kerja yang melibatkan dari masyarakat setempat. Untuk kelapa sawit yang diusahakan oleh

masyarakat sudah mulai ada perbaikan dalam produktifitas, terutama setelah mereka memahami teknik budidaya dari perusahaan sekitar. Di awal berusahatani kelapa sawit, petani menggunakan bibit asalan, ini dipengaruhi oleh kurangnya pendanaan untuk membeli bibit yang bersertifikat dan minimnya informasi tentang budidaya kelapa sawit dan ruginya menggunakan bibit asalan.

Selain faktor produksi bibit, faktor lain yang sangat mempengaruhi keberhasilan usaha tani kelapa sawit adalah penggunaan pupuk. Pupuk yang digunakan petani adalah pupuk Urea, Za, Sp-36, KCl, dan NPK (Mutiarra, Mahkota, dan Phonska). Dimana dosis yang digunakan oleh setiap petani tidak sama, hal ini tergantung dari pendanaan dan jenis pupuk yang digunakan. Kalau yang digunakan pupuk tunggal (Urea, Za, Sp-36 dan Kcl) dosis yang digunakan lebih banyak jika dibandingkan dengan menggunakan pupuk majemuk (NPK). Hal ini yang mempengaruhi keberhasilan petani dalam usaha tani kelapa sawit.

3. Subsistem Agroindustri

Pada saat panen, produksi sawit melimpah namun tidak semua tertampung oleh perusahaan. Perlu diberikan alternatif hasil olahan sawit selain CPO agar saat produksi melimpah yang tidak tertampung dapat dimanfaatkan dan tetap menguntungkan dan memberikan nilai tambah untuk pendapatan petani.

4. Subsistem Supporting

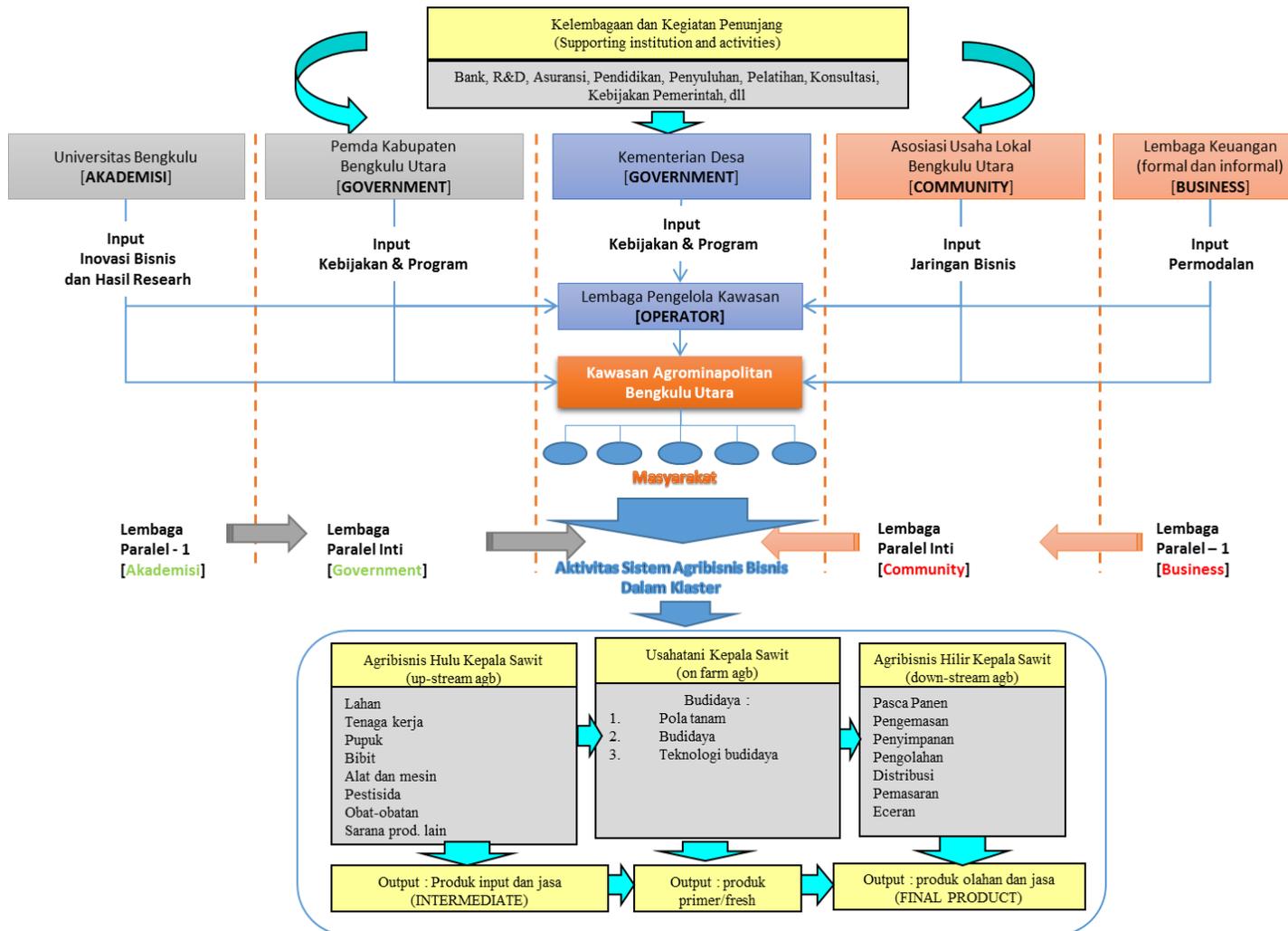
Setelah semua rangkaian dari proses telah dilaksanakan, kemudian sampai pada proses/tahap pemasaran. Kondisi harga karet adalah relatif rendah, dan cenderung petani lemah posisi tawarnya dalam menentukan harga, meskipun sudah ada penetapan harga dari pemerintah yang relatif tinggi namun pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai. Misalkan saja pemerintah menetapkan harga sawit sebesar 1.200/kg namun dilevel petani, harga sawit mereka dihargai 800/kg.

Selain itu, perlu ada peran perguruan tinggi maupun lembaga penelitian untuk menghasilkan perbaikan varietas unggul untuk jenis bibit sawit, kondisi saat ini kandungan CPO sawit rendah yaitu <20%, sedangkan standar CPO yang bagus berkisar 20-22%.

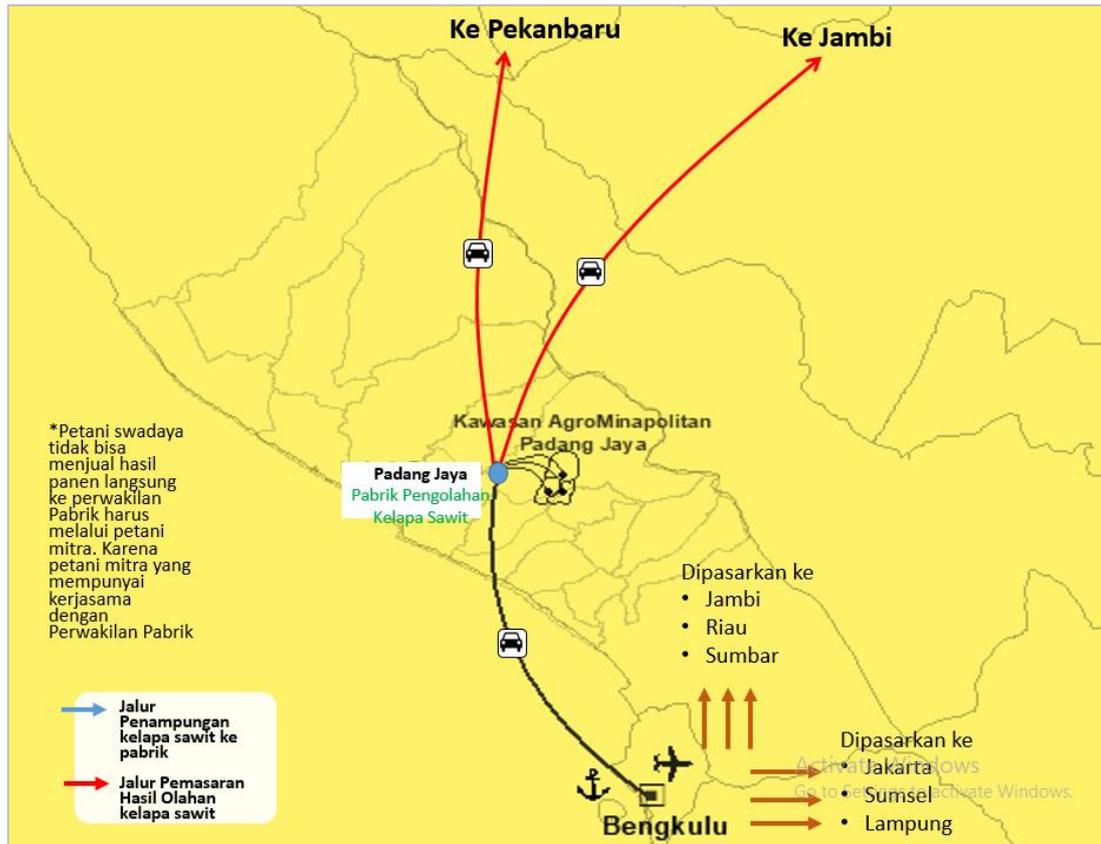
Sementara itu, dalam perspektif pengembangan kawasan, selain sistem agribisnis tersebut juga perlu dikembangkan jejaring kelembagaannya untuk memetakan peran dan fungsi masing-masing aktor di dalam kawasan pengembangan. Pihak-pihak terkait dalam pengembangan kawasan ini adalah: 1) Pengelola kawasan; 2) Masyarakat sebagai pelaku usaha di dalam klaster; 3) Pemerintah pusat yang keterlibatannya di bawah kordinasi Kementerian Desa; 4) Pemerintah daerah; 5) Institusi pendidikan tinggi; dan 6) Institusi keuangan. Peran dan fungsi masing-masing aktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Masyarakat
 - a. Sebagai pelaku utama dalam pengembangan usaha.
 - b. Sebagai pelaku utama dalam penciptaan iklim bisnis yang kondusif.
 - c. Sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian dan kenyamanan lingkungan di kawasan.
2. Pengelola kawasan
 - a. Sebagai aktor utama dalam menggerakkan aktivitas bisnis di seluruh kawasan.
 - b. Pengelola kawasan terlibat langsung dalam kegiatan bisnis.
 - c. Pengelola kawasan menjadi media/perantara antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat di dalam kawasan.

3. Pemerintah Pusat
 - a. Pembuat kebijakan dan regulasi dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan
 - b. Mengalokasikan program fisik dan non fisik, baik yang bersumber dari anggaran internal maupun dari kementerian/lembaga lain dalam rangka percepatan pembangunan kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan
4. Pemerintah Daerah
 - a. Pembuat kebijakan dan regulasi daerah dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan
 - b. Mengalokasikan program fisik dan non fisik, baik yang bersumber dari anggaran internal maupun dari eksternal dalam rangka percepatan pembangunan kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan
 - c. Mengkoordinasikan peran institusi di daerahnya dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengendalian program-program kegiatan di kawasan yang bersangkutan
5. Asosiasi Usaha Lokal
 - a. Sebagai penguat jejaring bisnis, khususnya di bidang pemasaran
 - b. Sebagai pemberi input *best practice*
6. Lembaga Keuangan
 - a. Sebagai penyedia permodalan usaha
 - b. Ada beberapa kasus, lembaga keuangan selain memberikan modal juga melakukan pendampingan usaha supaya usahanya berhasil, sehingga modal yang dipinjamkan dapat dikembalikan tepat waktu
7. Institusi Pendidikan Tinggi Lokal
 - a. Sebagai penyedia inovasi bisnis berbasis riset terapan sesuai dengan tema bisnis di kawasan
 - b. Sebagai pendamping dan pembina usaha dalam rangka mengamalkan tri dharma pendidikan tinggi di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 5.3. Jejaring Kelembagaan Kawasan Agrominapolitan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara



Gambar 5.4. Peta jejaring pemasaran produk kelapa sawit kawasan AgroMinapolitan Kabupaten Bengkulu Utara

5.2.2.3. Budidaya Ikan Nila

Ikan nila merupakan salah satu komoditas penting perikanan budidaya air tawar di Indonesia, maka hal demikian dapat kita lakukan di Bengkulu Utara. Potensi ikan nila di Bengkulu Utara sangat besar, karena kebutuhan kabupaten sekitar dipenuhi dari Bengkulu Utara (Dinas Perikanan dan Kelautan Bengkulu, 2018). Rincian unsur hulu-hilir kawasan AgroMinapolitan perikanan budidaya dalam kerangka agribisnis adalah sebagai berikut.

1. Subsistem Hulu

Budidaya ikan nila di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat di 3 Desa, terbanyak di Desa Tambak Rejo (setiap rumah memiliki kolam ikan). Hampir 50% lahan sawah beralih fungsi menjadi kolam ikan. Bibit ikan diperoleh secara mandiri atau membeli dari balai pembenihan yang ada disekitar lokasi. Yang menjadi kendala harga pakan yang masih relatif mahal, saat ini harga pakan ikan Rp 285.000 - 290.000/30 kg (1 sak).

2. Subsistem Budidaya

Produktivitas budidaya ikan nila di kawasan masih relatif rendah. Dari 10 ribu ekor ikan yang dibudidayakan setelah 4 bulan menghasilkan sekitar 2 ton, idealnya dapat menghasilkan 4 ton. Cara budidaya yang baik (CBIB) perlu lebih digalakan di kawasan ini, agar ikan yang dipelihara nantinya memiliki kualitas yang baik dan meningkatkan daya saing produk, bebas kontaminasi bahan kimia maupun hama penyakit, serta aman untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 02/MEN/2007 tentang CBIB.

Kelompok pembudidaya sudah mulai tumbuh baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan kelompok, misalnya intensifitas pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga proses budidaya ikan yang lebih efektif, efisien, memperkecil resiko kegagalan, dan ramah lingkungan. Selain pelatihan, pemerintah daerah juga memfasilitasi pertemuan antara petani ikan dengan pedagang.

3. Subsistem Agroindustri

Pada saat panen, produksi ikan nila melimpah namun tidak semua tertampung oleh pasar. Perlu diberikan alternatif hasil olahan ikan selain langsung dijual segar. Beberapa alternatif yang perlu dibangun adalah industri pengolahan ikan untuk menjadi produk lainnya (tepung ikan, bakso ikan, dll). Dengan begitu, petani ikan dapat memperoleh value added dari ikan tersebut.

4. Subsistem Supporting

Untuk mendukung keberlanjutan budidaya ikan nila, perlu adanya support dari seluruh pihak terkait. Hal ini karena di kawasan belum terdapat pabrik pakan ikan untuk mengatasi mahalnnya harga pakan ikan, pasar-pasar lokal yang berada di setiap desa, sebagai penampungan sementara. Kualitas SDM petani ikan juga masih relatif rendah, sehingga perlu adanya pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah ikan menjadi produk lainnya yang memiliki nilai jual. Selain itu, perlu adanya perbaikan terhadap varietas bibit ikan unggul, sehingga kualitas dan produktivitas lebih baik, karena masih banyak ditemukannya ikan cepret (tidak berkembang)/stunting yang harganya 50% dari harga normal.

Sementara itu, dalam perspektif pengembangan kawasan, selain sistem agribisnis tersebut juga perlu dikembangkan jejaring kelembagaannya untuk memetakan peran dan fungsi masing-masing aktor di dalam kawasan pengembangan. Pihak-pihak terkait dalam pengembangan kawasan ini adalah: 1) Pengelola kawasan; 2) Masyarakat sebagai pelaku usaha di dalam klaster; 3) Pemerintah pusat yang keterlibatannya di bawah kordinasi Kementerian Desa; 4) Pemerintah daerah; 5) Institusi pendidikan tinggi; dan 6) Institusi keuangan. Peran dan fungsi masing-masing aktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Masyarakat

- a. Sebagai pelaku utama dalam pengembangan usaha
- b. Sebagai pelaku utama dalam penciptaan iklim bisnis yang kondusif
- c. Sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian dan kenyamanan lingkungan di kawasan

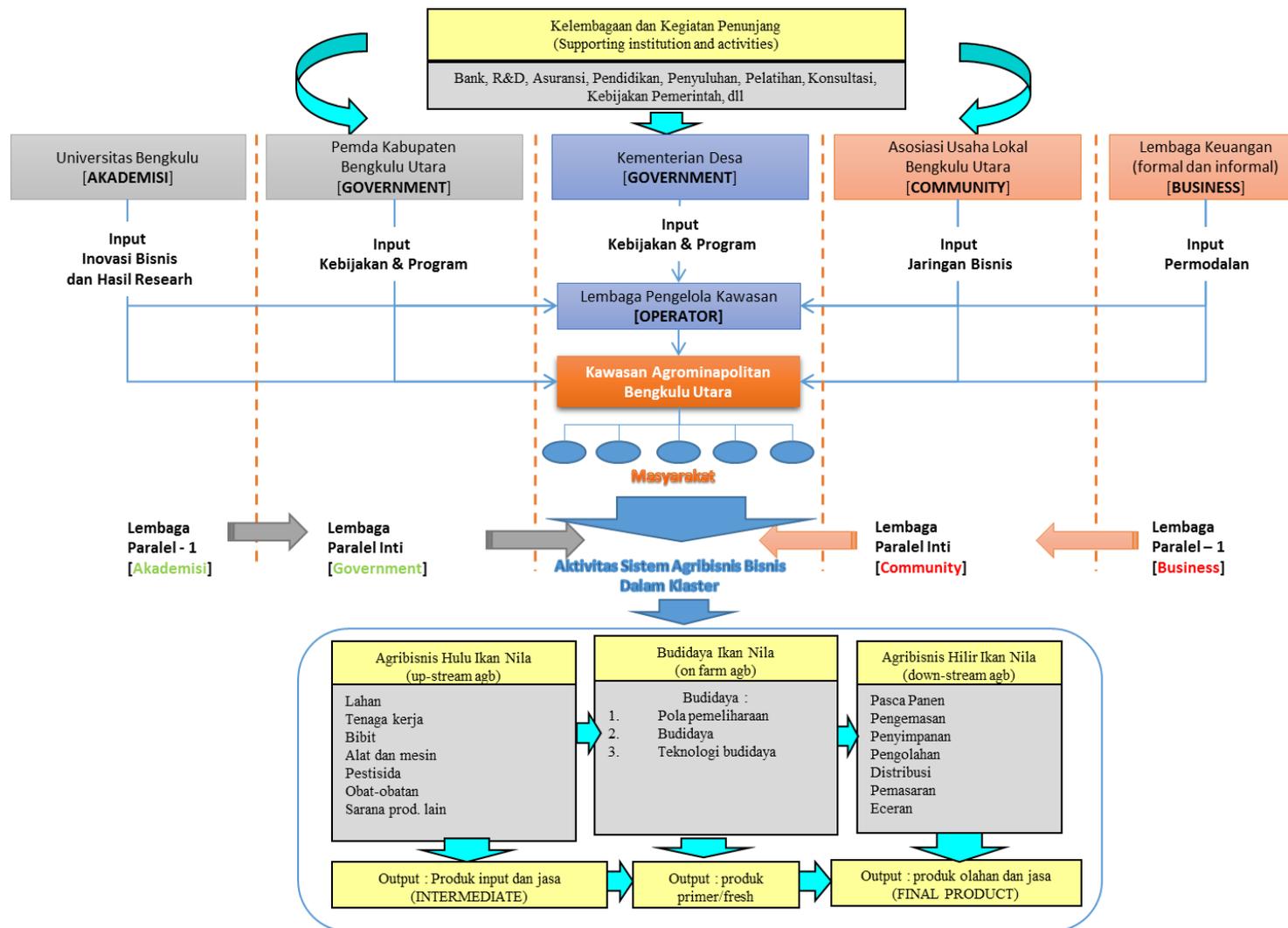
2. Pengelola kawasan

- a. Sebagai aktor utama dalam menggerakkan aktivitas bisnis di seluruh kawasan
- b. Pengelola kawasan terlibat langsung dalam kegiatan bisnis
- c. Pengelola kawasan menjadi media/perantara antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat di dalam kawasan

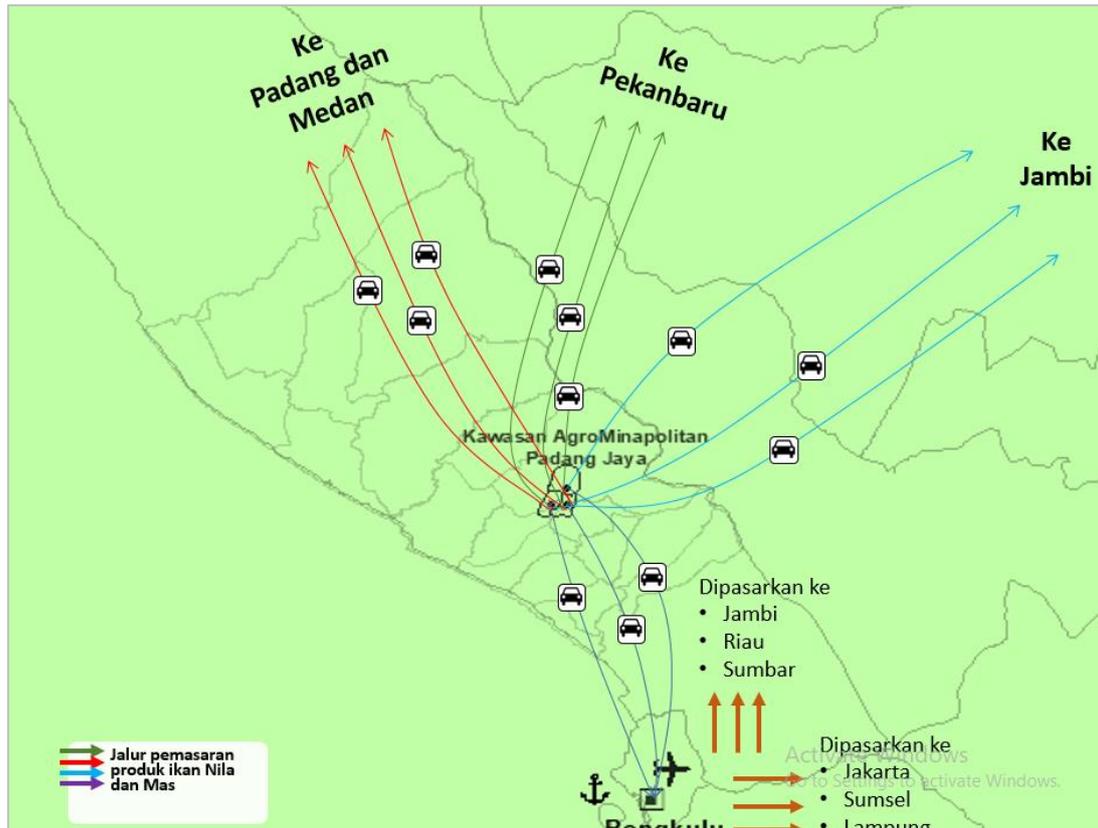
3. Pemerintah Pusat

- a. Pembuat kebijakan dan regulasi dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan
- b. Mengalokasikan program fisik dan non fisik, baik yang bersumber dari anggaran internal maupun dari kementerian/lembaga lain dalam rangka percepatan pembangunan kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan

4. Pemerintah Daerah
 - a. Pembuat kebijakan dan regulasi daerah dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan
 - b. Mengalokasikan program fisik dan non fisik, baik yang bersumber dari anggaran internal maupun dari eksternal dalam rangka percepatan pembangunan kawasan sesuai dengan tema yang ditetapkan
 - c. Mengkoordinasikan peran institusi di daerahnya dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengendalian program-program kegiatan di kawasan yang bersangkutan
5. Asosiasi Usaha Lokal
 - a. Sebagai penguat jejaring bisnis, khususnya di bidang pemasaran
 - b. Sebagai pemberi input *best practice*
6. Lembaga Keuangan
 - a. Sebagai penyedia permodalan usaha
 - b. Ada beberapa kasus, lembaga keuangan selain memberikan modal juga melakukan pendampingan usaha supaya usahanya berhasil, sehingga modal yang dipinjamkan dapat dikembalikan tepat waktu
7. Institusi Pendidikan Tinggi Lokal
 - a. Sebagai penyedia inovasi bisnis berbasis riset terapan sesuai dengan tema bisnis di kawasan
 - b. Sebagai pendamping dan pembina usaha dalam rangka mengamalkan tri dharma pendidikan tinggi di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 5.5. Jejaring Kelembagaan Kawasan Agrominapolitan Ikan Nila di Kabupaten Bengkulu Utara



Gambar 5.6. Peta jejaring pemasaran produk ikan nila di Kawasan AgroMinapolitan Kabupaten Bengkulu Utara

5.2.3. Hulu-Hilir Perdesaan Agropolitan dalam Perspektif Pengembangan Kawasan

5.2.3.1. Karet

Hulu-Hilir agropolitan dalam perspektif pengembangan kawasan dimaknai sebagai upaya untuk memetakan aktivitas dengan basis ruang dan jarak dalam perspektif klaster agroindustri. Perencanaan kawasan dilakukan dengan pendekatan Pusat Pertumbuhan (Kota Satelit) dan Kawasan Penyangga (*Hinterland*). Pusat Pertumbuhan merupakan pusat aktivitas dominan yang berfungsi sebagai penggerak wilayah penyangganya. Sementara itu, kawasan penyangga berfungsi sebagai bagian dari kawasan inti, baik sebagai *up-stream* maupun *down-stream* dalam kerangka agroindustri. Idealnya, aktivitas di kawasan pusat pertumbuhan harus terkoneksi dengan kawasan penyangga dalam hal aktivitas maupun sub aktivitas agropolitan tersebut.

1. Pusat Pertumbuhan Sebagai Pusat Pemasaran

Kawasan yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan kesepakatan dalam forum FGD adalah Desa Margasakti. Pertimbangannya adalah bahwa kawasan ini telah memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk konektivitas berbagai aktivitas di kawasan penyangga. Aktivitas bisnis utama yang ada di pusat pertumbuhan adalah pusat pemasaran (pasar).

Dengan demikian, kegiatan bisnis yang relevan dikembangkan di pusat pertumbuhan sesuai dengan tema agropolitan berbasis komoditas karet adalah perdagangan hasil karet baik ke tengkulak (pedagang) atau masuk ke pabrik pengolahan. Selain

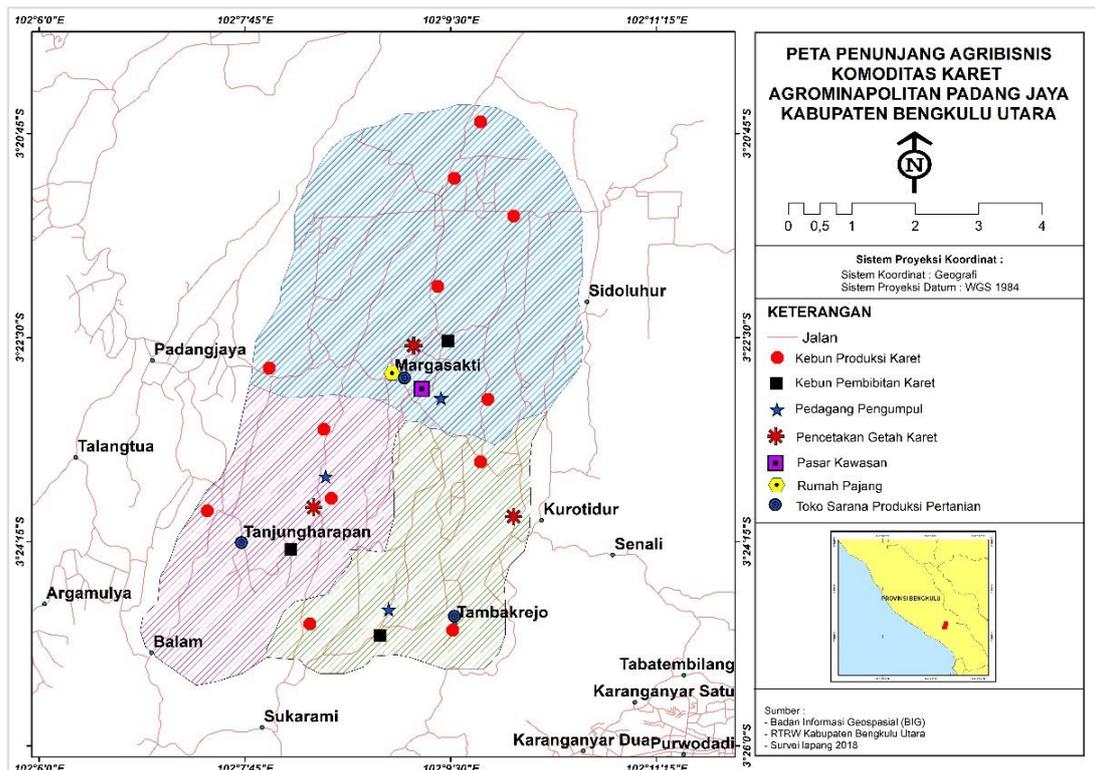
perdagangan hasil produksi, juga perlu dibangun bisnis sarana penunjang, seperti perdagangan sarana (mesin dan alat) pertanian, perdagangan pupuk dan obat tanaman.

2. Pusat Produksi

Kawasan yang dijadikan sebagai pusat produksi adalah Kec. Padang Jaya, yaitu meliputi 3 desa, yaitu: Desa Tanjung Harapan, Desa Marga Sakti dan Desa Tambak Rejo.

3. Pusat Pengolahan

Kawasan yang dijadikan sebagai pusat pengolahan adalah Desa Marga Sakti. Aktivitas utama di pusat pasar dan sekaligus sebagai pelayanan pendidikan.



Gambar 5.7. Peta Penyebaran Infrastruktur Bisnis di Kawasan Agrominapolitan Karet di Kabupaten Bengkulu Utara

5.2.3.2. Kelapa Sawit

1. Pusat Pertumbuhan Sebagai Pusat Pemasaran

Kawasan yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan kesepakatan dalam forum FGD adalah Desa Margasakti. Pertimbangannya adalah bahwa kawasan ini telah memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk konektivitas berbagai aktivitas di kawasan penyangga. Aktivitas bisnis utama yang ada di pusat pertumbuhan adalah pusat pemasaran (pasar).

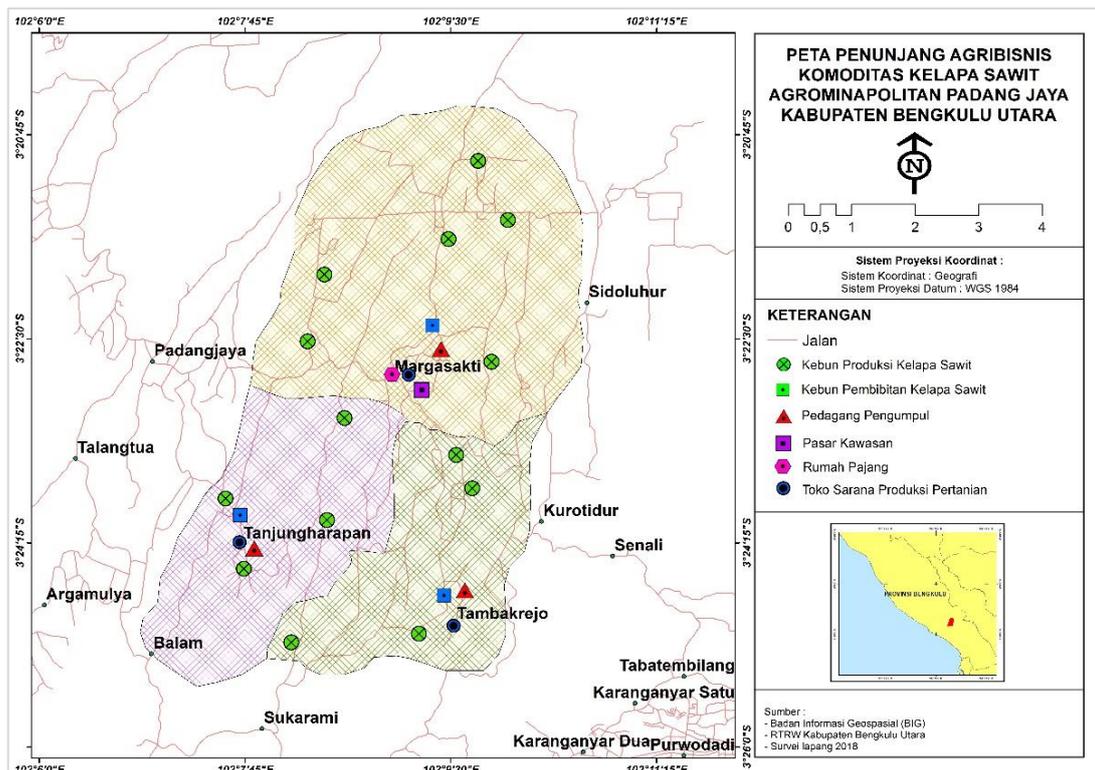
Dengan demikian, kegiatan bisnis yang relevan dikembangkan di pusat pertumbuhan sesuai dengan tema agropolitan berbasis komoditas kelapa sawit adalah perdagangan hasil sawit baik ke tengkulak (pedagang) atau masuk ke pabrik pengolahan. Selain perdagangan hasil produksi, juga perlu dibangun bisnis sarana penunjang, seperti perdagangan sarana (mesin dan alat) pertanian, perdagangan pupuk dan obat tanaman.

2. Pusat Produksi

Kawasan yang dijadikan sebagai pusat produksi adalah Kec. Padang Jaya, yaitu meliputi 3 desa, yaitu: Desa Tanjung Harapan, Desa Marga Sakti dan Desa Tambak Rejo.

3. Pusat Pengolahan

Kawasan yang dijadikan sebagai pusat pengolahan adalah Desa Marga Sakti. Aktivitas utama di pusat pasar dan sekaligus sebagai pelayanan pendidikan.



Gambar 5.8. Peta Penyebaran Infrastruktur Bisnis di Kawasan Agrominapolitan Kelapa Sawit di Kabupaten Bengkulu Utara

5.2.3.3. Budidaya Ikan Nila

1. Pusat Pertumbuhan Sebagai Pusat Pemasaran

Kawasan yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan kesepakatan dalam forum FGD adalah Desa Tambak Rejo. Pertimbangannya adalah bahwa kawasan ini telah memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk konektivitas berbagai aktivitas di kawasan penyangga. Aktivitas bisnis utama yang ada di pusat pertumbuhan adalah pusat pemasaran (pasar).

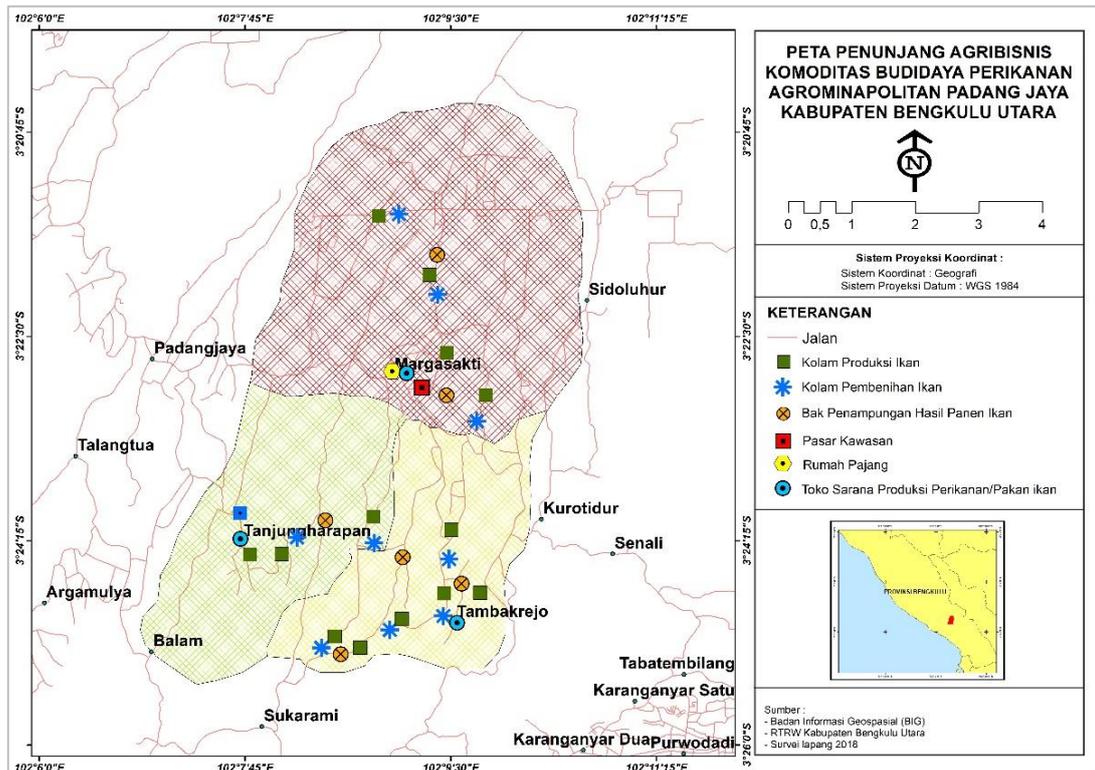
Dengan demikian, kegiatan bisnis yang relevan dikembangkan di pusat pertumbuhan sesuai dengan tema AgroMinapolitan berbasis komoditas ikan nila adalah perdagangan hasil ikan nila baik ke tengkulak (pedagang). Selain perdagangan hasil produksi, juga perlu dibangun bisnis sarana penunjang, seperti perdagangan sarana (mesin dan alat) perikanan dan obat ikan.

2. Pusat Produksi

Kawasan yang dijadikan sebagai pusat produksi adalah Tambak Rejo, Kec. Padang Jaya.

3. Pusat Pengolahan

Kawasan yang dijadikan sebagai pusat pengolahan adalah Desa Tambak Rejo, karena desa tersebut menjadi pusat budidaya perikanan. Sehingga akan lebih efektif dan efisien pusat budidaya sekaligus dijadikan pusat pengolahan.



Gambar 5.9. Peta Penyebaran Infrastruktur Bisnis di Kawasan Agrominapolitan Ikan Nila di Kabupaten Bengkulu Utara

5.3. PENGEMBANGAN JEJARING KAWASAN PERDESAAN

5.3.1. Sentra Kawasan

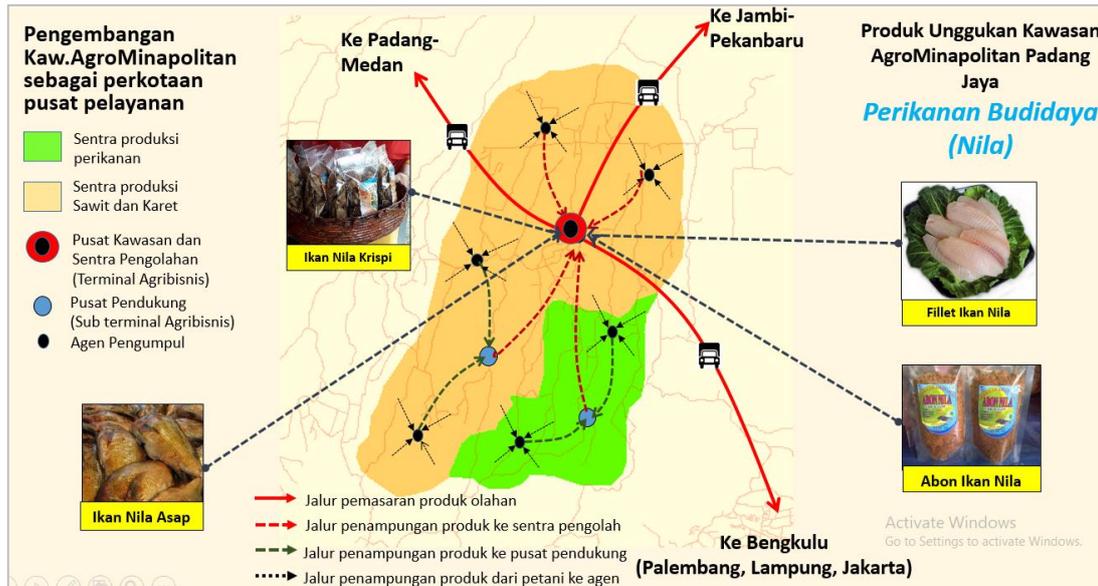
Pusat Kawasan adalah Desa Margasakti dengan keunggulan sebagai berikut.

1. Merupakan pusat desa induk
2. Menjadi pusat pasar komoditas
3. Merupakan pusat pelayanan pendidikan

Tabel 5.1. Sentra Kawasan

No	Desa	Lahan	Air Bersih	Listrik	Jaringan Kom-info	Infrastruktur Transportasi	Akses Pasar	Akses Lokasi Produksi	Jumlah Industri	Total Skor
1	Marga Sakti	75	100	100	100	100	100	100	90	765
2	Tambak Rejo	100	100	100	80	80	90	100	80	740
3	Tanjung Harapan	100	100	100	90	80	80	100	100	750

Sumber: Hasil FGD Penajaman RPKP (2018)



Gambar 5.10. Pusat Kawasan Agrominapolitan
(Sumber: Hasil FGD Penajaman RPKP, 2018)

5.3.2. Keterkaitan dengan kawasan lain

Kebijakan pengembangan berbasis kawasan bertujuan untuk menghilangkan ketidaksempurnaan sistem inovasi yang memungkinkan untuk lebih efisien dan menghindari kegagalan dalam koordinasi. Pendekatan berbasis kawasan adalah cara yang realistis untuk mengidentifikasi hambatan kebijakan dan kelembagaan terhadap daya saing dan inovasi.

Keuntungan pengembangan kawasan perdesaan antara lain:

1. Peningkatan produktivitas (melalui input khusus, akses terhadap informasi, sinergi, dan akses terhadap barang publik).
2. Inovasi yang lebih cepat (melalui penelitian kooperatif dan persaingan dalam kawasan).
3. Inovasi kreatif, seperti dalam kelompok desain mode di New York dan Paris.
4. Pembentukan bisnis baru (mengisi ceruk dan memperluas batas kawasan). Dalam kelompok, bisnis baru terbentuk sebagai konsekuensi persaingan, permintaan akan layanan, dan daya tarik investor; Dinamika ini pada gilirannya memacu inovasi.

Adanya kawasan perdesaan juga akan menimbulkan eksternalitas positif berupa:

1. Akses infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih efisien, termasuk modal. Perusahaan dengan mudah memperoleh akses terhadap pemasok, informasi, teknologi, lembaga pembiayaan, dan institusi pendidikan tinggi.
2. Pengurangan biaya. Biaya transaksi turun karena lokasi yang berdekatan, termasuk lokasi layanan publik. Kedekatan menawarkan keuntungan penting bagi sektor pertanian di negara-negara berkembang, khususnya untuk UKM. Seringkali perusahaan dapat memperoleh produk dan layanan dari perusahaan lainnya yang ada di dalam kawasan dan melupakan untuk mengembangkan atau memproduksi produk atau layanan sendiri karena biaya yang besar. Biaya juga dikurangi melalui peningkatan skala usaha ekonomi, seperti dalam kasus pemasaran bersama dan pembelian massal. Biaya yang berkaitan dengan perekrutan karyawan berbakat juga berkurang, asalkan bakat tersedia di klaster.
3. Akses terhadap informasi dan layanan. Berada di dalam sebuah kawasan perdesaan memberi para anggota akses ke pasar yang luas, dan informasi kompetitif.

4. Menarik investasi asing. Jika kawasan perdesaan merupakan pusat utama kegiatan ekonomi, maka akan menarik semua pemain kunci dari dalam dan luar negeri.
5. Pengakuan dan pemasaran yang lebih baik. Bagi usaha kecil dan perusahaan yang sedang berkembang, berlokasi dan dekat dengan pesaing dan kegiatan ekonomi terkait dapat membantu mereka tumbuh, mendapatkan pengakuan, dan mencapai status lebih cepat di pasar.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam pengembangan kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya telah dibentuk lembaga klaster kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya, termasuk juga pengurus untuk mengelola lembaga tersebut. Pengembangan kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya ini tidak hanya berdiri sendiri, namun dapat dikaitkan dengan kawasan-kawasan pengembangan lainnya: seperti kawasan pariwisata, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), atau pusat-pusat jasa dan perdagangan pada masing-masing kota di dalam atau luar provinsi.

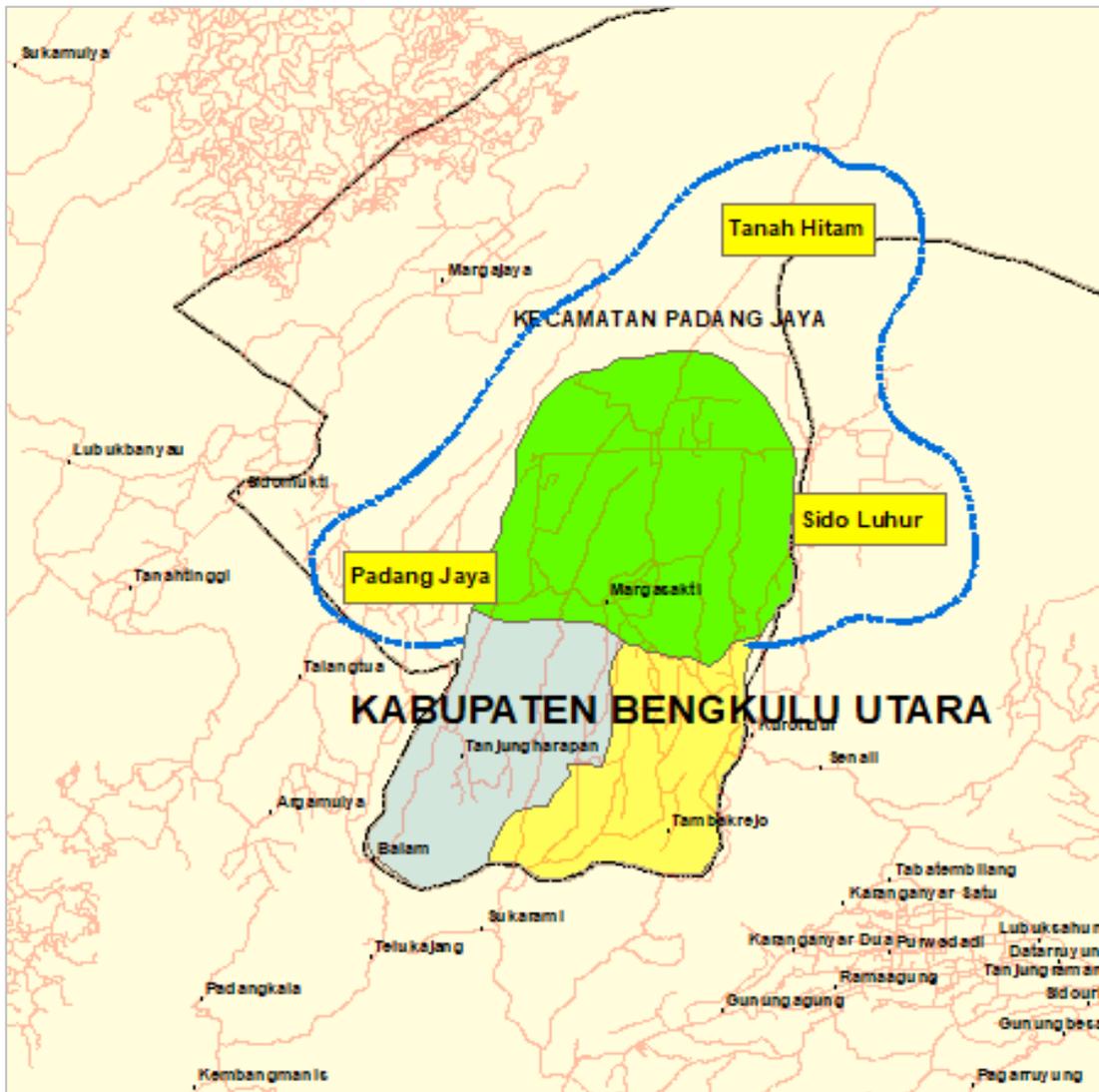


Gambar 5.11. Peta keterkaitan kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya dengan kawasan lainnya

Pada forum FGD di tingkat kawasan dan Kabupaten Bengkulu Utara, diusulkan untuk melakukan penambahan 3 desa lagi agar masuk ke dalam Kawasan AgroMinapolitan, yaitu Desa Padang Jaya, Desa Sidoluhur dan Desa Tanah Hitam. Adapun pertimbangan usulan penambahan 3 desa tersebut adalah:

1. Ada kesepakatan antara pemangku dalam kawasan dan luar kawasan
2. Berada dalam satu hamparan (terkonsolidasi lahannya)
3. Ada kesamaan komoditas yang menjadi unggulan dan atau andalan

4. Ada keterpaduan dalam sistem tata kelola agribisnis
5. Ada legalisasi dan pengusulan dari pemerintah daerah yang tertuang dalam SK Bupati



Gambar 5.12. Peta sebaran hamparan 3 desa yang diusulkan masuk ke dalam kawasan AgroMinapolitan Kabupaten Bengkulu Utara

Komoditas yang banyak diusahakan masyarakat di Desa Padang Jaya adalah Sapi potong, keterkaitan untuk dapat bergabung dalam satu kawasan didasari oleh keberadaannya yang bersebelahan dengan Desa Marga Sakti, disamping itu memiliki pola yang sama dengan sistem pengelolaan sapi yang dapat diintegrasikan dengan komoditas kelapa sawit sebagai sumber pakan (pelepah daun kelapa sawit). Sementara, Desa Sidoluhur selain berada dalam satu hamparan dan berbatasan dengan Desa Marga Sakti, juga memiliki keterkaitan dengan kawasan AgroMinapolitan lebih disebabkan oleh suplay input produksi (benih ikan nila) berasal dari desa tersebut, sedangkan Desa Tanah Hitam berbatasan langsung dengan Desa Marga Sakti dan memiliki keterkaitan dengan konektivitas pusat wisata yang pitu gerbangnya terdapat di Desa Marga Sakti.

Pengusulan penambahan 3 desa dalam kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya sudah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara dengan mengirim surat ke

Kemendesdesa, namun hingga pelaksanaan FGD 2 di Kabupaten Bengkulu Utara belum mendapat persetujuan dari 4 kementerian/Lembaga. Mengingat waktu penyelesaian dokumen RPKP ini sudah dipenghujung waktu, maka proses identifikasi potensi untuk menetapkan komoditas unggulan pada 3 desa usulan serta identifikasi kebutuhan/permasalahan belum dilakukan dalam kajian RPKP kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya saat ini.

BAB VI

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Bengkulu Utara



6.1. ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis kondisi yang dilakukan di Kawasan Perdesaan AgroMnapolitan Padang Jaya, secara umum, ada lima isu strategis yang terdapat di kawasan ini. *Pertama*, isu pengembangan perikanan darat. Terdapat potensi ikan terdapat di tiga desa kawasan perdesaan, ditambah usulan satu desa penunjang kawasan yaitu Desa Sidoluhur, sebagai sumber bibit ikan nila untuk kawasan AgroMinapolitan. Memfungsikan lembaga Bumdes/Bumdesma sebagai unit bisnis kawasan mulai dari hulu (input produksi) hingga ke hilir (pengolahan dan pemasaran).

Kedua, 20 tahun terakhir, banyak masyarakat petani yang melakukan alih fungsi komoditas seperti padi menjadi kelapa sawit dan kolam ikan. Padahal kawasan AgroMinapolitan merupakan sentra kebutuhan pangan (padi) sebelumnya dengan investasi jaringan irigasi teknis. Beralihnya sistem budidaya ini dilatarbelakangi oleh menurunnya produktivitas lahan dan rendahnya margin keuntungan yang diterima petani. Hal ini mendorong petani untuk melakukan alih fungsi komoditas menjadi kelapa sawit dan kolam ikan seperti yang terjadi saat ini. Untuk mempertahankan fungsi lahan agar tetap baik dan lestari maka pola integrasi tanaman budidaya seperti pangan, perikanan darat, perkebunan sawit, dan peternakan sapi dapat dilakukan. Masyarakat mengharapkan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan sumberdaya yang ada, seperti integrasi pertanian tanaman pangan dengan perikanan darat dan peternakan. Integrasi perkebunan sawit dengan peternakan.

Ketiga, konektivitas infrastruktur antar desa didalam dan luar kawasan serta perbaikan jalan produksi. Ketidaktaatan pengguna jalan, terutama pengusaha sawit dalam menggunakan jalan menyebabkan jalan-jalan desa dan jalan produksi kelebihan muatan yang mengakibatkan jalan rusak, mulai dari sedang ke ringan. Sedangkan perbaikan tidak setiap tahun dianggarkan.

Keempat, peningkatan pemasaran dan produk-produk unggulan kawasan melalui penataan bangunan fisik dan tata kelola pasar MinaAgropolitan serta meningkatkan peran kelembagan Bumdes/Bumdes Bersama dalam pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Pasar kawasan yang ada butuh direvitalisasi sesuai dengan peningkatan kebutuhan kawasan AgroMinapolitan. Pasar yang diinginkan termasuk pelayanan informasi komoditas dan produk unggulan, kantor Bumdes Bersama, dan rumah pajang.

Kelima, peningkatan keterampilan SDM masyarakat dengan menciptakan industri pengolahan produk ikan melalui skema kerjasama lembaga Bumdes/Bumdesma yang dapat membuka akses/peluang pasar sehingga petani memperoleh nilai tambah.

6.1.1. Isu Internal

1. Kekuatan

- Terdapat dua pasar skala kecamatan di Desa Marga Sakti yang dapat menjadi sarana pemasaran
- Terdapat 857 RTP (Rumah Tangga Perikanan) dan 76 POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar)
- Hasil perikanan yang melimpah (perikanan: 2-3 ton/malam)
- Masyarakat banyak yang bergerak di sektor perkebunan (kelapa sawit dan karet)
- Kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk bertani, membudidayakan ikan air tawar dan mengolah hasil pertanian/perikanan
- Banyak lahan kosong yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pertanian/perikanan

2. Kelemahan

- Pasar belum tertata dengan baik

- Biaya produksi perikanan yang masih tinggi
- Kekurangan bibit ikan untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar yang lebih optimal
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang budidaya ikan air tawar
- Kesulitan untuk mengangkut hasil perikanan dan memasarkan ikan
- Belum adanya upaya kreatif, inovatif, dan berkesinambungan untuk memproduksi olahan makanan berbahan dasar ikan air tawar dan hasil pertanian
- Belum ada peralatan pengolahan hasil perikanan
- Belum terbukanya jaringan pemasaran produk perikanan
- Harga di tingkat pekebun masih rendah
- Banyak tanaman kelapa sawit dan karet yang sudah tidak produktif, karena kurangnya biaya untuk pemeliharaan
- Minimnya pendidikan/pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan kemampuan SDM pembudidaya ikan air tawar, petani dan pengolah hasil perikanan/pertanian
- Biaya produksi pertanian yang masih tinggi
- Terbatasnya ketersediaan modal pembudidaya ikan air tawar dan pengolah hasil perikanan air tawar
- Kurangnya biaya untuk membuka lahan baru
- Keterbatasan alat penunjang produksi
- Pengairan yang belum maksimal

6.1.2. Isu External

1. Peluang

- Mengembangkan industri olahan hasil produksi perikanan dan pertanian untuk meningkatkan nilai jual produk
- Mengembangkan kegiatan pertanian di kawasan perdesaan MinaAgropolitan Padang Jaya karena tingginya kemauan masyarakat untuk bertani namun kemampuan belum memadai.

2. Ancaman

- Oversupply dari produksi perikanan karena belum terdapat bentuk produk pemasaran
- Bibit ikan kualitas jelek di pasaran

6.2. VISI DAN MISI

6.2.1. Visi

Tujuan pembangunan kawasan didahului pembuatan visi dan misi kawasan. Proses pembuatan visi dan misi.

TERWUJUDNYA KAWASAN AGROMINAPOLITAN YANG HARMONIS, MANDIRI, DAN SEJAHTERA

Visi ini terbangun mengingat sejak lama kawasan ini berkembang dalam pengembangan tanaman pangan dan hortikultura dan perikanan. Para transmigran juga berhasil mengembangkan tanaman karet dan sawit mandiri. Visi harmonis dikembangkan mengingat keberagaman masyarakat, sehingga kata-harmonis mesti menjadi bagian dari kesadaran masyarakat untuk dapat hidup bersama. Mandiri juga merupakan bagian dari visi masyarakat untuk menjadikan kawasan saling terkait. Sejahtera merupakan muara dari seluruh upaya masyarakat yang merupakan kontinum kemakmuran.

6.2.2. Misi

- **Harmonis**
 - Memfasilitasi kelompok dan lembaga di kawasan
 - Meningkatkan kerjasama antar desa kawasan untuk memajukan ekonomi di kawasan
- **Mandiri**
 - Memberdayakan usaha-usaha milik masyarakat
 - Pengelolaan SDA
 - Menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar desa kawasan
 - Mengembangkan ekonomi kawasan melalui produk unggulan desa
- **Sejahtera**
 - Meningkatkan hasil produksi dan menunjang ekonomi masyarakat
 - Meningkatkan daya saing produk kawasan
 - Mengelola sumberdaya secara berkelanjutan
- **Nilai-nilai**
 - Harmonis: Kerjasama, Menghargai, Bersaing secara sehat, solidaritas, keterbukaan, akuntabel
 - Mandiri: mental yang optimis, Kemauan dan semangat yang tinggi, gigih, komitmen, bersungguh-sungguh, keteladanan, tanggung jawab
 - Sejahtera: berbagi, adil

6.2.3. Memperkenalkan Merk (*Branding*) Wilayah

Memperkenalkan kawasan Agrominapolitan ke luar kawasan membutuhkan strategi pengenalan merk. Strategi penegnalam merk, dimulai dari pertanyaan sederhana, “Apa yang bisa diingat orang lain terhadap tempat kita” dan “ Apa yang unik dari tempat kita”.

TEMA BRANDING “DESTINASI WISATA KULINER IKAN TANJUNG REJO SAKTI”

Hasil dari pengenalan merek kawasan maka ada segmentasi pasar yang ingin dikenalkan dengan kawasan, segementasi ini umumnya dilakukan berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, status pendidikan. Atau digunakan status sosial ekonomi.

Tabel 6.1. Segmentasi pasar dalam pengelolaan merk kawasan

Segmen pasar	Pesan Inti	Saluran (visual, audio, whatsapp) / Media (poster, internet, brosur, pameran	
Keluarga	Liburan mancing	video	Media sosial
Pelajar	Edukasi kuliner	lembaga pendidikan: Poter	Lomba mancing
Anak muda/remaja	Petualangan kuliner	video	Lomba kuliner ikan di alam terbuka
Wisatawan domestik	Mudah dan murah, Lezat dan nyaman	video	Media sosial
Wisatawan mancanegara	<i>Cullinary adventure</i>	video, leaflet	Media sosial, biro perjalanan wisata
kelompok Usaha	Unggul dalam mengolah ikan	video, leaflet	Media sosial, pameran
Akademisi	Air Segarkan Sehat	video	Kampus (Pameran, bazar, KKN)

Sumber: FGD Penajaman RPKP (2018)

6.3. TUJUAN DAN SASARAN

6.3.1. Tujuan

Berdasarkan hasil kesepakatan melalui forum FGD di tingkat kawasan antara masyarakat kawasan dengan pemangku kepentingan, maka dirumuskan tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan BUMDES dalam mengelola aset desa
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengolahan pasca panen
- Meningkatkan kemampuan desa dalam pengelolaan ekonomi antar desa/hulu-hilir
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam branding produk
- Mewujudkan produk perikanan (segara dan olahan) yang tersertifikasi
- Mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan terhadap potensi wisata
- Meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan kawasan perdesaan
- Mewujudkan wisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan dekat dengan kehidupan warga local
- Mengoptimalkan penggunaan internet di desa (Desa Broadband) untuk promosi wisata

6.3.2. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya BUMDES yang memiliki kapasitas dalam peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi Agropolitan
- Berkembangnya usaha baru yang mengelola hasil pasca panen, khususnya komoditas perikanan darat
- Terwujudnya kesinambungan kegiatan ekonomi Agropolitan dari hulu hingga hilir dalam pengembangan kawasan perdesaan
- Pengembangan ekonomi kreatif berbasis pertanian dan wisata
- Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam sertifikasi produk
- Terjaganya kelestarian dan kebersihan kawasan perdesaan
- Berkembangnya gerakan inisiatif masyarakat dalam menjaga lingkungan
- Meningkatnya pengelolaan wisata pusaka budaya oleh masyarakat/BUMDES
- Meningkatnya kunjungan wisatawan dari luar kabupaten, luar provinsi dan luar negeri di objek wisata kawasan perdesaan

6.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis isu-isu strategis di atas serta untuk mencapai mewujudkan Visi dan Misi di atas diperlukan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Berikut ini adalah strategi dan arah kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Bengkulu Utara:

1. Strategi memfasilitasi kelompok dan lembaga di kawasan (BUMDES), dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan performa kelompok dan lembaga di kawasan
 - b. Peningkatan SDM kelompok dan atau lembaga
2. Strategi meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas Unggulan Kawasan, dengan arah kebijakan:

- a. Intensifikasi komoditas unggulan
- b. Ekstensifikasi komoditas unggulan
- c. Pengembangan Perikanan Budidaya air tawar
- d. Peningkatan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan sumberdaya yang ada
3. Meningkatkan infrastruktur dasar dan usaha tani, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan kuliatas irigrasi pertanian
 - b. Peningkatan jalan usaha tani
 - c. Peningkatan kualitas alan desa
 - d. Peningkatan prasarana air bersih
 - e. Peningkatan daya listrik
 - f. Peningkatan akses telekomunikasi
 - g. Pengembangan energi baru dan terbarukan
4. Meningkatkan pemasaran produk-produk unggulan, dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan pasar produk unggulan
 - b. Deversifikasi produk-produk komoditas unggulan
 - c. Pengembangan kapasitas bisnis dan bisnisplan

6.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program prioritas dalam FGD Penajaman Dokumen RPKP di Bengkulu Utara adalah revitalisasi pasar kawasan sebagai prioritas pertama. Program lain adalah pembenihan rakyat, dan Penguatan perencanaan pengembangan kapasitas bisnis dan *bisnisplan*. Ada dua belas program yang direncanakan seperti terlihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 6.2. Program Prioritas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Nomenklatur untuk RPKP
		Desa dan Kecamatan	
1	Rencana UPR (unit Pembenihan Rakyat) (2)	Marga Sakti dan Tanjung Harapan, Tanbak rejo	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata
2	Bak Penampungan Ikan Pokdakan	Marga Sakti dan Tanjung Harapan, Tanbak rejo	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata
3	Perbaikan Saluran Irigasi Tersier	Marga Sakti dan Tanjung Harapan, Tanbak rejo	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata
4	Pembangunan bendung suplesi	Tanjung harapan	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata
5	Pembangunan peningkatan jalan produksi /pokdakan (4)	Marga Sakti dan Tanjung Harapan, Tanbak rejo	Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi
6	Penguatan perencanaan pengembangan kapasitas bisnis	Marga Sakti dan Tanjung Harapan, Tanbak rejo	Menerapkan TIK untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Nomenklatur untuk RPKP
		Desa dan Kecamatan	
	dan bisnisplan (3)		
7	Pembuatan pabrik pakan ikan skala kawasan	Tanjung harapan	Penerapan teknologi dan inovasi utk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
8	Pabrik sheet karet skala kawasan	Diserahkan kepada kabupaten	Penerapan teknologi dan inovasi utk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
9	UKM Pengolahan ikan setiap desa (5)	Marga Sakti dan Tanjung Harapan, Tanbak rejo	Penerapan teknologi dan inovasi utk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
10	Pasar kawasan (1)	Marga sakti	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata
11	Sertifikasi produk ikan dan olahan (6)	Marga Sakti dan Tanjung Harapan, Tanbak rejo	Peningkatan PTSP di daerah
12	Pengembangan energi baru dan terbarukan (biogas)	Marga Sakti dan Tanjung Harapan, Tanbak rejo	Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri

Sumber: FGD Penajaman RPKP (2018)

Keterangan : (..) urutan program prioritas berdasarkan hasil FGD skoring

Tabel 6.3 Program dan Kegiatan

No	Kebutuhan Intervensi	Program	Lokasi	Satuan	Volume	Volume Tahun					Estimasi Biaya (juta rupiah)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Outcomes	
						2018	2019	2020	2021	2022				Existing	Expecting
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi														
		Peningkatan jalan poros antara Desa Tanjung Harapan hingga Desa Padang Jaya	Desa Tanjung Harapan- Desa Padang Jaya	km	2		2				9.746	APBN	Kementerian PUPR	Kondisi jalan rusak, kerikil dan tanah	Meningkatnya arus distribusi barang dan jasa
		Peningkatan jalan poros antara Desa Tambak Rejo hingga Desa Sidoluhur	Desa Tambak Rejo-Desa Sidoluhur	km	3,5		3,5				17.055,5	APBN	Kementerian PUPR	Kondisi jalan rusak, kerikil dan tanah	Meningkatnya arus distribusi barang dan jasa
		Peningkatan jalan poros antara Desa Marga Sakti hingga Desa Tanah Hitam	Desa Marga Sakti-Desa Tanah Hitam	km	6		6				29.283	APBN	Kementerian PUPR	Kondisi jalan rusak, kerikil dan tanah	Meningkatnya arus distribusi barang dan jasa
		Peningkatan jalan poros antara Desa Marga Sakti hingga Desa Sidoluhur	Desa Marga Sakti-Desa Sidoluhur	km	2,7			2,7			13.157,1	APBN	Kementerian PUPR	Kondisi jalan rusak, kerikil dan tanah	Meningkatnya arus distribusi barang dan jasa
		Peningkatan jalan poros antara Desa Padang Jaya hingga Desa Arga Mulya	Desa Padang Jaya-Desa Arga Mulya	km	3			3			14.619	APBN	Kementerian PUPR	Kondisi jalan rusak, kerikil dan tanah	Meningkatnya arus distribusi barang dan jasa
		Peningkatan jalan poros antara Desa Sidoluhur hingga Desa Tanah Hitam	Desa Sidoluhur Desa Tanah Hitam	km	3			3			14.619	APBN	Kementerian PUPR	Kondisi jalan rusak, kerikil dan tanah	Meningkatnya arus distribusi barang dan jasa
		Peningkatan jalan produksi/pokdakan	Tambak Rejo	km	1		1				2,863	APBN	Kementerian PUPR	Masih jalan tanah, kerikil dan sempit	Terjadi kelancaran dalam mengangkut hasil panen
		Peningkatan jalan produksi/pokdakan	Marga Sakti	km	1			1			2,863	APBN	Kementerian PUPR	Masih jalan tanah, kerikil dan sempit	Terjadi kelancaran dalam mengangkut hasil panen
		Peningkatan jalan produksi/pokdakan	Tanjung Harapan	km	1				1		2,863	APBN	Kementerian PUPR	Masih jalan tanah, kerikil dan sempit	Terjadi kelancaran dalam mengangkut hasil panen
		Pengadaan trayek angkutan antar desa (kawasan)	Tambak Rejo, Marga Sakti, Tanjung Harapan	Trayek	1		1				10.000	APBN	Dinas Perhubungan Kabupaten	Belum Tersedia modal antar Desa	Meningkatnya aktifitas dan kelancaran ekonomi masyarakat
2	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata														
		Pembangunan dan peningkatan kolam pembenihan/UPR (Unit Pembenihan Rakyat)	Tambak Rejo	ha	1		1				1.000	APBN	Dirjen KKP	Masih Terbatasnya kolam pembenihan	Terpenuhinya kebutuhan ikan yang disuplai dari dalam kawasan
		Pembangunan dan peningkatan kolam pembenihan/UPR (Unit Pembenihan Rakyat)	Marga Sakti	ha	1				1		1.000	APBN	Dirjen KKP	Masih Terbatasnya kolam pembenihan	Terpenuhinya kebutuhan ikan yang disuplai dari dalam kawasan
		Pembangunan dan peningkatan kolam pembenihan/UPR (Unit Pembenihan Rakyat)	Tanjung Harapan	ha	1						1.000	APBN	Dirjen KKP	Masih Terbatasnya kolam pembenihan	Terpenuhinya kebutuhan ikan yang disuplai dari dalam kawasan
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Tambak Rejo	ha	1		1				300	APBN	Dirjen Sumberdaya Air	Jaringan Irigasi Sekunder rusak./Putus	Meningkatnya luas areal yang terlayani air irigasi
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Marga Sakti	ha	1			1			300	APBN	Dirjen Sumberdaya Air	Jaringan Irigasi Sekunder rusak./Putus	Meningkatnya luas areal yang terlayani air irigasi
		Rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Tanjung Harapan	Km	1				1		300	APBN	Dirjen Sumberdaya Air	Jaringan Irigasi Sekunder rusak./Putus	Meningkatnya luas areal yang terlayani air irigasi

No	Kebutuhan Intervensi	Program	Lokasi	Satuan	Volume	Volume Tahun					Estimasi Biaya (juta rupiah)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Outcomes	
						2018	2019	2020	2021	2022				Existing	Expecting
		Pembangunan bendung suplesi	Tanjung Harapan	Unit	1				1		10.000	APBN	Dirjen Sumberdaya Air	Belum terbangun bendung suplesi	Meningkatnya luas areal lahan yang terlayani air irigasi
		Pembangunan embung Desa	Tanjung Harapan	Unit	1						1.000	APBN	Kemendes PDT	Belum terbangunnya embung desa	Terbutuhnya kebutuhan air petani
		Sertifikasi produk ikan dan olahan	Tambak Rejo	Item	1		1				50	APBN	Dinas perikanan Kabupaten	Produk-produk yang dihasilkan kawasan belum tersertifikasi	Meningkatnya nilai tambah produk sehingga margin keuntungan petani meningkat
		Sertifikasi produk ikan dan olahan	Marga Sakti	Item	3			1			50	APBN	Dinas perikanan Kabupaten	Produk-produk yang dihasilkan kawasan belum tersertifikasi	Meningkatnya nilai tambah produk sehingga margin keuntungan petani meningkat
		Sertifikasi produk ikan dan olahan	Tanjung Harapan	Item	3				1		50	APBN	Dinas perikanan Kabupaten	Produk-produk yang dihasilkan kawasan belum tersertifikasi	Meningkatnya nilai tambah produk sehingga margin keuntungan petani meningkat
3	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Bisnis /Pusat Bisnis di Kawasan Ekonomi Perdesaan														
		Penataan dan peningkatan sarana fisik pasar kawasan (terminal agribisnis/pusat kawasan)	Marga Sakti	Unit	1		1				5.000	APBN	Kementerian Perdagangan	Pasar kawasan belum tertata rapi	Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kemudahan pemasaran produk hasil panen
		Bantuan modal usaha untuk Bumdes dan BUMDesma	Tambak Rejo	Rp	1						100	APBN	Kemendes PDT	Usaha bumdes belum meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatnya perekonomian masyarakat
		Bantuan modal usaha untuk Bumdes dan BUMDesma	Marga Sakti	Rp	1						100	APBN	Kemendes PDT	Usaha bumdes belum meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatnya perekonomian masyarakat
		Bantuan modal usaha untuk Bumdes dan BUMDesma	Tanjung Harapan	Rp	1						100	APBN	Kemendes PDT	Usaha bumdes belum meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatnya perekonomian masyarakat
		Bantuan UBK (Usaha Berbasis Kelompok) berupa alat pengolahan hasil produksi ikan	Tambak Rejo	Unit	1	1					150	APBN	Kemendes PDT	Usaha kelompok belum berkembang	Meningkatnya usaha kelompok
		Bantuan UBK (Usaha Berbasis Kelompok) berupa alat pengolahan hasil produksi ikan	Marga Sakti	Unit	1		1				150	APBN	Kemendes PDT	Usaha kelompok belum berkembang	Meningkatnya usaha kelompok
		Bantuan UBK (Usaha Berbasis Kelompok) berupa alat pengolahan hasil produksi ikan	Tanjung Harapan	Unit	1			1			150	APBN	Kemendes PDT	Usaha kelompok belum berkembang	Meningkatnya usaha kelompok
		Bantuan ekonomi produktif (modal) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM)	Tanjung Harapan	Rp	1	1					150	APBN	Kemendes PDT	Usaha Kelompok RTM belum tercipta	Meningkatnya kesejahteraan RTM

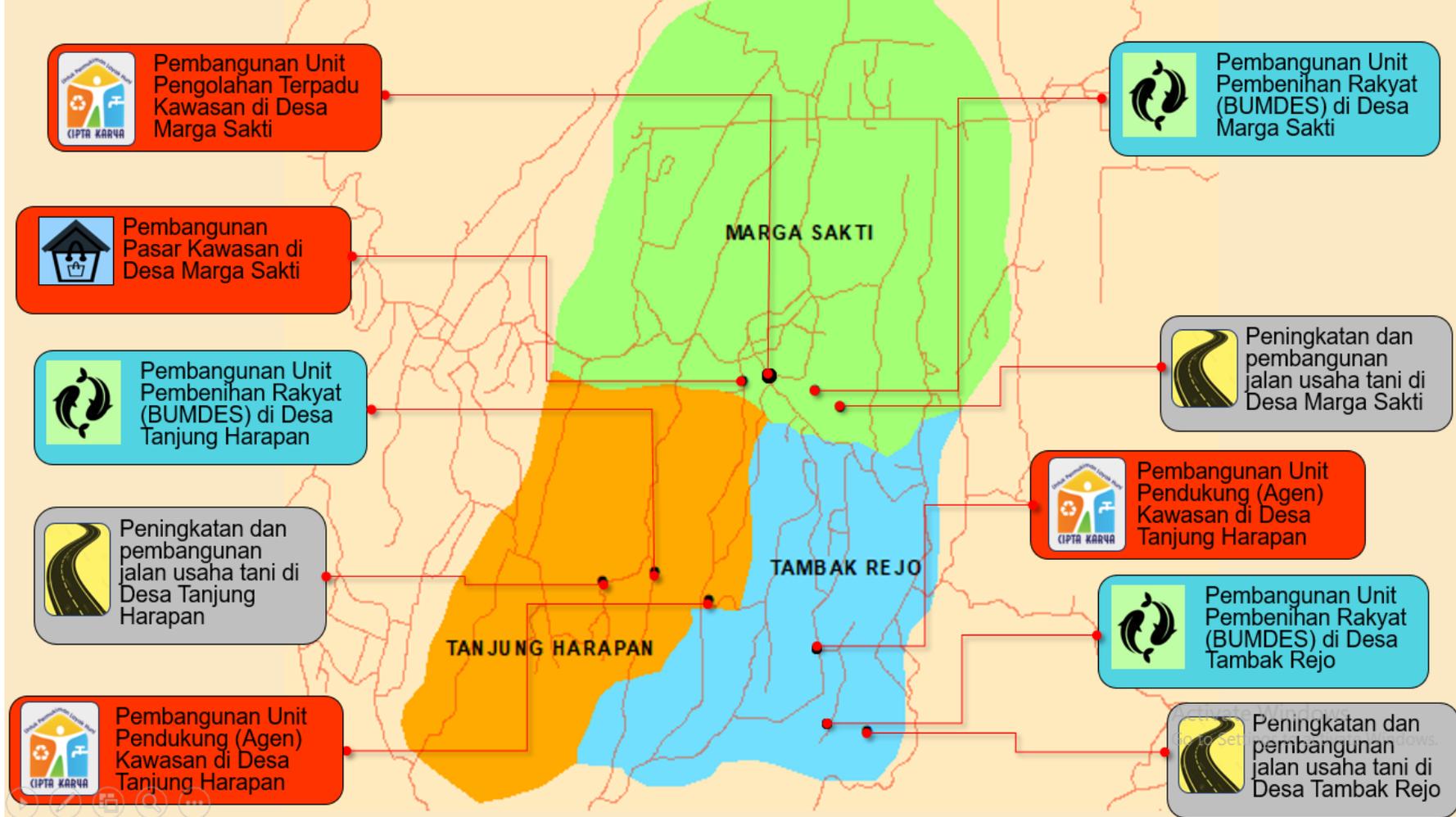
No	Kebutuhan Intervensi	Program	Lokasi	Satuan	Volume	Volume Tahun					Estimasi Biaya (juta rupiah)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Outcomes	
						2018	2019	2020	2021	2022				Existing	Expecting
4	Penerapan Teknologi dan Inovasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing														
		Demplot penreapan sistem irigasi mina padi	Tambak Rejo	Ha	1						50	APBD II	Dinas Pertanian	Belum dpat penerapan sistem mina padi	Lahan pertanian beririgasi teroptimalkan fungsinya
		Pelatihan Sistem integradi mina padi	Tambak Rejo	Kelompok	1						10	APBD II	Dinas Pertanian	Belum terdapat penerapan sistem mina padi	Meningkatnya pemahaman petani untuk mengoptimalkan fungsi lahannya
		Pembanguna gedung pabrik mini pakan ikan	Tanjung Harapan	Unit	1				1		5.000	APBN	Kementertian PUPR	Belum ytersedian pabrik kpakan ikan di kawasan	Tersedia dan terlayani kebutuhan pakan ikan dengan harga lebih murah
		Pengadaan mesin pelet ikan	Tanjung Harapan	Unit	1				1		500	APBN	Dirjen KPP	Belum tersedia mesin pembuat pelet ikan	Pabrik pakan mini dapat beroperasi
		Pembangunan bangunan pabrik mini sheet karet	Tanjung Harapan	Unit	1			1			5.000	APBN	Kementertian PUPR	Belum tersedia pabrik sheet karet di kawasan	Meningkatnya kualitas dan harga jual panen karet rakyat
		Pengadaan mesin pengolah karet	Tanjung Harapan	Unit	1			1			250	APBN	Kementertian Perindustrian	Belum tersedia mesin pengolah karet	Pabrik sheet karet dapat beroperasi
		Pembangunan gedung unit pengolahan terpadu	Marga Sakti	Unit	1		1				500	APBN	Kementertian PUPR	Belum tersedia unit pengolahan produk terpadu	Meningkatnya aktivitas bisnis dan perekonomian masyarakat
		Pengadaan sarana/piranti pengolahan ikan	Marga Sakti	Unit	1		1				100	APBN	Dirjen KPP	Belum tersedia piranti pengolah ikan	Industri kelompok yang dikelola BUMDES dapat berjalan
		Pembangunan sarana gedung unit pendukung kawasan (sub terminal agribisnis)	Tanjung Harapan	Unit	1			1			250	APBN	Kementertian PUPR	Belum tersedia gedung unit pengukung kawasan	Meningkatnya dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pendukung
		Pembangunan sarana gedung unit pendukung kawasan (sub terminal agribisnis)	Tambak Rejo	Unit	1		1	1			250	APBN	Kementertian PUPR	Belum tersedia gedung unit pengukung kawasan	Meningkatnya dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pendukung
		Pelatihan BUMDesma/BUMDESMA	Tambak Rejo	Kelompok	1	1					100	APBN	Kemendes PDT	Belum ada penerapan sistem BUMDES	Berjalannya sistem BUMDES yang meningkatkan kesejahteraan rakyat
		Pelatihan BUMDesma/BUMDESMA	Marga Sakti	Kelompok	1	1					100	APBN	Kemendes PDT	Belum ada penerapan sistem BUMDES	Berjalannya sistem BUMDES yang meningkatkan kesejahteraan rakyat
		Pelatihan BUMDesma/BUMDESMA	Tanjung Harapan	Kelompok	1	1					100	APBN	Kemendes PDT	Belum ada penerapan sistem BUMDES	Berjalannya sistem BUMDES yang meningkatkan kesejahteraan rakyat
		Pelatihan kewirausahaan	Tambak Rejo	Kelompok	1	1					100	APBN	Kemendes PDT	Belum berkembangnya sistem kewirausahaan di kawaasan	Meningkatnya jiwa wirausaha di lingkungan masyarakat tani

No	Kebutuhan Intervensi	Program	Lokasi	Satuan	Volume	Volume Tahun					Estimasi Biaya (juta rupiah)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Outcomes	
						2018	2019	2020	2021	2022				Existing	Expecting
		Pelatihan kewirausahaan	Marga Sakti	Kelompok	1	1					100	APBN	Kemendes PDT	Belum berkembangnya sistem kewirausahaan di kawaasan	Meningkatnya jiwa wirausaha di lingkungan masyarakat tani
		Pelatihan kewirausahaan	Tanjung Harapan	Kelompok	1	1					100	APBN	Kemendes PDT	Belum berkembangnya sistem kewirausahaan di kawaasan	Meningkatnya jiwa wirausaha di lingkungan masyarakat tani
		Pelatihan teknologi pasca panen dan pengemasan	Tambak Rejo	Kelompok	1		1				100	APBN	Kemendes PDT	Belum berkembangnya teknologi pasca panen dan pengemasan produk	Meningkatkan nilai tambah petani dengan produk olahan yang dihasilkan
		Pelatihan teknologi pasca panen dan pengemasan	Marga Sakti	Kelompok	1		1				100	APBN	Kemendes PDT	Belum berkembangnya teknologi pasca panen dan pengemasan produk	Meningkatkan nilai tambah petani dengan produk olahan yang dihasilkan
		Pelatihan teknologi pasca panen dan pengemasan	Tanjung Harapan	Kelompok	1		1				100	APBN	Kemendes PDT	Belum berkembangnya teknologi pasca panen dan pengemasan produk	Meningkatkan nilai tambah petani dengan produk olahan yang dihasilkan
5	Pembangunan Suplai Energi untuk Pemenuhan Domestik dan Industri														
		Pembangunan kandangn dan sarana instalansi biogas	Tambak Rejo	Unit	1			1			250	APBN	Kementertian PUPR	Belum terbangun sarana instalansi biogas	Termanfaatkan limbah ternak dan meningkatnya energi listrik petani
		Pembangunan kandangn dan sarana instalansi biogas	Marga Sakti	Unit	1				1		250	APBN	Kementertian PUPR	Belum terbangun sarana instalansi biogas	Termanfaatkan limbah ternak dan meningkatnya energi listrik petani
		Pembangunan kandangn dan sarana instalansi biogas	Tanjung Harapan	Unit	1					1	250	APBN	Kementertian PUPR	Belum terbangun sarana instalansi biogas	Termanfaatkan limbah ternak dan meningkatnya energi listrik petani
		Pengadaan sarana/mesin instalansi konversi biogas menjadi energi listrik	Tambak Rejo	Unit	1			1			100	APBN	Kementan danKemen ESDM	Kekurangan pasokan daya	Tercukupinya pasikan daya listrik
		Pengadaan sarana/mesin instalansi konversi biogas menjadi energi listrik	Marga Sakti	Unit	1				1		100	APBN	Kementan danKemen ESDM	Kekurangan pasokan daya	Tercukupinya pasikan daya listrik
		Pengadaan sarana/mesin instalansi konversi biogas menjadi energi listrik	Tanjung Harapan	Unit	1					1	100	APBN	Kementan danKemen ESDM	Kekurangan pasokan daya	Tercukupinya pasikan daya listrik
		Pembangunan gardu penambah daya untuk industri dan rumah tangga	Tambak Rejo	KVA	250		100	100	50		700	APBN	BUMN	Pasokan listrik di kawasan masih minim	Tercukupinya kebutuhan daya listrik masyarakat dan aktivitas ekonomi
		Pembangunan gardu penambah daya untuk industri dan rumah tangga	Marga Sakti	KVA	250		100	100	50		700	APBN	BUMN	Pasokan listrik di kawasan masih minim	Tercukupinya kebutuhan daya listrik masyarakat dan aktivitas ekonomi
		Pembangunan gardu penambah daya untuk industri dan rumah tangga	Tanjung Harapan	KVA	250		100	100	50		700	APBN	BUMN	Pasokan listrik di kawasan masih minim	Tercukupinya kebutuhan daya listrik masyarakat dan aktivitas ekonomi
6	Pengembangan Pendidikan Kejuruan untuk Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas Lokal														
		Pembangunan gedung SMK Pertanian	Tanjung Harapan	Unit	1			1			2.000	APBN	Kemendiknas dan kebudayaan	Belum terdapat SMK Pertanian	Meningkatkan kapasitas SDM kawasan yang

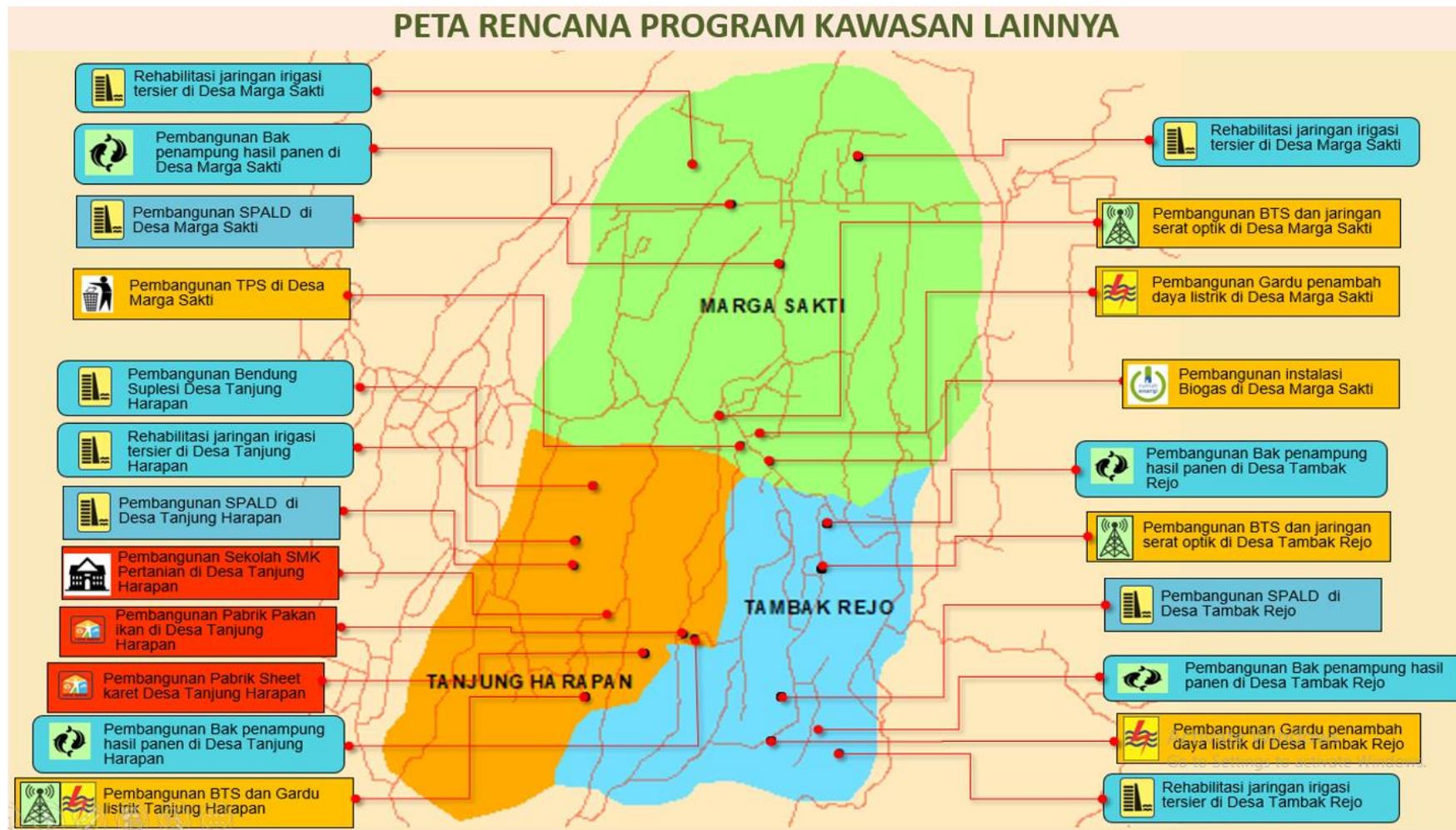
No	Kebutuhan Intervensi	Program	Lokasi	Satuan	Volume	Volume Tahun					Estimasi Biaya (juta rupiah)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Outcomes	
						2018	2019	2020	2021	2022				Existing	Expecting
															bergerak dibidang agribisnis
7	Pengembangan Kerjasama antar Desa, Daerah, KPS, BUM antar Desa														
		Pembentukan kerjasama BUMDESMA antar desa disetiap kecamatan	Kec. Padang Jaya, Batik Nau, Arga Makmur, Giri Mulya, Air Paddang	Unit	4		2	2			400	APBN	Kemendes PDT	Belum berjalannya skema kerjasama antar desa dalam BUMDESMA	Meningkatkan kerjasama antar desa yang menggerakkan ekonomi kawasan
8	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Daerah														
		Peningkatan kelembagaan unit usaha koperasi	Marga Sakti	Lembaga	1		1				50	APBD II	Dinas Koperasi	Baru terdapat lembaga koperasi petani sawit	Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi melalui usaha koperasi
		Peningkatan kelembagaan koperasi simpan pinjam	Marga Sakti	Lembaga	1		1				50	APBD II	Dinas Koperasi	Baru terdapat lembaga petani sawit	Terbantunya anggota koperasi dalam pemodalan usaha
9	Menerapkan TIK memfasilitasi Perdagangan dan Pertukaran Informasi														
		Penguatan perencanaan pengembangan kapasitas bisnis dan bisnisplan	Tambak Rejo	Kelompok	1	1					100	APBD II	Dinas Perindustrian	Belum terencana dan berkembangnya bisnis di kawasan	Berkembangnya usaha dan bisnis petani kawasan dengan profit yang menguntungkan
		Penguatan perencanaan pengembangan kapasitas bisnis dan bisnisplan	Marga Sakti	Kelompok	1	1					100	APBD II	Dinas Perindustrian	Belum terencana dan berkembangnya bisnis di kawasan	Berkembangnya usaha dan bisnis petani kawasan dengan profit yang menguntungkan
		Penguatan perencanaan pengembangan kapasitas bisnis dan bisnisplan	Tanjung Harapan	Kelompok	1	1					100	APBD II	Dinas Perindustrian	Belum terencana dan berkembangnya bisnis di kawasan	Berkembangnya usaha dan bisnis petani kawasan dengan profit yang menguntungkan
		Pembangunan BTS dan jaringan serat optik	Tambak Rejo	Unit	1		1				1.000	BUMN/Swasta	Swasta/Kominfo	Jaringan telekomunikasi masih terbatas	Meningkatnya akses jaringan telpon hingga ke pelosok
		Pembangunan BTS dan jaringan serat optik	Marga Sakti	Unit	1			1			1.000	BUMN/Swasta	Swasta/Kominfo	Jaringan telekomunikasi masih terbatas	Meningkatnya akses jaringan telpon hingga ke pelosok
		Pembangunan BTS dan jaringan serat optik	Tanjung Harpan	Unit	1				1		1.000	BUMN/Swasta	Swasta/Kominfo	Jaringan telekomunikasi masih terbatas	Meningkatnya akses jaringan telpon hingga ke pelosok
		Peningkatan jalan melalui kabel serat optik	Tambak Rejo	Km	1		1				1.000	BUMN/Swasta	Swasta/Kominfo	Jaringan Internet masih terbatas	Meningkatnya akses jaringan Internet hingga ke pelosok
		Peningkatan jalan melalui kabel serat optik	Marga Sakti	km	1			1			1.000	BUMN/Swasta	Swasta/Kominfo	Jaringan internet masih terbatas	Meningkatnya akses jaringan Internet hingga ke pelosok
		Peningkatan jalan melalui kabel serat optik	Tanjung Harapan	km	1				1		1.000	BUMN/Swasta	Swasta/Kominfo	Jaringan internet masih terbatas	Meningkatnya akses jaringan Internet hingga ke pelosok

No	Kebutuhan Intervensi	Program	Lokasi	Satuan	Volume	Volume Tahun					Estimasi Biaya (juta rupiah)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Outcomes	
						2018	2019	2020	2021	2022				Existing	Expecting
10	Pengembangan Pemukiman dan Kesehatan														
		Pembangunan SPALD setempat (untuk setiap 10 kolam)	Tambak Rejo	Unit	5		2	1	1	1	500	APBN	Dirjen Sumberdaya Air	Belum ada SPLAD dalam budidaya perikanan	Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan yang aman bagi makhluk hidup
		Pembangunan SPALD setempat (untuk setiap 10 kolam)	Marga Sakti	Unit	5		2	1	1	1	500	APBN	Dirjen Sumberdaya Air	Belum ada SPLAD dalam budidaya perikanan	Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan yang aman bagi makhluk hidup
		Pembangunan SPALD setempat (untuk setiap 10 kolam)	Tanjung Harapan	Unit	5		2	1	1	1	500	APBN	Dirjen Sumberdaya Air	Belum ada SPLAD dalam budidaya perikanan	Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan yang aman bagi makhluk hidup
		Pembangunan TPS	Tambak Rejo	Unit	1		1				100	APBN	Kementerian PUPR	Belum ada TPS di tiap Desa	Tertampungnya sampah yang menimbulkan penvemaran bagi lingkungan
		Pembangunan TPS	Marga Sakti	Unit	1		1				100	APBN	Kementerian PUPR	Belum ada TPS di tiap Desa	Tertampungnya sampah yang menimbulkan penvemaran bagi lingkungan
		Pembangunan TPS	Tanjung Harapan	Unit	1		1				100	APBN	Kementerian PUPR	Belum ada TPS di tiap Desa	Tertampungnya sampah yang menimbulkan penvemaran bagi lingkungan
		Pelatihan pengembangan sampah 3R	Tambak Rejo	Kelompok	1	1					100	APBN	KLHK	Penerapan sistem pengolahan sampah 3R belum berjalan	Terciptanya lingkungan yang higienis dan terbebas dari pencemaran lingkungan
		Pelatihan pengembangan sampah 3R	Marga Sakti	5	1	1					100	APBN	KLHK	Penerapan sistem pengolahan sampah 3R belum berjalan	Terciptanya lingkungan yang higienis dan terbebas dari pencemaran lingkungan
		Pelatihan pengembangan sampah 3R	Tanjung Harapan	K5elompok	1	1					100	APBN	KLHK	Penerapan sistem pengolahan sampah 3R belum berjalan	Terciptanya lingkungan yang higienis dan terbebas dari pencemaran lingkungan
		Penyediaan truk angkut sampah	Tambak Rejo	Unit	1	1					1.500	APBD I	Dinas Perhubungan	Belum tersedia truk angkut sampah	Terangcutnya sampah di lingkungan desa
		Penyediaan truk angkut sampah	Marga Sakti	Unit	1	1					1.500	APBD I	Dinas Perhubungan	Belum tersedia truk angkut sampah	Terangcutnya sampah di lingkungan desa
		Penyediaan truk angkut sampah	Tanjung Harapan	Unit	1	1					1.500	APBD I	Dinas Perhubungan	Belum tersedia truk angkut sampah	Terangcutnya sampah di lingkungan desa

PETA RENCANA PROGRAM PRIORITAS KAWASAN



Gambar 6.1. Peta rencana program prioritas RPKP Padang Jaya Bengkulu Utara



Gambar 6.2. Peta rencana program lainnya RPKP Padang Jaya Bengkulu Utara

6.6. RENCANA PUSAT-PUSAT KEGIATAN

Pada bab ini akan dijelaskan kondisi secara umum external kawasan sebagai potensi pusat kawasan di Bengkulu Utara. Lebih lanjut, beberapa strategi akan dijelaskan sebagai bagian dari gagasan atau ide terhadap pengembangan sentra kawasan salahsatunya pasar.

Perjalanan menuju lokasi pengembangan dapat dicapai melalui perjalanan udara dan darat. Perjalanan udara ditempuh dari Jakarta ke Ibu Kota Bengkulu. Perjalanan kemudian dilanjutkan melalui akses darat. Sarana transportasi ke lokasi terbatas, namun tetap terdapat terminal. Kondisi jalan sudah baik dengan material aspal. Drainase sudah tersedia di beberapa lokasi khususnya di pusat kawasan dengan adanya drainase/selokan.



Gambar 6.3. Kondisi Jalan di Bengkulu Utara

Secara umum tutupan lahan yang dominan adalah kebun, pemukiman, hutan. Fasilitas yang tersedia adalah kantor kecamatan, prasaranan seperti jaringan air bersih berupa sumur dan PAM juga telah tersedia. Jaringan listrik dan telekomunikasi juga telah ada dan baik. Tanaman yang umum dijumpai adalah tanaman perkebunan berupa karet dan sawit. Secara iklim kondisi relatif nyaman dan sejuk karena dekat dengan pegunungan. Terdapat beberapa objek wisata salah satunya curug sembilan.



Gambar 6.4. Perkebunan karet (kiri) dan sawit (kanan)

Secara sosial mata pencaharian penduduk umumnya bertani, berkebun, dan wirausaha, beberapa adalah transmigran yang didominasi dari daerah Jawa. Simbol utama yang sering ditemui adalah bunga raffles sebagai tanaman khas Provinsi Bengkulu. Adapun batik khas yang ada di Bengkulu juga memiliki corak Bunga Rafflesia dan pola floral daun dan batangnya. Terdapat beberapa produk perikanan darat seperti ikan nila, lele, dan patin. Beberapa produk pendukung seperti jagung dan peternakan sapi juga ada namun tidak dominan.



Gambar 6.5. Logo bunga Bangkai pada gapura dan Pola Batik

6.7. PRA DESAIN PROGRAM PRIORITAS

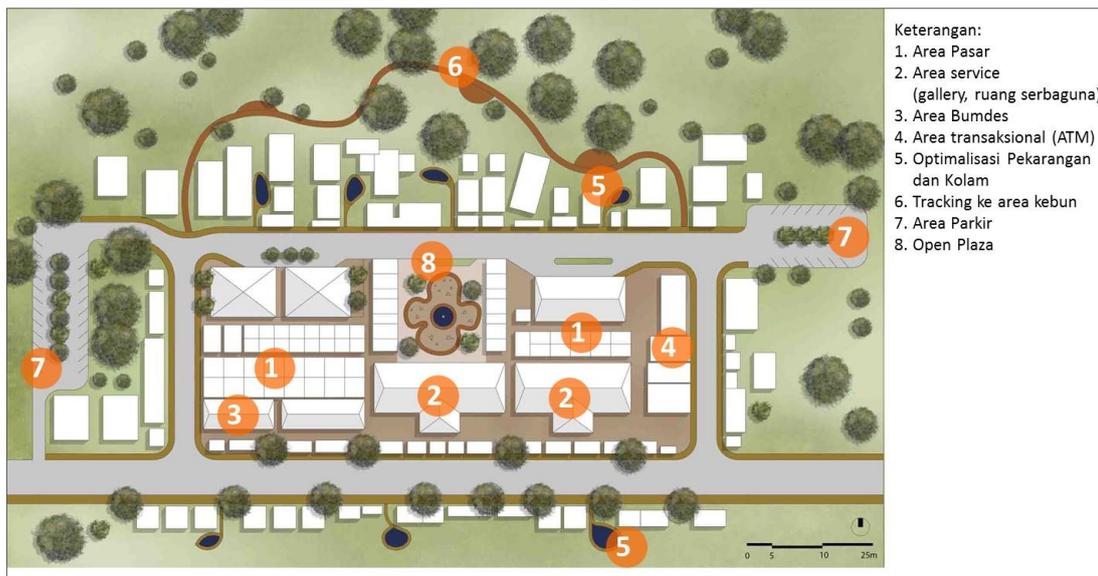
Kawasan prioritas yang akan dikembangkan adalah area pasar dengan total area sekitar 1,5 ha dengan kondisi bangunan sebagian permanen dan beberapa berupa bangunan sederhana. Akses jalan dapat dilalui oleh dua mobil, sekitar 8-10 m pada jalan utama dan 6-7 m pada jalan masuk pasar. Kondisi di sekitar pasar adalah pemukiman dan pada area belakang terdapat kebun dan vegetasi alami.



Gambar 6.6. Kondisi Pasar

Desain yang diterapkan pada kawasan pasar adalah geometrik dengan memperjelas struktur baru. Pada area tengah pasar dibuat courtyard agar masyarakat atau pengunjung yang dapat memanfaatkan taman. Pola desain dari courtyard atau plaza tersebut menerapkan pola desain *Bunga Rafflesia* sebagai ciri khas Bengkulu. Prinsip *pedestrian ways* juga diterapkan pada pasar dengan membuka akses trotoar di sisi kanan dan kiri jalan utama dan membuka jalur tegak lurus dan jelas yang membagi ruang-ruang pasar dari arah selatan pintu masuk hingga utara kawasan pasar. Bangunan pasar beberapa dikembangkan menjadi dua hingga tiga lantai dengan area lantai satu adalah *loading dock* untuk kegiatan logistik pasar. Beberapa kantong parkir dibuat pada area-area kosong di sisi timur dan barat pasar. Meskipun area parkir berada pada area pemukiman diharapkan pemerintah dapat ikut serta dalam pengembangan daya dukung pasar tersebut. Lebih lanjut untuk meningkatkan daya tarik pasar dan kemitraan, atraksi wisata pada area kebun juga diciptakan agar masyarakat bisa memanfaatkan kebun serta halaman pekarangan dengan budidaya perkebunan, buah, dan kolam ikan.

Fungsi-fungsi yang akan direncanakan khususnya di kawasan pasar diantaranya pada welcome area terdapat area service meliputi gallery ataupun ruang serbaguna, area bumdes, beberapa kios di depan pasar, hal ini dilakukan untuk membentuk *street wall* sehingga mengajak pengunjung untuk tertarik berjalan. Sisi timur juga disediakan fasilitas seperti ATM center. Pada area di luar pasar disediakan area parkir agar tidak mengganggu mobilitas dari kendaraan yang berkunjung ke pasar. Area plaza untuk berkumpul juga disediakan pada sisi utara kawasan. Kendaraan logistik akan masuk ke belakang kawasan kemudian dapan menurunkan barang di gedung khusus yang memiliki ruang *drop off*.



Gambar 6.7. Desain Pasar



Gambar 8. Area service (kiri atas), area pasar (kanan atas), area parkir (kiri bawah), dan area plaza (kanan bawah)

BAB VII

NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Bengkulu Utara



Berdasarkan kajian dokumen RPKP Kabupaten Bengkulu Utara, kawasan pembangunan perdesaan yang terdapat di Desa Marga Sakti, Tambak Rejo dan Tanjung Harapan, Kecamatan Padang jaya termasuk ke dalam kawasan AgroMinapolitan. Pengembangan kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya ini merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (perdesaan). Kawasan AgroMinapolitan Padang jaya disini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat kawasan (pengolahan dan pemasaran) serta sentra produksi pertanian dan perikanan pada desa-desa di sekitarnya sehingga membentuk Kawasan AgroMinapolitan.

Disamping itu, Kawasan AgroMinapolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian dan kawasan budidaya perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Berkembangnya suatu kawasan dapat dievaluasi berdasarkan nilai dan aktivitas produksi barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian nilai strategis pengembangan kawasan perdesaan dapat dilihat dari adanya peningkatan aktivitas dan nilai produksinya serta pengurangan angka kemiskinan.

7.1. PRODUK BARANG DAN JASA KAWASAN

Struktur ekonomi wilayah kawasan dapat ditunjukkan oleh kontribusi sektoral serta keterkaitan sektoral perekonomian wilayah. Kontribusinya dapat berupa wujud barang dan jasa. Nilai produk-produk barang yang dihasilkan merupakan perkalian jumlah kuantitas barang dengan harga per-unit produksi. Sedangkan produk-produk jasa dihitung berdasarkan nilai penerimaan dari jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.

Kontibusi wilayah kawasan perdesaan yang terdapat di Desa Marga Sakti, Tambak Rejo dan Tanjung Harapan, Kecamatan Padang jaya terdiri dari produk-produk pertanian dan perikanan. Produksi barang kawasan meliputi tanaman pangan, tanaman palawija, tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan. Untuk menilai seberapa strategis tingkat pengembangan kawasan perdesaan tersebut, maka dilakukan valuasi terhadap nilai produk barang dan jasa tersebut pada tahun *eksisting* (2018) dan proyeksi 5 tahun ke depan yaitu tahun 2022. Skenario penilaian didasarkan pada harga produk yang berlaku saat ini termasuk untuk periode 5 tahun ke depan, namun diasumsikan terjadi kenaikan terhadap nilai produk barang dan jasanya dengan adanya intensifikasi lahan dan pengolahan produk dengan laju inflasi tetap.

Nilai kontribusi produk tanaman pangan dan palawija berasal dari komoditas unggulan tanaman yang banyak diusahakan petani serta memiliki produktivitas yang cukup tinggi. Beberapa produk tanaman pangan-palawija yang dimaksud diantaranya, padi, ubi kayu dan jagung.

Hasil valuasi terhadap nilai produksi tanaman pangan-palawija menunjukkan bahwa komoditas yang memiliki nilai kontribusi ekonomi tertinggi di dalam kawasan AgroMinapolitan adalah padi, dilanjutkan ubi kayu dan jagung. Demikian pula untuk proyeksi 5 tahun ke depan dengan adanya intensifikasi lahan dan pola integrasi mina padi, nilai kontribusi komoditas padi tetap yang tertinggi, secara persentase kenaikan terbesar juga untuk

komoditas padi. Hasil analisis nilai produksi tanaman pangan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Nilai produksi tanaman pangan-palawija di kawasan AgroMinapolitan

No	Produksi	Satuan	Nilai		% Perubahan	% Perubahan/thn
			2018	2022		
Tanaman pangan-palawija						
a	Padi					
	• Luas sawah	ha	673	773	12,94	2,59
	• Produksi	ton	1.844	2.294	19,62	3,92
	• Nilai produksi	Rp	7.744.800.000	9.634.800.000	19,62	3,92
b	Ubi kayu					
	• Luas lahan	ha	240	240	0	0
	• Produksi	ton	4.326	4543	4,78	0,96
	• Nilai produksi	Rp	6.489.000.000	6.814.500.000	4,78	0,96
c	Jagung					
	• Luas lahan	ha	114	114	0	0
	• Produksi	ton	1.208	1.269	4,81	0,96
	• Nilai produksi	Rp	3.020.000.000	3.172.500.000	4,81	0,96
Valuasi tanaman pangan-palawija		Rp	17.253.800.000	19.621.800.000	12,07	2,41

Sumber : Hasil Analisis

Nilai kontribusi produk tanaman perkebunan berasal dari komoditas unggulan kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya yaitu kelapa sawit dan karet. Hasil valuasi terhadap nilai produksi tanaman perkebunan menunjukkan bahwa komoditas yang memiliki nilai kontribusi ekonomi tertinggi di kawasan AgroMinapolitan adalah komoditas kelapa sawit. Demikian pula untuk proyeksi 5 tahun ke depan dengan adanya intensifikasi lahan, komoditas kelapa sawit tetap memberikan kontribusi yang tertinggi, namun secara persentase kenaikannya masih lebih tinggi komoditas kelapa sawit. Hasil analisis nilai produksi tanaman perkebunan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2. Nilai produksi tanaman perkebunan di kawasan AgroMinapolitan

No	Produksi	Satuan	Nilai		% Perubahan	% Perubahan/thn
			2018	2022		
Perkebunan						
a	Kelapa sawit					
	• Luas han	ha	1.395	1.395	-	-
	• Produksi	ton	4.701	5.171	9,09	1,82
	• Nilai produksi	Rp	3.995.850.000	4.395.350.000	9,09	1,82
b	Karet					
	• Luas lahan	ha	1.026	1.026	0	0
	• Produksi	ton	771	848	9,08	1,82
	• Nilai produksi	Rp	1.156.500.000	1.272.000.000	9,08	1,82
Valuasi tanaman perkebunan		Rp	5.152.350.000	5.667.350.000	9,08	1,82

Sumber : Hasil Analisis

Nilai kontribusi produk tanaman hortikultura dan buah berasal dari komoditas unggulan yang banyak diusahakan petani serta memiliki produktivitas yang cukup tinggi.

Beberapa produk tanaman yang dimaksud diantaranya cabe merah, salak, durian, mangga dan pepaya.

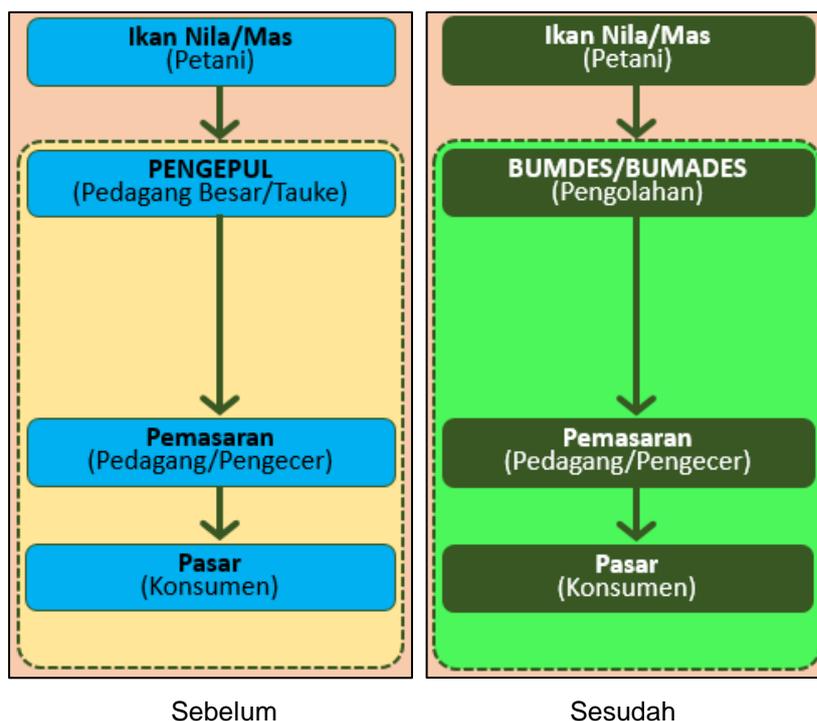
Hasil valuasi terhadap nilai produksi tanaman hortikultura dan buah menunjukkan bahwa komoditas yang memiliki nilai kontribusi ekonomi tertinggi di kawasan adalah cabe merah. Demikian pula untuk proyeksi 5 tahun ke depan dengan adanya intensifikasi lahan, komoditas cabe merah tetap memberikan peningkatan nilai produksi tertinggi di kawasan. Hasil analisis nilai produksi tanaman hortikultura dan buah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3. Nilai produksi tanaman hortikultura dan buah di kawasan AgroMinapolitan

No	Produksi	Satuan	Nilai		% Perubahan	% Perubahan/thn
			2018	2022		
Tanaman Hortikultura dan buah						
a	Cabe besar					
	• Luas lahan	ha	26	26	-	-
	• Produksi	ton	202	213	5,16	1,03
	• Nilai produksi	Rp	3.030.000.000	3.195.000.000	5,16	1,03
b	Salak					
	• Luas lahan	ha	31	31	0	0
	• Produksi	ton	123	130	5,38	1,08
	• Nilai produksi	Rp	553.500.000	585.000.000	5,38	1,08
c	Durian					
	• Luas lahan	ha	23	23	0	0
	• Produksi	ton	299	314	4,78	0,96
	• Nilai produksi	Rp	2.392.000.000	2.512.000.000	4,78	0,96
d	Mangga					
	• Luas lahan	ha	5	5	0	0
	• Produksi	ton	47	50	6,00	1,20
	• Nilai produksi	Rp	164.500.000	175.000.000	6,00	1,20
e	Pepaya					
	• Luas lahan	ha	17	17	0	0
	• Produksi	ton	55	58	5,17	1,03
	• Nilai produksi	Rp	137.500.000	145.000.000	5,17	1,03
Valuasi tanaman hortikultura-buah		Rp	6.277.500.000	6.612.000.000	12,07	2,41

Sumber : Hasil Analisis

Nilai kontribusi sektor perikanan dominan kawasan berasal dari komoditas perikanan yang banyak diusahakan petani yaitu ikan nila. Aktivitas agribisnis pengelolaan produk ikan nila yang dilakukan oleh petani di kawasan saat ini adalah menjual hasil panen secara langsung ke pedagang besar. Rantai agribisnis komoditas perikanan nila di kawasan AgroMinapolitan saat ini tergambar pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1. Skema rencana pengelolaan produk perikanan di kawasan AgroMinapolitan

Tabel 7.4. Rantai nilai agribisnis komoditas perikanan *eksisting* di kawasan AgroMinapolitan

No	Rantai Pemasaran	Modal (Pemeliharaan dan transport) Rp/kg	Nilai Jual Produk (Rp/kg)	Margin Rp
1	Petani	15.000-18.000	19.000-22.000	4.000
2	Pengepul	19.000-22.000	27.000-30.000	8.000
3	Pasar	23.000-26.000	35.000	12.000
4	Konsumen		35.000	

Sumber : Data primer dan Hasil Analisis

Tabel 7.5. Rantai nilai agribisnis komoditas perikanan setelah ada peran Bumdes di kawasan AgroMinapolitan

No	Rantai Pemasaran	Modal (Pemeliharaan dan transport) Rp/kg	Nilai Jual Produk (Rp/kg)	Margin Rp
1	Petani	12.000-14.000	19.000-22.000	7.000
2	BUMDES	17.000-20.000	30.000-35.000	15.000
3	Pasar	22.000-24.000	40.000	16.000
4	Konsumen		40.000	

Sumber : Data primer dan Hasil Analisis

Melalui skema tata kelola lembaga Bumdes, diharapkan produksi ikan nila di Kawasan AgroMinapolitan dapat diolah oleh kelompok-kelompok usaha masyarakat dengan berbagai macam produk olahan seperti ikan *fillet*, ikan krispi, ikan asap dan ikan presto. Peranan lembaga Bumdes disini adalah menciptakan akses dan peluang pemasaran bagi produk perikanan yang dihasilkan oleh kawasan. Melalui peranan lembaga Bumdes, diharapkan akan mendongkrak margin keuntungan petani dari Rp 4.000,- menjadi Rp 7.000,-.

Hasil valuasi nilai produksi perikanan secara agregat, dengan skema agribisnis saat ini diperoleh nilai sebesar Rp 62.226.000.000,-, sedangkan setelah ada program pengolahan

produk perikanan maka setelah 5 tahun ke depan diperoleh nilai produksi sebesar Rp 68.472.000.000,- berarti mengalami peningkatan sebesar 9,12 %. Hasil analisis nilai produksi perikanan nila selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.6.

Tabel 7.6. Nilai produksi sektor perikanan di kawasan AgroMinapolitan

No	Produksi	Satuan	Nilai		% Perubahan	% Perubahan/thn
			2018	2022		
Perikanan						
a	Kelapa sawit					
	• Luas kolam	ha	776	854	9,13	1,83
	• Produksi	ton	3.457	3.804	9,12	1,82
	• Nilai produksi	Rp	62.226.000.000	68.472.000.000	9,12	1,82
Valuasi sektor perikanan		Rp	62.226.000.000	68.472.000.000	9,12	1,82

Sumber : Hasil Analisis

Nilai kontribusi produk peternakan berasal dari komoditas ternak yang banyak diusahakan petani/peternak serta memiliki produktivitas yang cukup tinggi. Beberapa komoditas peternakan yang dimaksud diantaranya ayam, kambing dan sapi.

Hasil valuasi terhadap nilai produksi peternakan menunjukkan bahwa komoditas yang memiliki nilai kontribusi ekonomi tertinggi di kawasan AgroMinapolitan adalah sapi. Untuk proyeksi 5 tahun ke depan dengan penerapan sistem pengelolaan integrasi pertanian dan ternak sapi maka nilai kontribusinya diharapkan akan meningkat dari Rp 8.032.000.000,- menjadi Rp 8.432.000.000 atau meningkat sebesar 4,74%. Hasil analisis nilai produksi komoditas peternakan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.7.

Tabel 7.7. Nilai produksi peternakan di kawasan AgroMinapolitan

No	Produksi	Satuan	Nilai		% Perubahan	% Perubahan/thn
			2018	2022		
Peternakan						
a	Ayam					
	• Luas lahan	Ekor	21.664	22.747	4,76	0,95
	• Nilai produksi	Rp	433.280.000	454.940.000	4,76	0,95
b	Kambing					
	• Luas lahan	Ekor	981	1030	4,76	0
	• Nilai produksi	Rp	1.716.750.000	1.802.500.000	4,76	0,95
c	Sapi					
	• Luas lahan	Ekor	1.004	1.054	4,74	0
	• Nilai produksi	Rp	8.032.000.000	8.432.000.000	4,74	0,95
Valuasi sektor peternakan		Rp	10.182.030.000	10.689.440.000	4,75	0,95

Sumber : Hasil Analisis

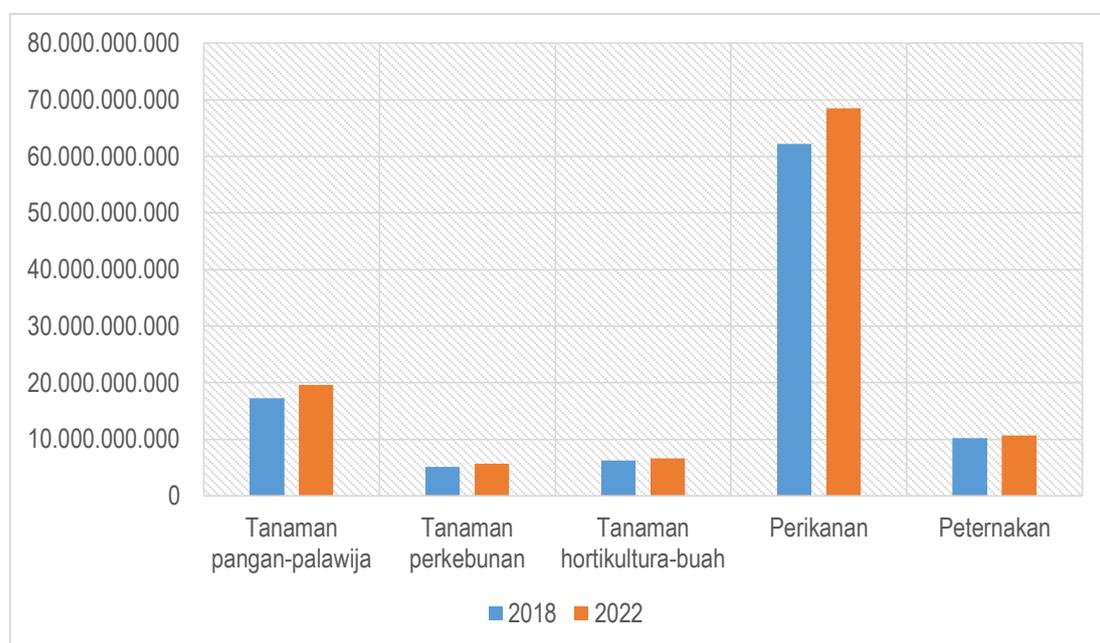
Berdasarkan hasil valuasi terhadap beberapa sektor/subsektor produksi barang dan jasa di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya, maka sektor tanaman perikanan yang paling memberikan kontribusi tertinggi terhadap nilai produksinya baik pada tahun *eksisting* (2018) maupun untuk proyeksi tahun 2022, dengan persentase perubahan meningkat sebesar 8,98 % dalam kurun waktu 5 tahun. Sedangkan nilai kontribusi terendah ada pada sektor tanaman perkebunan, baik pada tahun 2018 maupun pada tahun proyeksi 2022. Hal ini disebabkan

oleh harga jual komoditas kelapa sawit dan karet sedang jatuh ke level yang terendah. Hasil rekapitulasi selengkapnya tersaji pada Tabel 7.8.

Tabel 7.8. Rekapitulasi nilai produksi komoditas tiap sektor di Kawasan AgroMinapolitan

No	Sektor	Nilai produksi (Rp)		% Kenaikan
		2018	2022	
1	Tanaman pangan-palawija	17.253.800.000	19.621.800.000	12,07
2	Tanaman perkebunan	5.152.350.000	5.667.350.000	9,09
3	Tanaman hortikultura-buah	6.277.500.000	6.612.000.000	5,06
4	Perikanan	62.226.000.000	68.472.000.000	9,12
5	Peternakan	10.182.030.000	10.689.440.000	4,75
Jumlah		101.091.680.000	111.062.590.000	8,98

Sumber : Hasil Analisis



Gambar 7.2. Rekapitulasi nilai produksi komoditas AgroMinapolitan

Sektor perikanan budidaya (nila) saat ini di kawasan AgroMinapolitan Padang jaya menjadi sektor andalan dan unggulan yang memberikan prospek bisnis yang menjanjikan, walaupun biaya produksinya cukup tinggi. Berikut ini ilustrasi tata kelola produksi ikan nila pada beberapa skala luasan kolam.

Tabel 7.9. Asumsi tata kelola produksi perikanan nila kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya

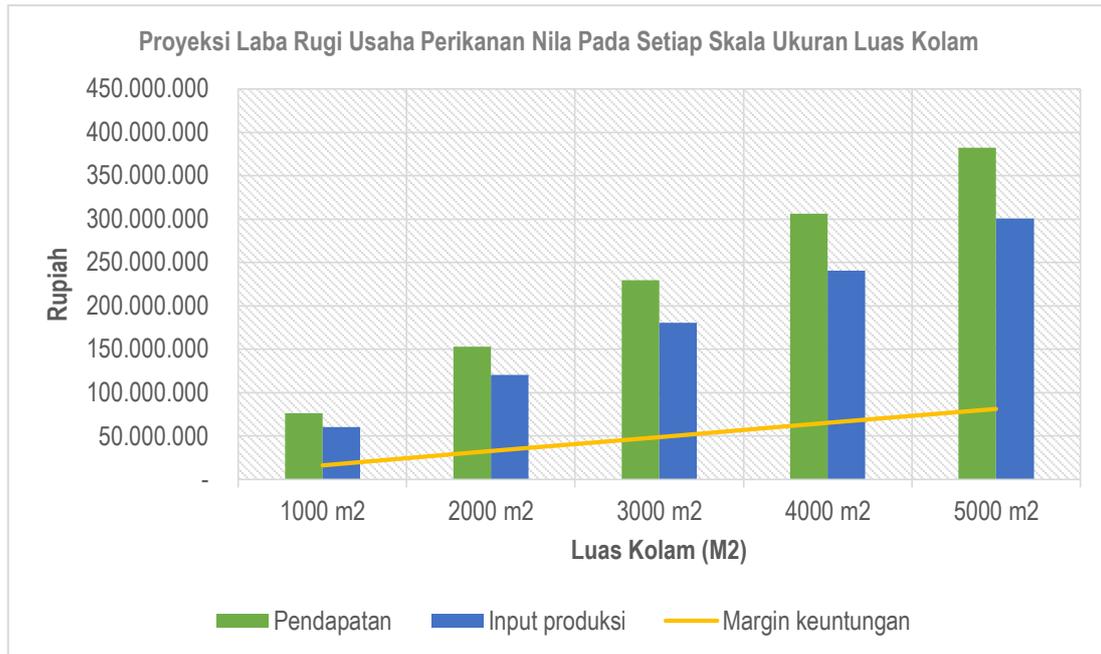
ASUMSI USAHA BUDIDAYA IKAN NILA						
Uraian	Satuan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		1000 M2	2000 M2	3000 M2	4000 M2	5000 M2
Populasi Ikan						
Luasan kolam	M2	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
Kepadatan benih per M2	ekor	15	15	15	15	15
Populasi ikan per 1000 M2	ekor	15.000	30.000	45.000	60.000	75.000
Jumlah bibit	ekor	15.000	30.000	45.000	60.000	75.000
Berat benih	gram/ekor	20	20	20	20	20
Harga benih	Rp	250	250	250	250	250
Masa Pemeliharaan	bulan	4	4	4	4	4
Berat panen rata-rata	gram/ekor	298	298	298	298	298
Kebutuhan pakan						
Kebuthan pakan	Kg	7.478	14.955	22.433	29.910	37.388
Harga pakan	Rp/kg	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Biaya pakan	Rp	52.343.156	104.686.313	157.029.469	209.372.625	261.715.781
Kebutuhan Tenaga Kerja						
Persiapan dan tanam benih	HOK	6	12	18	24	30
Pemeliharaan	HOK	30	60	90	120	150
Panen	HOK	6	12	18	24	30
Jumlah Tenaga Kerja	HOK	42	84	126	168	210
Upah tenaga kerja	Rp/hari	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Biaya Tenaga Kerja	Rp	3.570.000	7.140.000	10.710.000	14.280.000	17.850.000
Biaya Peralatan	Rp	593.333	1.086.667	1.580.000	2.173.333	2.666.667
Tingkat keberhasilan		90%	90%	90%	90%	90%

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 7.10. Proyeksi laba rugi budidaya perikanan nila

PROYEKSI LABA RUGI BUDIDAYA IKAN NILAI						
Uraian	Satuan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		1000 M2	2000 M2	3000 M2	4000 M2	5000 M2
PENDAPATAN						
Volume produksi	Kg	4.026	8.053	12.079	16.106	20.132
Harga jual	Rp	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Jumlah Pendapatan	Rp	76.501.125	153.002.250	229.503.375	306.004.500	382.505.625
BIAYA						
Benih	Rp	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000	18.750.000
Pakan	Rp	52.343.156	104.686.313	157.029.469	209.372.625	261.715.781
Tenaga kerja	Rp	3.570.000	7.140.000	10.710.000	14.280.000	17.850.000
Peralatan	Rp	593.333	1.086.667	1.580.000	2.173.333	2.666.667
Jumlah Biaya	Rp	60.256.490	120.412.979	180.569.469	240.825.958	300.982.448
LABA (RUGI) USAHA PER 4 BULAN	Rp	16.244.635	32.589.271	48.933.906	65.178.542	81.523.177
Rata-Rata Penghasilan per Bulan	Rp	4.061.159	8.147.318	12.233.477	16.294.635	20.380.794

Sumber : Hasil Analisis



Gambar 7.3. Grafik proyeksi laba rugi perikanan nila pada setiap skala ukuran kolam

Budidaya ikan nila merupakan jenis usaha agribisnis yang membutuhkan biaya tinggi (*high cost*) khususnya pakan ikan. Rata-rata input produksi dari pakan ternak sebesar 86,86%, tenaga kerja 5,92%, benih 6,22% dan peralatan 1%. Berdasarkan hasil analisis produksi budidaya ikan nila di kawasan AgroMinapolitan, diperoleh peningkatan rata rata pendapatan secara linier sebesar 50 % dari setiap peningkatan skala luas kolamnya.

Pengembangan usaha budidaya ikan nila berbasis kawasan, sebagai skenario awal adalah dengan penataan dan perbaikan sistem budidaya, fokus pada luas 338 ha (tahun 2018) memperoleh income sebesar Rp 965.411.200,-, pada tahun berikutnya (2019) dilakukan perluasan dan penataan sistem budidaya, maka *incomenya* meningkat menjadi RP 1.337.575.680,- dan pada tahun ketiga memaksimalkan luas kolam *eksisting* kawasan sebesar 776 ha, maka memperoleh income kawasan sebesar Rp 1.910.822.400,-. Nilai income ini konstan hingga tahun 2021 dan 2022. Rincian skenario perhitungan sistem pengelolaan ikan nila di kawasan AgroMinapolitan tersaji pada Tabel 7.11.

Tabel 7.11. Skenario pengembangan produksi budidaya ikan nila skala kawasan

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
LUASAN KOLAM BUDIDAYA						
Luasan awal	Ha	388	388	543,2	776	776
Pengembangan	Ha	0	155,2	232,8	0	0
Luasan akhir	Ha	388	543,2	776	776	776
PRODUKTIVITAS						
Populasi Ikan Neto per herktar	ekor	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Berat badan awal	Kg	0,02	0	0	0	0
Jumlah berat ikan	Kg	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Pertambahan berat badan selama pemeliharaan						
Pertambahan berat badan per hari	Kg	0,0025	0,00	0,00	0,00	0,00
Masa pemeliharaan	Hari	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Jumlah berat badan di akhir musim	Kg	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Jumlah pertambahan berat selama pemeliharaan	Kg	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Proyeksi Output Per Musim Per Hektar	Kg	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
TOTAL PRODUKSI (OUTPUT) KAWASAN						
Per Musim (4 bulanan)	Ton	16.761.600	23.466.240	33.523.200	33.523.200	33.523.200
Per Tahun	Ton	50.284.800	70.398.720	100.569.600	100.569.600	100.569.600
NILAI OUTPUT KAWASAN (On-Farm Agribisnis)						
Harga jual per ton	Rp	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Jumlah Nilai Output	Rp 000	955.411.200	1.337.575.680	1.910.822.400	1.910.822.400	1.910.822.400

Sumber : Hasil Analisis

7.2. PENYERAPAN TENAGA KERJA

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang sangat esensial dalam usaha memajukan perekonomian bangsa. Tenaga kerja yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, serta sebagai sasaran untuk menciptakan dan mengembangkan pasar.

Pertumbuhan dan perkembangan aktivitas produksi barang dan jasa di kawasan tentu akan berpengaruh terhadap *income* atau pendapatan petani atau pelaku usaha. Berdasarkan hasil analisis nilai produk barang dan jasa, sektor perikanan memberikan kontribusi pendapatan tertinggi di dalam kawasan AgroMinapolitan, namun disisi lain serapan tenaga kerja di sektor ini tidaklah setinggi sektor lainnya. Secara tidak langsung dari hasil analisis ini juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan di sektor perikanan yang dicirikan oleh peningkatan sewa modal di sektor ini, tidak berkontribusi secara nyata terhadap penyerapan tenaga kerja di dalam kawasan AgroMinapolitan. Hal ini disebabkan pengelolaan kolam ikan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja seperti aktivitas lahan intensif (pertanaman).

Dengan kontribusi pendapatan yang sangat tinggi dari sektor perikanan dan serapan tenaga kerja yang tidak terlalu tinggi, tentu berpengaruh besar terhadap rata-rata pendapatan/upah yang diterima pekerja yaitu Rp 41.666,-/hari pada tahun 2018 dan Rp 45.238,-/hari pada tahun 2022. Sementara sektor perkebunan dengan serapan tenaga kerja paling tinggi, ternyata tidak memberikan kontribusi rata-rata upah tinggi terhadap pekerja yaitu rata-rata hanya sebesar Rp 4.222,-/hari pada tahun 2018 dan Rp 4.846,-/hari pada tahun 2022. Hasil analisis selengkapnya untuk masing-masing sektor dapat dilihat pada Tabel 7.12.

Tabel 7.12. Nilai penyerapan tenaga kerja di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

No	Sektor/Subsektor	Jumlah		Perubahan (%)
		2018	2022	
1	Pertanian			
a	Tanaman Pangan-Palawija			
	• Tenaga kerja yang diserap	2.725	3.725	26,85
	• Upah rata-rata (Rp/hari)	22.211	24.229	8,33
b	Tanaman Perkebunan			
	• Tenaga kerja yang diserap	8.135	8.135	0
	• Upah rata-rata (Rp/hari)	4.222	4.846	12,88
c	Tanaman Hortikultura-Buah			
	• Tenaga kerja yang diserap	2.115	2.115	0
	• Upah rata-rata (Rp/hari)	19.787	20.842	5,06
2	Perikanan			
	• Tenaga kerja yang diserap	2.620	3.010	12,96
	• Upah rata-rata (Rp/hari)	41.666	45.238	7,90
3	Peternakan			
	• Tenaga kerja yang diserap	6.275	6.475	3,09
	• Upah rata-rata (Rp/hari)	30.346	32.677	7,13

Sumber : Hasil Analisis

Sebagai kawasan perdesaan yang berbasis pertanian, perkebunan, hortikultura, buah-buahan, perikanan dan peternakan, sektor pertanian dalam arti yang luas (termasuk pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, buah, peternakan dan perikanan) merupakan sumber pendapatan sekaligus sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk kawasan. Berdasarkan hasil analisis data di atas menunjukkan, penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan tergolong paling tinggi dibandingkan sektor lainnya baik pada tahun 2018 maupun 2022. Walaupun secara agregat nilai produksi sektor perikanan paling tinggi dibanding sektor lainnya, tetapi penyerapan tenaga kerja di sektor ini paling tinggi dibandingkan sektor lainnya, dengan demikian peran sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja masih tetap dominan.

7.3. PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin.

Adapun pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu kawasan bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan tingkat pendapatan petani atau pelaku usaha perkapita. Peningkatan pendapatan merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan rencana kegiatan bagi penduduk miskin di kawasan. Konsep yang digunakan adalah untuk mengukur tingkat pendapatan rumah tangga petani atau pelaku usaha setelah perencanaan program kawasan dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi kawasan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Proses pembangunan memerlukan pendapatan kawasan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan. Biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan walaupun pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan. Berikut ini tersaji hasil analisis nilai pendapatan kawasan untuk masing-masing sektor dan rencana pembangunan kawasan yang berimplikasi terhadap pengurangan kemiskinan (Tabel 7.13).

Tabel 7.13. Nilai peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan

No	Sektor/Subsektor	Jumlah		Perubahan (%)
		2018	2022	
1	Pertanian			
a	Tanaman pangan-palawija			
	• Jumlah petani (orang)	545	945	42,33
	• Pendapatan/kapita petani (Rp/kapita/hari)	19.573	21.955	10,85
	• Jumlah tenaga kerja (orang)	2.725	4.725	42,33
	• Pendapatan/kapita pekerja (Rp/kapita/hari)	10.553	11.921	11,48
	• Rata-rata garis kemiskinan (Rp/Kapita/hari)	14.726	17.983	18,11
	Jumlah penduduk miskin = Jumlah penduduk dengan pendapatan/kapita yang berada di bawah garis kemiskinan	2.725	4.725	42,33
	Jumlah yang dientaskan kemiskinannya (orang)	2.180	3.780	42,33
b	Tanaman perkebunan			
	• Jumlah petani (orang)	1.627	1.627	-
	• Pendapatan/kapita petani (Rp/kapita)	3.958	4.354	9,10
	• Jumlah tenaga kerja (orang)	8.135	8.135	-
	• Pendapatan/kapita pekerja (Rp/kapita)	1.056	1.161	9,04
	• Rata-rata garis kemiskinan (Rp/Kapita/hari)	14.726	17.983	18,11
	Jumlah penduduk miskin = Jumlah penduduk dengan pendapatan/kapita yang berada di bawah garis kemiskinan	9.762	9.762	-
	Jumlah yang dientaskan kemiskinannya (orang)	-	-	
c	Tanaman hortikultura dan buah buahan			
	• Jumlah petani (orang)	423	423	-
	• Pendapatan/kapita petani (Rp/kapita)	18.551	19.539	5,06
	• Jumlah tenaga kerja (orang)	2.115	2.115	-
	• Pendapatan/kapita pekerja (Rp/kapita)	4.947	5.210	5,05
	• Rata-rata garis kemiskinan (Rp/Kapita/hari)	14.726	17.983	18,11
	Jumlah penduduk miskin = Jumlah penduduk dengan pendapatan/kapita yang berada di bawah garis kemiskinan	2.115	2.115	-
	Jumlah yang dientaskan kemiskinannya (orang)	1.692	1.692	-
2	Perikanan			

No	Sektor/Subsektor	Jumlah		Perubahan (%)
		2018	2022	
	• Jumlah pemilik usaha (orang)	602	602	-
	• Pendapatan/kapita pemilik usaha (Rp/kapita)	123.440	142.176	13,18
	• Jumlah tenaga kerja (orang)	2.620	3.010	12,96
	• Pendapatan/kapita pekerja (Rp/kapita)	19.584	22.414	12,63
	• Rata-rata garis kemiskinan (Rp/Kapita/hari)	14.726	17.983	18,11
	Jumlah penduduk miskin = Jumlah penduduk dengan pendapatan/kapita yang berada di bawah garis kemiskinan	-	-	-
	Jumlah yang dientaskan kemiskinannya (orang)	12.888	14.448	10,80
3	Peternakan			
	• Jumlah pelaku usaha (orang)	1.255	1.295	3,09
	• Pendapatan/kapita pelaku usaha (Rp/kapita)	17.641	20.318	13,18
	• Jumlah tenaga kerja (orang)	6.275	6.475	3,09
	• Pendapatan/kapita pekerja (Rp/kapita)	2.704	3.251	16,83
	• Rata-rata garis kemiskinan (Rp/Kapita/hari)	14.726	17.983	18,11
	Jumlah penduduk miskin = Jumlah penduduk dengan pendapatan/kapita yang berada di bawah garis kemiskinan	6.275	6.475	3,09
	Jumlah yang dientaskan kemiskinannya (orang)	5.020	5.180	3,09

Sumber : Hasil Analisis

Tingkat kemiskinan di kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya dapat dilihat dari besarnya nilai rata-rata pendapatan perkapita/hari petani atau pelaku usaha masing-masing sektor. Jika nilai rata-rata pendapatan perkapita/hari petani atau pelaku usaha sektor tertentu lebih rendah dari nilai rata-rata pendapatan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara maka sektor tersebut berada dibawah garis kemiskinan. Untuk menentukan taraf kesejahteraan petani, maka standar minimum kemiskinan perkapita/hari pada tahun yang direncanakan diprediksi dari data rata-rata garis kemiskinan Kabupaten Bengkulu Utara (BPS). Hasil analisis selengkapnya tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.14. Standar nilai garis kemiskinan perkapita penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara

Tahun	Rp/Kapita/Hari	Tahun	Rp/Kapita/Hari
2007	5.058	2016	12.283
2008	5.725	2017	13.097
2009	5.901	2018	13.911
2010	7.848	2019	14.726
2011	8.652	2020	15.540
2012	9.097	2021	16.354
2013	9.494	2022	17.169
2014	10.654	2023	17.983
2015	11.468		

Sumber : Data BPS (olahan)

Berdasarkan hasil analisis, sektor perikanan memberikan kontribusi nilai produk yang terbesar terhadap kawasan, dengan demikian maka memberikan kontribusi nilai upah rata-rata yang paling tinggi. Dengan kondisi demikian, maka sektor perikanan pada tahun 2018 memberikan nilai pendapatan perkapita bagi petani sebesar Rp 123.440,-/hari, dan nilai

pendapatan perkapita bagi pekerja sebesar Rp 19.584,-/hari, sedangkan pada tahun 2022 direncanakan memberikan nilai pendapatan perkapita bagi petani sebesar Rp 412.176,-/hari, dan nilai pendapatan perkapita bagi pekerja sebesar Rp 22.414,-/hari. Peningkatan nilai produksi sektor perikanan melalui program pengolahan hasil perikanan serta peranan Bumdes/Bumdesma dalam membuka akses pasar di kawasan AgroMinapolitan, cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan petani perkapita/hari, dengan demikian memberikan dampak pengurangan masyarakat miskin. Melalui aktivitas sektor perikanan pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin yang dientaskan sebanyak 12.888 orang, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 14.448 orang.

Sektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi nilai produk yang terendah terhadap kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya, namun memberikan peluang penyerapan tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 8.135 orang, tetapi memberikan kontribusi nilai upah rata-rata pekerja yang rendah (tahun 2018) yaitu sebesar Rp 1.056/kapita/hari dan Rp 1.161/kapita/hari (tahun 2022). Dengan kondisi demikian, maka sektor tanaman perkebunan ini hanya memberikan nilai pendapatan perkapita relatif rendah bagi petani tanaman perkebunan yaitu rata-rata sebesar Rp 474.960,-/bulan (tahun 2018) dan nilai pendapatan rata-rata bagi petani sebesar Rp 552.480,-/bulan (tahun 2022). Hasil analisis selengkapnya untuk masing-masing sektor tersaji pada Tabel 7.10.

Jika program kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya dijalankan sesuai skenario RPKP, maka jumlah masyarakat miskin yang dapat dientaskan pada tahun 2018 sebanyak 21.780 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 25.100 orang. Khusus untuk sektor perkebunan dalam 5 tahun ke depan, tepatnya tahun 2022, pencapaian nilai produksinya masih dibawah standar pendapatan minimum. Oleh karena itu perlu adanya integrasi dengan subsektor lain agar nilai kontibusinya menjadi meningkat.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Bengkulu Utara



8.1. KESIMPULAN

1. Kawasan perdesaan di Kabupaten Bengkulu Utara bertemakan AgroMinapolitan. Kawasan ini terdiri dari Desa Marga Sakti, Tambak Rejo dan Tanjung Harapan.
2. Pusat kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya sebagai sentra pengolahan dan pelayanan terdapat di Desa Marga Sakti, sedangkan sentra produksi terdapat di Desa Tambak Rejo dan Tanjung Harapan.
3. Pembangunan kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya ikan nila dan komoditas pendukung kelapa sawit dan karet.
4. Isu strategis pembangunan kawasan AgroMinapolitan adalah a. konektivitas infrastruktur jalan; b. peningkatan pasar kawasan; c. memfungsikan kelembagaan BUMDES dan BUMDESMA sebagai unit bisnis kawasan; d. alih fungsi komoditas dari sawah menjadi Kelapa sawit dan kolam ikan; e. peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan sentra industri pengolahan ikan.
5. Program prioritas kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya adalah revitalisasi pasar kawasan, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan pusat pengolahan terpadu, pembangunan unit pembenihan rakyat dan perbaikan jaringan irigasi tersier.
6. Nilai strategis yang memberikan kontribusi terbesar bagi kawasan AgroMinapolitan Padang Jaya adalah komoditas perikanan budidaya ikan nila.
7. Sektor perkebunan memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, sedang yang memberikan kontribusi upah tertinggi terhadap tenaga kerja adalah sektor perikanan (ikan nila).
8. Sektor budidaya perikanan ikan nila berkontribusi besar terhadap nilai pendapatan tertinggi dan pengentasan kemiskinan.

8.2. SARAN

Untuk menggerakkan perekonomian kawasan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, maka butuh dukungan dari Kementerian (Kemendes, PUPR, KKP, PMK) serta kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memfasilitasi kelembagaan kawasan ini. Selain itu perlu sistem pengelolaan yang terintegrasi baik dari hulu ke hilir atau secara vertikal dan horisontal sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.

Sistem pengelolaan kawasan yang diusulkan adalah pengoptimalan fungsi pasar kawasan melalui sistem regulasi dan peran BUMDESMA. Peran lembaga BUMDESMA disini berbasis agroindustri, artinya komoditas hasil panen diolah sebagai produk olahan oleh rumah tangga industri (*home industry*) atau industri kawasan yang melibatkan sistem kelembagaan Bumdes/Bumades.

PENUTUP

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Bengkulu Utara



PENUTUP

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya, Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini telah selesai disusun.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata, maka Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Desa memandang perlu untuk membuat terobosan pembangunan dari lingkup kewilayahan terkecil, yaitu desa. Pandangan dan upaya sistemik ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam perspektif kawasan perdesaan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Adapun tujuan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan adalah mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan pembangunan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dalam pembangunan kawasan perdesaan yang ditujukan untuk: (a) terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa yang sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; (b) terwujudnya sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (c) pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan (d) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Kami mengharapkan, Peraturan Bupati ini dapat dijadikan rujukan bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan, baik pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta.

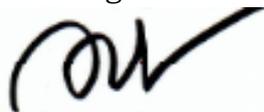
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Peraturan Bupati ini.

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640705 199803 1 010